



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025-2026



RPD JAWA TIMUR

2025
2026





GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tahun 2024, dan dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu menyusun dokumen rencana pembangunan daerah tahun 2025-2026 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - c. bahwa Diktum KETIGA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024, mengamanatkan rencana pembangunan daerah provinsi tahun 2025-2026 ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026;

Mengingat: . . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025-2026.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota adalah pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Pejabat Gubernur melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Gubernur dalam kurun waktu tertentu.
6. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi.
7. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi untuk tahun 2025-2026.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan RPD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan:
 - a. RKPD tahun 2025-2026;
 - b. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. Renja Perangkat Daerah tahun 2025-2026.
- (2) Penetapan RPD mempunyai tujuan untuk:
 - a. kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026; dan
 - b. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan tahun 2025-2026.

BAB III

SISTEMATIKA RPD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPD terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum;
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
 - e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah; dan
 - i. BAB IX Penutup.
- (2) Isi beserta sistematika RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi RPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit meliputi:
 - a. capaian target tujuan dan sasaran RPD;
 - b. capaian target Indikator Kinerja Daerah RPD;
 - c. efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan sasaran; dan
 - d. efektivitas Program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah.

Pasal 5

- (1) Hasil dari pengendalian dan evaluasi RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi acuan dalam melakukan perubahan RPD.
- (2) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting; dan/atau
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan.
- (3) Perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui hasil dari pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal, adanya:
 - a. kebijakan nasional;
 - b. keadaan darurat;
 - c. keadaan luar biasa; dan/atau
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Perubahan RPD menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOPIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,


ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 100 SERI E



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR**

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Hubungan antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen pembangunan lainnya, dokumen rencana penganggaran daerah, serta dokumen rencana pembangunan antar daerah	4
1.4. Maksud dan Tujuan	6
1.5. Sistematika	6
BAB II GAMBARAN UMUM.....	11
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	11
2.1.1 Aspek Geografi	11
2.1.2 Aspek Demografi	25
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	27
2.2.1 Produktivitas Daerah.....	27
2.2.2 Kesejahteraan Masyarakat	29
2.3 Aspek Daya Saing.....	48
2.3.1. Partisipasi Sumber Daya Manusia	48
2.3.2. Kualitas Sumber Daya Manusia	49
2.3.3. Penguasaan Teknologi Informasi	50
2.3.4. Ketersediaan Infrastruktur	51
2.3.5. Tenaga Kerja	53
2.3.6. Stabilitas Daerah	55
2.3.7. Daya Saing Daerah.....	56
2.4 Aspek Pelayanan Umum	56
2.4.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	56
2.3.1. Standar Pelayanan Minimum	103
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	115
3.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional.....	115
3.2 Kondisi Perekonomian Daerah.....	115
3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	115
3.2.2. Kinerja Investasi.....	116
3.2.3. Tingkat Inflasi	117
3.2.4. Perkiraan Ekonomi Makro	117

3.2.5.	Analisis Investasi	118
3.2.6.	Arah Ekonomi Makro	118
3.3	Kinerja Keuangan Daerah.....	119
3.3.1	Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019- 2024	120
3.3.2	Kondisi Kemampuan Keuangan Daerah	126
3.4	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2023- 2026.....	140
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....		153
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	153
4.2	Isu Strategis Pembangunan Daerah	157
4.2.1	Isu Global	158
4.2.2	Isu Nasional.....	158
4.2.3	Isu Regional	159
4.2.4	Isu strategis RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026	160
BAB V TUJUAN DAN SASARAN		167
5.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2026	167
5.2.	Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2026.....	168
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS		185
6.1.	Strategi umum	185
6.2.	Strategi Khusus.....	187
6.3.	Arah Kebijakan Pembangunan.....	189
6.4.	Arah Kebijakan Kewilayahan.....	190
6.4.1.	Koridor dan Poros Pengembangan Jawa Timur.....	191
6.4.2.	Arah Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur	192
6.5.	Cascading Kinerja.....	198
6.6.	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2026.....	227
6.7.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	243
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN		309
7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan	309
7.2.	Program Perangkat Daerah Beserta Pagu Indikatif Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2026	311
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH		372
8.1.	Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur 2025-2026	372
8.2.	Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026	373
BAB IX PENUTUP		380
9.1.	Pedoman Transisi	380
9.2.	Kaidah Pelaksanaan.....	381

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.....	11
Tabel 2. 2 Alokasi dan Persentase Tutupan Lahan Jawa Timur	12
Tabel 2. 3 Peta Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur	16
Tabel 2. 4 Perkembangan PDRB ADHK (Rp. Milyar) dan Kontribusi Sektor dan Subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2019 – 2022.....	18
Tabel 2. 5 Tingkat Risiko Bencana Tanah Longsor di Provinsi Jawa Timur	20
Tabel 2. 6 Tingkat Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi Jawa Timur	21
Tabel 2. 7 Tingkat Risiko Bencana Banjir di Provinsi Jawa Timur	21
Tabel 2. 8 Tingkat Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jawa Timur.....	22
Tabel 2. 9 Tingkat Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi Jawa Timur.....	22
Tabel 2. 10 Tingkat Risiko Bencana Tsunami di Provinsi Jawa Timur.....	23
Tabel 2. 11 Tingkat Risiko Bencana Banjir Bandang di Provinsi Jawa Timur	24
Tabel 2. 12 Struktur Penduduk Provinsi Jawa Timur	26
Tabel 2. 13 Persebaran Penduduk Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kelamin	26
Tabel 2. 14 PDRB Provinsi Jawa Timur	27
Tabel 2. 15 Kontribusi Sektor Utama PDRB Jawa Timur menurut Lapangan Usaha.....	28
Tabel 2. 16 Kontribusi PDRB Jawa Timur menurut Pengeluaran.....	28
Tabel 2. 17 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional.....	29
Tabel 2. 18 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Jawa Timur	30
Tabel 2. 19 Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional.....	31
Tabel 2. 20 Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret)	32
Tabel 2. 21 Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional.....	33
Tabel 2. 22 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret)	34
Tabel 2. 23 Indeks Pembangunan Gender	35
Tabel 2. 24 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab/Kota di Jawa Timur	36
Tabel 2. 25 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur dan Nasional	37
Tabel 2. 26 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota di Jawa Timur	38
Tabel 2. 27 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur dan Nasional	39
Tabel 2. 28 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Timur	40
Tabel 2. 29 Indeks Reformasi Birokrasi	42
Tabel 2. 30 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.....	44
Tabel 2. 31 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Timur	44
Tabel 2. 32 Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur	45
Tabel 2. 33 Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	46
Tabel 2. 34 Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Timur	47
Tabel 2. 35 Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Jawa Timur	48
Tabel 2. 36 Rata-Rata Lama Sekolah Jawa Timur	49
Tabel 2. 37 Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia di Jawa Timur.....	50
Tabel 2. 38 Indikator Penguasaan Teknologi Informasi di Jawa Timur.....	50
Tabel 2. 39 Indikator Ketersediaan Infrastruktur di Jawa Timur	52
Tabel 2. 40 Daya Serap Tenaga Kerja di Jawa Timur	54
Tabel 2. 41 Kriminalitas	55
Tabel 2. 42 Skor Komponen Indeks Daya Saing Daerah Prov. Jawa Timur Tahun 2022.....	56
Tabel 2. 43 Indikator Urusan Pendidikan di Jawa Timur	56
Tabel 2. 44 Jumlah SMK berdasarkan status standarisasi ISO TA 2022/2023	59
Tabel 2. 45 Indikator Urusan Kesehatan di Jawa Timur	59
Tabel 2. 46 Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Jawa Timur	63
Tabel 2. 47 Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Jawa Timur	65
Tabel 2. 48 Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Jawa Timur	66
Tabel 2. 49 Indikator Urusan Sosial di Jawa Timur	69
Tabel 2. 50 Indikator Urusan Ketenagakerjaan di Jawa Timur	69
Tabel 2. 51 Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jawa Timur ..	71
Tabel 2. 52 Indikator Urusan Pangan di Jawa Timur.....	73
Tabel 2. 53 Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Jawa Timur	74
Tabel 2. 54 Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Jawa Timur	76
Tabel 2. 55 Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Jawa Timur.....	77
Tabel 2. 56 Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di Jawa Timur.....	78
Tabel 2. 57 Indikator Urusan Perhubungan di Jawa Timur	79
Tabel 2. 58 Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Jawa Timur	80
Tabel 2. 59 Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Jawa Timur	81
Tabel 2. 60 Keragaan Koperasi di Jawa Timur	81

Tabel 2. 61 Indikator Urusan Penanaman Modal di Jawa Timur.....	82
Tabel 2. 62 Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga	83
Tabel 2. 63 Persentase Informasi Persandian yang Diamankan	85
Tabel 2. 64 Indikator Urusan Kebudayaan di Jawa Timur	85
Tabel 2. 65 Indikator Uursan Perpustakaan di Jawa Timur	86
Tabel 2. 66 Indikator Uursan Kearsipan di Jawa Timur	87
Tabel 2. 67 Indikator Urusan Pariwisata di Jawa Timur	87
Tabel 2. 68 Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur	88
Tabel 2. 69 Indikator Urusan Pertanian di Jawa Timur	88
Tabel 2. 70 Indikator Urusan Kehutanan di Jawa Timur	89
Tabel 2. 71 Indikator Urusan Energi dan Sumber Daya Alam di Jawa Timur	90
Tabel 2. 72 Indikator Urusan Perdagangan di Jawa Timur	91
Tabel 2. 73 Indikator Perindustrian di Jawa Timur	91
Tabel 2. 74 Indikator Urusan Transmigrasi di Jawa Timur	92
Tabel 2. 75 Indikator Urusan Perencanaan di Jawa Timur	93
Tabel 2. 76 Indikator Urusan Keuangan di Jawa Timur.....	93
Tabel 2. 77 Indeks Urusan Kepegawaian di Jawa Timur	94
Tabel 2. 78 Indikator Urusan Pendidikan dan Pelatihan di Jawa Timur.....	95
Tabel 2. 79 Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan di Jawa Timur.....	96
Tabel 2. 80 Persentase Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2018 – 2022	97
Tabel 2. 81 Indikator Urusan Penghubung di Jawa Timur.....	98
Tabel 2. 82 Indikator Urusan Pengawasan di Jawa Timur	99
Tabel 2. 83 Indikator Urusan Kesekretariatan DPRD di Jawa Timur.....	100
Tabel 2. 84 Kesekretariatan Daerah	100
Tabel 2. 85 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan	104
Tabel 2. 86 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan.....	105
Tabel 2. 87 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum	107
Tabel 2. 88 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	107
Tabel 2. 89 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.....	109
Tabel 2. 90 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial.....	110
Tabel 3. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi.....	117
Tabel 3. 2 Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2019-2022 (dalam juta Rupiah)	123
Tabel 3. 3 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2022 (dalam juta rupiah)	131
Tabel 3. 4 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019-2022 (dalam juta rupiah)	134
Tabel 3. 5 Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2022 (dalam juta rupiah)	139
Tabel 3. 6 Defisit Riil Anggaran Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020-2022 (dalam juta rupiah)	139
Tabel 3. 7 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026.....	143
Tabel 3. 8 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023-2026	144
Tabel 3. 9 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2026	147
Tabel 3. 11 Kerangka Pendanaan Daerah Indikatif Tahun 2023-2026	148
Tabel 5. 1 Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026	169
Tabel 5. 2 Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026.....	171
Tabel 6. 1 Strategi khusus Pembangunan Tahun 2025-2026	187
Tabel 6. 2 Cascading Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Nomenklatur.....	199
Tabel 6. 3 Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026	227
Tabel 6. 4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	243
Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Daerah Indikatif Tahun 2025-2026	309
Tabel 7. 2 Program Perangkat Daerah Beserta Pagu Indikatif Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026	311
Tabel 8. 1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2026.....	373
Tabel 8. 2 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2026.....	374

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan RTRW	5
Gambar 1. 2 Sinkronisasi, Integrasi Perencanaan Penganggaran	5
Gambar 2. 1 Penggunaan Lahan Eksisting Jawa Timur	13
Gambar 2. 2 Sebaran Pelabuhan Perikanan di Jawa Timur.....	15
Gambar 2. 3 Peta Wilayah Usaha Pertambangan Jawa Timur	19
Gambar 2. 4 Peta Risiko Bencana Multi Bahaya di Provinsi Jawa Timur ...	25
Gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional	116
Gambar 3. 2 Struktur Ekonomi Jawa Timur	116
Gambar 3. 3 Realisasi Investasi Jawa Timur.....	116
Gambar 3. 4 Perkembangan Inflasi Jawa Timur.....	117
Gambar 3. 5 Perkembangan Nilai ICOR Jawa Timur dan Nasional	118
Gambar 3. 6 Perubahan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022	132
Gambar 3. 7 Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022	133
Gambar 3. 8 Trend Dana Transfer Ke Daerah (TKD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022	133
Gambar 3. 9 Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019-2022 ...	135
Gambar 3. 10 Komposisi Belanja Daerah Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022 (dalam juta Rupiah).....	136
Gambar 3. 11 Komposisi Belanja Operasi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022	136
Gambar 3. 12 Presentase Komposisi Belanja Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022	138
Gambar 3. 13 Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan dan Pertumbuhan Belanja Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020-2022 .	139
Gambar 6. 1 Koridor dan Poros Pembangunan Jawa Timur	192
Gambar 6. 2 Peta Kawasan Pusat Pertumbuhan Wilayah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur.....	193



BAB I

PENDAHULUAN

RPD JAWA TIMUR

2025
2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur berakhir pada tahun 2024, sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca Pemilu Kepala Daerah Serentak secara Nasional pada tahun 2024 sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024, maka diperlukan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah transisi sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Jawa Timur Tahun 2025-2026.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan periode rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024, bahwa Gubernur yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya

disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2025-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi tahun 2025-2026 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah dan dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2025 serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2026 disusun dengan memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas Nasional;
2. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024;
3. Isu-isu strategis yang berkembang;
4. Kebijakan Nasional.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2, Seri D, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 13-238/2021);
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.

1.3. Hubungan antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen pembangunan lainnya, dokumen rencana penganggaran daerah, serta dokumen rencana pembangunan antar daerah

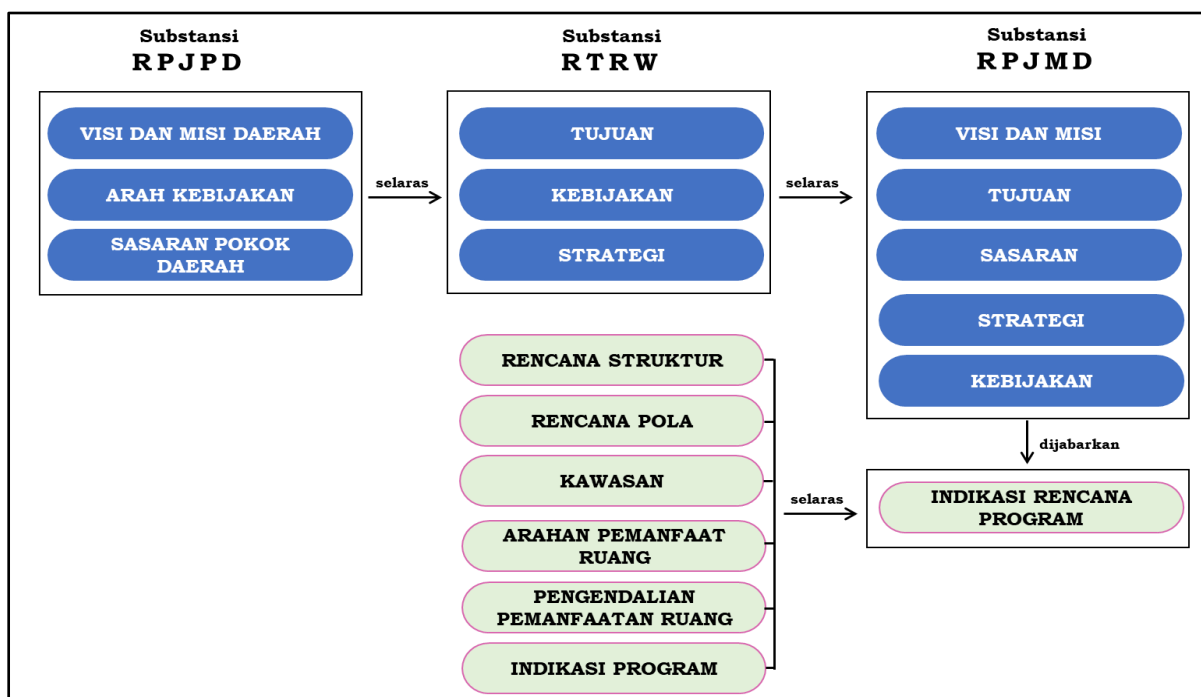
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) salah satu tujuannya mengamanatkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional serta

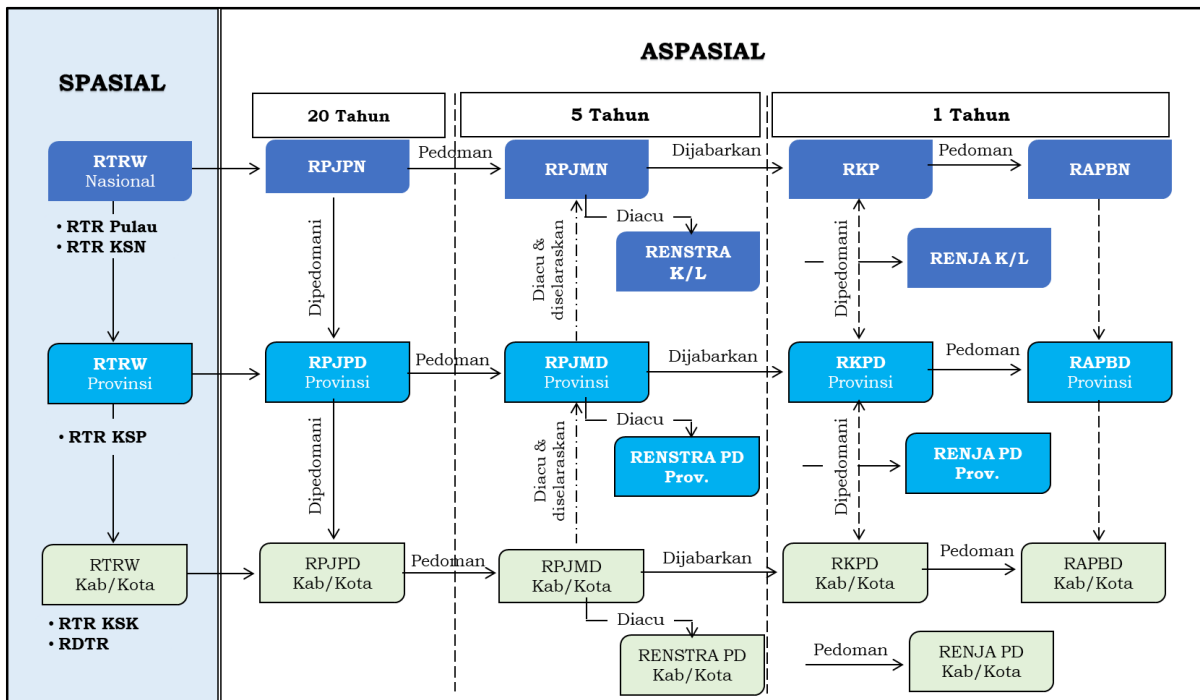
dokumen perencanaan lainnya untuk dipergunakan sebagai pedoman Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hubungan antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen pembangunan lainnya, dokumen rencana peng-anggaran daerah, serta dokumen rencana pembangunan antar daerah adalah sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1. 1 Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan RTRW



Gambar 1. 2 Sinkronisasi, Integrasi Perencanaan Penganggaran



1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Pembangunan Daerah sebagai pedoman penyusunan RKPD, penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan penyusunan Renja Perangkat Daerah sampai dengan ditetapkannya Kepala Daerah hasil Pemilu Kepala Daerah Serentak secara Nasional.

b. Tujuan

1. Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Daerah, untuk:
2. Kestinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026; dan
3. Pedoman pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan tahun 2025-2026.

1.5 Sistematika

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

- BAB II** **Gambaran Umum**
- Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.
- BAB III** **Gambaran Keuangan Daerah**
- Memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2018-2022 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2026.
- BAB IV** **Permasalahan dan Isu Strategis**
- Memuat permasalahan Pembangunan daerah berdasarkan kondisi daerah dan capaian kinerja daerah mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum termasuk standar pelayanan minimal.
- BAB V** **Tujuan dan Sasaran**
- Memuat tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah tahun 2025-2026 isu strategis aktual serta indikasi peningkatkan dan pemerataan pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.
- BAB VI** **Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas**
- Memuat strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran dan penentuan program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.
- BAB VII** **Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**
- Memuat kerangka pendanaan seluruh program dan daftar program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja Pembangunan daerah.
- BAB VIII** **Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah**
- Memuat penentuan target capaian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran rencana Pembangunan daerah tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025-2026 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (IKD).
- BAB IX** **Penutup.**



BAB II

GAMBARAN UMUM



RPD JAWA TIMUR

2025
2026

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Luas Wilayah Administrasi

Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah 48.036,84 Km² yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota yang mempunyai 666 Kecamatan dengan 773 Kelurahan dan 7.721 Desa. Secara astronomis, Provinsi Jawa Timur terletak pada 111,0° hingga 114,4° Bujur Timur dan 7,12° hingga 8,48° Lintang

Selatan dan memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 287 pulau.

Jumlah kecamatan dan desa Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Wilayah (Km ²)
			Kelurahan	Desa	Jumlah	
1	Kab. Pacitan	12	5	167	172	1.433,59
2	Kab. Ponorogo	21	26	281	307	1.418,62
3	Kab. Trenggalek	14	5	152	157	1.249,23
4	Kab. Tulungagung	19	14	257	271	1.144,53
5	Kab. Blitar	22	28	220	248	1.745,16
6	Kab. Kediri	26	1	343	344	1.523,56
7	Kab. Malang	33	12	378	390	3.473,44
8	Kab. Lumajang	21	7	198	205	1.797,10
9	Kab. Jember	31	22	226	248	3.313,46
10	Kab. Banyuwangi	25	28	189	217	3.592,90
11	Kab. Bondowoso	23	10	209	219	1.554,99
12	Kab. Situbondo	17	4	132	136	1.653,72
13	Kab. Probolinggo	24	5	325	330	1.724,51
14	Kab. Pasuruan	24	24	341	365	1.493,29
15	Kab. Sidoarjo	18	28	318	346	724,04
16	Kab. Mojokerto	18	5	299	304	984,64
17	Kab. Jombang	21	4	302	306	1.109,84
18	Kab. Nganjuk	20	20	264	284	1.289,07
19	Kab. Madiun	15	8	198	206	1.113,63
20	Kab. Magetan	18	28	207	235	706,44
21	Kab. Ngawi	19	4	213	217	1.395,80
22	Kab. Bojonegoro	28	11	419	430	2.312,63
23	Kab. Tuban	20	17	311	328	1.973,50
24	Kab. Lamongan	27	12	462	474	1.752,71
25	Kab. Gresik	18	26	330	356	1.256,36
26	Kab. Bangkalan	18	8	273	281	1.301,03

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Wilayah (Km ²)
			Kelurahan	Desa	Jumlah	
27	Kab. Sampang	14	6	180	186	1.228,25
28	Kab. Pamekasan	13	11	178	189	795,15
29	Kab. Sumenep	27	4	330	334	2.084,02
30	Kota Kediri	3	46	0	46	67,23
31	Kota Blitar	3	21	0	21	33,20
32	Kota Malang	5	57	0	57	111,08
33	Kota Probolinggo	5	29	0	29	54,68
34	Kota Pasuruan	4	34	0	34	39,00
35	Kota Mojokerto	3	18	0	18	20,22
36	Kota Madiun	3	27	0	27	36,13
37	Kota Surabaya	31	153	0	153	335,93
38	Kota Batu	3	5	19	24	194,17
Total		666	773	7.721	8.494	48.036,84

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

2.1.1.2 Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan merupakan peruntukan ruang di lapangan, dimana penggunaan lahan di lapangan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan diidentifikasi dengan melakukan pengolahan interpretasi dari data peta dari citra satelit SPOT 6/7 Tahun 2019-2020. Penggunaan lahan berbeda dengan rencana peruntukan ruang atau pola ruang yang ditetapkan Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur. Profil penggunaan lahan menggunakan jenis tutupan lahan yang selanjutnya di-klasifikasikan menjadi hutan, lahan terbangun, lahan terbuka alami/semi alami, laut, padang rumput, perairan tergenang, perkebunan/kebun, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, semak belukar dan sungai, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.2

Tabel 2. 2 Alokasi dan Persentase Tutupan Lahan Jawa Timur

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan	1.361.995,52	28,35
2	Lahan Terbangun	618.297,29	12,87
3	Lahan Terbuka Alami/Semi Alami	20.859,74	0,43
4	Lahan Terbuka Diusahakan	1.606,95	0,03
5	Laut	13,86	0,00
6	Padang Rumput	112,46	0,00
7	Perairan Tergenang	99.306,38	2,07
8	Perkebunan/Kebun	344.827,08	7,18
9	Pertanian Lahan Basah	1.650.996,22	34,37

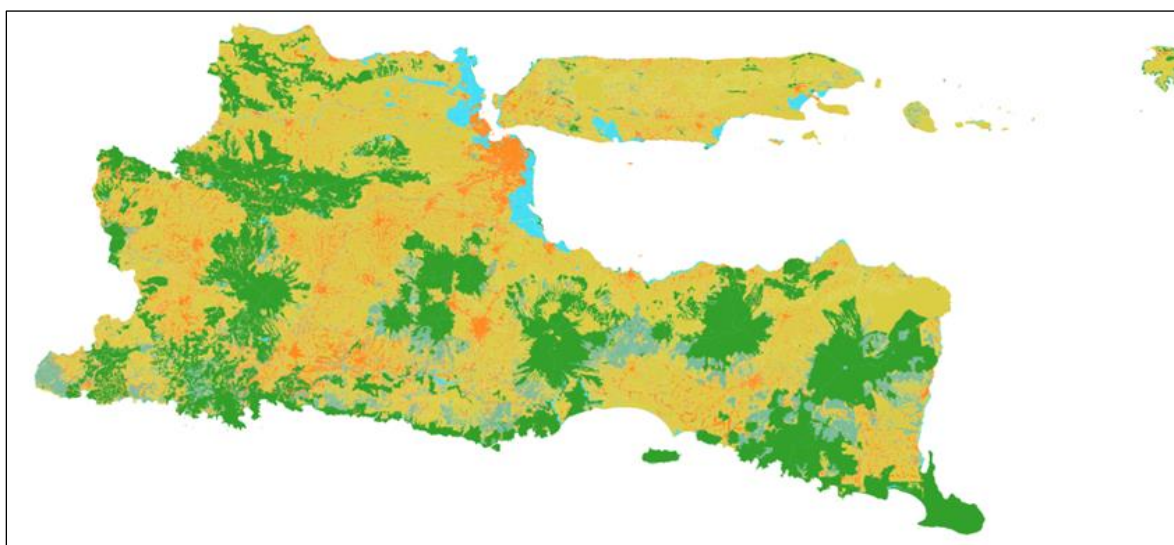
No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
10	Pertanian Lahan Kering	422.138,71	8,79
11	Semak Belukar	265.798,96	5,53
12	Sungai	17.901,81	0,37
	TOTAL	4.803.854,98	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Peta Citra SPOT 6/7 Tahun 2019-2021

Berdasarkan interpretasi citra satelit, tutupan lahan Jawa Timur didominasi oleh Pertanian yang memiliki proporsi terbesar yaitu sebesar 43,16 % dari luas wilayah keseluruhan Jawa Timur. Hal ini menjadi dasar Jawa Timur menjadi Provinsi dengan potensi pengembangan wilayah berbasis

pertanian/agropolitan. Selanjutnya penggunaan lahan terbesar kedua adalah peruntukan kawasan hutan yaitu sebesar 28,35%, kemudian diikuti dengan proporsi penggunaan lahan permukiman yang merupakan indikasi perkembangan kawasan terbangun di Jawa Timur.

Gambar 2.1 Penggunaan Lahan Eksisting Jawa Timur



Sumber: Hasil Pengolahan Data Peta Citra SPOT 6/7 Tahun 2019-2021

Berdasarkan peta penggunaan lahan Tahun 2021 sebagaimana tergambar dalam Gambar 2.1, kawasan lahan terbangun paling besar terdapat di Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur serta kawasan sekitarnya dengan mengikuti

perkembangan jaringan jalan (radial). Pembangunan jaringan jalan sebagai ujung tombak dari aksesibilitas kawasan yaitu Kabupaten Sidoarjo kawasan pusat perkotaan di sekitarnya terutama di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan hingga Kota Malang. Peta

dimaksud juga meng-gambarkan adanya peruntukan kawasan hutan

yang cukup rata tersebar di bagian selatan Jawa Timur.

2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana struktur wilayah provinsi adalah rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala provinsi dan mengintegrasikan wilayah provinsi. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sistem perkotaan di wilayah Provinsi Jawa Timur terdiri dari:

- **Pusat Kegiatan Nasional (PKN)** yaitu Kawasan Perko-taan Gresik, Bangkalan, Lamongan, Sidoarjo, Mojokerto, Kota

Malang, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya;

- **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)** yaitu Kawasan Perkotaan Banyuwangi, Bojo-negoro, Jember, Pacitan, Pamekasan, Sumenep, Treng-galek, Tuban, Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo; dan
- **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** yang terdiri dari pusat kegiatan bagi beberapa kecamatan.

Rencana pola ruang Provinsi Jawa Timur ditekankan pada penanganan dan pengembalian fungsi lindung sementara pada kawasan budi daya dioptimalkan pemanfaatannya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, kegiatan yang dikembangkan diarahkan untuk tidak mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 – 2043 telah menetapkan 16,54% wilayah provinsi jawa timur merupakan kawasan lindung sedangkan 83,46% merupakan Kawasan budidaya.

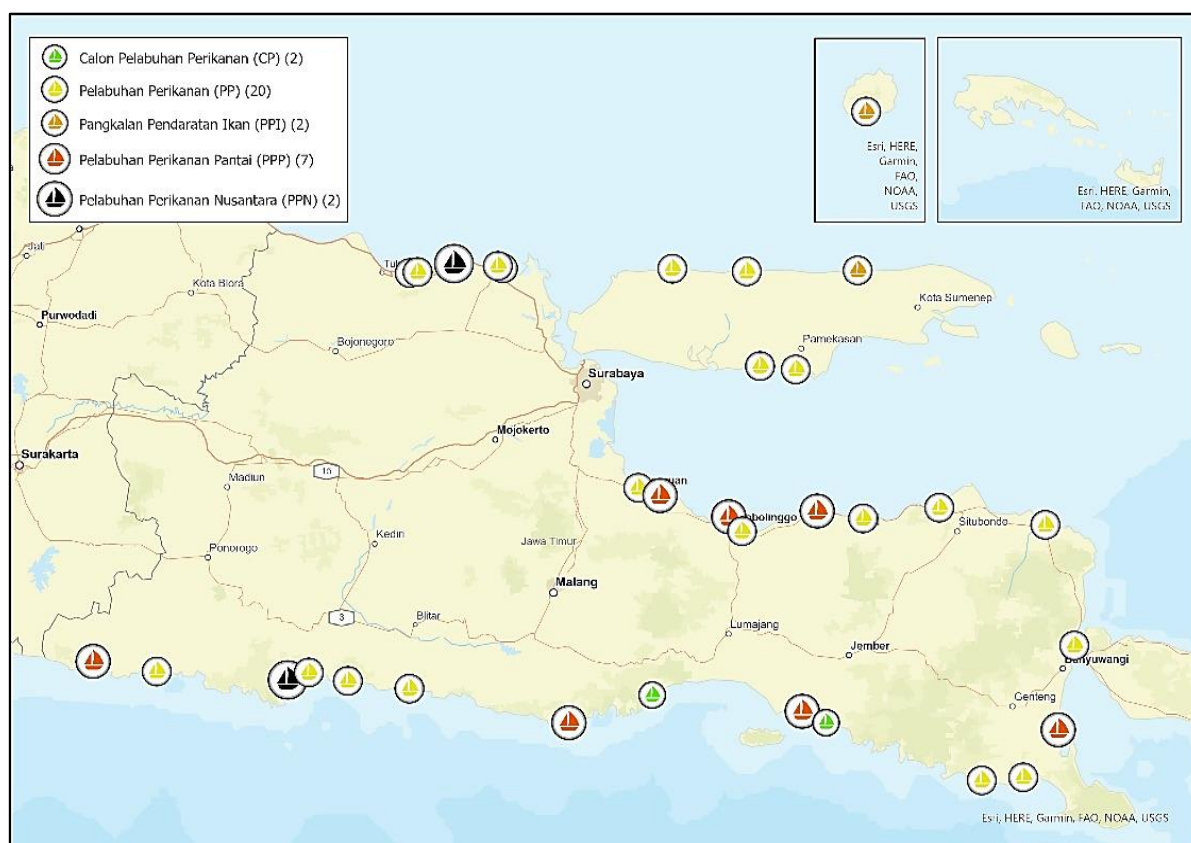
2.1.1.4 Potensi Sumber Daya Alam

1. Potensi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sebagaimana uraian sebelumnya, bahwa tutupan lahan Jawa Timur didominasi oleh pertanian (32,99 %) dan hutan (28,39%) menunjukkan potensi besar pengembangan wilayah Jawa Timur berbasis pertanian /agropolitan. Potensi perikanan

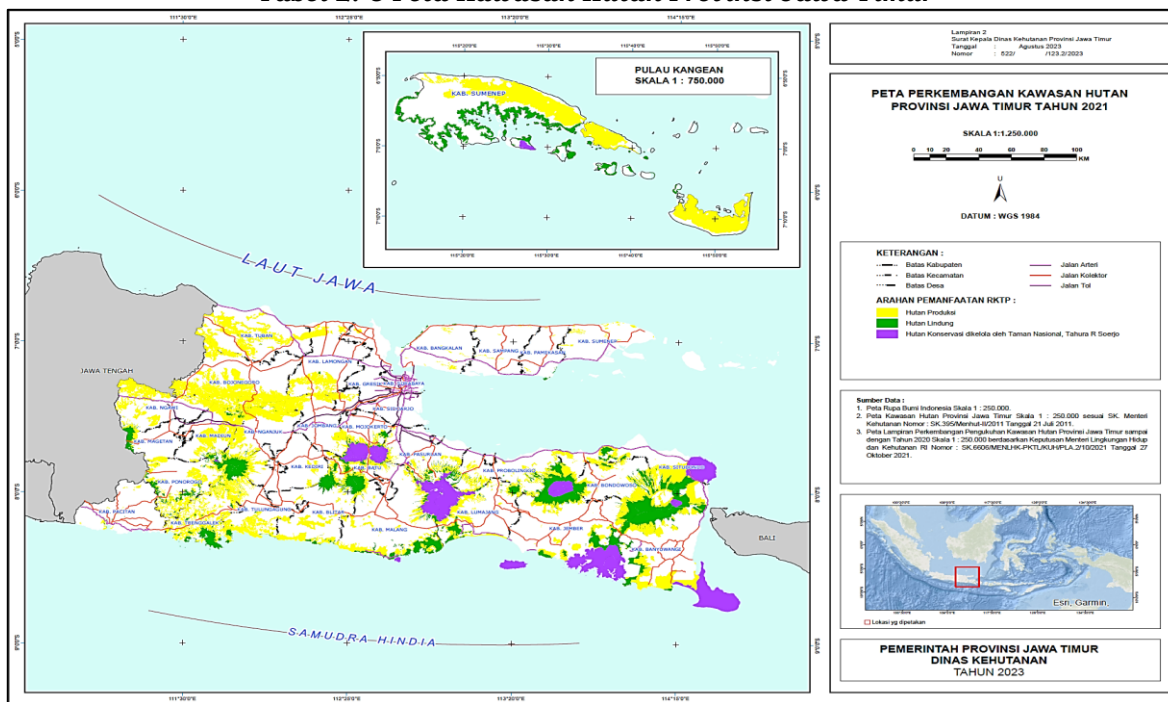
Jawa Timur juga amat besar dan dapat digambarkan dari jumlah pelabuhan perikanan di Jawa Timur berdasarkan Kepmen KKP No. 109 Tahun 2021 yang berjumlah 33 Pelabuhan Perikanan tersebar di wilayah pesisir Jawa Timur.

Gambar 2. 2 Sebaran Pelabuhan Perikanan di Jawa Timur



Sumber : Kepmen KKP No. 109 Tahun 2021

Tabel 2. 3 Peta Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur



Sumber : Dinas kehutanan, sesuai SK. Menteri LHK Nomor 6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Selanjutnya terkait potensi ekonomi, Produk Domestik regional Bruto (PDRB) sektor dan subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Agro) masih terus tumbuh dan pada tahun 2022 pada angka Rp. 173.638,40 milyar (PDRB ADHK tahun dasar 2010). Adapun demikian berbagai sub-sektor nya terjadi fluktuasi per-tumbuhan dan penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan trend kontribusi PDRB (nilai ekonomi) sektor Agro masih berfluktuasi tetapi mengalami penurunan signifikan pada sub-sektor Tanaman Pangan. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan sektor Agro tidak secepat laju sektor lain, terutama sektor

Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan.

Penurunan ini disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan, alih komoditas serta dampak dari perubahan iklim. Upaya yang sudah dan akan terus dilakukan antara lain dengan pengendalian alih fungsi lahan dengan mendorong pemerintah kabupaten /kota untuk menetapkan Perda tentang LP2B. Upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM pertanian dalam mengantisipasi perubahan iklim serta tat acara budidaya pertanian yang baik juga terus dilakukan dengan kerjasama dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah juga memberikan fasilitasi alat

mesin pertanian untuk mengurangi pengeluaran, meningkatkan pendapatan serta nilai tambah yang diterima oleh petani. Selain itu upaya dalam meningkatkan minat generasi muda untuk terjun dalam dunia pertanian juga terus didorong sebagai solusi keberlangsungan usaha pertanian di Jawa Timur.

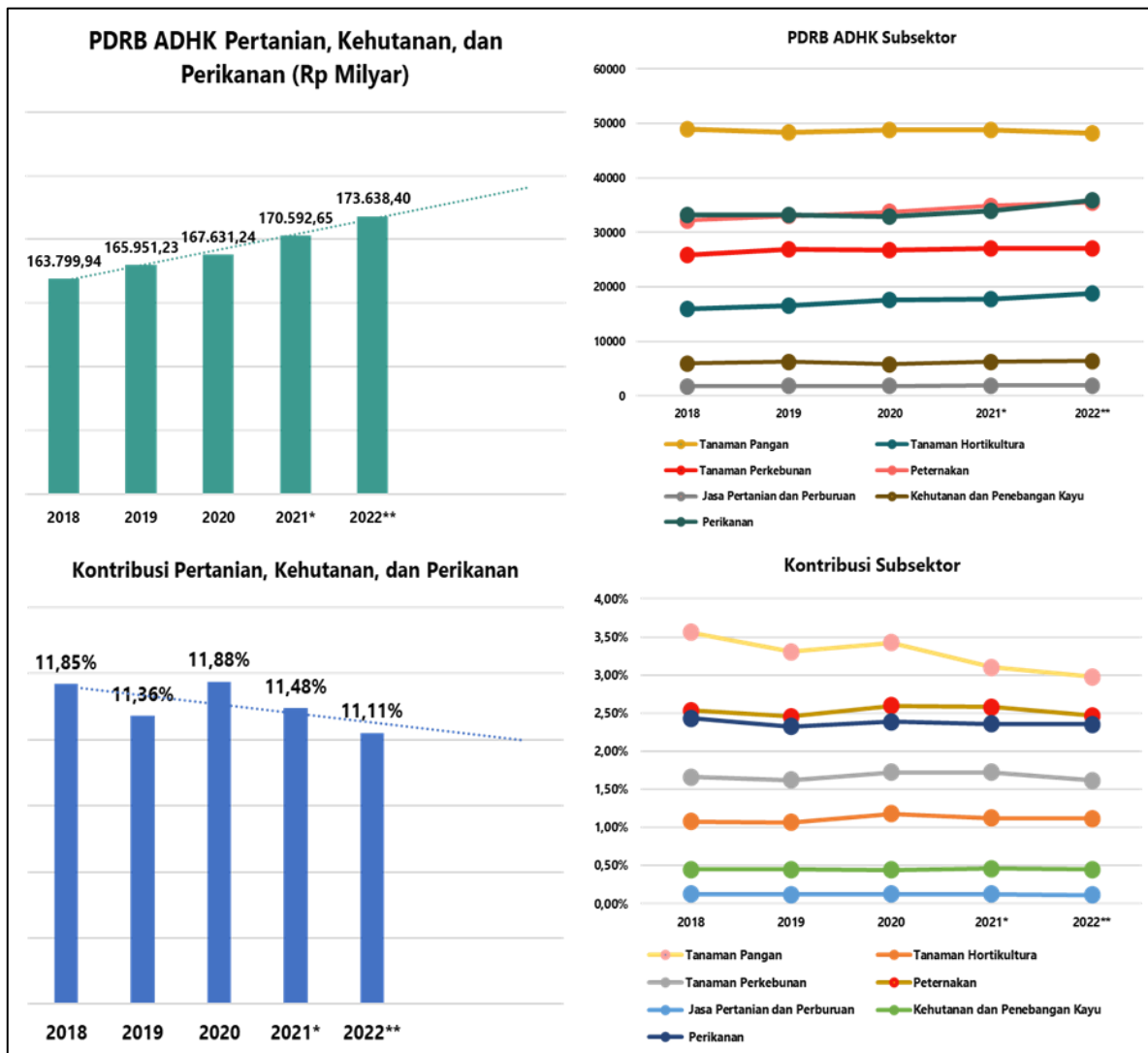
Seperti halnya pada komoditas tanaman pangan, upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM pertanian, intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan, pengendalian terhadap penyakit menular pada ternak juga terus dan akan dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan peternakan.

Di sektor perikanan, meskipun mengalami kontraksi selama tiga tahun berturut-turut (2018-2020), subsektor ini pulih dengan pertumbuhan positif pada 2021 dan 2022. Dalam menjaga dan

meningkatkan produksi dan produktivitas sektor perikanan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan fasilitasi bantuan alat produksi dan peralatan tangkap bagi nelayan, peningkatan kapasitas SDM nelayan serta pembudidaya ikan melalui pelatihan, serta bimbingan dan pelatihan.

Subsektor kehutanan dan penebangan kayu mengalami fluktuasi dengan kontraksi terdalam pada tahun 2016 dan 2020, tetapi nilai absolut PDRB ADHB cenderung meningkat, terutama dari tahun 2020 hingga 2022. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kontribusi sektor kehutanan antara lain dengan pengelolaan hutan produksi yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM masyarakat di sekitar hutan untuk menjaga dan mengelola hutan secara berkelanjutan.

Tabel 2. 4 Perkembangan PDRB ADHK (Rp. Milyar) dan Kontribusi Sektor dan Subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2019 – 2022



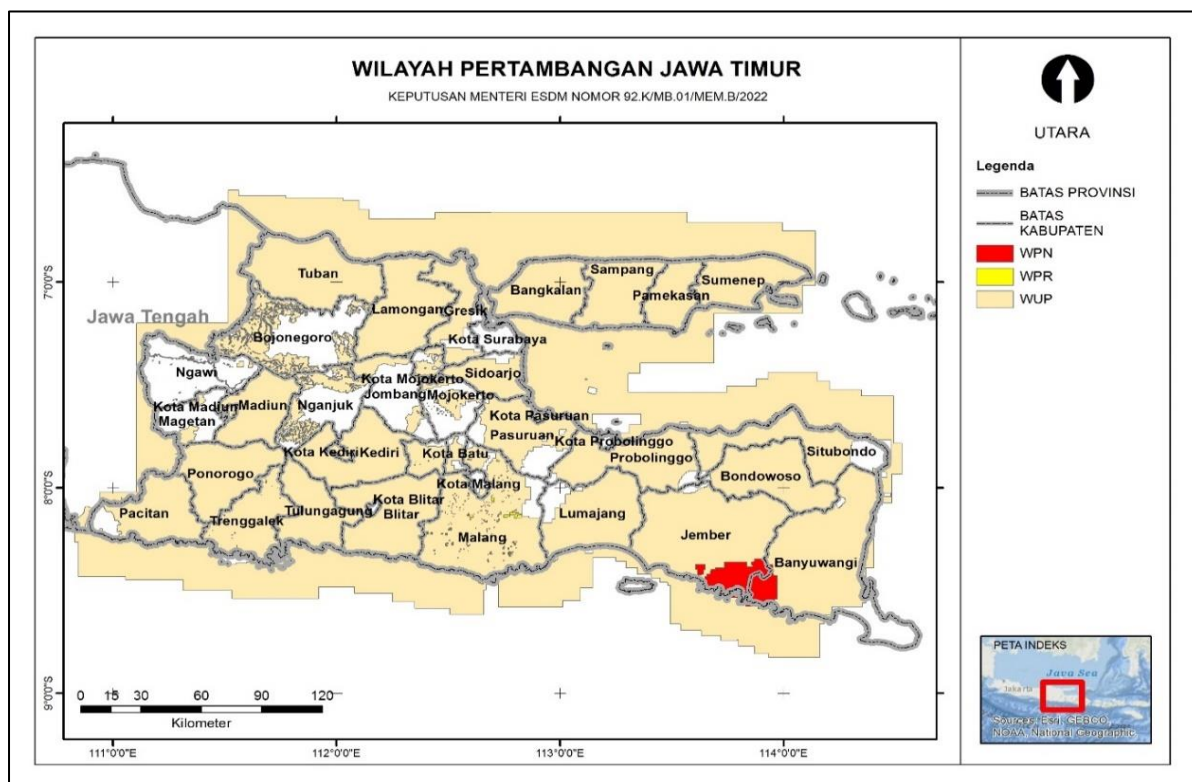
Sumber : BPS Jatim, 2023

2. Potensi Pertambangan

Potensi pertambangan di Jawa Timur tersebar di beberapa Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), yaitu: WUP Batubara yang meliputi wilayah Trenggalek, Pacitan dan Tulungagung; WUP Logam yang meliputi wilayah Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Trenggalek, Tulungagung dan Pacitan; sedangkan WUP Non

Logam hamper tersebar di seluruh Kabupaten di Jawa Timur yaitu wilayah Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Bojonegoro, Nganjuk, Tuban, Jombang, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Gambar 2. 3 Peta Wilayah Usaha Pertambangan Jawa Timur



Sumber : Keputusan Menteri ESDM No 92.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Jawa Timur

Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Jawa Timur berada di wilayah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang,

Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, dan Kota Surabaya.

2.1.1.5 Wilayah Rawan Bencana

Secara geografis, Jawa Timur merupakan sebagian wilayah di Indonesia yang rawan bencana dengan dominasi kelompok bencana hidrometeorologi dan kelompok bencana geologi. Kelompok bencana hidrometeorologi yang sering terjadi berupa banjir, gelombang ekstrem, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan dan cuaca ekstrem sedangkan untuk

kelompok bencana geologi berupa gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung api.

Secara klimatologis, pengaruh perubahan iklim seperti fenomena La Nina di Jawa Timur yang menjadi fokus kewaspadaan pemerintah dan masyarakat karena potensi bencana seperti angin kencang, hujan badai dan puting

beliung cukup besar. Hal ini disebabkan karena Jawa Timur yang merupakan bagian wilayah Indonesia berada di posisi sekitar ekuator yang menjadi tempat

pertemuan antara sirkulasi udara Hadley dan sirkulasi udara Walker sehingga berdampak pada dinamika cuaca dan iklim yang tidak menentu.

1. Tanah Longsor

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, dalam periode dari Tahun 2010 sampai 2020, Jawa Timur kehilangan 5.370 Ha hutan, menyumbang 11% dari total kehilangan tutupan pohon serta area total hutan primer basah di Jawa Timur berkurang sebanyak 2,3%.

Berdasarkan hasil kajian risiko, yang didapatkan dari komponen kelas bahaya yang

dihitung menggunakan data DEM dan zona gerakan tanah, kelas kerentanan yang dihitung berdasarkan komponen kerentanan sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan serta kelas kapasitas yang ditentukan dengan nilai IKD, menjadikan Provinsi Jawa Timur memiliki risiko tinggi terhadap tanah longsor. Tingkat risiko tanah longsor di 31 Kabupaten Kota di Jawa Timur dirincikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 5 Tingkat Risiko Bencana Tanah Longsor di Provinsi Jawa Timur

No	Kategori	Kabupaten/Kota
1.	Rendah	-
2.	Sedang	Kabupaten Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Kediri dan Kota Malang
3.	Tinggi	Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan dan Kota Batu

Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB, 2021

2. Gelombang Pasang (Gelombang Ekstrim) dan Abrasi

Kelas bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi ini dipengaruhi oleh kelas bahaya, kelas kerentanan dan kelas kapasitas. Kelas bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi dihitung menggunakan data DEM,

data arus ketinggian gelombang, peta geologi dan peta penutup lahan (peta sawah baku dan area permukiman) serta kelas kerentanan yang terdiri dari kerentanan sosial, politik, ekonomi dan lingkungan. Kondisi tersebut menja-

dikan Provinsi Jawa Timur memiliki kelas risiko tinggi. Tingkat risiko gelombang ekstrim dan abrasi di 22

Kabupaten Kota di Jawa Timur dirincikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 6 Tingkat Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Jawa Timur

No	Kategori	Kabupaten/Kota
1.	Rendah	Kabupaten Sidoarjo
2.	Sedang	Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya
3.	Tinggi	Kabupaten Situbondo

Sumber : *Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB, 2021*

3. Banjir

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, bencana banjir terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan kelas bahaya dan kerentanan yang beragam. Kelas bahaya risiko bencana banjir dianalisis menggunakan data DEM,

peta rawan banjir dan peta morfologi/sistem tanah. Untuk kelas kerentanan dipengaruhi oleh kerentanan sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Jawa Timur memiliki kelas risiko tinggi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 7 Tingkat Risiko Bencana Banjir di Provinsi Jawa Timur

No	Kategori	Kabupaten/Kota
1.	Rendah	-
2.	Sedang	Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Batu
3.	Tinggi	Kabupaten Ponorogo, Malang, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep

Sumber : *Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB, 2021*

4. Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, bencana kebakaran hutan dan lahan berpotensi terjadi di 31 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan kelas risiko

bervariasi dari rendah, sedang dan tinggi. Kelas risiko kebakaran hutan dan lahan dihitung berdasarkan kelas bahaya, kelas kerentanan dan kelas kapasitas. Kelas bahaya dianalisis menggunakan data berupa peta admi-

nistrasi, peta area terbakar, DEM, peta penutup lahan, peta jaringan sungai, peta jaringan jalan, peta isohyet curah hujan tahunan dan peta HGU perkebunan. Klasifikasi

tingkat risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Timur disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 8 Tingkat Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jawa Timur

No	Kategori	Kabupaten/Kota
1.	Rendah	Kabupaten Magetan, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Kota Kediri, Kota Surabaya, dan Kota Batu.
2.	Sedang	Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Jombang, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Gresik, dan Sumenep.
3.	Tinggi	Kabupaten Tulungagung, Blitar Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Nganjuk, dan Ngawi.

Sumber : *Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB, 2021*

5. Letusan Gunung Berapi

Berdasarkan hasil Kajian Resiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, terdapat 10 risiko bahaya letusan gunung api karena diindikasikan dapat meletus/mengeluarkan lava, asap beracun dan mengeluarkan

debu pasir meliputi Gunungapi Ijen, Gunungapi Semeru, Gunungapi Bromo, Gunungapi Lamongan, Gunungapi Arjuno-Welirang, Gunungapi Kelud, Gunungapi Raung, Gunungapi Argopuro, Gunungapi Lawu, Gunungapi Wilis.

6. Gempa Bumi

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, bencana gempa bumi berpotensi terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Timur termasuk memiliki kelas risiko rendah, sedang dan tinggi. Oleh karena itu, kelas risiko bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Timur dikategorikan tinggi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Tingkat Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi Jawa Timur

No	Kategori	Kabupaten/Kota
1.	Rendah	Kabupaten Tuban, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Kota Pasuruan
2.	Sedang	Kabupaten Pacitan, Kediri, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro,

No	Kategori	Kabupaten/Kota
		Lamongan, Gresik, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Batu
3.	Tinggi	Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang dan Kota Blitar

Sumber : *Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB, 2021*

7. Tsunami

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, bencana tsunami berpotensi mengancam daerah pesisir di Provinsi Jawa Timur dan memiliki

kelas bahaya dan kerentanan tinggi serta kapasitas sedang. Meskipun demikian kelas risiko bencana tsunami di Provinsi Jawa Timur adalah tinggi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 10 Tingkat Risiko Bencana Tsunami di Provinsi Jawa Timur

No	Kategori	Kabupaten/Kota
1.	Rendah	Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya
2.	Sedang	Kabupaten Probolinggo
3.	Tinggi	Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi

Sumber : *Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB, 2021*

8. Kekeringan

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, kelas kerentanan bencana kekeringan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tergolong sedang dan tinggi dengan kelas bahaya tinggi dan kelas kapasitas sedang. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Jawa

Timur memiliki kelas risiko bencana kekeringan tinggi dengan rincian 34 kabupaten/kota masuk kedalam kategori sedang dan sisanya masuk kedalam kategori tinggi. Kabupaten /kota yang masuk kedalam risiko bencana kekeringan tinggi antara lain Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Gresik dan Sumenep.

9. Banjir Bandang

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, potensi bencana banjir bandang dapat terjadi pada 28 (dua puluh

delapan) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Kelas risiko kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur terdapat pada kelas sedang dan tinggi. Dengan demikian, kelas

risiko bencana banjir bandang di Provinsi Jawa Timur adalah tinggi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 11 Tingkat Risiko Bencana Banjir Bandang di Provinsi Jawa Timur

No	Kategori	Kabupaten/Kota
1.	Rendah	-
2.	Sedang	Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, Sidoarjo, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto dan Kota Batu
3.	Tinggi	Kabupaten Trenggalek, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Gresik dan Kota Probolinggo

Sumber : *Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB, 2021*

10. Cuaca Ekstrim

Berdasarkan hasil Kajian Resiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, bencana cuaca ekstrim (angin puting beliung) berpotensi terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan tingkat risiko tinggi kecuali Kabupaten Pacitan dengan kelas sedang. Secara keseluruhan, tingkat risiko bencana cuaca ekstrim di Provinsi Jawa Timur adalah tinggi. Kabupaten pacitan merupakan kabupaten dengan tingkat risiko kategori sedang. Sementara tingkat risiko

kategori tinggi terdiri dari Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Tulung-agung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probo-linggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Batu.

11. Likuifaksi

Berdasarkan hasil Kajian Resiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, bencana Likuifaksi berpotensi memapar kabupaten/kota dengan kelas bahaya tinggi, kelas kapasitas sedang dan kelas kerentanan sedang. Secara keseluruhan kelas risiko bencana likuefaksi di Provinsi

Jawa Timur adalah sedang. Adapun kabupaten/kota yang memiliki tingkat risiko kategori sedang antara lain Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan,

Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang,

Pamekasan, Sumenep, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun dan Kota Surabaya.

12. Epidemologi dan Wabah

Bahaya epidemi dan wabah penyakit berpotensi memapar 30 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan kelas risiko rendah. Kondisi ini menjadikan kelas risiko

bencana epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Jawa Timur dalam hasil Kajian Resiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026 menjadi rendah.

Gambar 2. 4 Peta Risiko Bencana Multi Bahaya di Provinsi Jawa Timur



Sumber : Kajian Resiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026

2.1.2 Aspek Demografi

Selama kurun waktu enam tahun terakhir (2018–2023) jumlah penduduk Jawa Timur selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 39,5 juta jiwa, kemudian terus meningkat menjadi 41,41 juta

jiwa pada tahun 2023 dengan sex ratio sebesar 99,48 persen. Artinya, setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99-100 penduduk laki-laki. Jika dilihat dari kepadatan penduduk, di wilayah Jawa Timur

tahun 2023 terdapat 862 jiwa setiap km².

Tabel 2. 12 Struktur Penduduk Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk (ribuJiwa)	39.699	40.666	40.878	41.150	41.416
2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (ribu jiwa)					
	a. <15 tahun	8.783	8.701	8.646	8.612	8.584
	b. 15 – 64 tahun	27.630	28.571	28.668	28.793	28.902
	c. >64 tahun	3.286	3.394	3.565	3.745	3.930
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	5,52	- 2,33 ^r	3,56 ^x	5,34 ^{xx}	0,65
4	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	830	851	855	857	862
5	Sex Ratio (L/P) (%)	97,53	99,6	99,56	99,52	99,48
6	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umum					
	a. 15 – 29 tahun	5.159	5.112	5.021	5.055	5.501
	b. 30 – 54 tahun	11.608	11.979	12.050	12.152	12.675
	c. >54 tahun	4.732	5.173	5.249	5.662	5.693

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Tabel 2. 13 Persebaran Penduduk Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (Jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kab. Pacitan	297.014	298.826	295.902	297.823	592.916	596.649
Kab. Ponorogo	481.540	485.603	482.713	486.979	964.253	972.582
Kab. Trenggalek	371.527	373.810	368.142	370.548	739.669	744.358
Kab. Tulungagung	552.835	557.045	552.502	556.928	1.105.337	1.113.973
Kab. Blitar	624.631	629.127	615.691	620.370	1.240.322	1.249.497
Kab. Kediri	836.025	841.629	819.995	825.821	1.656.020	1.667.450
Kab. Malang	1.353.154	1.361.591	1.332.746	1.341.584	2.685.900	2.703.175
Kab. Lumajang	562.257	567.106	574.970	580.155	1.137.227	1.147.261
Kab. Jember	1.279.947	1.288.194	1.287.771	1.296.577	2.567.718	2.584.771
Kab. Banyuwangi	866.723	873.100	865.008	871.714	1.731.731	1.744.814
Kab. Bondowoso	384.676	385.966	396.741	398.226	781.417	784.192
Kab. Situbondo	339.230	340.547	352.030	353.534	691.260	694.081
Kab. Probolinggo	572.137	573.945	587.828	589.914	1.159.965	1.163.859
Kab. Pasuruan	809.968	813.307	809.067	812.722	1.619.035	1.626.029
Kab. Sidoarjo	1.058.552	1.063.973	1.044.849	1.050.615	2.103.401	2.114.588
Kab. Mojokerto	569.966	573.841	563.618	567.675	1.133.584	1.141.516
Kab. Jombang	673.386	678.250	662.586	667.636	1.335.972	1.345.886
Kab. Nganjuk	561.677	565.193	555.356	559.054	1.117.033	1.124.247
Kab. Madiun	375.368	378.994	382.297	386.141	757.665	765.135
Kab. Magetan	333.605	335.566	344.738	346.900	678.343	682.466
Kab. Ngawi	435.470	437.350	441.962	444.043	877.432	881.393

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (Jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kab. Bojonegoro	660.216	663.775	654.909	658.699	1.315.125	1.322.474
Kab. Tuban	603.875	606.876	605.668	608.919	1.209.543	1.215.795
Kab. Lamongan	686.117	693.701	685.392	693.240	1.371.509	1.386.941
Kab. Gresik	670.835	676.735	661.829	667.913	1.332.664	1.344.648
Kab. Bangkalan	535.522	542.775	551.098	558.781	1.086.620	1.101.556
Kab. Sampang	488.673	492.572	495.489	499.638	984.162	992.210
Kab. Pamekasan	420.612	422.584	437.206	439.425	857.818	862.009
Kab. Sumenep	548.419	551.524	588.213	591.771	1.136.632	1.143.295
Kota Kediri	144.876	145.556	144.542	145.280	289.418	290.836
Kota Blitar	75.587	76.359	76.373	77.182	151.960	153.541
Kota Malang	420.897	421.340	425.229	425.842	846.126	847.182
Kota Probolinggo	120.545	121.500	122.655	123.674	243.200	245.174
Kota Pasuruan	105.753	106.709	105.744	106.741	211.497	213.450
Kota Mojokerto	66.611	67.125	67.739	68.289	134.350	135.414
Kota Madiun	97.370	98.460	101.822	103.000	199.192	201.460
Kota Surabaya	1.431.041	1.433.967	1.456.182	1.459.731	2.887.223	2.893.698
Kota Batu	109.119	110.138	107.616	108.664	216.735	218.802

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, hasil proyeksi penduduk interim Jawa Timur kondisi Juni 2022, Juni 2023

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Produktivitas Daerah

Produktivitas suatu Daerah dapat diukur salah satunya menggunakan kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama 5 Tahun terakhir PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) serta PDRB Per Kapita Jawa Timur selalu mengalami peningkatan, meskipun sempat

mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Secara spasial pada triwulan III tahun 2023, Jawa Timur adalah penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 25,56 persen dan penyumbang terbesar kedua secara Nasional sebesar 14,60 persen setelah DKI Jakarta.

Tabel 2. 14 PDRB Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 s.d TW III
PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	2.189,78	2.352,42	2.299,46	2.454,72	2.730,91	2.203,18



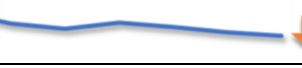
Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 s.d TW III
PDRB ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	1.563,76	1.650,14	1.610,42	1.668,75	1.757,82	1.379,392
PDRB Per Kapita (Juta Rp.)	55,41	59,02	56,64	60,05	66,36	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Sektor utama penopang ekonomi Jawa Timur cenderung sama, yaitu didominasi oleh Industri Pengolahan, Perdagangan dan Pertanian. Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan cenderung mengalami peningkatan,

sedangkan Pertanian cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2022 kontribusi industri pengolahan sebesar 30,60 persen, perdagangan 18,67 persen, dan pertanian 11,11 persen.

Tabel 2. 15 Kontribusi Sektor Utama PDRB Jawa Timur menurut Lapangan Usaha


Kategori	Tahun						Tren Kontribusi 2018 – 2023 TW III
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 s.d TW III	
Industri Pengolahan	29,75	30,32	30,68	30,72	30,60	30,06	
Perdagangan	18,19	18,49	17,92	18,46	18,67	18,76	
Pertanian	11,85	11,36	11,89	11,50	11,11	12,12	




Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Struktur PDRB menurut Pengeluaran didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor Luar Negeri dan Konsumsi Pemerintah.

Kontribusi komponen tersebut dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan kecuali komponen Ekspor Luar Negeri yang menunjukkan tren meningkat.

Tabel 2. 16 Kontribusi PDRB Jawa Timur menurut Pengeluaran

Kategori	Tahun					Tren Kontribusi 2018-2022
	2018	2019	2020	2021	2022	
Konsumsi Rumah Tangga	59,32	59,54	60,82	59,34	59,53	

Kategori	Tahun					Tren Kontribusi 2018-2022
	2018	2019	2020	2021	2022	
PMTB	28,36	28,56	28,18	27,11	27,15	
Ekspor Luar Negeri	13,57	12,30	14,04	14,15	14,08	
Konsumsi Pemerintah	5,53	5,59	5,11	5,02	4,27	

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.2.2 Kesejahteraan Masyarakat

2.2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran kondisi makro ekonomi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir menunjukkan trend positif, dimana pertumbuhan ekonominya selalu diatas Nasional kecuali pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,33 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2021 mulai tumbuh membaik sebesar 3,5 persen dan pada tahun 2022 sebesar 5,34 persen atau kembali tumbuh di atas Nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sampai dengan triwulan III tahun 2023 tumbuh

sebesar 5,02 persen, dengan pertumbuhan tertinggi adalah Pengadaan Listrik, Gas dan Transportasi & Pergudangan. Faktor pendorong kedua lapangan usaha tersebut adalah penambahan produksi gas dan tingginya permintaan es karena faktor cuaca serta jumlah penum-pang meningkat karena masa liburan sekolah dan arus balik idul adha. Seluruh *leading sector*, yaitu Industri, Pertanian, Perdagangan, dan Konstruksi mengalami pertumbuhan positif.

Tabel 2. 17 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional

Pertumbuhan Ekonomi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023 (TW III c-to-c)
Jawa Timur	5,53	-2,33	3,56	5,34	5,02
Nasional	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,05

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan Ekonomi 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur paska pandemi Covid-19 tumbuh positif. Kabupaten/Kota mengalami

pertumbuhan yang diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur bahkan Nasional pada tahun 2022, antara lain Kabupaten Tuban, Kabupaten

Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Probolinggo, Kabupaten Bojonegoro (tanpa migas), Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan

Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pacitan, Kota Madiun, dan Kabupaten Jombang, sedangkan 23 Kabupa-ten/Kota lainnya tumbuh di bawah Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur.

Tabel 2. 18 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Kab. Pacitan	5,47	5,08	-1,84	2,49	5,54
2	Kab. Ponorogo	5,27	5,01	-0,9	3,19	3,24
3	Kab. Trenggalek	5,03	5,08	-2,17	3,65	4,52
4	Kab. Tulungagung	5,21	5,32	-3,09	3,53	5,22
5	Kab. Blitar	5,10	5,12	-2,29	3,02	5,2
6	Kab. Kediri	5,07	5,06	-2,41	3,06	4,9
7	Kab. Malang	5,55	5,49	-2,68	3,12	5,13
8	Kab. Lumajang	5,00	4,61	-2,79	3,14	4,43
9	Kab. Jember	5,02	5,51	-2,98	4,00	4,53
10	Kab. Banyuwangi	5,84	5,55	-3,58	4,09	4,43
11	Kab. Bondowoso	5,08	5,30	-1,36	3,49	3,51
12	Kab. Situbondo	5,46	5,44	-2,33	3,26	4,39
13	Kab. Probolinggo	4,47	4,56	-2,12	3,35	4,52
14	Kab. Pasuruan	5,73	5,83	-2,03	4,34	5,32
15	Kab. Sidoarjo	6,01	5,99	-3,69	4,21	7,53
16	Kab. Mojokerto	5,88	5,81	-1,11	4,12	5,82
17	Kab. Jombang	5,29	5,10	-1,98	3,24	5,37
18	Kab. Nganjuk	5,38	5,36	-1,71	3,61	4,84
19	Kab. Madiun	5,10	5,42	-1,69	3,32	4,32
20	Kab. Magetan	5,21	5,04	-1,64	3,04	3,89
21	Kab. Ngawi	5,21	5,05	-1,69	2,55	3,19
22	Kab. Bojonegoro	4,39	6,34	-0,4	-5,54	-6,16
23	Kab. Tuban	5,15	5,14	-5,85	3,00	8,88
24	Kab. Lamongan	5,44	5,43	-2,65	3,43	5,56
25	Kab. Gresik	5,81	5,42	-3,68	3,79	7,38
26	Kab. Bangkalan	4,22	1,03	-5,59	-2,07	-1,12
27	Kab. Sampang	4,11	1,85	-0,29	0,22	2,31
28	Kab. Pamekasan	5,46	4,92	-2,54	3,41	4,66
29	Kab. Sumenep	3,63	0,14	-1,13	2,61	3,11
30	Kota Kediri	5,43	5,47	-6,25	2,5	3,95
31	Kota Blitar	5,82	5,84	-2,28	4,28	5,22
32	Kota Malang	5,72	5,73	-2,26	4,21	6,32

No	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
33	Kota Probolinggo	5,93	5,94	-3,64	4,06	6,12
34	Kota Pasuruan	5,54	5,56	-4,33	3,64	6,22
35	Kota Mojokerto	5,80	5,65	-3,69	3,65	5,56
36	Kota Madiun	5,96	5,69	-3,39	4,79	5,52
37	Kota Surabaya	6,19	6,09	-4,85	4,29	6,51
38	Kota Batu	6,50	6,51	-6,46	4,04	6,18

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Ket. * : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

2.2.2.2 Kemiskinan

Pembangunan merupakan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Wujud kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat.

Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya, baik dari segi peningkatan kinerja perekonomian maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

Tabel 2. 19 Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional

Persentase Penduduk Miskin	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Maret)
Jawa Timur	10,85	10,20	11,46	10,59	10,49	10,35
Nasional	9,66	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Persentase penduduk miskin Jawa Timur menunjukkan tren yang positif setelah kasus pandemi covid-19 seiring dengan semakin membaiknya perekonomian Jawa Timur. Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2023 sebesar 10,35 persen, mengalami penurunan sebesar 0,14 persen

point terhadap September 2022 (10,49 persen). Sedangkan jumlah Penduduk Miskin pada Maret 2023 sebesar 4,19 juta jiwa, berkurang sebanyak 47,7 ribu jiwa terhadap September 2022 (4,24 juta jiwa). Penurunan penduduk miskin memberi arti bahwa pengurangan penduduk yang memiliki penge-

luaran per kapita lebih rendah dari garis kemiskinan.

Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah mengurangi penduduk miskin diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan serta meningkatkan ketaja-

man sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan Strategi penanganan kemiskinan Jawa Timur yang antara lain Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2. 20
Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
(Kondisi Maret)

No	Kab/Kota	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Pacitan	14,19	13,67	14,54	15,11	13,80	13,65
2	Kab. Ponorogo	10,36	9,64	9,95	10,26	9,32	9,53
3	Kab. Trenggalek	12,02	10,98	11,62	12,14	10,96	10,63
4	Kab. Tulungagung	7,27	6,74	7,33	7,51	6,71	6,53
5	Kab. Blitar	9,72	8,94	9,33	9,65	8,71	8,69
6	Kab. Kediri	11,31	10,42	11,40	11,64	10,65	10,72
7	Kab. Malang	10,37	9,47	10,15	10,5	9,55	9,45
8	Kab. Lumajang	9,98	9,49	9,83	10,05	9,06	8,93
9	Kab. Jember	9,98	9,25	10,09	10,41	9,39	9,51
10	Kab. Banyuwangi	7,80	7,52	8,06	8,07	7,51	7,34
11	Kab. Bondowoso	14,39	13,33	14,17	14,73	13,47	13,34
12	Kab. Situbondo	11,82	11,20	12,22	12,63	11,78	11,9
13	Kab. Probolinggo	18,71	17,76	18,61	18,91	17,12	17,19
14	Kab. Pasuruan	9,45	8,68	9,26	9,7	8,96	9,24
15	Kab. Sidoarjo	5,69	5,32	5,59	5,93	5,36	5
16	Kab. Mojokerto	10,08	9,75	10,57	10,62	9,71	9,8
17	Kab. Jombang	9,56	9,22	9,94	10	9,04	9,15
18	Kab. Nganjuk	12,11	11,24	11,62	11,85	10,70	10,89
19	Kab. Madiun	11,42	10,54	11,46	11,91	10,79	11,04
20	Kab. Magetan	10,31	9,61	10,35	10,66	9,84	9,8
21	Kab. Ngawi	14,83	14,39	15,44	15,57	14,15	14,4
22	Kab. Bojonegoro	13,16	12,38	12,87	13,27	12,21	12,18
23	Kab. Tuban	15,31	14,58	15,91	16,31	15,02	14,91
24	Kab. Lamongan	13,80	13,21	13,85	13,86	12,53	12,42
25	Kab. Gresik	11,89	11,35	12,40	12,42	11,06	10,96
26	Kab. Bangkalan	19,59	18,90	20,56	21,57	19,44	19,35
27	Kab. Sampang	21,21	20,71	22,78	23,76	21,61	21,76

No	Kab/Kota	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
28	Kab. Pamekasan	14,47	13,95	14,60	15,3	13,93	13,85
29	Kab. Sumenep	20,16	19,48	20,18	20,51	18,76	18,7
30	Kota Kediri	7,68	7,16	7,69	7,75	7,23	7,15
31	Kota Blitar	7,44	7,13	7,78	7,89	7,37	7,3
32	Kota Malang	4,10	4,07	4,44	4,62	4,37	4,26
33	Kota Probolinggo	7,20	6,91	7,43	7,44	6,65	6,48
34	Kota Pasuruan	6,77	6,46	6,66	6,88	6,37	6,6
35	Kota Mojokerto	5,50	5,15	6,24	6,39	5,98	5,77
36	Kota Madiun	4,49	4,35	4,98	5,09	4,76	4,74
37	Kota Surabaya	4,88	4,51	5,02	5,23	4,72	4,65
38	Kota Batu	3,89	3,81	3,89	4,09	3,79	3,31

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.2.2.3 Indeks Gini

Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh pada suatu daerah yaitu Indeks Gini. Indeks gini adalah besaran yang digunakan untuk mengukur derajat

ketimpangan distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk. Angka gini rasio merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Perhitungan Indeks Gini menggunakan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar maka pendapatannya besar pula.

Tabel 2. 21 Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional

Indeks Gini	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023 (Maret)
Jawa Timur	0,364	0,364	0,364	0,365	0,387
Nasional	0,380	0,385	0,381	0,381	0,388

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan :

$G < 0,3$ = Ketimpangan rendah
 $0,3 \leq G \leq 0,5$ = Ketimpangan sedang, dan
 $G > 0,5$ = Ketimpangan tinggi

Indeks gini Provinsi Jawa Timur pada maret 2023 sebesar 0,387 mengalami kenaikan dibandingkan September 2022 sebesar 0,022 poin. Hal ini dikarenakan dampak perubahan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa 2023, Dana Desa untuk BLT minimal 10 persen dan maksimal 25 persen serta keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Penyaluran BLT Dana Desa 2023 per 6 Maret 2023 sudah disalurkan

kepada 163.669 Ke-luarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Langsung Tu-nai (BLT), lebih rendah dibanding-kan tahun 2022 (KPM sebanyak 800 ribu KPM per bulan), sedang-kan kondisi pasca pandemi men-jadikan perekonomian golongan atas cepat berkembang. Pada Ma-ret 2023 di Jawa Timur, distribusi total pengeluaran untuk penduduk pada kelompok 40 persen terbawah mengalami penurunan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 2. 22 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret)

No	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Pacitan	0,35	0,40	0,351	0,337	0,338
2	Kab. Ponorogo	0,35	0,35	0,380	0,369	0,336
3	Kab. Trenggalek	0,39	0,37	0,379	0,335	0,331
4	Kab. Tulungagung	0,37	0,30	0,336	0,327	0,342
5	Kab. Blitar	0,38	0,33	0,348	0,353	0,335
6	Kab. Kediri	0,33	0,30	0,325	0,330	0,329
7	Kab. Malang	0,38	0,38	0,371	0,367	0,368
8	Kab. Lumajang	0,32	0,30	0,297	0,309	0,349
9	Kab. Jember	0,34	0,30	0,318	0,336	0,301
10	Kab. Banyuwangi	0,31	0,31	0,316	0,373	0,329
11	Kab. Bondowoso	0,35	0,30	0,329	0,334	0,365
12	Kab. Situbondo	0,36	0,32	0,305	0,323	0,298
13	Kab. Probolinggo	0,34	0,33	0,326	0,326	0,275
14	Kab. Pasuruan	0,32	0,31	0,346	0,344	0,325
15	Kab. Sidoarjo	0,35	0,31	0,340	0,347	0,373
16	Kab. Mojokerto	0,31	0,27	0,325	0,294	0,327
17	Kab. Jombang	0,32	0,33	0,334	0,332	0,31
18	Kab. Nganjuk	0,31	0,42	0,335	0,308	0,301
19	Kab. Madiun	0,33	0,33	0,357	0,359	0,354
20	Kab. Magetan	0,38	0,36	0,324	0,357	0,352
21	Kab. Ngawi	0,35	0,34	0,337	0,309	0,3
22	Kab. Bojonegoro	0,35	0,31	0,303	0,340	0,28
23	Kab. Tuban	0,36	0,30	0,337	0,345	0,345
24	Kab. Lamongan	0,31	0,32	0,296	0,292	0,273

No	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
25	Kab. Gresik	0,27	0,28	0,299	0,313	0,363
26	Kab. Bangkalan	0,29	0,31	0,322	0,303	0,306
27	Kab. Sampang	0,26	0,27	0,262	0,268	0,28
28	Kab. Pamekasan	0,33	0,34	0,320	0,323	0,305
29	Kab. Sumenep	0,25	0,30	0,256	0,294	0,266
30	Kota Kediri	0,33	0,32	0,346	0,374	0,371
31	Kota Blitar	0,35	0,34	0,344	0,370	0,381
32	Kota Malang	0,41	0,34	0,395	0,407	0,421
33	Kota Probolinggo	0,31	0,27	0,311	0,299	0,322
34	Kota Pasuruan	0,34	0,31	0,301	0,350	0,36
35	Kota Mojokerto	0,34	0,31	0,355	0,334	0,381
36	Kota Madiun	0,36	0,35	0,392	0,345	0,398
37	Kota Surabaya	0,36	0,41	0,344	0,351	0,388
38	Kota Batu	0,33	0,32	0,333	0,312	0,308

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.2.2.4 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator hasil pengembangan dari penghitungan IPM. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. IPG merupakan perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Timur selama tahun 2018-2022

menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Hal ini dibuktikan dengan capaian IPG Jawa Timur mulai tahun 2020 berada diatas Nasional. Kesetaraan pembangunan manusia selalu diupayakan di Jawa Timur, dengan mengupayakan kenaikan IPM perempuan. Pemerintah Jawa Timur melalui program pembangunannya, berupaya untuk meningkatkan IPM perempuan, khususnya pada indeks pendidikan dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Tabel 2. 23 Indeks Pembangunan Gender

No	Indeks Pembangunan Gender	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jawa Timur	90,77	90,91	91,07	91,67	92,08
2	Nasional	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63

Sumber : BPS RI

Indeks Pembangunan Gender setiap tahunnya mengalami peningkatan. Terdapat 18 kabupaten/kota

capaiannya berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur, namun masih terdapat 20 kabupaten/kota yang

capaiannya di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2. 24 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab/Kota di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Pacitan	84,44	85,13	84,87	85,09	85,65
2	Kab. Ponorogo	93,00	93,34	93,56	93,65	93,96
3	Kab. Trenggalek	92,52	92,74	92,93	92,56	92,41
4	Kab. Tulungagung	95,75	95,63	95,48	95,52	95,63
5	Kab. Blitar	92,33	92,73	92,70	92,76	93,22
6	Kab. Kediri	92,81	92,70	93,07	92,9	92,85
7	Kab. Malang	88,38	88,66	88,68	88,34	88,35
8	Kab. Lumajang	87,88	88,04	88,09	88,39	88,77
9	Kab. Jember	84,23	84,30	84,66	84,82	85,31
10	Kab. Banyuwangi	86,44	86,81	86,66	86,96	87,26
11	Kab. Bondowoso	89,89	90,42	90,68	90,75	91,10
12	Kab. Situbondo	86,69	87,11	87,06	87,16	87,32
13	Kab. Probolinggo	84,86	84,95	85,38	85,39	86,02
14	Kab. Pasuruan	90,41	90,68	90,48	90,89	91,02
15	Kab. Sidoarjo	93,33	93,79	94,13	94,26	94,68
16	Kab. Mojokerto	90,15	90,65	91,10	91,24	91,37
17	Kab. Jombang	89,94	90,37	90,15	90,23	90,51
18	Kab. Nganjuk	93,26	93,27	93,26	93,76	93,89
19	Kab. Madiun	91,13	91,81	91,79	91,77	92,14
20	Kab. Magetan	92,93	93,16	93,36	93,65	93,88
21	Kab. Ngawi	91,72	92,52	92,19	92,32	92,53
22	Kab. Bojonegoro	89,77	89,98	90,17	90,21	90,63
23	Kab. Tuban	87,34	87,63	87,78	88,06	88,39
24	Kab. Lamongan	88,00	88,40	88,59	88,99	89,50
25	Kab. Gresik	89,72	90,05	89,93	90,2	90,78
26	Kab. Bangkalan	86,38	86,93	86,88	86,95	87,35
27	Kab. Sampang	84,33	84,79	85,50	86,32	86,79
28	Kab. Pamekasan	85,50	86,05	86,17	86,5	86,83
29	Kab. Sumenep	80,11	80,72	80,81	81,18	81,88
30	Kota Kediri	94,48	94,53	94,39	94,21	94,53
31	Kota Blitar	97,60	97,80	97,46	97,36	97,37
32	Kota Malang	94,71	94,72	94,97	95,24	95,54
33	Kota Probolinggo	95,56	95,91	95,87	96,01	96,24
34	Kota Pasuruan	96,02	96,18	96,16	96,27	96,74
35	Kota Mojokerto	93,05	93,18	93,26	93,47	93,63
36	Kota Madiun	93,47	94,05	94,38	94,42	94,57
37	Kota Surabaya	93,57	93,60	93,58	93,9	94,21
38	Kota Batu	89,27	89,71	89,72	89,89	90,10

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Jawa Timur yang ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan berada di atas Nasional. Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang dan hidup sehat dan standar hidup layak. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Jawa Timur sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2023, IPM Jawa Timur rata-rata meningkat sebesar 0,73 persen per tahun.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan

untuk dapat hidup hingga 74,87 tahun. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat menjadi 13,38 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat menjadi 8,11 tahun pada tahun 2023. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 429 ribu rupiah (3,58 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020, sedangkan sumber data HLS, RLS, dan pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

Tabel 2. 25 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur dan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Jawa Timur	70,77	71,50	73,04	73,48	74,05	74,65
Nasional	71,39	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Ket: Perhitungan UHH mulai tahun 2020 menggunakan hasil Long Form SP2020

IPM tertinggi Jawa Timur tahun 2023 tercatat di Kota Malang sebesar 84,00, hal yang sama juga terjadi untuk tahun sebelumnya. Terdapat sebanyak 7 daerah dengan IPM berkategori “sangat tinggi”, yaitu Kota Surabaya, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Blitar, dan Kabupaten

Sidoarjo. Di samping itu, daerah dengan kategori IPM “tinggi” sebanyak 27 kabupaten/kota, sedangkan daerah berkategori IPM “sedang” sebanyak 4 kabupaten/kota. Kabupaten di Jawa Timur yang IPM-nya “naik kelas” tahun ini adalah Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo,

Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pamekasan, dari IPM berkategori “sedang” ke “tinggi”. Pertumbuhan IPM tertinggi tahun 2023 terjadi di Kabupaten

Pamekasan (1,4 persen), sementara pertumbuhan terendah terjadi di Kabupaten Lamongan (0,61 persen).

Tabel 2. 26 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Pacitan	67,33	68,16	69,28	69,45	70,19	70,94
2	Kab. Ponorogo	69,91	70,56	71,57	71,81	72,59	73,18
3	Kab. Trenggalek	68,71	69,46	70,10	70,40	71,28	71,96
4	Kab. Tulungagung	71,99	72,62	73,15	73,29	74,14	74,65
5	Kab. Blitar	69,93	70,57	71,02	71,48	72,25	72,84
6	Kab. Kediri	71,01	71,85	72,80	73,31	74,20	74,68
7	Kab. Malang	69,40	70,35	71,24	71,48	72,23	73,00
8	Kab. Lumajang	64,83	65,33	67,04	67,65	68,48	69,37
9	Kab. Jember	65,96	66,69	69,01	69,20	69,80	70,42
10	Kab. Banyuwangi	70,06	70,60	71,85	72,62	73,15	73,79
11	Kab. Bondowoso	65,27	66,09	69,10	69,24	69,91	70,56
12	Kab. Situbondo	66,42	67,09	68,94	69,34	69,76	70,65
13	Kab. Probolinggo	64,85	65,60	68,77	68,94	69,56	70,36
14	Kab. Pasuruan	67,41	68,29	70,20	70,54	71,29	71,91
15	Kab. Sidoarjo	79,50	80,05	80,65	81,01	81,37	81,88
16	Kab. Mojokerto	72,50	73,53	74,58	74,90	75,61	76,23
17	Kab. Jombang	72,64	72,85	73,63	74,10	74,66	75,16
18	Kab. Nganjuk	71,86	71,71	72,78	73,03	73,95	74,70
19	Kab. Madiun	71,23	71,69	72,94	73,07	73,51	74,02
20	Kab. Magetan	71,01	73,49	74,85	75,08	75,76	76,30
21	Kab. Ngawi	72,91	70,41	71,49	71,97	72,62	73,28
22	Kab. Bojonegoro	69,91	68,75	70,18	70,70	71,15	71,80
23	Kab. Tuban	67,43	68,37	69,60	70,10	70,79	71,40
24	Kab. Lamongan	71,97	72,57	73,44	73,97	74,83	75,29

No	Kab/Kota	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
25	Kab. Gresik	75,28	76,10	76,59	76,98	77,62	78,44
26	Kab. Bangkalan	62,87	63,79	65,17	65,42	66,11	66,82
27	Kab. Sampang	61,00	61,94	64,75	64,86	65,44	66,19
28	Kab. Pamekasan	65,41	65,94	68,65	68,78	69,35	70,32
29	Kab. Sumenep	65,25	66,22	67,15	67,74	68,49	69,13
30	Kota Kediri	77,58	78,08	78,78	79,15	80,12	80,97
31	Kota Blitar	77,58	78,56	78,88	79,27	80,15	80,78
32	Kota Malang	80,89	81,32	82,19	82,77	83,38	84,00
33	Kota Probolinggo	72,53	73,27	74,81	75,20	76,08	76,93
34	Kota Pasuruan	74,78	75,25	76,47	76,83	77,71	78,30
35	Kota Mojokerto	77,14	77,96	78,95	79,34	80,19	80,90
36	Kota Madiun	80,33	80,88	81,93	82,27	83,02	83,71
37	Kota Surabaya	81,74	82,22	82,76	82,94	83,32	83,99
38	Kota Batu	75,04	75,88	76,82	77,21	78,13	79,07

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Ket: Perhitungan UHH mulai tahun 2020 menggunakan hasil Long Form SP2020

2.2.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu

ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 2. 27 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur dan Nasional

Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jawa Timur	3,82	5,84	5,74	5,49	4,88
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur setiap tahunnya selalu dibawah Nasional

dan memiliki kecenderungan menurun. TPT Jawa Timur tahun 2023 sebesar 4,88 persen, turun

0,61 persen poin dibanding tahun 2022. Berdasarkan wilayah, TPT perkotaan pada tahun 2023 sebesar 5,58 persen mengalami penurunan sebesar 2,18 persen poin dibanding tahun 2022, sedangkan TPT perdesaan sebesar 4,01 persen mengalami peningkatan sebesar 1,23 persen poin. Menurut jenis kelamin, TPT laki-laki sebesar 4,94 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan sebesar 4,8 persen poin.

Isu yang masih terjadi dalam pengangguran adalah TPT lulusan SMK yang menunjukkan angka tertinggi dibandingkan penduduk usia kerja dengan jenjang pendidikan lainnya. Tingginya TPT pada lulusan SMK dan juga pada lulusan Perguruan Tinggi, selain isu link and match antara kemampuan/skill dengan ketersediaan lapangan pekerjaan juga

kemungkinan besar karena karakteristik angkatan kerja pada jenjang pendidikan ini cenderung untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki terutama pada kelompok pendatang baru di pasar kerja sehingga waktu tunggu dari saat menyatakan terjun di pasar kerja atau berniat untuk mencari pekerjaan hingga memperoleh pekerjaan yang sesuai akan relatif lebih lama dibanding angkatan kerja pada jenjang lain. Pelaksanaan job fair bisa menjadi salah satu sarana untuk memangkas waktu tunggu karena bisa mempercepat pertemuan antara pencari kerja berkemampuan khusus ini dengan penyedia lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan khusus tersebut.

Tabel 2. 28 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Pacitan	1,43	0,95	2,28	2,04	3,65	1,83
2	Kab. Ponorogo	3,87	3,58	4,45	4,38	5,51	4,66
3	Kab. Trenggalek	4,17	3,43	4,11	3,53	5,37	4,52
4	Kab. Tulungagung	2,61	3,36	4,61	4,91	6,65	5,65
5	Kab. Blitar	3,37	3,11	3,82	3,66	5,45	4,91
6	Kab. Kediri	4,25	3,68	5,24	5,15	6,83	5,79
7	Kab. Malang	3,24	3,82	5,49	5,40	6,57	5,70
8	Kab. Lumajang	2,55	2,81	3,36	3,51	4,97	3,67
9	Kab. Jember	4,09	3,80	5,12	5,44	4,06	4,01
10	Kab. Banyuwangi	3,67	4,08	5,34	5,42	5,26	4,75
11	Kab. Bondowoso	3,90	2,96	4,13	4,46	4,32	4,15
12	Kab. Situbondo	1,92	2,82	3,85	3,68	3,38	3,27
13	Kab. Probolinggo	4,15	3,88	4,86	4,55	3,25	3,24
14	Kab. Pasuruan	6,11	5,42	6,24	6,03	5,91	5,48
15	Kab. Sidoarjo	4,73	4,72	10,97	10,87	8,80	8,05
16	Kab. Mojokerto	4,27	3,68	5,75	5,54	4,83	4,67
17	Kab. Jombang	4,64	4,39	7,48	7,09	5,47	4,66

No	Kab/Kota	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
18	Kab. Nganjuk	2,64	3,22	4,80	4,98	4,74	4,68
19	Kab. Madiun	3,81	3,62	4,80	4,99	5,84	5,14
20	Kab. Magetan	3,92	3,08	3,74	3,86	4,33	4,16
21	Kab. Ngawi	3,83	3,70	5,44	4,25	2,48	2,41
22	Kab. Bojonegoro	4,19	3,70	4,92	4,82	4,69	4,63
23	Kab. Tuban	2,83	2,76	4,81	4,68	4,54	4,40
24	Kab. Lamongan	3,17	4,00	5,13	4,90	6,05	5,46
25	Kab. Gresik	5,82	5,54	8,21	8,00	7,84	6,82
26	Kab. Bangkalan	5,25	5,84	8,77	8,07	8,05	6,18
27	Kab. Sampang	2,41	2,81	3,35	3,45	3,11	2,72
28	Kab. Pamekasan	2,92	2,32	3,49	3,10	1,40	1,74
29	Kab. Sumenep	1,79	2,17	2,84	2,31	1,36	1,71
30	Kota Kediri	3,63	4,22	6,21	6,37	4,38	4,06
31	Kota Blitar	4,06	4,64	6,68	6,61	5,39	5,24
32	Kota Malang	6,79	6,04	9,61	9,65	7,66	6,80
33	Kota Probolinggo	3,64	4,41	6,70	6,55	4,57	4,53
34	Kota Pasuruan	4,55	5,06	6,33	6,23	6,18	5,64
35	Kota Mojokerto	2,45	2,65	6,74	6,87	5,05	4,73
36	Kota Madiun	3,85	4,01	8,32	8,15	6,39	5,85
37	Kota Surabaya	6,12	5,87	9,79	9,68	7,62	6,76
38	Kota Batu	3,12	2,48	5,93	6,57	8,43	4,52

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.2.2.7 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kewajiban yang melekat pada suatu Instansi Pemerintah agar dapat melaksanakan roda pemerintahan dengan baik dan mampu menjadi katalisator dalam pencapaian pembangunan. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan Reformasi Birokrasi tentu harus menjadi salah satu perhatian utama.

Ekspektasi masyarakat terhadap birokrasi semakin hari semakin tinggi. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang saat ini telah dan sedang dilaksanakan

perlu dilakukan penajaman sehingga dapat menghasilkan multiplier effect pada sector lainnya. Upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik. Gambaran reformasi birokrasi telah dilaksanakan dengan baik tentunya tidak hanya menggunakan dasar dokumen perencanaan dan pelaksanaan tertulis saja, akan tetapi lebih dari itu, dapat dilihat implementasi pada setiap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tabel 2. 29 Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi	72,81	73,83	76,38	76,71	80,11

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

Indeks reformasi birokrasi di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 72,81, kemudian terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 80,11. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh kategori A. hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reformasi birokrasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, diantaranya: menindak lanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan perbaikan beberapa penilaian hasil seperti ASN Profesional dan Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Tahun 2022 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Selain itu, untuk menjaga kesesuaian dengan isu strategis terkini dan menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 dengan menyusun Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.

Secara khusus aspek aspek yang perlu ditajamkan adalah :

- a. Substansi tujuan, sasaran dan indikator keberhasilan RB dalam Road Map RB Nasional pada umumnya dan RB daerah khususnya yang sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi

- dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
- b. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas instansi Pemerintah, sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi.
 - c. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategi RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu-prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
 - d. Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

2.2.2.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perkembangan IKLH Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu Tahun 2019-2022 cenderung meningkat serta melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan IKLH Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 tidak terlepas dari adanya berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif baik melalui kegiatan fisik (penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, rehabilitasi lahan kritis, dan sebagainya) maupun kegiatan non fisik (pengawasan, pembinaan, penyusunan kebijakan, dan sebagainya) dengan turut

melibatkan para stakeholder terkait. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan dikarenakan belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik serta UMKM sehingga air limbah yang dihasilkan masih belum memenuhi baku mutu. IKLH Provinsi Jawa Timur perlu ditingkatkan khususnya pada capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang masih berada dalam kategori kurang dan cenderung memperoleh berbagai tekanan diantaranya pencemaran kualitas air akibat kegiatan domestik maupun komersial, serta peningkatan alih fungsi maupun kebakaran lahan dan hutan.

Tabel 2. 30 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,36	67,10	67,70	68,49	69,92	69,59

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Di sisi lain terkait dengan capaian IKLH Kabupaten/Kota di Jawa Timur cenderung dinamis namun masih berada di dalam kategori sedang ($50 \leq \text{IKLH} < 70$) sampai dengan baik ($70 \leq \text{IKLH} < 90$). Pada Tahun 2022 terdapat 32 Kabupaten/Kota yang berada dalam kategori sedang dan 6 Kabupaten/Kota yang berada dalam kategori baik. Hal ini perlu

dipertahankan bahkan ditingkatkan khususnya bagi Kabupaten/Kota yang memiliki capaian IKLH dalam kategori sedang sama halnya dengan Provinsi Jawa Timur seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan karena adanya peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk di Jawa Timur.

Tabel 2. 31 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Pacitan	73,31	73,47	72,62	71,68	64,96
2	Kab. Ponorogo	72,48	70,54	78,50	69,48	70,54
3	Kab. Trenggalek	64,30	64,92	67,69	67,82	74,27
4	Kab. Tulungagung	73,48	71,23	63,68	63,68	64,85
5	Kab. Blitar	69,50	69,90	66,74	67,17	66,8
6	Kab. Kediri	-	64,27	63,10	55,44	64,79
7	Kab. Malang	70,60	80,65	78,94	60,78	67,52
8	Kab. Lumajang	76,78	77,55	74,84	63,21	64,65
9	Kab. Jember	69,37	70,42	75,00	63,12	69,35
10	Kab. Banyuwangi	67,96	67,23	68,66	70,61	71,2
11	Kab. Bondowoso	-	64,63	71,06	66,39	68,97
12	Kab. Situbondo	-	72,53	72,05	74,49	73,02
13	Kab. Probolinggo	69,42	62,16	63,40	64,17	60,38
14	Kab. Pasuruan	57,10	57,37	62,54	63,13	59,78
15	Kab. Sidoarjo	55,10	61,03	65,30	59,81	57,54
16	Kab. Mojokerto	62,37	61,67	65,82	69,75	69,92
17	Kab. Jombang	73,57	65,44	72,09	64,03	61,73
18	Kab. Nganjuk	66,50	71,98	62,28	64,28	67,37
19	Kab. Madiun	77,91	75,98	76,58	66,69	70,45
20	Kab. Magetan	66,36	67,54	82,30	62,04	64,78

No	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
21	Kab. Ngawi	-	73,09	68,01	65,44	65,90
22	Kab. Bojonegoro	64,89	69,01	72,38	64,95	68,25
23	Kab. Tuban	-	67,55	68,76	66,43	65,53
24	Kab. Lamongan	66,20	67,92	72,67	64,92	64,70
25	Kab. Gresik	-	73,99	74,25	53,40	58,15
26	Kab. Bangkalan	-	64,39	66,09	55,36	56,84
27	Kab. Sampang	-	73,70	72,53	62,28	60,31
28	Kab. Pamekasan	-	59,74	61,79	60,55	64,04
29	Kab. Sumenep	74,74	76,55	73,94	65,73	65,20
30	Kota Kediri	58,29	63,24	63,57	61,06	63,59
31	Kota Blitar	-	63,12	66,52	61,75	64,15
32	Kota Malang	-	65,27	75,98	62,99	57,04
33	Kota Probolinggo	56,51	56,51	64,40	70,20	60,85
34	Kota Pasuruan	67,28	66,34	64,92	66,02	56,72
35	Kota Mojokerto	-	65,24	57,73	58,08	60,57
36	Kota Madiun	64,22	63,87	65,42	58,99	58,13
37	Kota Surabaya	61,34	61,43	60,96	67,78	55,97
38	Kota Batu	72,15	73,25	83,52	72,24	75,27

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

2.2.2.9 Indeks Risiko Bencana

Capaian Indeks Risiko Bencana terus menurun hingga Tahun 2022 sebesar 108,69 dan masuk dalam kelas sedang. Mulai tahun 2019 Indeks Risiko Bencana dihitung di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya hanya sebagian dari Kabupaten/Kota yang dijadikan sebagai sampel. Capaian Indeks Risiko Bencana terus menurun hingga Tahun 2022

menjadi 108,69 yang berarti Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin serius dalam menanggulangi bencana. Hal ini dikarenakan indeks kapasitas daerah mengalami kenaikan, dimana kenaikan ini dikarenakan 7 prioritas penilaian kapasitas daerah sudah terpenuhi di Tahun 2022. Klasifikasi Indeks Risiko Bencana adalah: (a) Tinggi (>144); (b) Sedang (13 – 144); (c) Rendah (<13).

Tabel 2. 32 Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana	152,40	137,88	126,42	117,26	108,69	101,65*

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Ket. *) : Angka Sementara

Indeks Risiko Bencana mengalami penurunan di semua Kabupaten/Kota di Jawa. Hal ini mengindikasikan bahwa semua Kabupaten/Kota memperbaiki kesiapan daerah apabila terjadi bencana. Seluruh Kabupaten/Kota memiliki nilai Indeks Risiko Bencana kelas sedang sama halnya dengan Jawa Timur.

Tabel 2. 33 Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota Provinsni Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Pacitan	126,21	123,14	121,27	116,39	111,05
2	Kab. Ponorogo	140,77	127,14	115,60	106,50	99,83
3	Kab. Trenggalek	170,91	151,25	151,25	151,25	136,02
4	Kab. Tulungagung	169,75	151,42	137,68	126,28	118,03
5	Kab. Blitar	198,06	178,37	160,26	146,14	134,86
6	Kab. Kediri	163,09	144,43	131,50	121,46	112,47
7	Kab. Malang	142,10	137,09	133,20	128,84	124,34
8	Kab. Lumajang	129,74	123,84	117,76	113,78	110,47
9	Kab. Jember	198,80	182,18	158,19	146,30	137,23
10	Kab. Banyuwangi	168,29	151,91	137,92	127,80	120,26
11	Kab. Bondowoso	166,00	150,96	128,75	112,39	105,17
12	Kab. Situbondo	168,40	149,35	128,39	113,48	102,44
13	Kab. Probolinggo	162,29	156,70	141,16	128,87	119,66
14	Kab. Pasuruan	214,00	180,34	156,26	139,18	126,32
15	Kab. Sidoarjo	85,29	81,62	79,15	75,95	72,69
16	Kab. Mojokerto	163,60	140,94	123,74	110,06	99,84
17	Kab. Jombang	154,80	138,40	128,55	119,16	110,18
18	Kab. Nganjuk	152,80	132,87	118,22	107,88	99,67
19	Kab. Madiun	155,20	134,81	130,18	121,35	113,47
20	Kab. Magetan	152,80	135,80	131,26	115,72	103,51
21	Kab. Ngawi	143,20	131,06	119,98	119,98	109,72
22	Kab. Bojonegoro	96,93	93,63	90,44	87,55	84,39
23	Kab. Tuban	175,20	160,38	145,00	133,04	123,10
24	Kab. Lamongan	139,55	125,33	115,86	107,52	99,50
25	Kab. Gresik	101,35	99,29	99,29	96,50	94,89
26	Kab. Bangkalan	139,01	129,50	118,71	109,55	102,13
27	Kab. Sampang	154,80	140,63	127,19	116,36	106,15
28	Kab. Pamekasan	180,40	172,53	160,19	139,45	120,85
29	Kab. Sumenep	204,80	184,62	160,35	146,19	133,27
30	Kota Kediri	140,80	122,79	109,69	97,63	86,98
31	Kota Blitar	132,00	118,79	106,06	102,65	96,75
32	Kota Malang	113,60	100,77	91,26	82,25	73,13
33	Kota Probolinggo	148,40	129,83	114,16	104,10	101,33
34	Kota Pasuruan	158,40	136,22	123,69	115,23	108,09
35	Kota Mojokerto	142,80	133,95	120,57	120,57	110,59
36	Kota Madiun	136,00	121,28	116,73	116,73	108,85
37	Kota Surabaya	166,80	150,34	150,34	136,36	124,93
38	Kota Batu	134,40	116,06	104,09	95,31	88,04

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

2.2.2.10 Nilai Tukar Petani

Perhitungan Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2015 hingga 2018 menggunakan tahun dasar 2012 = 100, sedangkan mulai tahun 2019 menggunakan tahun dasar 2018 = 100. NTP Provinsi Jawa Timur menunjukkan dinamika dan fluktuasi selama periode 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 dan 2019, NTP mengalami peningkatan mencapai 108,53. Namun, pada tahun 2020, NTP mengalami penurunan signifikan menjadi 100,77, mengindikasikan adanya tekanan ekonomi pada petani. Meskipun pada tahun 2021 dan 2022 NTP kembali meningkat, tetapi tetap di level yang lebih rendah (100,01 dan

102,47), dan mencerminkan adanya tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Kemudian hingga Oktober 2023, rata-rata NTP menunjukkan tren kenaikan, hal ini kemungkinan disebabkan kenaikan harga gabah yang signifikan pada tahun 2023.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan NTP adalah dengan meningkatkan kualitas komoditas yang dihasilkan oleh petani antara lain melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, mendorong penerapan Good Agricultural Practices (GAP), serta penanganan panen dan pasca panen yang benar.

Tabel 2. 34 Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Timur

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (s.d Okt)
Nilai Tukar Petani (NTP)	106,62	108,53	100,77	100,01	102,47	108,24

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.2.2.11 Nilai Tukar Nelayan

Perhitungan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2015 hingga 2018 menggunakan tahun dasar 2012 = 100, sedangkan mulai tahun 2019 menggunakan tahun dasar 2018 = 100. NTN Jawa Timur menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2018 hingga Oktober 2023. Pada tahun 2019, NTN Jawa Timur mengalami sedikit penurunan menjadi 98,44. Pada tahun 2018, NTN mencapai

126,90, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2019 menjadi 98,44. Pada tahun 2020, NTN terus menurun menjadi 95,77, mencerminkan tekanan ekonomi pada sektor perikanan. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 101,11, NTN kembali meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai 103,75. Hingga Oktober 2023, NTN kembali berada pada level 101,11, menandakan

dinamika fluktuasi yang masih berlangsung.

Upaya yang dilakukan untuk menekan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh nelayan antara lain dengan pemberian fasilitasi bantuan alat tangkap.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh nelayan adalah ketersediaan bahan bakar khusus nelayan. Kerjasama dan kolaborasi dengan pihak terkait terus didorong untuk mendapatkan solusi permasalahan tersebut.

Tabel 2. 35 Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Jawa Timur

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (s.d Okt)
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100	98,44	95,77	101,11	103.75	101,11

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.3 Aspek Daya Saing

2.3.1. Partisipasi Sumber Daya Manusia

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi sumber daya manusia adalah Pendidikan, melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Indikator angka rata-rata lama sekolah (mean years school/MYS) merupakan indikator yang dihasilkan dari kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Namun, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali.

Berdasarkan angka rata-rata lama sekolah dapat diperoleh gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah. Sedangkan harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Tabel 2. 36 Rata-Rata Lama Sekolah Jawa Timur

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-Rata Lama Sekolah	7,39	7,59	7,78	7,88	8,03
2	Harapan Lama Sekolah	13,10	13,16	13,19	13,36	13,37

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Angka rata-rata lama sekolah di Jawa Timur menunjukkan peningkatan, artinya kualitas Sumber Daya Manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Rata-Rata Lama Sekolah Jawa Timur tahun 2022 mencapai 8,03 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Jawa Timur usia 25 tahun ke atas sebagian

besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II). Harapan lama sekolah di Jawa Timur meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2022, harapan lama sekolah di Jawa Timur telah mencapai 13,37 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1.

2.3.2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar dalam mencapai budaya literasi masyarakat dengan pengukuran pada unsur pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat. Unsur pembangunan literasi masyarakat

terdiri dari 7 kom-ponen, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi, dan anggota perpustakaan. Sedangkan unsur aspek masyarakat meliputi jumlah penduduk, jumlah penduduk yang bekerja, jumlah civitas sekolah dan akademika

Tabel 2. 37 Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	-	13,44	14,78	15,70

Sumber : Perpustakaan Nasional

Capaian indeks pembangunan literasi Jawa Timur tahun 2022 apabila dikonversi ke dalam skala 0-100 maka nilai IPLM Jawa Timur sebesar 74,73, masuk kedalam kategori sedang dan urutan ke-5 dengan IPLM tertinggi Nasional. Tiga Kabupaten/Kota

dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kota Malang 98,74, Kota Blitar 98,15, dan Kab. Tulungagung 97,18. Sedangkan, tiga Kabupaten/Kota yang terendah yaitu Kab. Bojonegoro 56,47, Kab. Tuban 53,88, dan Kab. Sumenep 52,01.

2.3.3. Penguasaan Teknologi Informasi

Perkembangan digitalisasi di Indoensia yang sangat signifikan beberapa tahun belakangan ini ikut mendorong terciptanya ekosistem digital yang semakin baik. Pemetaan kompetensi digital masyarakat di Indonesia telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika selama 3 tahun terakhir (2020-2022) melalui survei status literasi digital dan mengukurnya menjadi indeks literasi digital Indoensia. Terdapat 4 (empat) pilar yang menjadi bagian dari kerangka kerja pengembangan kurikulum literasi digital, yaitu

kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Keempat pilar ini dijadikan acuan untuk pengembangan program literasi digital nasional yang mencakup digital society, digital economy, dan digital government.

Indeks literasi digital Jawa Timur setiap tahun mengalami peningkatan, bahkan Jawa Timur masuk kedalam 15 besar indeks literasi digital berdasarkan Provinsi di Indoensia dan berada diatas skor Nasional.

Tabel 2. 38 Indikator Penguasaan Teknologi Informasi di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Literasi Digital	-	-	3,11	3,55	3,58

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika

2.3.4. Ketersediaan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi termasuk di dalamnya pertumbuhan dunia usaha, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai hasil akhirnya. Infrastruktur yang berkaitan dengan daya saing diantaranya adalah terkait dengan infrastruktur sumber daya air, transportasi, serta air minum.

Ketersediaan infrastruktur sumber daya air dalam mendukung peningkatan daya saing dapat diukur melalui pengelolaan jaringan irigasi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi. Panjang total jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri kurang lebih sepanjang 1.777.712 km dan juga telah dilengkapi dengan bangunan air sebagai penunjang prasarana irigasi.

Beberapa bangunan air tersebut diantaranya adalah 7 Kantong Lumpur, 146 Bangunan Bagi, 192 Bangunan Bagi Sadap, 2.144 Bangunan Sadap, 231 Talang, 37 Siphon, 535 Gorong-Gorong, 28 Pelimpah Samping, dan 83 Drain Inlet. Sistem irigasi yang terintegrasi antara jaringan irigasi dengan bangunan penunjangnya menjadi salah satu komponen penting dari infrastruktur pendukung pertanian.

Ketersediaan Infrastruktur transportasi menjadi hal yang penting dalam mendukung daya saing wilayah. Salah satunya adalah jaringan jalan dimana panjang jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur mengalami penambahan dari 1.421 km menjadi 1.671,32 km sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 188/716/KPTS/013/2023 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor 188/210/KPTS /013/2023 tentang Penetapan Status Jalan Sebagai Jalan Provinsi dengan capaian kondisi mantap jalan yang fluktuatif dari tahun 2018-2022, kondisi persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2022 sebesar 89,10 %.

Tabel 2. 39 Indikator Ketersediaan Infrastruktur di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	% Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	91,08	92,35	92,10	89,61	89,10
2	Rata-rata IKM terhadap Pelayanan Perhubungan	83,60	79,77	81,87	88,28	88,11
3	% Peningkatan PDRB Sektor Transportasi	10,42	1,94	15,36	4,97	24,78

Sumber : No (1) : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

No (2,3) : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Pelayanan Perhubungan didukung dengan pemenuhan sarana prasarana angkutan darat, laut, penyeberangan dan udara. Dalam mendukung pemenuhan pelayanan tersebut terdapat simpul – simpul transportasi yang menghubungkan layanan transportasi antar wilayah di Provinsi Jawa Timur antara lain Terminal Tipe B sejumlah 29 terminal. Selain itu, terdapat pelayanan angkutan penumpang perkotaan berupa Bus Trans Jatim yang beroperasi mulai tahun 2022, yang hingga akhir tahun 2023 telah melayani tiga koridor yakni Trans Jatim Koridor I dengan rute Sidoarjo – Surabaya – Gresik dengan rata-rata *load factor* sebesar 118% dan jumlah penumpang 135.071 orang per bulan, Trans Jatim Koridor II dengan rute Mojokerto-Surabaya dengan rata-rata *load factor* sebesar 44% dan jumlah penumpang 54.576 orang per bulan, dan Trans Jatim Koridor III dengan rute Mojokerto – Gresik dengan rata-rata *load factor* sebesar

54% dan jumlah penumpang 59.633 penumpang per bulan.

Ketersediaan infrastruktur transportasi laut terdapat Pelabuhan Pengumpan Regional eksisting sejumlah 14 pelabuhan, Sejumlah 5 pelabuhan dari Pelabuhan Pengumpan Regional tersebut yakni Pelabuhan Kalianget, Pelabuhan Bawean, Pelabuhan Sapudi, Pelabuhan Kangean, dan Pelabuhan Ketapang juga melayani angkutan penyeberangan. Sedangkan, untuk transportasi udara meliputi Bandar Udara Juanda Sidoarjo, Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang, Bandar Udara Banyuwangi, Bandar Udara Trunojoyo di Sumenep, Bandar Udara Notohadinegoro Jember, Bandar Udara Bawean, dan Bandar Udara Dhoho Kediri.

Sektor transportasi dalam PDRB Provinsi Jawa Timur mencakup penyediaan angkutan penumpang dan barang melalui angkutan rel, angkutan darat, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkut-

an udara. Rata-rata pertumbuhan PDRB sektor transportasi pada tahun 2018-2022 sebesar 5,35%. Pertumbuhan positif tersebut dipengaruhi oleh adanya relaksasi kebijakan aturan bepergian oleh pemerintah yang berakibat pada meningkatnya mobilitas penduduk. Adanya kenaikan volume pengiriman perusahaan logistik seiring dengan membaiknya kinerja perdagangan *e-commerce* juga berkontribusi pada pertumbuhan positif PDRB sektor transportasi.

Selain ketersediaan infrastruktur sumber daya air dan transportasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendukung daya saing wilayah dengan pemenuhan layanan infrastruktur dasar khususnya air minum layak. Dalam pemenuhan capaian layanan air minum layak di Jawa Timur tersebut didukung melalui berbagai kegiatan salah satunya yaitu pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membangun SPAM Regional

Umbulan dan SPAM Regional Mojolagres. SPAM Regional Umbulan telah mensuplai kebutuhan air minum untuk 2 Kota (Kota Pasuruan dan Kota Surabaya) dan 3 Kabupaten (Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik) di Wilayah Provinsi Jawa Timur. Kapasitas Rencana SPAM Regional Umbulan adalah 4.000 liter per detik (l/dt). Kemudian untuk SPAM Regional Mojolagres sedang mensuplai kebutuhan air minum untuk Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik dengan kapasitas 300 liter per detik (l/dt). Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala terkait pencapaian akses air minum layak di Jawa Timur antara lain keterbatasan sumber air baku yang ada, sehingga pengembangan pelayanan air minum yang diharapkan melalui sistem penyediaan air minum regional/lintas wilayah yang telah direncanakan di beberapa daerah belum bisa terlaksana secara optimal.

2.3.5. Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2023 sebanyak 23,87 juta orang yang meliputi 22,70 juta orang bekerja dan 1,17 juta pengangguran. Struktur ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Agustus 2023 mampu mengurangi pengangguran sekitar

90,13 ribu orang dibanding Agustus 2022. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, tiga lapangan pekerjaan di Jawa

Timur yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 31,49 persen atau sepertiga dari total penduduk bekerja di Jawa Timur; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan

Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,10 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 15,20 persen. Dominasi tiga sektor ini masih menunjukkan pola yang sama dengan kondisi Agustus 2022 dan Agustus 2023.

Tabel 2. 40 Daya Serap Tenaga Kerja di Jawa Timur

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2022		Agustus 2023		Perubahan Agustus 2023	
	juta orang	persen	juta orang	persen	juta orang	persen
Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan						
SD ke Bawah	9,64	44,6	9,37	41,29	-264,15	-3,3
SMP	3,83	17,72	4,23	18,62	396,33	0,9
SMA	3,41	15,78	3,84	16,92	431,23	1,14
SMK	2,6	12,01	2,97	13,08	373,91	1,07
Diploma I/II/III	0,32	1,47	0,36	1,6	45,43	0,13
Universitas	1,82	8,42	1,93	8,49	107,14	0,07
Jumlah	21,61	100	22,7	100	1089,88	-
Lapangan Pekerjaan Utama						
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	6,77	31,31	7,15	31,49	383,1	0,18
Pertambangan dan Penggalian	0,11	0,5	0,11	0,5	5,36	0
Industri Pengolahan	3,22	14,9	3,45	15,2	230,39	0,3
Pengadaan Listrik, Gas	0,04	0,2	0,03	0,14	-11,91	-0,06
Treatment Air, Sampah, Daur Ulang	0,07	0,32	0,08	0,35	9,23	0,03
Konstruksi	1,4	6,46	1,51	6,63	109,61	0,17
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4,34	20,08	4,34	19,1	-4,43	-0,98
Pengangkutan dan Pergudangan	0,71	3,27	0,73	3,23	28,59	-0,03
Akomodasi dan Makan Minum	1,56	7,2	1,77	7,8	213,25	0,59
Informasi dan Komunikasi	0,13	0,59	0,13	0,56	1,34	-0,02
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,2	0,94	0,23	1,02	26,93	0,07
Real Estat	0,04	0,17	0,04	0,17	1,12	0
Jasa Perusahaan	0,29	1,32	0,3	1,34	17,69	0,01

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2022		Agustus 2023		Perubahan Agustus 2023	
	juta orang	persen	juta orang	persen	juta orang	persen
Administrasi Pemerintahan	0,46	2,14	0,45	1,99	-10,57	-0,15
Jasa Pendidikan	1	4,62	1,03	4,55	35,1	-0,07
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,31	1,45	0,29	1,26	-28,43	-0,19
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,98	4,52	1,06	4,67	83,51	0,15
Jumlah	21,61	100	22,7	100	1089,88	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.3.6. Stabilitas Daerah

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna.

Selama rentang tahun 2018-2021, kriminalitas di Jawa Timur memiliki kecenderungan menurun. Jumlah kejahatan yang dilaporkan selama tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2020 namun resiko penduduk terjadi tindak pidana per 10.000 penduduk mengalami penurunan. Angka kriminalitas diperoleh dari Data Polda Jatim melalui jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun per 10.000 penduduk. Risiko penduduk terjadi tindak pidana per 10.000 penduduk di tahun 2021 sebesar 61 menunjukkan bahwa terjadi 61 tindak pidana di antara 10.000 penduduk per tahunnya.

Tabel 2. 41 Kriminalitas

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	38.065	31.419	24.186	24.844	-
2	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 10.000 Penduduk	97	80	62	61	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.3.7. Daya Saing Daerah

Indeks daya saing daerah merupakan instrument pengukuran yang bertujuan untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif dan dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran indeks daya saing daerah tahun 2022 terdiri dari empat komponen pembentuk daya

saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing. Indeks daya saing daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 sebesar 3,74 lebih tinggi dibandingkan dengan skor Nasional sebesar 3,26.

Tabel 2. 42 Skor Komponen Indeks Daya Saing Daerah Prov. Jawa Timur Tahun 2022

Komponen	Pilar	Skor
Lingkungan Pendukung	Institusi	4,07
	Infrastruktur	3,60
	Adopsi TIK	3,90
	Stabilitas Ekonomi Makro	3,88
Sumber Daya Manusia	Kesehatan	3,83
	Keterampilan	3,50
Pasar	Pasar Produk	2,18
	Pasar Tenaga Kerja	3,31
	Sistem Keuangan	3,14
	Ukuran Pasar	3,88
Ekosistem Inovasi	Dinamika Bisnis	5,00
	Kapabilitas Inovasi	4,54
Indeks Daya saing Daerah Provinsi Jawa Timur		3,74
Indeks Daya saing Daerah Nasional		3,26

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.4.1.1. Urusan Wajib

1. Pendidikan

Tingkat kemajuan peradaban suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang

tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan penduduknya yang rendah, mempunyai produktivitas yang rendah pula.

Tabel 2. 43 Indikator Urusan Pendidikan di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks pendidikan	0,610	0,619	0,626	0,634	0,639	0,642
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16 – 18 tahun	74,49	75,71	79,76	74,14	73,40	-
3	Angka Partisipasi Murni (APM) – SMA/Sederajat	69,92	61,77	62,24	62,63	62,10	-
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/Sederajat	84,94	90,78	93,75	97,48	99,82	-
5	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,50	1,53	0,51	0,49	0,46	-
6	Angka kelulusan sekolah SMA/MA/SMK	98,73	98,54	99,65	99,68	99,71	-
7	Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi Minimal S1/D4	98,40	97,42	99,98	99,80	97,28	-
8	Rasio murid SMK dibanding SMA	58,06: 41,94	58,28 : 41,72	59,18: 40,82	59,29: 40,71	1:360 1:346	-
9	Persentase ABK yang mendapat layanan pendidikan	28,08	29,16	30,46	30,20	30,82	-

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Realisasi Indeks Pendidikan di Jawa Timur sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan ini, menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan di Jawa Timur sehingga berdampak produktifitas ekonomi daerah. Semakin tinggi nilai indeks pendidikan, maka semakin besar kontribusinya terhadap nilai indeks pembangunan manusia.

Pengukuran daya serap sekolah terhadap penduduk yang sekolah dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APS usia 16 – 18 tahun adalah jumlah

penduduk kelompok usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan 16-18 tahun. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS pada suatu kelompok usia di wilayah tertentu menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar bagi penduduk di wilayah tersebut untuk dapat mengenyam pendidikan menurut jenjang tertentu. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan penduduk yang sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu sesuai dengan jenjang peruntukannya. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Angka Partisipasi

Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah murid penduduk yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Secara umum dalam rentang tahun 2018-2022, indikator pengukuran daya serap sekolah menunjukkan trend yang bagus. Hal tersebut menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi semakin besar dan mencerminkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta daya tampung satuan pendidikan di Jawa Timur semakin membaik, yang pada akhirnya dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, serta tingkat kemampuan fisik serta intelektual.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih perlu Upaya untuk meningkatkan rasio SMK terhadap SMU agar mencapai target 70:30 untuk meningkatkan rasio SMK terhadap SMA upaya yang dilakukan adalah penambahan ruang kelas baru untuk meningkatkan jumlah siswa SMK, serta Pemerintah Jawa Timur memperkuat pendidikan vokasional melalui

program dual track tetap menjadi andalan dan sangat membantu dalam meningkatkan dan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan daya saing. Dual track strategy diterapkan pada jalur non formal (SMK Mini, BLK dan Madin, red) serta formal seperti SMK yang di link and match kan dengan industri dan perguruan tinggi, serta filial antara SMK dengan PTN.

Pada tahun 2018-2022, Persentase ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan. Dengan kondisi ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan khususnya pada Anak yang berkebutuhan Khusus. Perhatian khusus melalui kebijakan dan program yang berpihak kepada anak terus dilakukan, terutama bagi penyandang disabilitas/anak berkebutuhan khusus untuk membangun masa depan mereka, demi peningkatan kualitas kesejahteraannya. Sejalan dengan hal tersebut berbagai program dalam upaya penanggulangan masalah anak terus dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur agar anak anak Jawa Timur dapat tumbuh berkembang secara wajar dan optimal.

Pemerintah berusaha meningkatkan mutu pendidikan melalui standar nasional pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tuntutan dari perkem-

bangun pasar bebas. Usaha yang dilakukan sekolah adalah selain membenahi pelaksanaan sesuai standar nasional, sekolah juga melakukan pembenahan manajemen mutu sekolah. Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan oleh sekolah-sekolah sekarang adalah Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Terkait dengan sertifikasi masih ada sekitar 700 SMK bidang teknologi informasi dan

komunikasi yang belum terakreditasi serta hampir 600 SMK bidang teknologi dan rekayasa yang belum terakreditasi. Dari segi jurusan, juga ada ketidakcocokan dengan arah industri prioritas diantaranya kemaritiman, pariwisata dan teknologi pangan. Sekitar 130 ribu murid mengambil jurusan terkait otomotif, dan sekitar 160 ribu murid mengambil jurusan terkait teknologi informasi.

Tabel 2. 44 Jumlah SMK berdasarkan status standarisasi ISO TA 2022/2023

Sertifikasi	SMK Negeri	SMK Swasta	Total
9001 2000	15	48	63
9001 2008	139	192	331
Proses sertifikasi	12	104	116
Belum sertifikasi	130	1.392	1.522
TOTAL	296	1.736	2.032

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

2. Kesehatan

Indeks Kesehatan diperoleh dari hasil olah umur harapan hidup, asumsinya semakin sehat seseorang maka semakin panjang usia hidupnya. Indeks ini terkait

pembangunan kesehatan di daerah. Perhitungan Indeks Kesehatan mulai tahun 2020 menggunakan data *Long Form* SP2020.

Tabel 2. 45 Indikator Urusan Kesehatan di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kesehatan	0,784	0,787	0,834	0,835	0,840	0,844
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	22,83	22,46	23	23	Data sudah tidak rilis BPS	-
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	91,45	89,81	98,40	234,70	93	-
4	Prevalensi stunting	32,70	26,9	-	23,5	19,2	-
5	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	83,42	91,15	90,3	88,50	91	-
6	Persentase RFT Rate Kusta	90	93,5	92,5	92,6	91,7	-
7	Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV	93	90,8	50	61	80,5	-
-8	<i>Treatment Succes Rate (TSR) Tuberculosis</i>	90	90	89,3	89,13	89,64	-

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	<i>Treatment Coverage Tuberculosis</i>	50	66	44,7	45,1	64	-
10	Junlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	38	38	38	38	38	-
11	Annual Parasite Incidence (API) Malaria (permil)	0,012	0,02	0,01	0,01	0,01	-

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Kinerja urusan kesehatan Provinsi Jawa Timur secara umum menunjukkan hasil yang baik. Capaian ini didukung dengan berbagai kebijakan program kesehatan salah satunya dengan bantuan pemenuhan tenaga kesehatan ke daerah dan kepulauan. Selain itu, diperlukan juga penguatan upaya promotif preventif sebagai langkah paling awal untuk dapat membawa masyarakat hidup lebih sehat.

Integrasi layanan primer dengan penguatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk kesehatan ibu, anak yang kemudian akan dikembangkan juga untuk segala umur siklus kehidupan diharapkan dapat meningkatkan kesehatan keluarga. Selain itu juga diperlukan pemenuhan dan pemerataan fasilitas layanan kesehatan dengan sistem rujukan yang terpadu.

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan program kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau probabilitas bayi meninggal sebe-

lum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Tingginya angka kematian bayi dipicu karena berat badan bayi lahir yang rendah, dibawah 2.500 gram. Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolannya, dan bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup. AKB dan AKI di Jawa Timur mengalami kenaikan pada saat pandemi covid-19 karena adanya pembatasan kunjungan pemeriksaan kehamilan sehingga penapisan ibu hamil risiko tinggi kurang maksimal. Selain itu, penyebab umum tingginya kasus tersebut diantaranya hipertensi, terjadi pendarahan, dan beresiko tinggi/4T (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu dekat, dan Terlalu banyak).

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pence-

gahan Stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk membebaskan setiap anak dari risiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Upaya pencegahan Stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas (Rumah Tangga 1000 HPK). Berdasarkan SSGI Tahun 2022, angka stunting Jawa Timur mengalami penurunan dari angka 23,5 di Tahun 2021 menjadi 19,2. Penurunan ini lebih baik dari proyeksi Bappenas Tahun 2022 dengan angka stunting 20,88. Bersamaan pencapaian ini, terdapat 24 Kabupaten/Kota yang telah berhasil mengalami penurunan angka stunting dan 14 Kabupaten/Kota mengalami kenaikan. Maka dapat kita sikapi bersama bahwa stunting bukan hanya menyasar pada balita beresiko namun juga perlu penyiapan bagi PUS (Pasangan Usia Subur), ibu hamil maupun bagi remaja putri sebagai penyiapan jangka panjang.

Salah satu upaya dalam menilai mutu pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit adalah dengan melalui akreditasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit, akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi. Pengaturan

akreditasi bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkelanjutan dan melindungi keselamatan pasien rumah sakit, meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di rumah sakit, dan rumah sakit sebagai institusi, meningkatkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dan mendukung program pemerintah di bidang kesehatan. Secara umum selama tahun 2018-2022 persentase Rumah Sakit di Jawa Timur telah menunjukkan peningkatan. Namun pada tahun 2021 nilai capaian akreditasi sebesar 88,50% dikarenakan pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan (SE Menkes No. HK.02.02/Menkes/455/2021), untuk kegiatan akreditasi RS dilakukan penundaan di masa pandemi COVID-19 sehingga untuk RS yang habis masa akreditasinya dan RS baru belum dapat berproses terakreditasi kembali.

Penyakit kusta merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang dapat menimbulkan kecacatan permanen, serta perubahan emosi dan psikis penderitanya. RFT (*Release From Treatment*) mengindikasikan keberhasilan pengobatan penderita kusta karena dengan berobat secara dini dan sampai tuntas merupakan upaya dalam memutus mata rantai penularan dan mencegah kecacatan karena kusta. Tantangan dalam keberhasilan

pengobatan kusta adalah rasa bosan karena harus minum obat setiap hari selama 6 bulan atau 12 bulan tergantung tipe kustanya dan efek samping dari salah satu obat yang dapat menyebabkan kulit menghitam (tidak permanen). Dalam kurun waktu 2018 – 2022 terjadi perkembangan yang fluktuatif terhadap persentase RFT kusta di Jawa Timur dan sudah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI sebesar > 90%.

Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV dan Persentase keberhasilan pengobatan TBC di Jawa Timur terus mengalami peningkatan sampai tahun 2019. Akan tetapi, tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 terjadi pandemi Covid-19 sehingga ada kekhawatiran pasien untuk datang ke layanan kesehatan.

Penyakit Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya. Penularan bakteri TBC melalui udara ketika pasien TBC batuk, bersin, maupun berbicara saat tidak menggunakan masker. Pasien TBC yang tidak mendapatkan pengobatan secara lengkap dan tuntas, rentan mendapat penyakit penyerta lainnya karena imunitas tubuh rendah dan juga berisiko mengalami kematian. Oleh sebab itu TBC masih menjadi masalah

kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi dan budaya. Pada tahun 2022, jumlah kasus TBC yang ditemukan di Jawa Timur sebanyak 78.799 kasus (73,3%). Penemuan kasus TBC mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kasus yang ditemukan pada tahun 2021 yaitu sebesar 43.247 kasus. Meskipun ada peningkatan capaian penemuan dan pengobatan TBC Provinsi Jawa Timur tahun 2022, namun belum mencapai target nasional 90% serta masih ada gap 9,56% antara capaian penemuan kasus TBC (73,3%) dan capaian pengobatan kasus TBC (63,74%). Oleh karena itu fasilitas kesehatan yang menemukan kasus TBC harus meningkatkan koordinasi dengan komunitas untuk melakukan pelacakan pada kasus TBC yang belum melakukan pengobatan.

Tujuan program pengendalian malaria di Indonesia adalah mencapai Eliminasi Malaria pada tahun 2030. Tahun 2018 di Jawa Timur 38 kabupaten/kota sudah mencapai Eliminasi Malaria. Capaian indikator kinerja selanjutnya yaitu Kesakitan malaria digambarkan dengan insidens malaria, dalam hal ini Annual Parasite Incidence (API) malaria merupakan angka kesakitan per 1000 penduduk berisiko dalam satu tahun atau indikator dalam menentukan endemisitas/tingkat penularan malaria di suatu daerah.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator terkait urusan pekerjaan umum di Jawa Timur meliputi kinerja jalan, jaringan irigasi, akses air minum, dan akses

sanitasi. Semua indikator tersebut mengalami peningkatan lebih baik setiap tahunnya.

Tabel 2. 46 Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Konektivitas	0,686	0,713	0,758	0,707	0,810
2	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	68,70	69,15	68,79	68,86	68,90
3	Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum layak	93,66	94,39	95,56	95,02 ₁₎	95,05 ₁₎
4	Persentase Cakupan Pelayanan akses sanitasi (air limbah) Layak	74,28	78,78	80,98	80,97 ₁₎	81,13 ₁₎
5	Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW	90	91	87,08 ₂₎	90,51 ₂₎	92,53 ₂₎

Sumber :

Nomor (1) : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Nomor (2) : Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

Nomor (3, 4) : BPS Provinsi Jawa Timur

Nomor (5) : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Keterangan:

1) : Terdapat perubahan data base jumlah rumah tangga

2) : Berdasarkan hasil perhitungan dengan penambahan komponen

Indeks konektivitas adalah indikator untuk mengukur kinerja Jalan Provinsi dalam menghubungkan pusat kegiatan dan/atau kabupaten/kota di Jawa Timur. Indeks konektivitas ini merupakan indeks komposit yang terdiri atas 3 variabel yakni Tingkat Pelayanan Jalan (*Level of Services*), jalan yang memenuhi persyaratan teknis, dan kondisi kemantapan jalan. Masing-masing variabel mempunyai tingkat dukungan yang berbeda tetapi memberikan pengaruh yang positif sehingga semakin tinggi nilai masing-masing variabel akan semakin tinggi nilai indeks konektivitas. Indeks Konektivitas

sampai tahun 2022 mencapai 0,810. Nilai tersebut didukung oleh pemenuhan persyaratan teknis jalan yang mencapai 62,57%, persentase kemantapan jalan provinsi yang mencapai 89,10%, serta persentase jalan dengan Rasio Volume Kendaraan (RVK) < 75 % yang mencapai 84,66%. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kedepannya akan tetap mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas penanganan jalan melalui pelebaran jalan menuju standar, pemeliharaan berkala jalan, dan pemeliharaan rutin jalan.

Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik di Jawa Timur pada

tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 secara perlahan mulai mengalami peningkatan dan melebihi target yang telah ditentukan. Peningkatan capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik pada Tahun 2022 tidak terlepas dari adanya upaya penanganan jaringan irigasi yang meliputi rehabilitasi fisik pada 34 (tiga puluh empat) Daerah Irigasi (DI) maupun peningkatan fungsi saluran melalui kegiatan operasi dan normalisasi pada 176 (seratus tujuh puluh enam) DI.

Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sampai dengan Tahun 2022 di Provinsi Jawa Timur mencapai 95,05 persen. Capaian tersebut berada di bawah target nasional yaitu sebesar 97,89 persen. Terdapat penurunan capaian pada tahun 2021 disebabkan karena adanya perubahan database jumlah rumah tangga yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik. Namun demikian, capaian tahun 2022 telah mengalami peningkatan dari capaian tahun 2021 sebesar 95,02 persen.

Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak (air limbah) Provinsi Jawa Timur 2022 telah meningkat yaitu capaiannya sebesar 81,13 persen, berada di bawah target yang diberikan Nasional yaitu sebesar 83,00 persen. Capaian layanan air limbah di Provinsi Jawa Timur didukung

dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan sarana prasarana sanitasi (air limbah) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pusat, inisiasi pengembangan sistem pengelolaan air limbah regional serta kerjasama dengan berbagai program terkait antara lain UNICEF, USAID IUWASH, dll. Upaya peningkatan akses sanitasi layak juga dilaksanakan secara terintegrasi melalui program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) serta program jambanisasi yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kodam V Brawijaya dan Lantamal V dimana dalam mewujudkan rumah layak huni, salah satu komponennya adalah ketersediaan jamban yang layak.

Pada sub urusan Penataan Ruang, peningkatan luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW menandakan bahwa terdapat peningkatan ketaatan stakeholder terhadap regulasi yang disusun oleh pemerintah daerah. Peningkatan ketaatan terhadap tata ruang tersebut didorong oleh pengoptimalan sumber daya manusia dan ketepatan waktu dalam penyelesaian evaluasi Izin Pemanfaatan Ruang. Namun demikian sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyusun revisi dokumen RTRW Tahun 2023-2043 dimana rancangan peraturan daerahnya sudah mendapatkan

persetujuan DPRD Provinsi Jawa Timur.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kegiatan yang bersifat multi sektor dan sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, dimana dalam penyelenggaraannya diharapkan masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis dan berkelanjutan.

Ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman meliputi drainase, persampahan, sanitasi, dan air bersih dan PSU merupakan komponen penting dalam mewujudkan hunian yang layak dan berkelanjutan

Tabel 2. 47 Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman yang Layak Huni	76,30	80,83	82,18	80,97	80,82
2	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni dan terjangkau	60,96	65,61	68,08	66,93	66,28

Sumber :

No (1) : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

No (2) : BPS Prov. Jatim

Keterangan: Jumlah rumah tangga mulai tahun 2021 menggunakan hasil SP2020

Dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar menjadi prasyarat utama. Indikator Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman yang Layak Huni memberikan gambaran tingkat pemenuhan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman dan terjangkau; akses air minum layak serta akses sanitasi (air limbah) yang layak di Provinsi Jawa Timur. Adapun kriteria hunian layak berdasarkan SDG's adalah kecukupan luas

bangunan, ketahanan bangunan, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak. Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman Layak Huni pada tahun 2022 telah mencapai 80,82 persen. Di sisi lain, capaian persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni pada tahun 2022 adalah 66,28 persen. capaian ini berada di bawah target yang telah ditetapkan Nasional sebesar 69,80 persen. Upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian infrastruktur dasar perumahan permukiman yang

layak huni adalah peningkatan akses layanan air minum layak melalui peningkatan kapasitas SPAM regional dan penanganan desa rawan kekeringan, peningkatan akses sanitasi layak melalui pembangunan IPAL komunal, dan peningkatan rumah tinggal layak huni yang bekerjasama dengan stakeholder lain.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang

Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, maka berdasarkan usulan SK Bupati /Walikota disepakati baseline untuk penanganan kawasan permukiman kumuh yaitu seluas 16.289,64 Ha. Dengan penanganan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2022 yaitu seluas 5.468,76 Ha, maka untuk penanganan selanjutnya adalah seluas 10.820,89 Ha.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Globalisasi dan teknologi informasi membawa perkembangan positif dalam meningkatkan kualitas pembangunan secara umum, namun terdapat beberapa hal negatif yang harus diberikan perhatian khusus. Salah satunya adalah munculnya isu yang berkembang di masyarakat, yang

dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus dalam menghadapinya, antara lain dengan melakukan fasilitasi terhadap integrasi bangsa, serta mencegah disintegrasi bangsa yang mengedepankan pemberdayaan.

Tabel 2. 48 Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Kejadian Poleksosbud terhadap tahun sebelumnya	67,77	80,42	93,04	77,57	75,90	
2	Persentase penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	-	-	-	99,47	99,57	100,55
3	Indeks Kapasitas Daerah	0,49	0,54	0,57	0,60	0,63	0,65
4	Jumlah Desa Tangguh Bencana	591	804	1015	1270	1500	1745*)

Sumber :

No (1) : Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur

No (2) : Satpol PP Provinsi Jawa Timur

No (3,4) : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

Keterangan:

**) merupakan capaian akumulasi destana di Jawa Timur ditambah dengan destana yang dibentuk melalui sumber dana lain-lain sejumlah 88 desa/kelurahan (data dihimpun tahun 2023)*

Persentase kejadian poleksosbud terhadap tahun sebelumnya merupakan perbandingan antara jumlah kejadian terkait poleksosbud pada tahun berjalan (n) dengan jumlah kejadian terkait poleksosbud tahun sebelumnya (n-1). Jumlah kejadian terkait poleksosbud adalah jumlah data kejadian yang menonjol berlatarbelakang politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang mempunyai potensi untuk menyebabkan konflik terbuka, atau mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di Provinsi Jawa Timur, yang berhasil dihimpun dalam 1 (satu) tahun. Dari rentang tahun 2018-2022 kejadian-kejadian pol-eksosbud tiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini ditunjukkan dengan capaian persentase kejadian tersebut yang setiap tahunnya tidak melebihi 100 persen sehingga menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersinergi dengan aparat terkait dalam menekan kejadian poleksosbud di Jawa Timur dari tahun ke tahun dan akan tetap dilaksanakan di tahun selanjutnya.

Persentase penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan suatu indikator kinerja sebagai bentuk pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Jawa Timur, yang diperoleh dari hasil rata-rata pengukuran secara kuantitatif atas perbandingan data realisasi dengan target yang telah ditentukan pada kegiatan :

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum)
2. Penegakan peraturan daerah (Perda)/peraturan kepala daerah (Perkada)
3. Keterlibatan anggota Pelindungan masyarakat (Linmas) dalam Linmas
4. Peningkatan SDM
5. Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran

Realisasi kinerja diatas menggambarkan upaya menciptakan kondisi tenteram, tertib, dan teratur melalui kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan data realisasi kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat peningkatan realisasi kinerja pertahunnya yang diperoleh dari realisasi di setiap indikator kinerja program secara keseluruhan telah melampaui target dan terjadi peningkatan dari sisi kuantitas pelaksanaan kegiatan.

Indeks Kapasitas Daerah menggambarkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan merupakan

salah satu komponen dalam perhitungan indeks risiko bencana (IRB). Klasifikasi Indeks Kapasitas adalah: (a) Tinggi ($>0,66$); (b) Sedang ($0,33 - 0,66$); (c) Rendah ($<0,33$).

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan bencana yang merupakan salah satu upaya mitigasi bencana telah dilaksanakan pembentukan desa tangguh bencana (destana) pada desa rawan bencana bertujuan untuk mengurangi resiko bencana dengan pendekatan kepada masyarakat. Pembentukan destana dilaksanakan melalui dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota serta sumber pendanaan lainnya seperti lembaga internasional maupun secara mandiri. Sampai dengan tahun 2023, telah terbentuk 1745 Destana di Jawa Timur. Di antara total jumlah destana tersebut, destana yang

dibentuk melalui APBD Provinsi adalah sejumlah 164, 43, dan 63 Desa/Kelurahan pada tahun 2018, 2019, dan 2020 secara berurutan. Kemudian pembentukan Destana melalui APBD Provinsi pada tahun 2021 sampai dengan 2023 yaitu sejumlah masing-masing 40 Desa/Kelurahan pada setiap tahunnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya mendorong peningkatan desa tangguh bencana antara lain: penyusunan kajian resiko dan rencana aksi, pembantuan Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) level desa, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) evakuasi dan peringatan dini serta pembekalan dan pelatihan Perolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), Dapur Umum (DU) dan Rescue Dasar.

6. Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Masalah PPKS khususnya

anak jalanan, gepeng, gelandangan psikotik dan WTS kesemuanya membutuhkan perhatian yang intensif dan segera agar tidak berkembang makin mencemaskan. Sejak situasi krisis, perkembangan PPKS jalanan yakni anak jalanan, gelandangan, gelandangan psikotik, pengemis, dan Wanita Tuna Susila atau PSK (Pekerja Seks Komersial) secara kualitatif semakin mengkhawatirkan.

Tabel 2. 49 Indikator Urusan Sosial di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase PPKS yang Mandiri	1,19	1,20	1,26	1,29	1,30
2	Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1,41	1,25	1,32	1,30	1,25
3	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar dan Pulihnya Keberfungsian Sosial PPKS	-	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Kinerja urusan sosial setiap tahunnya menunjukkan hasil yang baik. Untuk mendukung program pemerintah penanganan PPKS yang inklusif, selain kebijakan kesejahteraan, juga diarahkan kepada kemandirian PPKS. Dari kebijakan ini diharapkan PPKS dapat keluar dari beban kemiskinan. Kemandirian PPKS dapat dilakukan melalui pemberdayaan sosial,

pelatihan dan keterampilan, permodalan dan dukungan lingkungan sosial yang kondusif. Berbagai Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan PPKS antara lain dengan memberikan pembinaan, bantuan maupun perlindungan, sehingga PPKS dapat hidup secara normal.

2.4.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Untuk mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja yang

dapat diserap oleh pasar kerja, ukuran yang digunakan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja.

Tabel 2. 50 Indikator Urusan Ketenagakerjaan di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,56	69,61	70,33	70,00	71,23	72,56
2	Tingkat Kesempatan Kerja						

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan. Semakin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada tahun 2023 terdiri dari 22,70 juta orang bekerja dan 1,17 juta orang menganggur. Berdasarkan jenis kelamin, baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Meski demikian, masih terdapat perbedaan mencolok diantara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Pada tahun 2023, TPAK laki-laki sebesar 85,90 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 59,46 persen.

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) hanya menunjukkan jumlah angkatan kerja, baik yang sedang mencari

pekerjaan maupun yang telah bekerja dibandingkan dengan seluruh penduduk usia produktif di suatu wilayah. Indikator TPAK belum dapat menunjukkan secara spesifik jumlah penduduk bekerja dalam angkatan kerja di suatu wilayah. Pada penetapan kebijakan ketenagakerjaan hingga tahun 2023, indikator TPAK belum dapat mewakili kondisi kesempatan kerja di Jawa Timur. Untuk itu, pada periode selanjutnya penggunaan indikator TPAK digantikan dengan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator TKK mengindikasikan secara spesifik besarnya angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi TKK, maka kesempatan kerja di wilayah tersebut semakin tinggi.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks ketimpangan gender (IKG) adalah indikator baru yang menyempurnakan indikator ketimpangan gender sebelumnya dan disusun berdasarkan dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. IKG menunjukkan kerugian potensial dalam capaian pembangunan manusia karena ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Nilai IKG

berkisar 0-1, semakin kecil IKG menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah (kesetaraan yang semakin tinggi). Indeks ketimpangan gender di Jawa Timur sejak tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren menurun. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik. Penurunan IKG tahun 2022 dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan. Perbaikan dimensi

kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan indikator wanita melahirkan tidak di fasilitas kesehatan yang turun, sedangkan perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas yang

meningkat lebih tinggi dibanding laki-laki. Dalam rangka menurunkan ketimpangan gender maka dilakukan peningkatan partisipasi perempuan melalui pelatihan ketrampilan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum

Tabel 2. 51 Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Ketimpangan Gender	0,483	0,476	0,449	0,460	0,440
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	67,93	71,8	72,25	64,59	66,1
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 penduduk perempuan	-	-	-	4,37	4,67

Sumber :

No (1) : BPS Provinsi Jawa Timur

No (2, 3) : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang dapat menunjukkan komitmen daerah dalam melakukan perlindungan anak. Indikator Perlindungan Anak di dukung 5 klaster sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA) meliputi: (1). Hak Sipil dan Kebebasan, (2). Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan

Alternatif, (3). Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, (4). Hak Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang serta (5). Hak Perlindungan Khusus Anak. Sehingga pelaksanaan perlindungan anak tidak lagi dilakukan secara sektoral, namun harus dikoordinasikan dan dilakukan secara terpadu dan holistic oleh semua Perangkat Daerah terkait sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan.

Penangan perempuan korban kekerasan adalah jumlah kasus yang lapor dan ditangani oleh unit pelayanan. Kenaikan rasio kekerasan terhadap Perempuan menunjang

jukkan indikasi tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah khususnya terkait dengan layanan korban kekerasan. Selain itu juga, sebagai

3. Pangan

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi penyanga pangan Nasional. Surplus komoditi pangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Provinsi lainnya di Indonesia, disamping untuk stok/cadangan pangan Nasional. Sebagai Provinsi lumbung pangan, Jawa Timur masih perlu melakukan pemantapan ketersediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan ditingkat wilayah dan rumah tangga. Pada tahun 2022, terdapat kenaikan cadangan pangan Jagung dan Kedelai di Jawa Timur, sedangkan untuk cadangan pangan Beras (padi) pada tahun 2022 terjadi penurunan karena terdapat penyesuaian kapasitas cadangan pangan Beras oleh Bulog wilayah Jawa Timur, dimana pada tahun 2021 terdapat dinamika penyediaan dan kapasitas oleh Bulog wilayah Jawa Timur sehingga tertahan dan tercatat lebih tinggi di akhir tahun 2021 oleh BPS. Adapun demikian dinamika yang terjadi tidak banyak mempengaruhi kondisi ketahanan pangan karena hanya berupa dinamika sementara saja di tahun

keberhasilan sosialisasi meningkatnya kesadaran Masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan sehingga kekerasan tidak berulang kembali.

2021 dan kembali pada angka normal di tahun 2022.

Skor Pola Pangan Harapan (Indeks PPH) adalah skor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pola makan suatu populasi sesuai dengan pedoman gizi yang diharapkan. Skor ini mencerminkan sejauh mana kebiasaan makan suatu kelompok mencapai target standar gizi yang diharapkan sesuai norma kesehatan. Skor PPH Jawa Timur berada pada kisaran angka poin 85-92 dan nilai update terakhir pada tahun 2022 mencapai 92,8 menunjukkan bahwa konsumsi pangan di Jawa Timur relatif baik dan mencerminkan adanya keragaman pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat. Angka yang tinggi pada skor PPH juga dapat menunjukkan bahwa masyarakat di Jawa Timur cenderung memilih makanan yang sehat dan bergizi serta memperhatikan ragam makanan dalam pola konsumsi mereka.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Jawa Timur menunjukkan tren yang terus meningkat. IKP Jawa Timur termasuk dalam

kategori yang tinggi (> 75,68). Dari aspek ketersediaan Jawa Timur memiliki tingkat ketahanan yang tinggi dengan indikasi nilai Indeks Ketersediaan di atas 90. Tantangan yang masih dihadapi adalah pada aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pada aspek keterjangkauan pangan indikator

yang digunakan sebagai proksi perhitungan adalah persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik.

Tabel 2. 52 Indikator Urusan Pangan di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Ketersediaan Pangan (Ton)					
	a. Beras	6.002.140	5.503.726	5.618.101	7.160.483	6.301.918
	b. Jagung	5.798.473	5.923.567	6.131.163	6.383.661	6.552.943
	c. Kedelai	225.987	110.666	344.998	978.088	1.432.103
2	Pola Pangan Harapan (PPH)	85,0	92,5	91,2	85,6	92,8
3	Indeks Ketahanan Pangan	-	73,71	79,9	79,7	79,85

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Badan Pangan Nasional

4. Pertanahan

Kinerja urusan pertanahan diukur melalui indikator persentase kasus sengketa yang termediasi. Indikator tersebut merupakan cerminan dari terlak-sananya Urusan Bidang Pertanahan dimana pemerintah provinsi menerima permohonan kasus sengketa yang selanjutnya dapat dilakukan mediasi. Pada Tahun 2021 sampai 2022 terdapat 23 surat permohonan penyelesaian sengketa yang ditujukan kepada Gubernur dan 3 surat permohonan

yang ditujukan ke Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Timur. Dari jumlah tersebut yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebanyak 3 surat permohonan yang ditujukan kepada Tim GTRA Provinsi dan 2 surat permohonan penyelesaian sengketa yang ditujukan kepada Gubernur, sehingga yang dapat dilakukan fasilitasi berupa mediasi/rapat koordinasi yakni sebanyak 5 kasus sengketa.

5. Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, IKLH merupakan nilai

komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Tabel 2. 53 Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,96	56,13	56,13	53,37	56,13
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,50	83,32	84,59	83,68	84,28
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	63,56	63,16	63,72	47,36	47,36
4	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	-	-	-	82,46	85,45

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

IKA, IKU, IKL, maupun IKAL Provinsi Jawa Timur cenderung dinamis namun pada 2 (dua) tahun terakhir cenderung meningkat. Secara khusus, untuk Indeks Kualitas Lahan (IKL) masih berada dalam kategori kurang. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lahan dan hutan yang mencakup alih fungsi lahan, deforestasi, kebakaran, dan lahan kritis. Selain IKL, untuk indikator lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah IKA seiring dengan tingginya potensi pencemaran sumber air oleh aktivitas masyarakat terutama pada ruas-ruas sungai yang melintasi daerah padat penduduk.

Beberapa upaya perlindungan dan pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diantaranya adalah pembangunan

Pusat Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 (PPSLB3) di Kabupaten Mojokerto, penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Regional, rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan, Program Kampung Iklim (PROKLIM), Perlindungan Mata Air (PERMATA), Desa BERSERI (Bersih dan Lestari), adiwiyata, eco pesantren, kalpataru serta pembinaan pengelolaan lingkungan hidup pelaku usaha/kegiatan.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup selain diukur melalui komponen penyusunnya yaitu air, udara, tutupan lahan, dan air laut juga perlu mempertimbangkan kondisi terkini terkait dengan perubahan iklim sebagai tantangan. Perubahan iklim yang diindikasikan dengan kenaikan temperatur, curah hujan ekstrem, kenaikan muka air

laut, serta badai yang lebih intens sudah mulai terasa dampaknya. Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK), yaitu CO₂, CH₄, N₂ dan CFC akibat aktivitas manusia merupakan penyebab terjadinya perubahan iklim. Pasca UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) pada COP (*Conference of The Parties*) ke 21 di Paris terdapat perubahan target nasional penurunan emisi GRK dari 26% dengan usaha sendiri pada Tahun 2020 menjadi 29% pada Tahun 2030.

Pada tahun 2022 Provinsi Jawa Timur memiliki kontribusi emisi sebesar 99.456.908,72 ton CO₂ eq. Hasil tersebut merupakan proyeksi jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di udara dengan skema *Business as Usual* (BAU) berdasarkan hasil kaji ulang Baseline Emisi GRK Tahun 2022. Capaian penurunan emisi total GRK

Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018– 2022 dari 6 (enam) sektor, yaitu pertanian, kehutanan, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah, serta kawasan pesisir dan kelautan adalah sebesar 17.231.784,88 ton CO₂eq. Sedangkan persentase capaian penurunan emisi GRK Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sesuai dengan target penurunan emisi GRK tahun 2030 hasil kaji ulang adalah sebesar 7,48%. Persentase capaian penurunan emisi GRK paling tinggi berasal bidang pertanian dan telah melampaui target penurunan emisi GRK dengan persentase capaian sebesar 3,30% sedangkan target penurunan emisinya 1,27%. Salah satu aksi mitigasi pada bidang pertanian yang memiliki kontribusi paling besar dalam penurunan emisi GRK adalah Penerapan Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Komoditi Padi.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Seiring dengan pentingnya kepemilikan identitas berupa e-KTP, maka sejak tahun 2013 di Provinsi Jawa Timur penerapan e-KTP sudah meliputi 38 Kabupaten/Kota. Hasil perekaman KTP elektronik di 38 Kabupaten/Kota terus menunjukkan peningkatan meskipun mengalami penurunan pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yakni

sebesar 99,95 persen tetapi turun di tahun 2021 menjadi 99,84 tetapi naik kembali di tahun 2022 menjadi 100,91. Saat ini pelayanan e-KTP maupun Kartu Keluarga (KK) sudah dipermudah, karena penduduk dapat mengu-rusnya di kantor kecamatan setempat.

Persentase lembaga yang memanfaatkan data kependudukan diperoleh berdasarkan lembaga yang telah melakukan perjanjian kerjasama atau berita

acara serah terima untuk mendapatkan akses pemanfaatan data kependudukan. Dalam peningkatan perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima dengan lembaga maka dilakukan advokasi kepada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pelayanan

adminis-trasi kependudukan sehingga diperoleh data yang akurat dan sosialisasi kepada lembaga tentang pentingnya pemanfaatan data administrasi kependudukan untuk perencanaan pembangunan.

Tabel 2. 54 Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Penduduk ber KTP	99,98	99,47	99,95	99,84	100,91
2	Persentase lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	-	-	-	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jatim

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Salah satu permasalahan di Jawa Timur adalah masih tingginya penduduk miskin di pedesaan. Persentase penduduk miskin di Jawa Timur jika ditinjau menurut daerah, wilayah pedesaan persentase penduduk miskinnya cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah Jawa Timur untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya, baik dari segi peningkatan kinerja perekonomian maupun upaya pemerataan pembangunan khususnya di wilayah pedesaan. Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan pedesaan, maupun tingkat kemiskinan secara umum dengan berkelanjutan.

Masih tingginya angka penduduk miskin di pedesaan didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang kurang beragam dengan jumlah yang minim menjadi hambatan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang cukup bagi masyarakat di pedesaan. Sebagian besar masyarakat miskin pedesaan bekerja di sektor pertanian, utamanya sebagai buruh tani. Kondisi tersebut juga memiliki sebab-akibat dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di pedesaan. Sementara itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih memilih untuk berpindah menuju wilayah perkotaan (urbanisasi) dengan

ekspektasi kesempatan kerja yang lebih besar dan pendapatan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, tingginya angka penduduk miskin di perdesaan juga disebabkan karena kurang optimalnya fungsi desa untuk mendukung perkembangan perekonomian desa. Peran dan fungsi dari BUMDesa/BUMDesMa dan Lembaga Masyarakat Desa (LKD) masih belum optimal untuk mendukung optimalisasi potensi desa, serta memfasilitasi perkembangan usaha ekonomi masyarakat desa. Dengan demikian diperlukan program pemberdayaan baik bagi desa, dalam hal ini BUMDesa

/BUMDesMa dan LKD, maupun bagi usaha-usaha ekonomi masyarakat desa secara langsung.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), desa tertinggal dan sangat tertinggal di Jawa Timur hanya 1 desa di tahun 2020 dan pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal di Jawa Timur, hal ini menandakan bahwa kinerja Provinsi Jawa Timur semakin baik dalam mengurangi desa tertinggal dan sangat tertinggal. Seiring dengan hal tersebut, persentase desa mandiri setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2022.

Tabel 2. 55 Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Penduduk Miskin Pedesaan	15,21	14,16	15,16	13,79	13,90
2	Persentase Desa Mandiri	0,89	2,21	4,3	9	19,30

Sumber :

No (1) : BPS Provinsi Jawa Timur

No (2) : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan Desa Mandiri adalah:

- a. Memfokuskan sebagian besar sasaran kegiatan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada lokasi Desa berstatus belum Mandiri;
- b. Optimalisasi Dana Desa untuk mendukung peningkatan status kemandirian desa;
- c. Intervensi Program Khusus Percepatan Penanggulangan Kemiskinan difokuskan pada lokasi Desa berstatus belum Mandiri; dan
- d. Mensosialisasikan Pembentukan / Peningkatan optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Desa khusus pada lokasi Desa berstatus belum Mandiri.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana merupakan sebuah program pemerintah yang dicanangkan untuk menekan angka kelahiran yang semakin hari semakin tinggi. Tujuan Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan

menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Sementara itu, Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan satu cara atau alat kontrasepsi.

Tabel 2. 56 Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Total Fertility Rate	-	-	-	2,21	2,00
2	Persentase Cakupan KB aktif	76,17	75,72	75,55	75,65	67,24
3	Persentase Drop Out KB	16,34	16,45	16,73	19,17	-
4	Persentase Jumlah kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (<i>un-met need</i>)	10,02	10,03	9,52	14,90	19,69
5	Angka Fertilitas Menurut Umur/ <i>Age Specific Fertility Rates (ASFR)</i>	30	30,35	31	21,07	27,8

Sumber : Radalgram BKKBN

Urusan pengendalian penduduk dan KB masih perlu mendapatkan perhatian di Jawa Timur karena berdasarkan indikator kinerja selama tahun 2018-2022 menunjukkan hasil yang kurang bagus. Masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya menggunakan alat kontrasepsi, namun belum yakin terhadap kontrasepsi modern sehingga lebih memilih kontrasepsi tradisional.

Capaian TFR yang sudah mencapai angka 2 poin menunjukkan angka yang ideal yang berarti setiap keluarga memiliki 2 anak sehingga jumlah

penduduk akan tetap stabil. Di tahun 2022, wanita yang berusia 15-19 tahun, dalam satu tahun rata-rata akan melahirkan 27 - 28 bayi untuk setiap 1.000 wanita. Hal ini disebabkan peningkatan kasus perkawinan anak sehingga berdampak pada meningkatnya angka kelahiran remaja (ASFR). Untuk meningkatkan kepesertaan KB khususnya pada fasilitas Kesehatan dan pencegahan perkawinan anak perlu dilakukan peningkatan advokasi dan sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga Masyarakat.

9. Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2032, sasaran dalam Tatrabil adalah terwujudnya sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani

perpindahan orang dan/atau barang antar simpul atau kota wilayah, dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya. Indikator terkait urusan perhubungan di Jawa Timur adalah Indeks Aksesibilitas.

Tabel 2. 57 Indikator Urusan Perhubungan di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Aksesibilitas	51,80	51,90	52,52	53,20	76,17

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Indikator Indeks Aksesibilitas di Provinsi Jawa Timur merupakan agregat dari indikator layanan pada seluruh sektor perhubungan meliputi pelayanan angkutan darat, pelayanan angkutan kereta api, pelayanan angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), pelayanan angkutan laut dan pelayanan angkutan udara. Pada tahun 2022 digunakan metode perhitungan baru yang mencakup layanan Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).

Indeks Aksesibilitas pada tahun 2022 mencapai 76,17 atau meningkat sebesar 22,97 poin dari tahun 2021. Capaian tersebut didukung oleh indeks kinerja angkutan jalan dan indeks kinerja ASDP. Indeks kinerja angkutan jalan tahun 2022 mencapai 0,884 dengan 152 trayek terlayani. Indeks Kinerja ASDP pada tahun 2022 sebesar 0,477, dengan 14 trayek

trayek lintas penyeberangan yang terdiri dari lintas pelayanan dalam provinsi, yaitu Paciran-Bawean, Gresik-Bawean, Ujung-Kamal, Jangkar-Raas, Jangkar-Kalianget, Jangkar-Sapudi, Jangkar-Kangean, Kalianget-Sapudi, Kalianget-Raas, Kalianget-Kangean, dan lintas antar provinsi, yaitu Ketapang-Gilimanuk, Paciran-Bahaur (Kalimantan Tengah), Paciran-Garongkong (Sulawesi Selatan), dan Jangkar-Lembar (Nusa Tenggara Barat).

Angka kecelakaan lalu lintas jalan di jalan provinsi pada tahun 2022 sebesar 31.924 kejadian atau meningkat sebesar 50,10% dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2022 sebesar angka kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang adalah sebesar 59 kejadian atau meningkat sebesar 37,21% dibandingkan dengan tahun 2021. Sebagai upaya mereduksi angka kejadian kecelakaan tersebut

dilakukan pemenuhan fasilitas ke-lengkapan jalan secara berkala hingga pada tahun 2022 telah terpenuhi sebesar 46,91%. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa

10. Komunikasi dan Informatika

Reformasi birokrasi dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE. Di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Timur juga berupaya meningkatkan kese-lamatan di perlintasan sebidang kereta api melalui pemeliharaan *early Warning System* (EWS).

ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2. 58 Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks SPBE	2,92	3,10	3,40	2,82	3,30

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Timur adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Eletronik. Dimana pada aspek ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kelebihan pada layanan administrasi pemerintahan yang meliputi perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, pengelolaan BMN, dan pengawasan internal telah saling terintegrasi dengan penggunaan aplikasi umum yang berbagi pakai, sehingga menjadi kekuatan bagi Pemprov Jawa Timur. Selain itu pada aspek

layanan publik berbasis online, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki Layanan pengaduan layanan publik, serta layanan dokumentasi dan informasi hukum yang mengakomodir fitur transaksional dan terintegrasi. Selanjutnya Layanan publik unggulan seperti implementasi e-Samsat, JOSS, dan PPDB telah bersifat transaksional serta terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi terkait, dan telah dilakukan pengembangan aplikasi layanan secara berkelanjutan, dimana keseluruhan aspek tersebut mejadi kekuatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penerapan SPBE.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Hasil survei perhitungan Nilai Tambah K-UMKM setiap tahun menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur mengalami kontraksi -3,31 persen pada tahun 2020. Meskipun dipengaruhi oleh pandemi COVID-

19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi, namun seiring stabilitas perekonomian yang semakin me-ningkat, kondisi tersebut menunjukkan perbaikan pada tahun 2021 dan 2022.

Tabel 2. 59 Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pertumbuhan PDRB Koperasi dan UMKM	5,50	5,78	-3,31	8,84	7,19

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Salah satu langkah reformasi perkoperasian yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dilakukan melalui pemetaan ulang koperasi aktif dan tidak aktif yang difokuskan pada rehabilitasi koperasi. Melalui upaya pemulihan

tersebut diharapkan mampu merubah paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi pendekatan Kualitas dan semakin mengarah pada digitalisasi koperasi.

Tabel 2. 60 Keragaan Koperasi di Jawa Timur

No	Uraian	Satuan	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
1	Total Koperasi	Unit	35.583	36.417	37.283
	Koperasi Aktif	Unit	22.450	22.848	22.979
	Koperasi Tdk Aktif	Unit	13.133	13.569	14.304
2	Koperasi bersertifikat	Unit	10.493	13.245	13.486
3	Anggota	Org/Kop	3.925.385	3.820.616	4.124.803
4	RAT	Kop	13.357	11.126	12.385
5	Manager	Orang	2.681	2.222	2.219
6	Karyawan	Orang	177.915	146.342	42.072
7	Modal Sendiri	Rp.000	14.073.006.896	20.841.516.203	22.384.253.074.439
8	Modal Luar	Rp.000	14.571.593.288	24.595.689.632	19.373.786.370.804
9	Total Asset	Rp.000	32.623.359.517	47.906.481.684	41.758.039.445.243
10	Volume Usaha	Rp.000	34.920.954.707	32.560.604.622	32.713.391.891.034
11	S H U	Rp.000	1.314.928.525	1.208.070.334	1.299.768.774.208

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

12. Penanaman Modal

Selama 5 Tahun terakhir realisasi investasi Jawa Timur menunjukkan tren positif. Peningkatan signifikan terjadi di tahun 2022, yang meningkat 38,8% dibanding tahun 2021. Dalam kurun waktu tersebut investasi di Jawa Timur didominasi Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN) dan terus tumbuh kecuali pada tahun 2021 namun secara total investasi (PMDN dan PMA) mengalami kenaikan. Sampai dengan bulan September 2023, realisasi investasi di Jawa Timur mencapai Rp. 100,1 Triliyun.

Tabel 2. 61 Indikator Urusan Penanaman Modal di Jawa Timur

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Jan-Sept)
PMA (Triliyun Rupiah)	17,9	13	22,6	27	44,9	45,8
PMDN (Triliyun Rupiah)	33,3	45,5	55,7	52,5	65,4	54,2
Nilai Realisasi Penanaman Modal (Triliyun Rupiah)	51,2	58,5	78,3	79,5	110,3	100,1

Sumber : Kementerian Investasi/BKPM RI

Hasil perhitungan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi selama 5 tahun terakhir ICOR Jawa Timur lebih rendah dibanding Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa investasi di Jawa Timur lebih efisien daripada rata-rata nasional dan realisasi investasi menunjukkan trend positif.

Dalam mendukung peningkatan investasi di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh amanat Presiden Republik Indonesia dalam

mempercepat pembangunan wilayah Jawa Timur, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No.80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan, dan Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Percepatan tersebut dilakukan melalui proyek proyek strategis yang diharapkan dapat mendukung pembangunan di Jawa Timur dengan fokus pembangunan kewilayahan

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta berperan penting untuk memetik bonus demografi. Keberhasilan pembangunan pemuda dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Dalam kerangka penyusunan IPP, aspek-aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain. Kelima domain tersebut adalah (i) domain pendidikan, (ii) domain kesehatan dan kesejahteraan, (iii) domain lapangan dan kesempatan kerja, (iv) domain partisi-pasi dan kepemimpinan, serta (v) domain gender dan diskriminasi.

Jumlah atlet berprestasi di Jawa Timur setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, namun tahun 2020 tidak ada atlet berprestasi karena tidak terselenggaranya event-event olahraga yang disebabkan oleh Dampak Pandemi Covid 19 dan adanya regulasi atau

surat edaran dari Kemenpora RI Nomor: 6.11.1/ MENPORA /VI/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan Dalam Mendukung Keberlangsungan Pemulihan Kegiatan Melalui Adaptasi Perubahan Pola Hidup dalam Tatanan Normal Baru.

Pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda merupakan aktor dalam pembangunan. Perkembangan Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi diharapkan dapat juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu wujud partisipasi pemuda berperan aktif dalam pembangunan.

Tabel 2. 62 Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	53,17	52,50	53,00	53,50	56,33
2	Jumlah Atlet Berprestasi Nasional Dan Internasional	1.085	1.300	0	500	840
3	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi	16,34	17,83	17,92	17,96	19,48

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

14. Statistik

Indeks Pembangunan Statistik merupakan indikator baru untuk mengukur capaian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Data Statistik Sektorial baik di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Terdapat lima domain dalam perhitungan indeks pembangunan statistic, yaitu prinsip SDI, kualitas data, proses bisnis statistic, kelembagaan, dan statistic nasional. Berdasarkan uji coba perhitungan indeks pembangunan statistik yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur mendapatkan angka 2,83 dari skala 1-5. Capaian ini didukung dengan adanya komitmen

15. Persandian

Capaian persentase informasi persandian yang diamankan selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini didukung oleh adanya peningkatan kesadaran Perangkat Daerah tentang keamanan informasi meskipun masih sangat minim jika berpedoman kepada Indeks KAMI (Keamanan Informasi), bahkan seringkali aplikasi Pemerintahan merupakan aplikasi yang rentan pada serangan hacker, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM pada masing-masing perangkat daerah yang menangani tentang teknologi informasi mengenai pentingnya upaya pencegahan insiden cyber. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk GOV CSIRT (Computer Security Incident

kerjasama antara Dinas Kominfo selaku walidata bersama dengan Bappeda dan BPS Provinsi Jawa Timur selaku Pembina data untuk mendukung Satu Data Jawa Timur. Dengan adanya kolaborasi tersebut, Satu Data Jawa Timur dapat tercapai lebih cepat, terutama dengan adanya pemanfaatan dan pengembangan teknologi dalam aplikasi SATA yang berbasis *Big Data* dan memanfaatkan IoT serta teknologi AI sehingga dapat menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan yang efisien dan tepat sasaran, serta mendukung penerapan *e-government* Jawa Timur.

Response Team) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/26/KPTS/013/2020 tentang Tim Respon Insiden Keamanan Komputer Provinsi Jawa Timur, dan merupakan Provinsi pertama yang telah membentuk dan melaunching GOV CSIRT. Urusan persandian dan keamanan informasi dapat mengoptimalkan pengamanan informasi elektronik dan non elektronik yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan memanfaatkan JatimProv-CSIRT yang terbentuk tahun 2020. Dalam mendukung keamanan siber, Provinsi Jawa Timur sedang menyusun Peraturan Gubernur terkait sistem manajemen keamanan informasi.

Tabel 2. 63 Persentase Informasi Persandian yang Diamankan

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	243	-	-	-	493	548

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur

16. Kebudayaan

Melalui pembangunan lingkungan dan iklim yang mendukung keberlanjutan warisan budaya serta promosi identitas lokal, masyarakat dapat berkembang dengan tetap memegang nilai-nilai budayanya. Terdapat 3 aspek kunci dalam kebudayaan yang diharapkan mampu menjaga relevansi dan keberlanjutan budaya di tengah-tengah perubahan zaman yaitu Pertama, Jumlah Warisan Budaya

yang menunjukkan komitmen wilayah dalam melindungi dan mengakui keberagaman budaya, Kedua, Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan yang mencerminkan keberhasilan upaya pelestarian serta Ketiga, Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan yang mencerminkan investasi dan upaya dalam memajukan keberagaman budaya.

Tabel 2. 64 Indikator Urusan Kebudayaan di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Warisan Budaya yang Ditetapkan	-	-	22	20	20
2	Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan	2	10,58	8,78	9,62	2,14
3	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	5,65	5,45	5,99	7,72	10,09

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Terdapat 11 (sebelas) cagar budaya yang masuk dalam pemeringkatan Jawa Timur dan naik dari 514 cagar budaya pada tahun 2021 menjadi 525 cagara budaya pada tahun 2022. Realisasi

persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan adalah 10,09 persen atau terdapat 84 jenis seni dan 36 karya seni baru yang merupakan bagian dari objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan menjadi 554 OPK.

17. Perpustakaan

Berdasarkan hasil kajian Perpusnas, Indeks Kegemaran Membaca Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan peningkatan dalam frekuensi membaca, durasi membaca, dan jumlah bahan bacaan di masyarakat. Pemerintah Jawa Timur juga aktif dalam mendekati masyarakat dengan menyediakan lebih banyak dan

beragam bahan bacaan. Upaya lainnya melibatkan kegiatan promosi, publikasi, pameran, serta mobil perpustakaan keliling. Pemerintah juga mendorong pembentukan sudut baca, taman bacaan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan perpustakaan dengan memberikan akses 24 jam melalui perpustakaan digital atau e-library.

Tabel 2. 65 Indikator Ursan Perpustakaan di Jawa Timur

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Kegemaran Membaca	39,69	62,65	63,96	64,20	68,54	69,78

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

18. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan).

Capaian Indeks Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Timur diperoleh dari nilai pengawasan eksternal sebesar 60% ditambah nilai pengawasan internal sebesar 40%. Pengawasan eksternal kearsipan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Provinsi Jawa Timur terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sedangkan pengawasan internal Kearsipan dilakukan di perangkat daerah di lingkungan provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2022 hasil Indeks Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Timur naik sebesar 91,44 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota di Jawa Timur semakin baik dalam pengelolaan (tertib) arsip. Peningkatan Indeks Penyelenggaraan Kearsipan didukung oleh bertambahnya

sumber daya manusia kearsipan, arsiparis maupun pengelola kearsipan baik di lembaga kearsipan kabupaten/kota maupun perangkat daerah provinsi; Peraturan/pedoman teknis

kearsipan yang sudah ditetapkan; Pengelola arsip statis dengan disusunnnya sarana bantu temu balik arsip statis dan Pengelolaan arsip dinamis, khususnya dalam penyusunan arsip.

Tabel 2. 66 Indikator Ursan Kearsipan di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	88,18	76,70	81,42	82,59	91,44

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

2.4.1.3. Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Pariwisata dianggap sebagai sektor yang memiliki potensi besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mendukung sektor lainnya. Data PDRB Pariwisata di Jawa Timur, berdasarkan survey di 38 kabupaten/kota, menunjukkan bahwa pariwisata memainkan peran strategis dalam perkembangan ekonomi daerah.

Meskipun menghadapi kendala selama Pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan wisatawan mancanegara, pada tahun 2022 Jawa Timur berhasil mengatasi tantangan tersebut dan mencatat pertumbuhan PDRB pariwisata sebesar 13,53 persen dengan kontribusi pariwisata sebesar 5,65 persen.

Tabel 2. 67 Indikator Urusan Pariwisata di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur (%)	5,86	6,00	5,64	5,62	5,65
2	Pertumbuhan PDRB Pariwisata (%)	6,83	6,92	-9,60	6,33	13,53

Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Jawa Timur

2. Kelautan dan Perikanan

Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan menunjukkan tren positif selama periode 2018-2022. Setelah dua tahun

penurunan pada 2018 dan 2019, subsektor mengalami kontraksi pada 2020 (-0,69%). Namun, subsektor perikanan pulih pada

2021 dengan pertumbuhan 2,99%, yang meningkat lebih signifikan pada 2022 menjadi 5,71%. Peningkatan ini mencerminkan

pemulihan dan kontribusi positif untuk perekonomian Jawa Timur dari sub sektor perikanan.

Tabel 2. 68 Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan	-0,86	-0,09	-0,69	2,99	5,71

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

3. Pertanian

Selama periode 2018-2022, pertanian Jawa Timur mengalami dinamika yang fluktuatif pada subsektornya. Pertumbuhan PDRB sub kategori tanaman pangan menunjukkan fluktuasi dengan pemulihan pada 2020 namun kembali menurun pada 2022. Sementara itu, tanaman hortikultura menunjukkan peningkatan stabil selama seluruh periode, memberikan kontribusi positif yang konsisten. Subsektor perkebunan menghadapi tantangan dengan

penurunan pada 2020 dan 2022, sementara pertumbuhan sub kategori peternakan menunjukkan pemulihan yang kuat pada 2019 dan 2021.

Penyumbang PDRB terbesar di sub kategori perkebunan adalah tebu dan tembakau sehingga upaya yang dilakukan melalui peningkatan produksi dan produktivitas tebu dan tembakau dengan cara intensifikasi.

Tabel 2. 69 Indikator Urusan Pertanian di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan	-4,10	-1,26	1,02	-0,09	-1,39
2	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Hortikultura	-2,62	3,69	6,60	0,67	6,15
3	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perkebunan	-0,07	4,21	-0,33	1,04	-0,28
4	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Peternakan	-1,30	2,56	2,38	3,31	1,79

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

4. Kehutanan

Pertumbuhan PDRB dalam Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu menunjukkan tren positif selama periode 2018-2022, meskipun terjadi kontraksi di tahun 2020 (-6,76%) pada masa Pandemi COVID-19. Peningkatan ini mencerminkan pemulihan dan kontribusi positif untuk perekonomian Jawa Timur dari sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu. Disamping mendukung pertumbuhan ekonomi, sektor kehutanan juga berkontribusi terhadap kualitas lingkungan hidup. Luas hutan di Jawa Timur adalah 1.978.320,56 Ha atau 41,38% dari luas daratan Jawa Timur yang terdiri dari hutan produksi seluas 782.772 Ha, hutan lindung seluas 344.742 Ha dan Hutan Konservasi seluas 233.632 Ha serta hutan rakyat seluas 617.174,56 Ha. Berdasarkan hasil penilaian efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi dengan menggunakan instrumen METT (Management Effectiveness Tracking Tools) oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahura Raden Soerjo yang merupakan kawasan hutan konservasi yang berada di bawah kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai 82%. Hal ini menunjukkan kawasan konservasi tersebut telah dikelola secara efektif. Dalam upaya mempertahankan atau memulihkan daya dukung DAS melalui rehabilitasi lahan kritis dan/atau rehabilitasi mangrove, tercatat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 s.d 2022 telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi seluas 37.295,17 hektar dengan rincian 15.770,92 Ha (2019), 9.936,67 Ha (2020), 6.043,12 Ha (2021), 5.544,46 Ha (2022) melalui APBD Provinsi dan sumber dana lainnya. Dinamika ini memberikan gambaran positif terkait keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian hutan dalam konteks berkelanjutan.

Tabel 2. 70 Indikator Urusan Kehutanan di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu	-2,54	4,41	-6,76	7,99	1,97

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kondisi kelistrikan Jawa Timur sampai dengan 2023 daya mampu sebesar 9.999 MW dengan beban puncak sebesar 6.216 MW dan masih mempunyai cadangan pasokan 2.739 MW. Potensi listrik tersebut untuk memenuhi kebutuhan antara lain Rumah Tangga, Bisnis, Sosial, Publik, dan Industri.

Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah terpasang jaringan listrik dengan total rumah tangga. Selama 5 tahun

terakhir rasio elektrifikasi Jawa Timur mengalami peningkatan dengan capaian sampai dengan Juni tahun 2023 sebesar 99,62 persen.

Guna meningkatkan ketahanan energi salah satunya melalui pemanfaatan energi baru terbarukan. Adapun komposisi Bauran Energi Terbarukan di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, yaitu dari 4,47 persen di tahun 2018 menjadi 9,36 persen di tahun 2022.

Tabel 2. 71 Indikator Urusan Energi dan Sumber Daya Alam di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Elektrifikasi (%)	94,64*	98,39	98,86	99,08	99,39	99,62 (s.d juni)
2	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	4,47	5,26	6,22	8,57	9,36	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Ket. *) : konsep perhitungan lama

Solusi untuk meningkatkan ketahanan energi adalah dengan pemanfaatan energi baru terbarukan. Dalam kebijakan energi nasional pada tahun 2025 terwujudnya elastisitas energi yaitu

6. Perdagangan

Sebagai salah satu sektor utama penopang ekonomi Jawa Timur, Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam 5 tahun terakhir

pengurangan porsi BBM dalam komposisi energi primer hingga 20% dan optimalisasi bahan bakar batubara 33% dan gas 30%, sisanya dengan meningkatkan pemakaian Energi Baru Terbarukan (EBT).

cenderung mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2022 pertumbuhannya mencapai 6,87 persen.

Tabel 2. 72 Indikator Urusan Perdagangan di Jawa Timur

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (s.d TW III)
Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,19	5,96	-5,77	7,77	6,87	6,15

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

7. Perindustrian

Industri Pengolahan merupakan kontributor utama dan tertinggi dalam Perekonomian Jawa Timur, dengan pertumbuhan selalu positif selama 5 tahun terakhir kecuali

pada tahun 2020 mengalami kontraksi akibat adanya pandemic Covid-19. Pada tahun 2022 pertumbuhan industri pengolahan mencapai 6,28 persen.

Tabel 2. 73 Indikator Perindustrian di Jawa Timur

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (s.d TW III)
Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	7,55	6,82	-2,06	3,37	6,28	3,96

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

8. Transmigrasi

Program transmigrasi pada dasarnya merupakan suatu kebijakan pemerintah yang antara lain bertujuan untuk memecahkan masalah kependudukan dan meningkatkan pembangunan daerah. Transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk saja tetapi juga berusaha meningkatkan pembangunan daerah tujuan dan kesejahteraan individu/ transmigran yang bersangkutan.

Perkembangan persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya di Jawa Timur tahun 2019 sebesar 75,99 persen. Sementara itu pada tahun 2020 Tidak dilakukan survey terkait persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya. Mulai tahun 2021 kembali dilaksanakan survey terhadap transmigran. Terdapat perubahan indikator pada urusan transmigrasi yang semula persentase transmigran yang

berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya berubah menjadi persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosial. Untuk meningkatkan persentase transmigrasi ini dibutuhkan peran pemerintah, diantaranya pemerataan penduduk ke daerah-daerah

yang memiliki potensi sumberdaya alam yang besar tetapi belum dimanfaatkan dengan maksimal dan memberikan pelatihan serta keterampilan pada penduduk transmigrasi agar memanfaatkan potensi sumberdaya alam sekitar untuk meningkatkan perekonomiannya.

Tabel 2. 74 Indikator Urusan Transmigrasi di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosialnya	70,00	75,99	-	-	-
Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi	-	-	-	72,07	76,22

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

2.4.1.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

Indikator untuk mengetahui tingkat konsistensi RKPD dan RPJMD ditentukan dengan indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Indikator tersebut dirumuskan berdasarkan jumlah nomenklatur program RKPD-P yang konsisten dengan nomenklatur program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dibandingkan dengan jumlah nomenklatur program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan.

Persentase keselarasan dokumen perencanaan pada tahun 2022

terrealisasi sebesar 99,35 persen. Hal ini disebabkan karena terdapat penambahan nomenklatur program dalam Perubahan RKPD 2022 sebanyak 1 program. Penambahan Program pada RPKD 2022 dimaksud merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 terkait Penganggaran APBD 2023 untuk Urusan Tantribumlinmas, yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Tabel 2. 75 Indikator Urusan Perencanaan di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100	100	94,36	100	99,35

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur

2. Keuangan

Provinsi Jawa Timur memantapkan komitmennya untuk mencapai good governance dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Jawa Timur telah mendapatkan opini WTP sebanyak 8 kali secara berturut-turut sejak tahun 2015.

Tabel 2. 76 Indikator Urusan Keuangan di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	138,50	138,63	132,23	124,62	201,22*
3	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	58,04	46,49	45,65	55,24	66,63*
4	Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang Sah	4,96	3,04	-7,14	6,00	14,09

Sumber :

No (1-3): BPKAD Provinsi Jawa Timur

No (4): Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Rasio Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Pendapatan transfer yang terdiri

dari dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan bantuan keuangan. Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 sebesar 201,22 persen, mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 124,62 persen. Hal ini dikarenakan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus

meningkatkan sehingga dana perimbangan mengalami kenaikan yang signifikan. Peningkatan pendapatan transfer tahun 2022 terhadap tahun 2021 lebih besar dibandingkan dengan peningkatan PAD.

Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai keberhasilan Daerah dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), PAD merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah, dimana pemungutannya dikendalikan langsung oleh

3. Kepegawaian

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN yang saat ini digunakan oleh

Pemerintah Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2022 jumlah Pendapatan Daerah yang dapat dihimpun Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 31 Trilyun 904 Milyar 599 Juta 506 Ribu 787 Rupiah, terdiri atas PAD sebesar 17 Trilyun 573 Milyar 322 Juta 019 Ribu 811 Rupiah dan Pendapatan Transfer sebesar 10 Trilyun 563 Milyar 739 Juta 586 Ribu 218 Rupiah. Apabila dibandingkan rasionya, maka penerimaan PAD mencapai 66,63 persen dari total Pendapatan Daerah.

Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian adalah dengan kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

Tabel 2. 77 Indeks Urusan Kepegawaian di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Profesionalitas ASN	88,05	82,00	85,00	85,30	86,27

Sumber : BKD Provinsi Jawa Timur

Sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Unsur penilaian Indeks

Profesionalitas Pegawai (IPP) terdiri dari kualifikasi bobot 25%, kompetensi bobot 40%, kinerja bobot 30% dan disiplin 5%. Adapun pengkategorian Tingkat

Profesionalitas ASN adalah nilai 91 – 100 berkategori sangat tinggi, nilai 81 – 90 berkategori tinggi, nilai 71 – 80 berkategori sedang, nilai 61 – 70 berkategori rendah dan nilai 0 – 60 berkategori sangat rendah.

IP ASN selama lima tahun terakhir (2018-2022) memiliki

4. Pendidikan dan Pelatihan

Upaya pengembangan kompetensi pegawai ASN dapat dilakukan melalui pendidikan atau pelatihan. Sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Pengembangan kompetensi sendiri merupakan salah satu faktor yang

trend naik dan tetap pada kategori tinggi. Peningkatan ini mencerminkan indikator kualitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih terukur, memiliki kredibilitas & reliabilitas sehingga potensi tiap-tiap ASN disesuaikan dengan rencana pengembangan SDM yang jelas.

digunakan dalam mengukur indeks profesi-onalitas ASN.

Dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dimensi pengembangan kompetensi memiliki bobot sebesar 40% dari keseluruhan pengukuran. Untuk itu perlu dipastikan bahwa tiap ASN telah memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi minimal 20 JP guna mendukung pelaksanaan tugas agar dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Tabel 2. 78 Indikator Urusan Pendidikan dan Pelatihan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi minimal 20 JP	-	12,22	27,56

Sumber : BPSDM Provinsi Jawa Timur

Persentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi minimal 20 JP dilakukan secara terintegrasi melalui Aplikasi Pengembangan Kompetensi Mandiri ASN (Sibang Kodir) yang mulai diimplementasikan pada tahun 2021. Adapun faktor pendorong

kenaikan capaian tersebut yaitu peningkatan kesadaran ASN akan pentingnya pengembangan kompetensi baik itu dalam tataran peningkatan kinerja maupun pengembangan karier. Dengan demikian pengembangan kompetensi menjadi salah satu tahapan

yang sangat penting dalam mendukung manajemen ASN. Sedangkan faktor penghambat dari capaian tersebut yaitu admin OPD yang kurang aktif, ketidaktahuan ASN akan kebe-radaan Sibang

5. Penelitian dan Pengembangan

Inovasi Daerah yang diamanatkan melalui Peraturan Peme-rintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Inovasi daerah tersebut meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi

Kodir, kurangnya kesadaram ASN akan pentingnya pengembangan kompetensi, rendahnya keikut-sertaan ASN dalam kegiatan pengembangan kompetensi, dan kurangnya penguasaan IT.

pelayanan publik; dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerin-tahan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian inovasi daerah dilakukan melalui mekanisme pengukuran Indeks Inovasi Daerah dari beberapa indikator indeks inovasi daerah. Dari hasil indeks inovasi daerah ini selanjutnya dilakukan pemeringkatan / pengelompokan menjadi beberapa kategori, yaitu sangat inovatif, inovatif, dan kurang inovatif.

Tabel 2. 79 Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Inovasi Daerah	-	-	-	63,15	72,82

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah

6. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada tahun 2009 Pemerintah melakukan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan tujuan untuk mengukur perkembangan demokrasi di Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota dan mengukur perkembangan demokrasi dua sisi yakni peran negara (pemerintah) dan Masyarakat. Sehingga, memperoleh dasar ter-ukur untuk penyusunan program

pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam Perkembangannya hingga tahun 2021 pengukuran Indeks Demokarsi Indonesia (IDI) pada level provinsi mengalami perubahan metode pengukuran yang semula pada metode lama mengedepankan demokrasi politik mengalami perubahan dengan

focus pada demonopoisasi lebih luas dengan melibatkan aspek politik. Senyampang dengan hal tersebut pengukuran yang semula dengan menggunakan metode lama dengan pengukuran 3 (tiga) Aspek,

11 (sebelas) Variabel dan 28 (dua puluh delapan) Indikator dan mulai tahun 2021 perhitungan IDI diubah dengan menggunakan metode baru dan terformulasikan kedalam 3 (tiga) Aspek dan 22 (dua puluh dua).

Tabel 2. 80 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Aspek Kebebasan Sipil	78.98	77.21	72.14	80.51	-
Persentase Aspek Hak-Hak Politik	60.98	67.45	80.25	56.43	-
Persentase Aspek Lembaga Demokrasi	76.57	75.97	80.55	81.09	-
Persentase Aspek Kebebasan	-	-	-	-	88.11
Persentase Aspek Kesetaraan	-	-	-	-	81.14
Persentase Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	-	-	-	-	74.81
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kumulatif	70.92	72.86	77.68	70.71	81.31

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur

Pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terkecuali IDI pada tahun 2021 mengalami penurunan, namun meningkat kembali pada tahun 2022. Perlu diketahui bahwa pencapaian realisasi Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun (n) merupakan hasil dari kinerja pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia dari tahun (n-1).

Nilai IDI Provinsi Jawa Timur tercatat memiliki posisi terendah di Tahun 2021 yaitu sebesar 70,71, nilai ini turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,97 poin. Capaian IDI yang rendah pada tahun 2021 dipengaruhi oleh

penurunan nilai yang sangat tajam pada indikator aspek hak-hak politik. Sejak tahun 2021, pengukuran IDI telah menggunakan metode yang baru. IDI tertinggi terjadi di tahun 2022 yaitu sebesar 81,31 atau meningkat sebesar 10,6 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Selama Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 terjadi peningkatan dan penurunan pada masing-masing aspek pengukuran IDI Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan pada Aspek Kebebasan dan Aspek Kesetaraan, masing-masing meningkat sebesar sebesar 7,6 poin dan 24,71 poin. Namun pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi terjadi penurunan sebesar 6,28 poin. Penurunan pada nilai Aspek Lembaga Demokrasi tersebut dipengaruhi oleh indikator –

indikator penyusunnya yaitu menurunnya kinerja Lembaga Legislatif, meningkatnya putusan PTUN terkait kebijakan pejabat pemerintah, menurunnya jaminan pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat serta menurunnya transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBD oleh pemerintah.

7. Penghubung

Keberadaan Badan Penghubung Daerah di ibukota DKI Jakarta menjembatani urusan pemerintahan dari pusat ke daerah di Jawa Timur agar dapat berjalan dengan mudah. Badan Penghubung Daerah sering kali berhubungan langsung dengan masyarakat luas pengguna berbagai macam fasilitas yang disediakan Badan Penghubung Daerah. Tingkat kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur yang bisa digunakan sebagai penentu kualitas pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Penghubung Daerah Tahun 2022 sebesar 90,18.

Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan IDI adalah penguatan kapasitas SDM yang tergabung dalam kelompok kerja IDI melalui pembekalan atau pelatihan, serta menyusun regulasi dalam mengoptimalkan capaian IDI Provinsi Jawa Timur.

Rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti adalah hasil kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta optimalisasi pengembangan potensi Kabupaten/Kota. Pada tahun 2018 rekomendasi hasil yang ditindaklanjuti mencapai 95 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 sebesar 100 persen. Peningkatan ini mengindikasikan koordinasi yang dilaksanakan sudah terfokus dan terarah serta bersinergi dengan program kegiatan kabupaten/kota.

Tabel 2. 81 Indikator Urusan Penghubung di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penghubung	-	-	90,96	90,15	90,18
2	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	95	99	99,2	100	100

Sumber :

No (1) : Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur

No (2) : Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

8. Pengawasan

Survei Penilaian Integritas (SPI) dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah. Hasil SPI dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi dan diharapkan mampu menindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi pencegahan korupsi di instansi masing-masing dan menjadikannya sebagai gerakan perubahan. Di Provinsi Jawa Timur upaya tersebut antara lain berupa penancangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), *Monitoring Center for Prevention* (MCP), dan sebagainya.

Secara umum hasil penilaian integritas Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan tugas di instansi ini memiliki risiko korupsi yang tinggi, setidaknya dalam satu komponen pelaksanaan tugas, seperti penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik

kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, alma-mater, dan sejenisnya, juga adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk pegawai yang melanggar aturan. Indeks integritas yang diperoleh Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 mencapai skor sebesar 73,11, nilai tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu 70,03. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas instansi yang semakin baik. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengawal Indeks Integritas agar terus meningkat diantaranya melakukan sosialisasi terkait gratifikasi, sosialisasi tata cara pertanggung-jawaban keuangan, memberikan masukan terhadap unit kerja yang akan dilakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM), membentuk tim Saberpungli dan menangani pengaduan yang masuk melalui *Whistle Blowing System*.

Tabel 2. 82 Indikator Urusan Pengawasan di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Integritas	74,96	76,42	76,10	70,03	73,11

Sumber : Inspektorat Provinsi Jawa Timur

9. Kesekretariatan DPRD

Capaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap

pelayanan Sekretariat DPRD selama lima tahun terakhir (2018-2022)

terus menunjukkan peningkatan. Hal ini menggambarkan semakin membaiknya dan efektif pelayanan

yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada masyarakat.

Tabel 2. 83 Indikator Urusan Kesekretariatan DPRD di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80,69	80,79	81,05	82,32	83,91

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

10. Kesekretariatan Daerah

Kinerja urusan kesekretariatan daerah berdasarkan realiasi tahun 2018-2022 menunjukkan hasil yang positif dan mengalami peningkatan setiap tahun. Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi

birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Tabel 2. 84 Kesekretariatan Daerah

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Timur	81,70	81,71	82,38	83,18	83,83
2	Persentase Rekomendasi Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama yang Menjadi Kebijakan	-	-	-	90	90
3	Indeks Kepedulian Sosial		74,28	74,40	78,62	81,70
4	Persentase produk hukum di Jawa Timur yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan	100	100	100	100	100
5	Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Perekonomian	-	-	10	11	11
6	Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan Kebijakan	100	100	100	100	100
7	Indeks Tata Kelola Pengadaan	-	-	-	84,86	82,1
8	Nilai IKM Pengguna Layanan di Lingkungan Sekretariat Daerah		83	83,5	83,92	85,08

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
9	Nilai IKM Pengguna Layanan Keprotokolanan dan Materi Komunikasi Pimpinan				84,50	86,76

Sumber :

- No (1) : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur
 No (2) : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur
 No (3) : Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur
 No (4) : Biro Hukum Provinsi Jawa Timur
 No (5) : Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur
 No (6) : Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur
 No (7) : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Timur
 No (8) : Biro Umum Provinsi Jawa Timur
 No (9) : Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jawa Timur

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dengan adanya implementasi SAKIP, diharapkan kinerja yang akan direncanakan dan dilaksanakan berorientasi pada hasil. Perkembangan nilai SAKIP pada tahun 2018-2022 terus menunjukkan peningkatan, yaitu dari 81,70 pada tahun 2018 menjadi 83,83 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pelaksanaan program pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah semakin baik karena terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Rekomendasi Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama yang Menjadi Kebijakan merupakan hasil dari Perumusan Rekomendasi Kebijakan Daerah, Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama. Rumusan Rekomendasi tersebut terjabarkan meliputi Kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Kebijakan yang mendukung penyelenggaraan otonomi daerah di Jawa Timur, Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/ Kota yang inklusif dan Kualitas Layanan administrasi pemerintahan yang cepat dan transparan. Pada Tahun 2021 dan 2022 terlihat kualitas Rumusan Rekomendasi Bidang Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama yang Menjadi Kebijakan mencapai hasil sebesar 90% setiap tahunnya. Hasil ini mengindikasikan Rekomendasi yang dihasilkan sudah terfokus dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Timur.

Indeks Kepedulian Sosial di Jawa Timur selalu meningkat setiap tahunnya. Indeks kepedulian sosial terbentuk dari 5 sub dimensi, yakni sikap percaya, toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas,

dan aksi bersama. Dari 5 sub dimensi tersebut, selama tahun 2021-2022 sub dimensi yang mengalami peningkatan adalah toleransi sebesar 3,87 poin, kelompok dan jejaring sebesar 13,57 poin, dan aksi bersama sebesar 16,48 poin. Dengan semakin meningkatnya kepedulian sosial maka akan tercipta keharmonisan sosial yang kuat, suasana kekeluargaan, dan saling membantu satu sama lain. Kedepan kebijakan pembangunan yang responsif pada kepedulian sosial akan menjadi salah satu pendekatan yang melingkupi pembangunan daerah Jawa Timur.

Penyusunan produk hukum daerah harus memenuhi kaidah-kaidah dalam penyusunan produk hukum, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Terkait hal tersebut, capaian pada Tahun 2019 hingga Tahun 2022 Persentase Produk Hukum Yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi, Kepentingan Umum dan/atau Kesusilaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah 100 persen. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target indikator yang terus konsisten ini, disebabkan karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa Timur dalam penyusunan produk hukum daerah konsisten mengikuti tahapan

penyusunan produk hukum daerah yang telah diatur sesuai ketentuan perundang – undangan

Kebijakan Perekonomian mengacu pada tindakan sebuah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, kebijakan ini dapat mencakup pengoptimalan kinerja analisis makro ekonomi, pengendalian inflasi di Jawa Timur, kinerja pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal, sarana perekonomian serta kinerja perindustrian dan perdagangan. Selain itu kebijakan bidang perekonomian juga mencakup perumusan kebijakan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, Energi Sumber Daya Mineral, dan Lingkungan Hidup, serta pengoptimalan kinerja BUMD dan BLUD.

Salah satu upaya untuk mengetahui efektifitas pelayanan administrasi dan informasi pembangunan adalah melalui optimalisasi pelaksanaan kebijakan. persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan pada tiap tahunnya mampu mencapai angka maksimal, yaitu 100 persen. Hal ini tidak terlepas dari upaya pengendalian administrasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara berkala dan tepat waktu.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dihitung berdasarkan penilaian dari pengguna layanan. Kepuasan Pengguna Layanan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 cenderung meningkat hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu (1) Pelayanan Prima terhadap layanan penerimaan surat dan informasi terkait dengan penyelesaian surat-surat yang tepat sasaran / sesuai tujuan (2) Pelayanan Prima terhadap Kerumah Tanggaan semisal Layanan pemanfaatan fasilitas gedung dan perlengkapannya untuk acara-acara kenegaraan, rapat dan menerima tamu dll (3) Pelayanan Prima terhadap Administrasi Keuangan Setda dan Ketatausahaan di Lingkungan Setda Provinsi Jawa Timur.

Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan

2.3.1. Standar Pelayanan Minimum

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (3) maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada Pasal 298 (1) Belanja

keprotokolan dan materi komunikasi pimpinan memiliki sasaran variabel berupa pengguna layanan keprotokolan dan materi komunikasi pimpinan. Pengukuran Indeks tersebut menggunakan perhitungan e - Sukma dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Perhitungan nilai IKM tersebut diharapkan dapat menjadi penilaian yang lebih objektif dan menyeluruh dalam melakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Administrasi Pimpinan kepada pengguna layanan. Upaya dalam peningkatan IKM ini diantaranya adalah Pemanfaatan teknologi informasi dan sumberdaya secara maksimal, optimalisasi pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan dan materi komunikasi pimpinan.

Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang

berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM

terdiri atas : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

1. Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan terdiri atas SPM Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus. Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Hal ini juga diatur dalam Permendagri 59 tahun 2021. Atas dasar peraturan tersebut, pendidikan juga wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal yang disahkan melalui Permendik-budristek RI nomor 32 tahun 2022 tentang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang mengatur tentang Jenis dan penerima Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, pencapaian SPM Pendidikan dan pelaporan serta evaluasi. Hal ini mempengaruhi perubahan transformasi SPM tahun 2018 dan 2021 yang lebih berfokus kepada kualitas pembelajaran dan kualitas lingkungan sekolah. Standar Pelayanan Minimal tahun 2021 berfokus kepada kualitas pembelajaran, kualitas lingkungan sekolah, partisipasi dan kualitas pendidik. Indikator: Literasi, Numerasi, Iklim keamanan, kebinekaan, inklusivitas.

Tabel 2. 85 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan

No.	Indikator	Realisasi	
		2021	2022
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16 – 18 Tahun	74,14	73,40
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 4 – 18 Tahun	32,02	27,52
3	Rerata Kompetensi Literasi SMA	65,43	66,12
4	Rerata kompetensi Numerasi SMA	52,17	55,44
5	Rerata Kompetensi Literasi SMK	60,54	60,26
6	Rerata Kompetensi Numerasi SMK	49,80	51,36
7	Rerata Kompetensi Literasi SDLB	57,76	64,83
8	Rerata Kompetensi Numerasi SDLB	56,81	63,62
9	Rerata Kompetensi Literasi SMPLB	64,12	67,25
10	Rerata Kompetensi Numerasi SMPLB	57,35	60,10
11	Rerata Kompetensi Literasi SMLB	62,66	58,48
12	Rerata Kompetensi Numerasi SMLB	51,69	54,57
13	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	34,64	86,76

No.	Indikator	Realisasi	
		2021	2022
14	Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	65,70	65,70
15	Indeks Iklim Keamanan SMA	73,97	68,94
16	Indeks Iklim Kebinekaan SMA	61,67	67,19
17	Indeks Inklusivitas SMA	53,64	56,28
18	Indeks Iklim Keamanan SMK	70,62	66,37
19	Indeks Iklim Kebinekaan SMK	59,75	64,26
20	Indeks Inklusivitas SMK	52,68	54,86
21	Indeks Iklim Keamanan SDLB	79,29	77,23
22	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	59,92	70,68
23	Indeks Inklusivitas SDLB	58,28	61,96
24	Indeks Iklim Keamanan SMPLB	80,77	73,46
25	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	60,16	67,46
26	Indeks Inklusivitas SMPLB	58,35	64,21
27	Indeks Iklim Keamanan SMLB	79,19	71,75
28	Indeks Iklim Kebinekaan SMLB	61,04	66,21
29	Indeks Inklusivitas SMLB	58,17	61,75

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

2. Kesehatan

Operasionalisasi SPM Bidang Kesehatan berlandaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar. Adapun SPM bidang Kesehatan adalah:

- a. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana.
- b. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Seluruh kejadian penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) harus mendapat penanganan dan respon cepat 1 x 24 jam sesuai dengan Permenkes No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang jenis penyakit potensi KLB/wabah. Hal tersebut salah satunya

bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan yang lebih luas di wilayah dan tidak sampai terjadi KLB. Berdasarkan laporan di tahun 2022, diketahui bahwa jumlah KLB yang tercatat dan dilaporkan di wilayah mengalami peningkatan. Salah satunya karena kejadian Covid-19 dimasukkan dalam kriteria KLB, sesuai dengan kriteria utama Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Selain Covid-19, KLB yang terjadi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 adalah KLB difteri, KLB pertusis, KLB campak - rubella, KLB keracunan pangan. Dari seluruh KLB yang dilaporkan, sudah dilakukan respon dan penanganan cepat 1 x 24 jam secara keseluruhan (100%).

Tabel 2. 86 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022

1	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau / atau berpotensi bencana provinsi	100	100	100	100
2	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Pekerjaan Umum kewenangan provinsi terdiri atas Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas daerah kabupaten/kota. Capaian penerapan SPM Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota yang diukur dengan indikator Persentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kab/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab/Kota. Upaya pemenuhan SPM Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota dilakukan melalui Pembangunan SPAM Regional Umbulan dan SPAM Mojolagres, dimana dengan kedua pembangunan SPAM Regional ini pada tahun 2022 ditargetkan memiliki kapasitas air curah sebesar ± 3.360 liter/detik dan terealisasi sebesar 2900 liter/detik. Dengan total kapasitas tersebut,

telah dimanfaatkan sebesar 2.090,39 liter/detik oleh Kabupaten/Kota, yang melayani +836.156 jiwa (dengan asumsi 1 liter/detik dapat melayani 80KK, dan masing-masing KK sejumlah 5 jiwa).

Kemudian untuk penerapan SPM Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota diukur dengan indikator Persentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional, sampai dengan tahun 2022, di Jawa Timur belum memiliki pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat lintas kabupaten/kota. Namun hal ini sudah mulai diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) serta melaksanakan Identifikasi Potensi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Regional sebagai langkah awal dalam inventarisasi potensi pengembangan air limbah regional.

Tabel 2. 87 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kab/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab/Kota *)	-	2,19	23,32	88,82	86,31
2	Presentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional **)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Ket: *) Formulasi perhitungan tahun 2021-2024 menggunakan target pertahun

***) Belum memiliki SPAL Regional,

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kewenangan provinsi terdiri atas Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi dengan indikator Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n terhadap jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator persentase rumah tangga

penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan ditambah rumah tangga penerima subsidi uang sewa ditambah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan. Capaian penerapan pada kedua SPM pada tahun 2022 adalah 100 persen, hal ini dikarenakan tidak adanya Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan program pemerintah yang berdampak pada relokasi rumah rumah warga.

Tabel 2. 88 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n terhadap jumlah	100	100	100	100	100

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n					
2	Persentase rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan ditambah rumah tangga penerima subsidi uang sewa ditambah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Untuk mendukung pelaksanaan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman khususnya terkait Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana juga didukung dengan pelaksanaan BTT sesuai usulan dari Kabupaten/Kota. Pada tahun

2022 telah disalurkan dana BTT Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan hunian terdampak bencana longsor di Kabupaten Trenggalek sebanyak 50 unit hunian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.

Penerapan SPM Tahun 2023 khususnya Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum memiliki 2 (dua) indikator yaitu: Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (bobot 80%) dan Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%).

Penerima layanan dasar dalam hal ini merupakan warga negara yang berada pada radius 0-50 meter dari lokasi penegakan perda dan perkada. Sedangkan mutu layanan dasar merupakan hal-hal pendukung pelayanan dasar seperti kapasitas Sumber

Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar pelayanan dan lainnya. Pencapaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 89 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100	100	100	-
Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	-	-	-	100
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	-	-	-	97,83

Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2022, Sesuai Permendagri 59 tahun 2021 bahwa perhitungan capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum memiliki perubahan yang sebelumnya hanya terdapat 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada menjadi 2 (dua) indikator, yaitu Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (bobot 80%) dan Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (bobot 20%). Perubahan indikator ini mempengaruhi capaian SPM.

Dalam penerapan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tidak ada warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian baik materil ataupun fisik. Hal ini dapat dinarasikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur selaku perangkat daerah dalam melak-sanakan kegiatan penegakan Perda dan Perkada telah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), humanis, persuasif dan edukatif sehingga tidak ada warga negara yang terdampak akibat penegakan hukum atau Perda dan Perkada yang dilakukan

6. Sosial

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Bidang Sosial sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan

Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi, Bab II pasal 7 (tujuh) SPM Bidang Sosial tersebut mencakup 5 (lima) pelayanan dasar.

Tabel 2. 90 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	840	910	940	1.101	968
2	Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	2.619	2.809	2.824	1.247	3.029
3	Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	907	987	1.050	1169	1.037
4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	350	350	350	542	530
5	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3.772	5.119	24.126	26.862	27.957

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Target penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya penambahan kapasitas tampung pada UPT yang menangani Penyandang Disabilitas dan adanya penambahan bantuan permakanaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menangani Penyandang Disabilitas yang ada di masyarakat.

Target penanganan Anak Terlantar di Dalam Panti setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya penam-

bahan kapasitas tampung pada UPT yang menangani Anak Terlantar dan adanya penambahan bantuan permakanaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang ada di masyarakat.

Target penanganan Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya penambahan kapasitas tampung pada UPT yang menangani Lanjut Usia Terlantar dan adanya penambahan bantuan permakanaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial

Lanjut Usia yang ada di masyarakat.

Target penanganan Gelandangan dan Pengemis setiap tahunnya tidak mengalami perubahan hal ini disebabkan UPT yang menangani tidak mengalami penambahan kapasitas tampung, dan belum ada lembaga kesejahteraan sosial yang menangani gelandangan dan pengemis. penanganan Rehabilitasi Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti

Capaian SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bagi

Korban Bencana Daerah Provinsi, dicapai melalui Program Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat. penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan mendapatkan dukungan psikososial. Peningkatan pada tahun 2021 dan tahun 2022 korban bencana alam dan sosial, disebabkan meningkatnya kasus bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, Angin Puting beliung, Gempa Bumi, Kekeringan dan erupsi Gunung Merapi serta meningkatnya korban bencana sosial terutama Pandemi Covid-19.



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



RPD JAWA TIMUR

2025
2026

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Perlambatan ekonomi global masih berlanjut di tahun 2023 salah satunya yaitu kinerja perdagangan global yang melemah sebagai dampak kebijakan moneter di sebagian negara maju yang masih ketat serta belum pulihnya ekonomi Tiongkok. Disamping itu, masih berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok berdampak signifikan pada negara-negara berkembang. Selain itu, gejolak global dengan meningkatnya tensi geopolitik Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan disrupsi pangan dan energi. Disamping itu, harga komoditas global yang melonjak menyebabkan tingginya inflasi di banyak negara.

Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian

Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi dan pemulihan yang terus menguat, dimana konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian terus mengalami penguatan. Di tengah tekanan inflasi global yang tinggi, laju inflasi domestik relatif terkendali yang didukung oleh penguatan permintaan domestik telah mendorong peningkatan level harga setelah sempat tertahan selama masa pandemi. Selain itu, pemulihan sektor pariwisata terus berlanjut salah satunya didukung kebijakan reopening Tiongkok serta peran Indonesia menjadi Keketuaan ASEAN (ASEAN Chairmanship) pada tahun 2023.

3.2 Kondisi Perekonomian Daerah

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran kondisi makro ekonomi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir menunjukkan trend positif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu diatas nasional kecuali pada tahun 2020 dan 2021 akibat adanya pandemi Covid-19. Sektor utama penopang ekonomi Jawa Timur didominasi oleh industri pengolahan, perdagangan dan

pertanian. Kontribusi sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan cenderung mengalami peningkatan, sedangkan Pertanian cenderung turun. Sedangkan secara kontribusi terhadap perekonomian pulau Jawa maupun Nasional, Jawa Timur merupakan kontributor terbesar kedua setelah DKI Jakarta

Gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023, diolah

Gambar 3. 2 Struktur Ekonomi Jawa Timur

Kontribusi 3 Sektor Utama Perekonomian Jatim	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Tren Kontribusi 2015 - 2023 (TW-I)
INDUSTRI PENGOLAHAN	29,31	28,91	29,12	29,75	30,32	30,68	30,72	30,60	↑
PERDAGANGAN	17,60	17,90	17,93	18,19	18,49	17,92	18,46	18,67	↑
PERTANIAN	13,65	13,44	12,84	11,85	11,36	11,89	11,50	11,11	↓

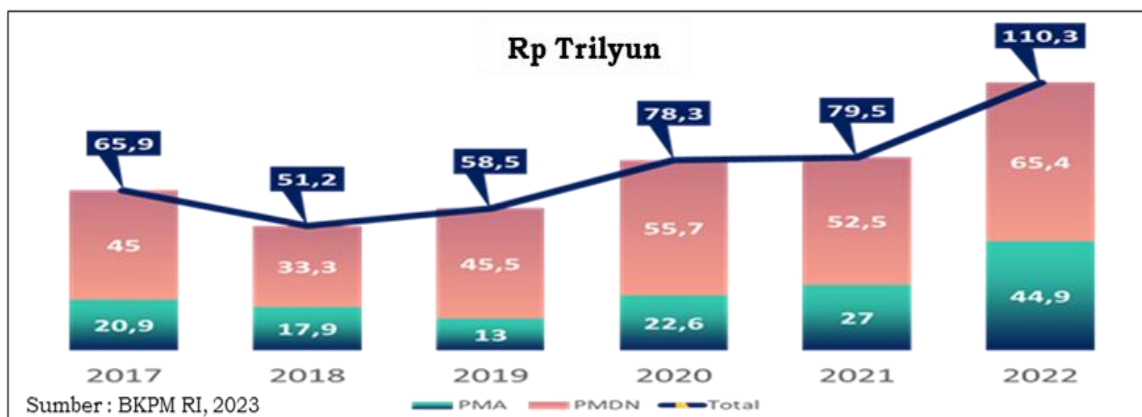
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023, diolah

3.2.2. Kinerja Investasi

Selama 5 Tahun terakhir realisasi investasi Jawa Timur menunjukkan tren positif. Peningkatan signifikan terjadi di tahun 2022, yang meningkat 38,8% dibanding tahun 2021.

katan signifikan terjadi di tahun 2022, yang meningkat 38,8% dibanding tahun 2021.

Gambar 3. 3 Realisasi Investasi Jawa Timur



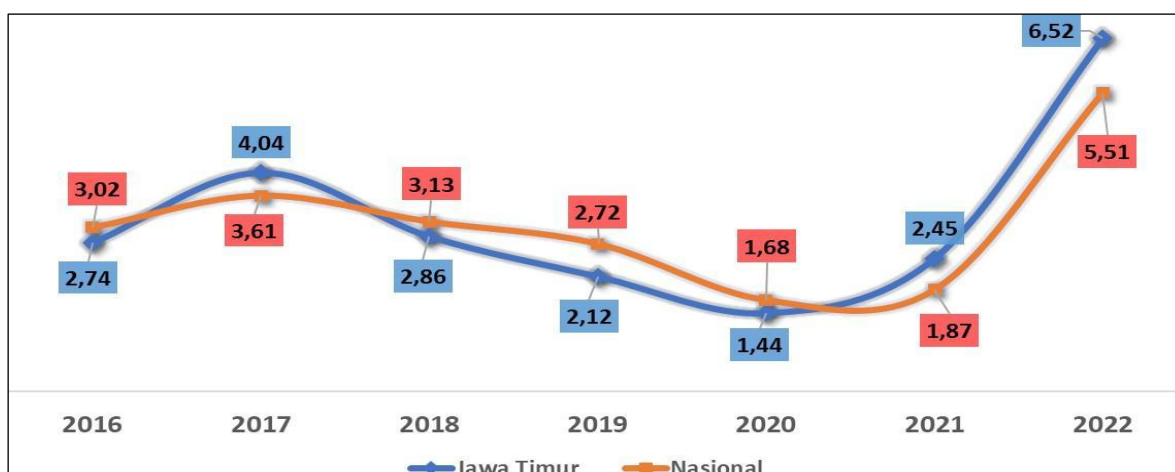
Sumber : BKPM RI, 2023

3.2.3. Tingkat Inflasi

Inflasi Jawa Timur sebelum masa pandemi cenderung mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 dan 2022 meningkat akibat aktivitas ekonomi yang terganggu sebagai dampak

pandemi. Pada bulan Desember 2022 inflasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2021. Kondisi tersebut terjadi pada tingkat Provinsi maupun Nasional.

Gambar 3. 4 Perkembangan Inflasi Jawa Timur



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023 diolah

3.2.4. Perkiraan Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi dunia kedepan masih dipengaruhi oleh konflik geopolitik Rusia-Ukraina, gangguan rantai pasok global,

kebijakan proteksionisme, masih tingginya inflasi global, dan kebijakan moneter ketat secara global.

Tabel 3. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Organisasi/ Lembaga	Proyeksi (%)			
	2023	2024	2025	2026
Bank Indonesia Prov Jatim	4,6-5,40	4,70-5,50	-	-
FEB Universitas Brawijaya	5,00-5,15	5,13-5,25	5,43-5,63	5,52- 5,73
FEB Universitas Airlangga	5,06-5,27	5,17-5,49	5,27-5,49	5,27- 5,49

Sumber: BI Jatim, Hasil FGD Bidang Ekonomi, diolah

Pertumbuhan ekonomi Asia diperkirakan tumbuh 4,8% menurut proyeksi *International Monetary Fund* (IMF) sedangkan Indonesia diperkirakan mencapai 5% berdasarkan proyeksi Bank

Dunia. Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperkirakan mencapai 5,27% sampai 5,63% sedangkan tahun 2026 diperkirakan berada pada kisaran 5,27% sampai 5,73%.

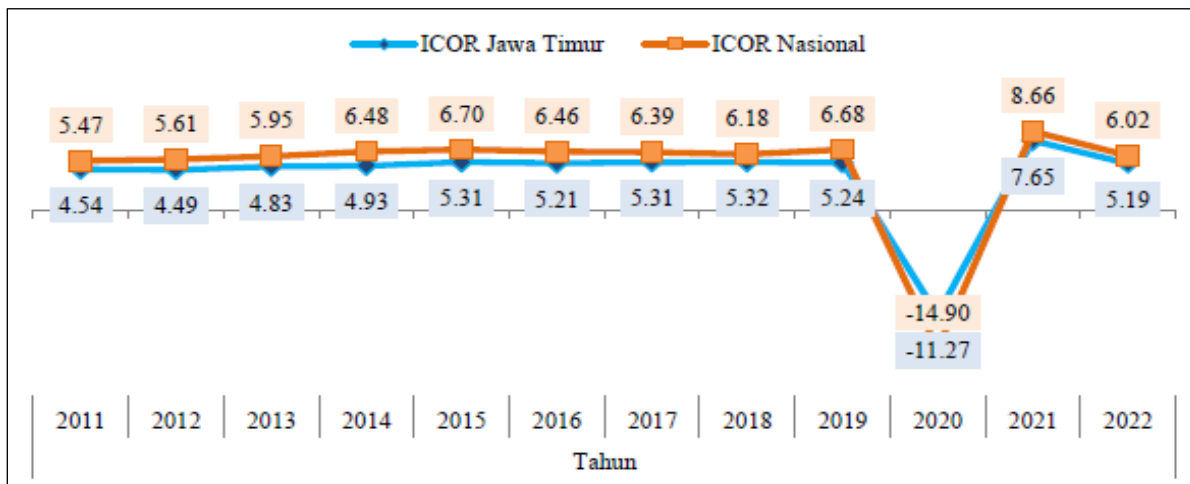
3.2.5. Analisis Investasi

Secara umum ICOR selain digunakan untuk menentukan seberapa besar kebutuhan investasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi juga dapat digunakan untuk melihat efisiensi investasi yang ditanamkan di suatu daerah atau di suatu negara pada periode tertentu. Semakin kecil nilai ICOR berarti investasi semakin efisien dan semakin besar nilai ICOR

berarti investasi makin tidak efisien.

Nilai ICOR Provinsi Jawa Timur selama periode 2013-2022 secara konsisten berada dibawah nasional. Secara umum hal ini menggambarkan bahwa investasi di Provinsi Jawa Timur lebih efisien dibanding rata-rata Nasional.

Gambar 3. 5 Perkembangan Nilai ICOR Jawa Timur dan Nasional



Sumber: BPS (2023), diolah

3.2.6. Arah Ekonomi Makro

Arah ekonomi makro Jawa Timur dalam mewujudkan visi misi pembangunan Jawa Timur dilaksanakan melalui pemerataan serta pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Pemerataan

pertumbuhan ekonomi wilayah yang dilakukan melalui optimisasi dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal.

Pertumbuhan ekonomi berkualitas dilaksanakan melalui penciptaan stabilitas makro ekonomi yang didukung investasi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga melalui peningkatan nilai tambah ekonomi sektor primer maupun sekunder serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Dinamika ekonomi juga mendorong ekonomi makro untuk diarahkan pada pengembangan ekonomi hijau,

3.3 Kinerja Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditempuh, baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target Penerimaan Daerah hingga mobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui Pengeluaran Daerah.

Sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Secara umum terdapat 2 (dua) penerimaan daerah yang memegang peranan penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di

ekonomi biru serta ekonomi syariah.

Dengan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan dapat menopang fundamental ekonomi serta memperkuat pembangunan ekonomi inklusif untuk mendorong pertumbuhan (*pro growth*), mengurangi kemiskinan (*pro poor*) serta ramah lingkungan (*pro environment*).

Provinsi Jawa Timur yaitu sebagai sumber penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Untuk efektivitas pengelolaan keuangan daerah, selama kurun waktu 2 (dua) tahun ini, telah dirumuskan berbagai strategi optimalisasi yang adaptif dengan kondisi makro ekonomi serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Strategi yang ditempuh dirumuskan dalam berbagai paket kebijakan, yang mencakup Kebijakan Pendapatan,

Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Strategi yang ditempuh diderivasi ke dalam bentuk struktur APBD yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, eko-nomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa APBD merupakan instrumen kunci dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai ketentuan pada Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan Pasal 23 Ayat (3) bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melak-

sanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan;

2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan;

3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;

5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan

6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3.3.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019- 2024

Sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Peme-

- rintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
 4. Pengeluaran Daerah;
 5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
 6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam hal ini, lingkup pengelolaan keuangan daerah diatas akan diwujudkan dalam APBD sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.

Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019-2024 menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah telah

berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tepat menjadi kunci kinerja pelaksanaan APBD yang optimal.

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2024 menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya. Evaluasi atas kinerja pelaksanaan APBD mencakup aspek efektivitas alokasi anggaran, pencapaian target pembangunan, dan kesesuaian perencanaan dengan hasil pelaksanaan pembangunan. Dengan memetakan keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan APBD, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memperoleh wawasan yang mendalam untuk merancang kebijakan yang lebih efisien dan responsif di masa mendatang.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan

Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah dan disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan; 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan

Dengan terbitnya regulasi diatas maka, terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, Jaringan, dan Irigasi, BM Aset Tetap Lainnya.

Kinerja Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 dapat dilihat melalui data LRA (Laporan Realisasi Anggaran), yang diformulasikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2019-2022 (dalam juta Rupiah)

No.	Uraian	2019			2020			2021			2022		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1b	PENDAPATAN	33.427.673	33.455.209	100,08 %	30.142.939	31.631.025	104,94 %	32.969.569	34.280.709	103,98 %	29.564.645	31.904.776	107,92 %
1b.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	18.212.437	19.327.125	106,12 %	15.448.833	17.950.997	116,20 %	17.124.366	18.935.886	110,58 %	18.122.847	21.256.651	117,29 %
1b.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	14.892.800	15.522.201	104,23 %	12.377.000	14.412.667	116,45 %	14.227.429	15.400.864	108,25 %	5.046.046	17.573.322	116,80 %
1b.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	139.792	146.816	105,02 %	71.404	84.103	117,78 %	110.303	110.951	100,59 %	103.562	119.974	115,85 %
1b.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	412.155	402.299	97,61%	421.292	417.764	99,16%	404.504	408.640	101,02 %	441.685	441.444	99,95%
1b.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	2.767.691	3.255.810	117,64 %	2.579.136	3.036.462	117,73 %	2.382.129	3.015.430	126,59 %	2.531.554	3.121.912	123,32 %
1b.2	PENDAPATAN TRANSFER	15.049.908	14.015.983	93,13%	14.590.458	13.575.795	93,05%	15.644.967	15.194.249	97,12%	11.397.952	10.563.740	92,68%
1b.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	14.975.612	13.941.687	93,10%	14.494.774	13.480.112	93%	15.592.530	15.134.312	97,06%	11.330.692	10.496.480	92,64%
1b.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	73.795	73.795	100%	95.683	95.683	100%	52.438	52.438	100%	67.259	67.259	100%
1b.2.3	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH-LAINNYA	-	-	100%	-	-	100%	-	7.500	100%	-	-	100%
1b.2.4	BANTUAN KEUANGAN	500	500	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%
1b.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	165.328	112.101	67,81%	103.649	104.233	100,56 %	200.236	150.574	75,20%	43.847	84.386	192,46 %

No.	Uraian	2019			2020			2021			2022		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1b.3.1	Pendapatan Hibah	165.328	112.101	67,81%	103.649	104.233	100,56%	200.236	148.231	74,03%	43.847	68.215	155,58%
1b.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%
1b.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	100%	-	-	100%	-	2.342	100%	-	16.170	100%
2b	BELANJA	38.004.721,35	33.967.109,63	89,38%	34.565.028,40	32.286.757,64	93,41%	36.621.318,45	33.852.939	92,44%	33.601.144	31.502.993	93,76%
2b.1	Belanja Operasi	25.212.573,87	23.135.622,31	91,76%	24.629.062,92	23.156.806,03	94,02%	24.948.257,62	23.369.682	93,67%	21.958.349	20.885.611	95,11%
2b.1.1	Belanja Pegawai	8.769.061,93	7.988.531,67	91,10%	7.805.285,95	7.605.952,24	97,45%	7.459.100,12	6.988.563	93,69%	7.906.839	7.374.401	93,27%
2b.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.378.111	6.459.621	87,55%	6.577.498	5.910.184	89,85%	8.129.102	7.300.024	89,80%	8.351.784	7.969.604	95,42%
2b.1.3	Belanja Bunga	14.168	10.603	74,84%	12.575	12.340	98,13%	0	0	100%	0	0	100%
2b.1.4	Belanja Subsidi	37.500	28.851	76,94%	37.500	28.804	76,81%	0	0	100%	22.000	15.097	68,62%
2b.1.5	Belanja Hibah	8.897.605	8.576.572	96,39%	10.080.713	9.514.407	94,38%	9.259.050	8.988.623	97,08%	5.510.905	5.381.891	97,66%
2b.1.6	Belanja Bantuan Sosial	116.128	71.445	61,52%	115.491	85.119	73,70%	101.005	92.472	91,55%	166.822	144.618	86,69%
2b.2	Belanja Modal	3.279.043	2.770.974	84,51%	2.284.846	1.904.557	83,36%	2.418.102	1.969.921	81,47%	2.870.792	2.505.994	87,29%
2b.2.1	Belanja Modal	3.279.043	2.770.974	84,51%	2.284.846	1.904.557	83,36%	2.418.102	1.969.921	81,47%	2.870.792	2.505.994	87,29%
2b.3	Belanja Tidak Terduga	263.889	33.072	12,53%	1.389.943	1.016.551	73,14%	777.436	369.939	47,58%	709.198	116.316	16,40%
2b.3.1	Belanja Tidak Terduga	263.889	33.072	12,53%	1.389.943	1.016.551	73,14%	777.436	369.939	47,58%	709.198	116.316	16,40%
2b.4	Belanja Transfer	9.249.216	8.027.441	86,79%	6.261.177	6.208.844	99,16%	8.477.523	8.143.397	96,06%	8.062.804	7.995.072	99,16%
2b.4.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	8.375.712	7.258.424	86,66%	5.457.292	5.457.179	100%	7.868.818	7.563.629	96,12%	7.295.950	7.295.847	100%

No.	Uraian	2019			2020			2021			2022		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2b.4. 2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	873.504	769.018	88,04%	803.885	751.665	93,50%	608.705	579.769	95,25%	766.854	699.225	91,18%
3	PEMBIAYAAN	4.577.048,28	4.881.242,79	106,65%	4.422.089,49	4.355.766,06	98,50%	3.651.749,29	3.651.611	100%	4.036.499	4.044.541	100,20%
3.1	Penerimaan Pembiayaan	4.955.848,28	4.955.848,28	100%	4.458.042,49	4.391.517,49	98,51%	3.732.917,93	3.732.431	99,99%	4.079.381	4.079.381	100%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	378.800	74.605	19,70%	35.953	35.751	99,44%	81.169	80.820	99,57%	42.882	34.840	81,25%
4	APBD	38.383.521	38.411.058	100,07%	34.600.981	36.022.542	104,11%	36.702.487	38.013.140	103,57%	33.644.027	35.984.158	106,96%
5	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	4.369.342,49		0	3.700.033,20		0	4.079.381,41		0	4.446.324,79	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2019-2022 (diolah)

3.3.2 Kondisi Kemampuan Keuangan Daerah

3.3.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah menurut Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan

keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiscal gap). Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembia-yaannya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang

dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang dan Pemerintah Daerah juga dilarang melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impur yang merupakan program strategis nasional, hal ini berarti bahwa reformasi peraturan perundang-undangan sudah memberikan perubahan yang mendasar. Perubahan tersebut dapat kita cermati pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut mengubah sistem yang semulanya open list menjadi close list. Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dengan memperluas coverage Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal kewenangan penetapan tarif. Dalam hal pengawasan pungutan daerah telah diubah dari represif menjadi preventif yaitu setiap Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan berlaku penuh pada 5 Januari 2025, dimana Undang-Undang tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan pungutan meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Terhadap pungutan tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdapat kewajiban Pemerintah Provinsi untuk membagikan sebagian perolehan pungutan Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan melalui Bagi Hasil dan Opsen Pajak.

Opsen atas PKB dan BBNKB merupakan peralihan dari sistem bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dirumuskan oleh

Pemerintah Pusat dengan tujuan peningkatan kemandirian Daerah, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Adapun upaya peningkatan penerimaan PAD dilakukan melalui kegiatan intensifikasi sektor pungutan Pajak Daerah utamanya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), diantaranya penyampaian administrasi perpajakan secara elektronik, penagihan pajak daerah serta meningkatkan/menambah jumlah titik pelayanan pembayaran pajak. Beberapa model pelayanan yang telah dikembangkan adalah: Samsat Link, Samsat Drive-Thru, Samsat Corner, Samsat Payment

Point, Samsat Mobil Keliling, e-samsat, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Samsat, Samsat Pos, Samsat Kampus, Samsat Koperasi Indonesia (SAMKOPI), serta pengembangan Samsat online lainnya yang dioperasikan bersama dengan mitra swasta, marketplace, Lembaga Pembiayaan, BUMDesa, Pondok Pesantren maupun Perbankan.

Pada sisi lain, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah dilakukan Rasionalisasi yang bertujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat memperoleh manfaat langsung dari fasilitas yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 Ayat (4) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain: Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan

Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir termasuk didalamnya Pendapatan atas layanan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

Selanjutnya, Dana Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 1 pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kelompok pendapatan dana transfer TKD dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah merupakan bagian dari TKD

yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana Alokasi Umum menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. Dana Alokasi Khusus menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

Prediksi penerimaan dari Pendapatan Transfer dilakukan berdasarkan penetapan Pemerintah Pusat melalui alokasi pembagian sementara dan definitif untuk Pemerintah Provinsi oleh Kementerian Keuangan, sehingga

penetapan target hanya bersifat koordinatif dan konfirmasi, sedangkan untuk pemetaan potensi obyek pajak tetap dalam kendali Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi hanya melaksanakan fungsi rekonsiliasi / pencocokan kas antara besaran alokasi Pemerintah Pusat dan besaran penerimaan bagian Pemerintah Provinsi. Kondisi ini berlaku pula pada sektor bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, sehingga diperlukan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan terkait data bagi hasil penerimaan

Kelompok Pendapatan Daerah yang terakhir adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sesuai ketentuan pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami progress yang baik dengan ditandai selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain Pajak Daerah, karena pembatasan objek pungutan, jenis pendapatan lain utamanya

Retribusi Daerah serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah relatif mengalami diversifikasi objek pungutan serta perubahan tarif layanan yang ditetapkan baik melalui Peraturan Daerah,

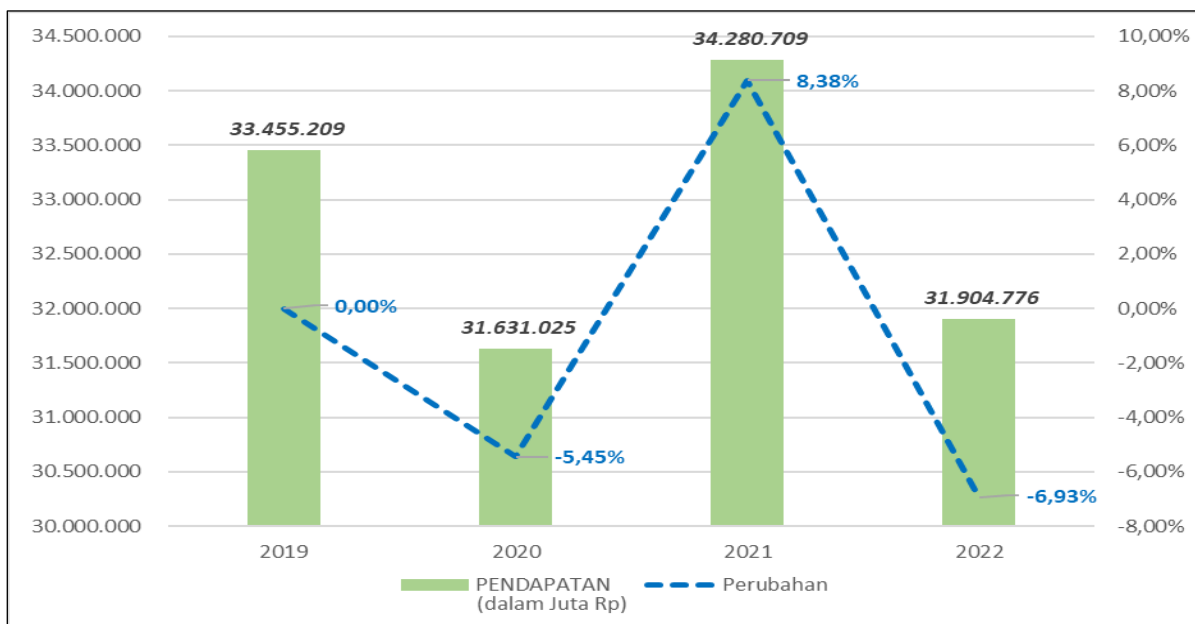
Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.

Kinerja realisasi pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3. 3 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2022 (dalam juta rupiah)

NO	PENDAPATAN	2019	2020	2021	2022
1b	PENDAPATAN	33.455.209	31.631.025	34.280.709	31.904.776
1b.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	19.327.125	17.950.997	18.935.886	21.256.651
1b.1.1	Pajak Daerah	15.522.201	14.412.667	15.400.864	17.573.322
1b.1.2	Retribusi Daerah	146.816	84.103	110.951	119.974
1b.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	402.299	417.764	408.640	441.444
1b.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	3.255.810	3.036.462	3.015.430	3.121.912
1b.2	PENDAPATAN TRANSFER	14.015.983	13.575.795	15.194.249	10.563.740
1b.2.1	Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	13.941.687	13.480.112	15.134.312	10.496.480
1b.2.2	Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	73.795	95.683	52.438	67.259
1b.2.3	Transfer Pemerintah Daerah- Lainnya	-	-	7.500	-
1b.2.4	Bantuan Keuangan	500	-	-	-
1b.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	112.101	104.233	150.574	84.386
1b.3.1	Pendapatan Hibah	112.101	104.233	148.231	68.215
1b.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
1b.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	2.342	16.170

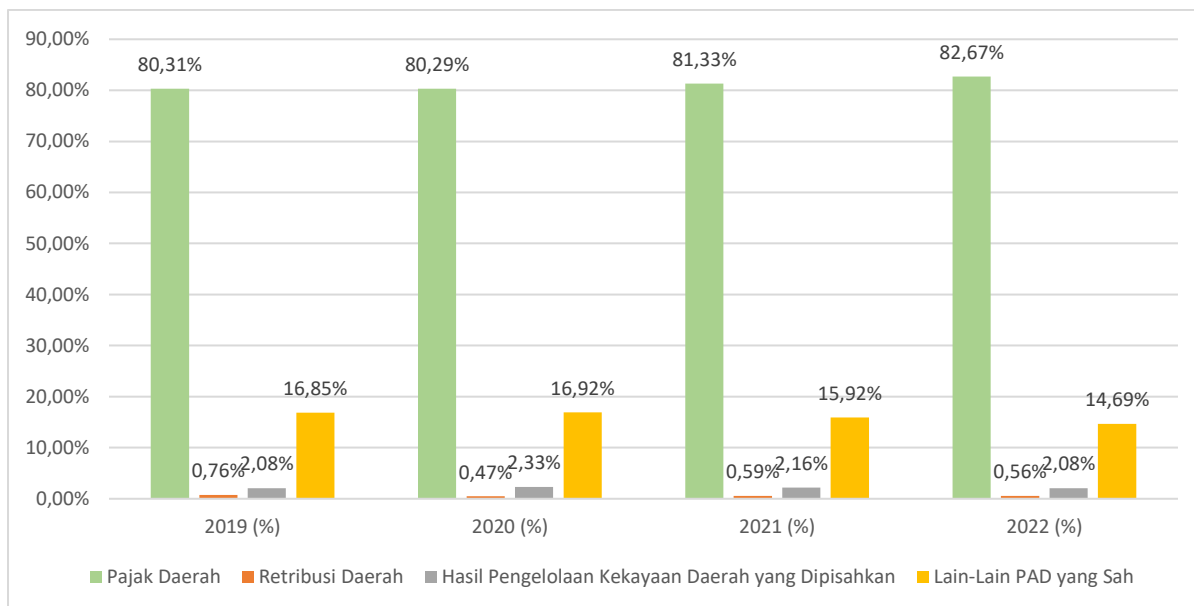
Gambar 3. 6 Perubahan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022



Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2019 tercatat sebesar Rp 33,46 Triliun. Pada 2020 Pandemi COVID-19 melanda seluruh Dunia termasuk Indonesia khususnya Jawa Timur, hal ini mempengaruhi pendapatan daerah yang turun sebesar 5,45% dari tahun 2019 atau sejumlah Rp 31,63 Triliun. Pada Tahun Anggaran 2021 pendapatan daerah mencatat angka sebesar Rp 34,28 Triliun atau mengalami kenaikan 8,38% dibandingkan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020. Pada Tahun Anggaran 2022 pendapatan daerah tercatat 31,9 Triliun, dengan adanya penurunan Dana Transfer sebesar 30,48% dari tahun 2021.

Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur pada Tahun 2019-2024 didominasi oleh Pajak Daerah, tercatat pada tahun 2022 pajak daerah memiliki kontribusi sebesar 82,67%, diikuti dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 14,69%, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 2,08%, dan yang terakhir adalah Retribusi Daerah 0,56%. Kontribusi Retribusi Daerah yang masih minim menjadi perhatian tersendiri. Mengantisipasi hal tersebut terus dilakukan optimalisasi objek pendapatan dari sektor Retribusi Daerah.

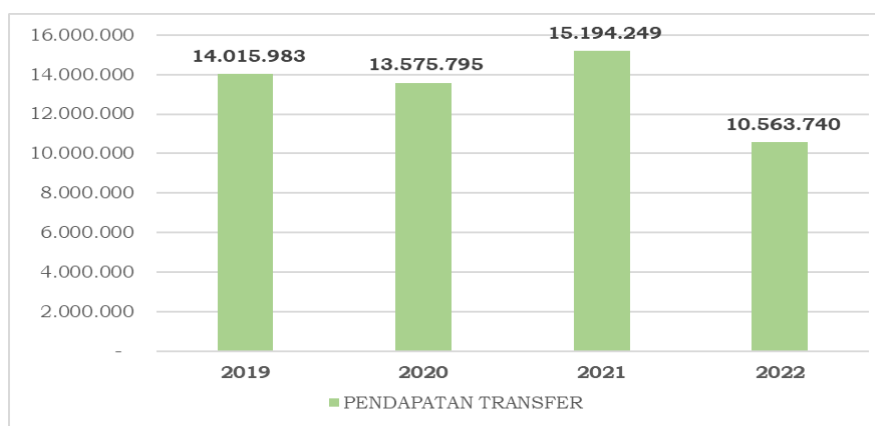
Gambar 3. 7 Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022



Realisasi tren dana perimbangan Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2022, terdapat penurunan yang signifikan pada Tahun Anggaran 2022 jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021. Hal ini disebabkan karena Dana Transfer untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diperuntukkan untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur, pada tahun 2022 tidak lagi disalurkan melalui Pemerintah

Provinsi Jawa Timur melainkan langsung disalurkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut mengenai tren akan dana perimbangan, secara pertumbuhan trennya melambat, pada tahun 2022 dana perimbangan berkurang 4,63 Triliun menjadi 10,56 triliun Rupiah atau turun 30,48% dari tahun 2021.

Gambar 3. 8 Trend Dana Transfer Ke Daerah (TKD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022



Komposisi pendapatan yang berasal dari jenis Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berdasarkan realisasi pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan secara nominal per tahunnya kendati secara pertumbuhan masih berfluktuatif. Sebagaimana diuraikan di atas, terhadap

gambaran kinerja Pendapatan Daerah secara garis besar utamanya terhadap Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan optimalisasi sumber penerimaan melalui strategi pendapatan yang tepat sehingga diharapkan melalui arah kebijakan yang sesuai dengan kondisi makro ekonomi regional dan daerah maka Pendapatan Daerah dapat dioptimalkan lagi.

3.2.2.2 Belanja Daerah

Sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan

Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

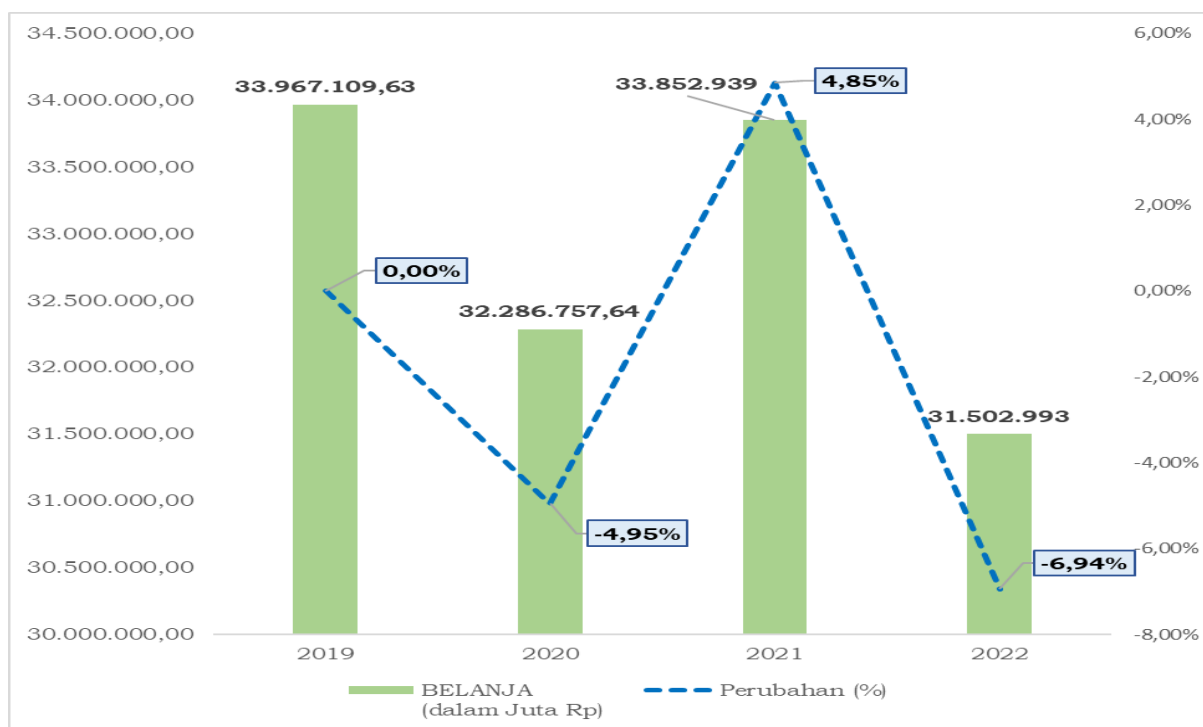
Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Tabel 3. 4 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019-2022 (dalam juta rupiah)

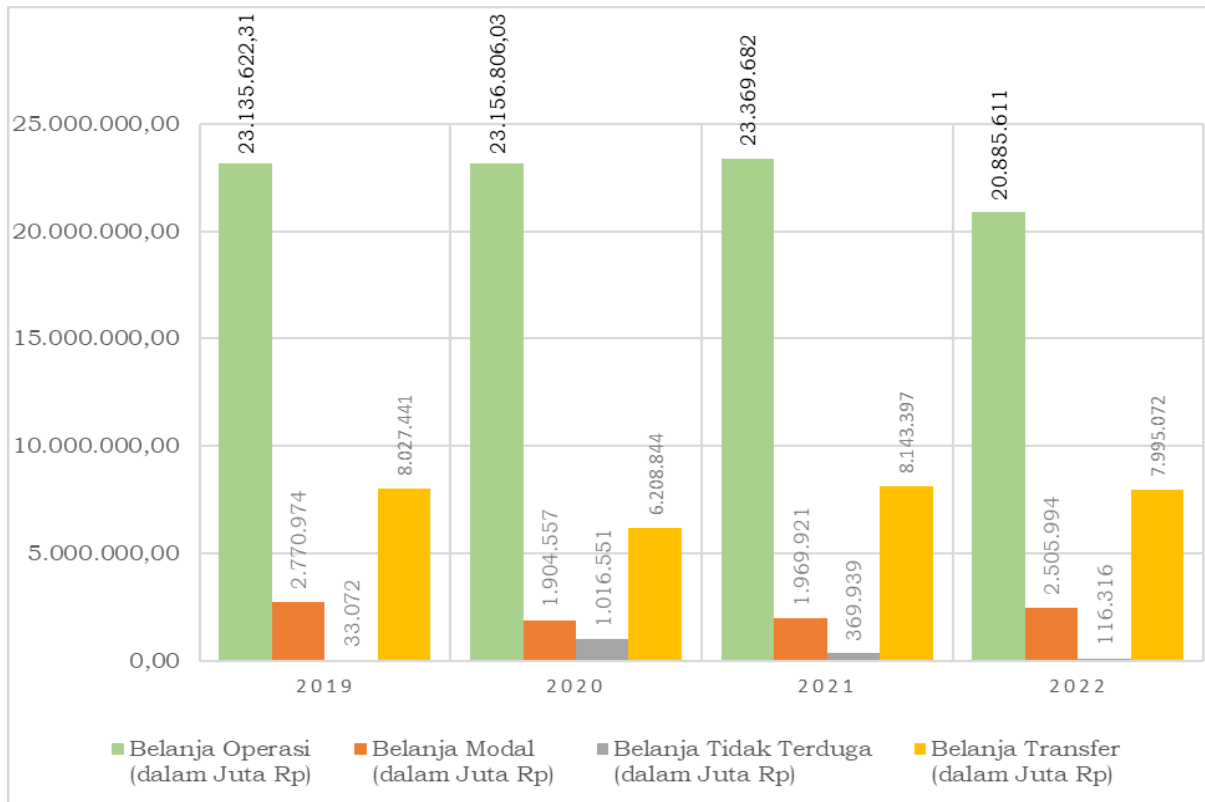
No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2b	BELANJA	33.967.109,63	32.286.757,64	33.852.939	31.502.993
2b.1	Belanja Operasi	23.135.622,31	23.156.806,03	23.369.682	20.885.611
2b.1.1	Belanja Pegawai	7.988.531,67	7.605.952,24	6.988.563	7.374.401
2b.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.459.621	5.910.184	7.300.024	7.969.604
2b.1.3	Belanja Bunga	10.603	12.340	0	0

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2b.1.4	Belanja Subsidi	28.851	28.804	0	15.097
2b.1.5	Belanja Hibah	8.576.572	9.514.407	8.988.623	5.381.891
2b.1.6	Belanja Bantuan Sosial	71.445	85.119	92.472	144.618
2b.2	Belanja Modal	2.770.974	1.904.557	1.969.921	2.505.994
2b.2.1	Belanja Modal	2.770.974	1.904.557	1.969.921	2.505.994
2b.3	Belanja Tidak Terduga	33.072	1.016.551	369.939	116.316
2b.3.1	Belanja Tidak Terduga	33.072	1.016.551	369.939	116.316
2b.4	Belanja Transfer	8.027.441	6.208.844	8.143.397	7.995.072
2b.4.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	7.258.424	5.457.179	7.563.629	7.295.847
2b.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	769.018	751.665	579.769	699.225

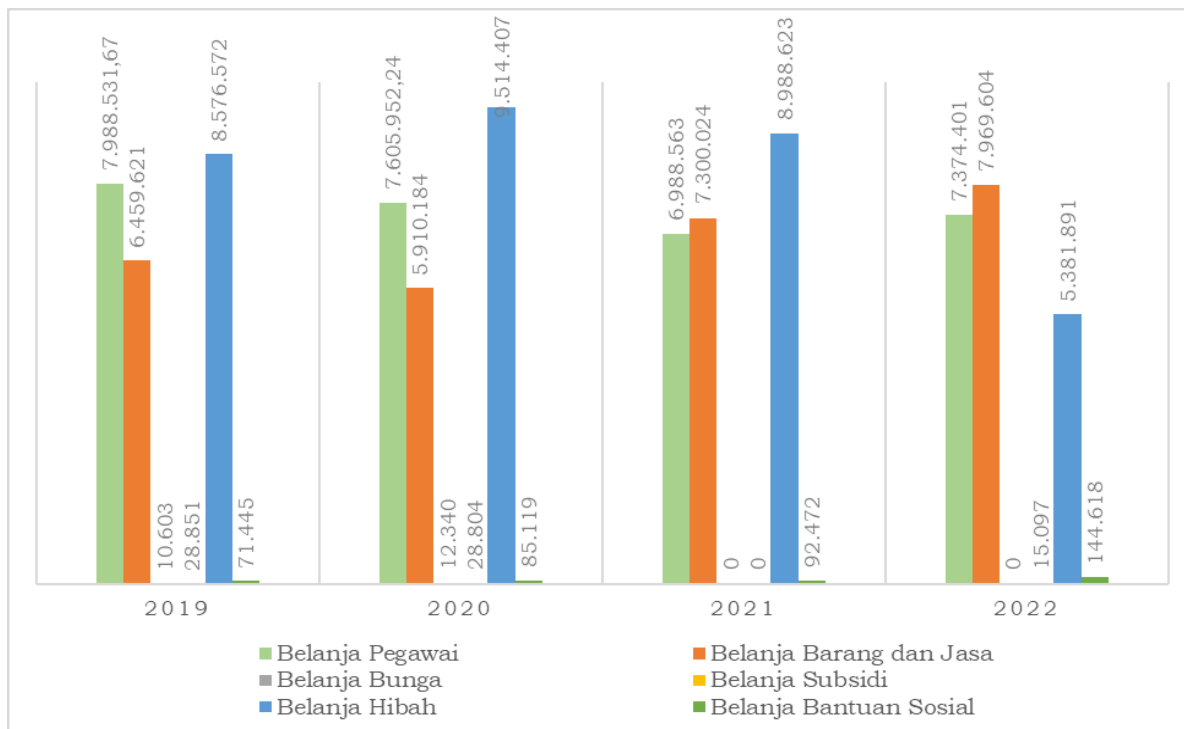
Gambar 3. 9 Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019-2022 (dalam juta rupiah)



Gambar 3. 10 Komposisi Belanja Daerah Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022 (dalam juta Rupiah)



Gambar 3. 11 Komposisi Belanja Operasi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022



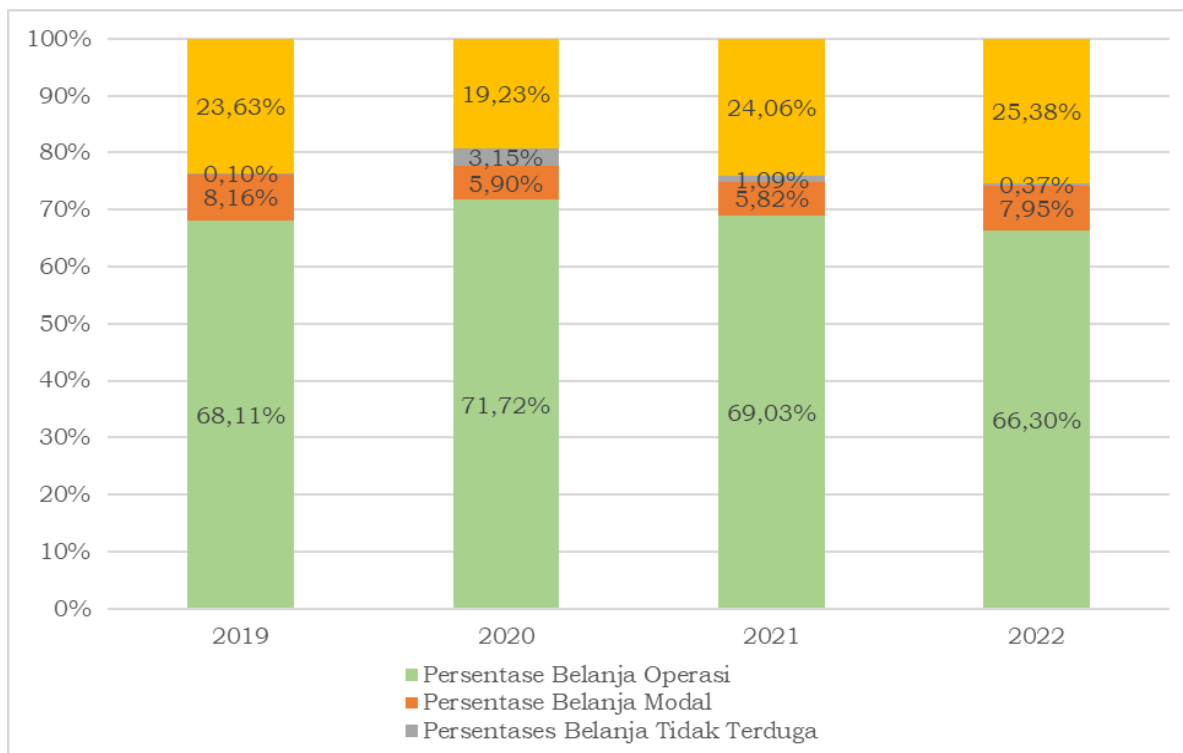
Kekuatan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang fluktuatif pada periode Tahun Anggaran 2019-2022. Dari Tahun Anggaran 2019 Realisasi Belanja Daerah sebesar 33,96 Triliun Rupiah lebih dan mengalami penurunan menjadi sebesar 32,29 Triliun Rupiah lebih pada Tahun Anggaran 2020, selanjutnya mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 33,82 Triliun pada tahun 2021 dan mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 31,5 Triliun pada 2022, sehingga terjadi pertumbuhan rata-rata 2,48%.

Pada kelompok Belanja Operasi terdapat peningkatan pada Jenis Belanja Bunga yang diakibatkan pada periode Tahun Anggaran 2015-2020 beberapa Rumah Sakit yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RSUD Dr. Soedono Madiun dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang) melakukan perjanjian pinjaman daerah kepada PT. Bank Jatim yang dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung layanan.

Selain belanja bunga, kenaikan presentase cukup signifikan juga terjadi pada Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung). Kenaikan pada tahun 2017 disebabkan karena sejak Tahun Anggaran 2017 terdapat alokasi anggaran untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017.

Pada periode selanjutnya, selisih presentase antara belanja langsung dan tidak langsung terhadap belanja daerah semakin membesar. Dimana pada 2019 presentase belanja tidak langsung terhadap belanja daerah adalah 68,58% sedangkan presentase belanja langsung terhadap belanja daerah adalah 31,42%, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 2018 yang sebelumnya presentase belanja tidak langsung terhadap belanja daerah hanya 66,99% seiring dengan meningkatnya komponen-komponen yang memberikan sumbangsih terbesar terhadap belanja langsung seperti belanja pegawai tidak langsung, belanja hibah, dan belanja bagi hasil.

Gambar 3. 12 Presentase Komposisi Belanja Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022



3.3.2.1. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis ini juga menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mencukupi pembiayaan akibat selisih pendapatan dengan alokasi belanja. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan

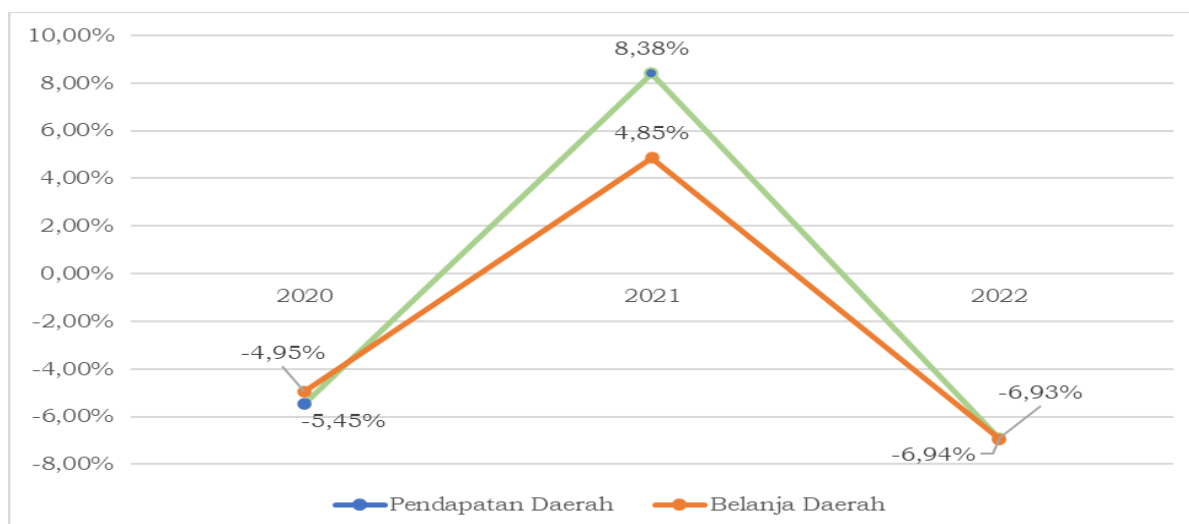
modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Perkembangan Pembiayaan selama tahun 2019-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 5 Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2022 (dalam juta rupiah)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN	4.881.242,79	4.355.766,06	3.651.611	4.044.541
3.1	Penerimaan Pembiayaan	4.955.848,28	4.391.517,49	3.732.431	4.079.381
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	74.605	35.751	80.820	34.840

Gambar 3. 13 Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan dan Pertumbuhan Belanja Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020-2022



Tabel 3. 6 Defisit Riil Anggaran Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020-2022 (dalam juta rupiah)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Realisasi Pendapatan Daerah	33.455.209	31.631.025	34.280.709	31.904.776
	Dikurangi realisasi :				
2	Belanja Daerah	33.967.109,63	32.286.757,64	33.852.939	31.502.993
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	74.605	35.751	80.820	34.840
	Surplus Riil	-586.505,63	-691.483,64	346.950	366.943

3.4 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2023- 2026

Proyeksi kerangka keuangan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023-2026 disusun berdasarkan hasil analisis

3.4.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023 – 2026

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023 – 2026 didasarkan target Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023-2026, serta data APBD Tahun 2019-2022 dan data APBD tahun 2023 semester pertama. Berdasarkan hal tersebut, beberapa asumsi yang menjadi pertimbangan dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah yaitu kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup tinggi, dari proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada tahun 2022 memiliki nilai sebesar 66,63% dan rata-rata dari tahun 2019-2022 dalam besaran 59,10%. Adapun untuk proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD tahun 2023 turun menjadi 66,02% disebabkan karena terdapat peningkatan Dana Transfer dari Kurang Bayar/Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada P-APBD 2023.

Namun demikian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang akan berlaku pada tahun 2025, persentase PAD

atas realisasi keuangan daerah tahun 2019-2024, kondisi keuangan daerah tahun 2023-2024, dan asumsi kondisi daerah tahun 2023-2026.

terhadap total Pendapatan Daerah pada tahun 2025-2026 diproyeksikan mengalami penurunan. Dengan berlakunya Undang-Undang terkait HKPD tersebut, terdapat perubahan mekanisme dan formulasi Bagi Hasil Pajak PKB dan BBNKB menjadi Opsen Pajak PKB dan BBNKB.

Adapun kontribusi terbesar PAD Provinsi Jawa Timur adalah berasal dari Pajak Daerah yang pada tahun 2022 memiliki nilai sebesar 82,67% dari total PAD. Proyeksi pada komponen Pendapatan Asli Daerah dirumuskan berdasarkan asumsi berapa jumlah dana yang dibutuhkan dalam halnya mencapai target pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dengan harapan nilai yang dihasilkan dapat menjadi target yang harus dicapai dalam halnya mencapai pertumbuhan ekonomi daerah pada periode tertentu. memperhatikan karakteristik Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), merupakan pajak langsung bersifat periodikal

dihitung berdasarkan potensi objek pajak. Prediksi perubahan jumlah objek selama tiga tahun kedepan dengan memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2025 mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD beserta aturan turunannya yang mengatur terkait dengan PKB. Besaran tarif PKB yang awalnya masih sesuai dengan Perda No 9 Tahun 2010 sebesar 1,5% disesuaikan menjadi sebesar 1,2%;
- b. Prediksi jumlah wajib pajak yang tidak melaksanakan penelitian ulang (tidak patuh tahunan) sebesar 10% setiap tahunnya;
- c. Prediksi pertumbuhan kendaraan baru moderat, dengan proyeksi pertumbuhan potensi kendaraan baru seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata di Jawa Timur selama tahun 2018-2023 yaitu sebesar 3,51%. Dengan demikian, prediksi Pertambahan jumlah objek kendaraan baru diperkirakan berada pada rentang 3% sampai dengan 3,5%;
- d. Prediksi objek mutasi masuk dan mutasi keluar yang jumlahnya tidak terlalu signifikan (dibawah 1%);
- e. Belum memperhitungkan potensi apabila dilakukan

kebijakan insentif / keringanan Pajak.

2. **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**, merupakan pajak tidak langsung yang sifatnya non periodikal, dipungut apabila terjadi peralihan kepemilikan kendaraan bermotor, proyeksinya dihitung berdasarkan perkiraan penjualan kendaraan baru oleh GAIKINDO dan AISI, selaku asosiasi produsen kendaraan bermotor Roda 4 dan Roda 2 di Indonesia. Pada tahun 2025 mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD beserta aturan turunannya yang mengatur terkait dengan BBNKB. Besaran tarif BBNKB yang awalnya masih sesuai dengan Perda No 9 Tahun 2010 sebesar 12,5% disesuaikan menjadi sebesar 12%. Bersamaan dengan hal tersebut, pada sektor BBNKB hanya dikenakan pada penyerahan pertama sehingga untuk BBN atas peralihan kedua dan seterusnya tidak dikenakan serta kendaraan bermotor listrik dengan pertumbuhan signifikan masih diberikan kebijakan bebas BBNKB oleh pemerintah. Berdasarkan data 5 tahun kebelakang, perkembangan objek kendaraan bermotor di Jawa Timur menunjukkan tren perlambatan dengan rata-rata sebesar -5,42%. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan negatif objek

kendaraan baru jenis R2 yang mencapai -5,51% serta objek kendaraan baru jenis R4 menunjukkan tren perlambatan dengan rata-rata sebesar -4,38%. Meskipun target dari GAIKINDO dan AISI secara nasional terus mengalami kenaikan, namun proporsi kendaraan baru di Jawa Timur mengalami penurunan. Pertumbuhan realisasi penerimaan BBNKB rata-rata di Jawa Timur selama tahun 2018-2023 menunjukkan angka 2,02%. Sehingga dengan memperhatikan data-data tersebut, maka jumlah pertambahan potensi kendaraan baru di Jawa Timur diperkirakan berada pada rentang rata-rata pertumbuhan di kisaran 2,02%.

3. **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**, dihitung Berdasarkan perkiraan penyaluran Bahan Bakar Minyak oleh penyedia di wilayah Jawa Timur dan perkiraan harga jual bahan bakar minyak oleh Pemerintah yang nilainya selalu berubah mengikuti perkembangan harga jual minyak mentah dunia dan nilai tukar mata uang asing. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan PBBKB di Jawa Timur tahun 2017-2021 sebesar 1,71% per tahun.
4. **Pajak Air Permukaan**, dihitung berdasarkan jumlah konsumsi air permukaan dan nilai perolehan air, yang dipengaruhi

oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Perubahan cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;
- b. Fluktuasi konsumsi air yang dipengaruhi oleh cuaca, dimana pada musim penghujan konsumsi akan berkurang, sebaliknya pada musim kemarau akan terjadi peningkatan konsumsi air permukaan.

5. **Pajak Rokok**, dihitung berdasarkan prediksi jumlah cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi. Selain itu hal yang sangat berpengaruh adalah komitmen terhadap partisipasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yaitu sebesar 37,5% dari penerimaan Pajak Rokok, yang apabila tidak diaksanakan akan dipotong langsung oleh Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2023 Pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang menyebabkan

lesunya produksi rokok dan maraknya rokok ilegal sehingga berdampak pada penurunan penerimaan pajak rokok.

6. Pajak Alat Berat, merupakan pajak kepada orang atau badan atas kepemilikan alat berat. Pajak Alat Berat merupakan jenis pendapatan baru Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan berlaku mulai tahun 2025 berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan tata cara pelaksanaan

restitusi yang diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur.

7. Opson Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, merupakan pendapatan dari Opson atas pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah dipungut oleh Kabupaten/Kota. Opson tersebut juga merupakan jenis pendapatan baru Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan berlaku mulai tahun 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Tabel 3. 7 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026

No.	Uraian	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1b	PENDAPATAN	32.826.282	31.418.165	25.996.649	25.563.871
1b.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	21.672.944	20.392.169	16.329.297	16.344.593
1b.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	18.104.150	16.792.260	12.656.771	12.708.471
1b.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	95.748	95.093	93.538	85.756
1b.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	471.792	467.563	468.638	482.943
1b.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	3.001.253	3.037.253	3.110.350	3.067.423
1b.2	PENDAPATAN TRANSFER	11.125.134	10.996.697	9.667.352	9.219.278
1b.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN	11.125.134	10.996.697	9.667.352	9.219.278
1b.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA	-	-		
1b.2.3	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH- LAINNYA	-	-		
1b.2.4	BANTUAN KEUANGAN	-	-		
1b.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	28.204	29.299	-	-
1b.3.1	Pendapatan Hibah	28.204	29.299		
1b.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-		
1b.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-		

3.4.2. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023 – 2026

Kerangka pendanaan pembangunan dalam dua tahun mendatang dilakukan dengan menghitung kapasitas riil keuangan daerah. Komponen penghitungan kapasitas riil ini adalah penerimaan daerah serta pengeluaran daerah. Penerimaan daerah meliputi pendapatan daerah (PAD, dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sah) serta penerimaan pembiayaan daerah (pencairan dana cadangan dan perhitungan perki-raan awal SiLPA). Sementara itu, pengeluaran daerah meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk memenuhi ketiga prioritas dimaksud. Dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian formulasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah dengan tidak menyertakan Belanja Tidak Langsung sebagai komponen pengurang Penerimaan, hal ini karena semua jenis belanja telah diakomodir dalam Program Pembangunan.

Proyeksi belanja tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Perubahan APBD Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil realisasi semester 1 tahun 2023. Sedangkan Proyeksi belanja 2024 sebagaimana yang telah disepakati dalam Nota Kesepakatan Raperda APBD 2024, disusun berdasarkan perumusan sasaran strategi dan program pembangunan daerah dalam rangka mengatasi permasalahan dan isu strategis Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Kondisi proyeksi belanja tahun 2023 dan tahun 2024 menjadi salah satu dasar dalam proyeksi perhitungan belanja tahun 2025-2026 serta mempertimbangkan berkurangnya pendapatan setelah berlaku Undang-undang terkait HKPD, sehingga total belanja tahun 2025-2026 diproyeksikan menurun.

Gambaran tentang Belanja Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2023-2026 mendatang, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 8 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023-2026

No.	Uraian	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2b	BELANJA	37.140.208	33.265.022	27.484.811	26.791.924
2b.1	Belanja Operasi	23.364.448	22.319.102	20.350.010	19.886.994
2b.1.1	Belanja Pegawai	8.324.473	9.494.420	9.641.457	9.433.591
2b.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.005.451	8.472.454	7.602.455	7.808.641

No.	Uraian	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2b.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0
2b.1.4	Belanja Subsidi	13.285	49.000	32.045	34.411
2b.1.5	Belanja Hibah	4.847.156	4.163.412	2.936.529	2.457.011
2b.1.6	Belanja Bantuan Sosial	174.084	139.816	137.525	153.340
2b.2	Belanja Modal	2.947.122	2.156.376	1.705.652	1.573.239
2b.2.1	Belanja Modal	2.947.122	2.156.376	1.705.652	1.573.239
2b.3	Belanja Tidak Terduga	699.609	290.099	300.000	300.000
2b.3.1	Belanja Tidak Terduga	699.609	290.099	300.000	300.000
2b.4	Belanja Transfer	10.129.030	8.499.445	5.129.149	5.031.690
2b.4.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	9.550.593	7.560.352	4.302.121	4.194.692
2b.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	578.437	939.093	827.028	836.998

Arah kebijakan belanja daerah selama 2 tahun yang akan datang, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas Pertama

Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
- c. Belanja Moda Transportasi, besarnya 10% dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok, 70 % untuk BBH kab/kota, 30% hak provinsi dengan komposisi: 50% specific grant dan 50% block grant, dari yang 50% specific grant, 75 % untuk iuran JKN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk

Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Sedangkan Belanja Mengikat atau (*Mandatory Expenditure*), digunakan untuk sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai. Belanja Pegawai yang digunakan untuk Belanja Pegawai BLUD dan Belanja Pegawai BOS, Honor Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan Sistem Informasi;
- b. Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok
- c. Belanja DAK BOS;
- d. Belanja Operasional Kantor; dan
- e. Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD).

Selain itu juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Moda Transportasi, Belanja Infrastruktur, Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.

2. Prioritas Kedua

Selain untuk memenuhi prioritas pertama, kapasitas riil juga digunakan untuk memenuhi

belanja dalam rangka menjalankan prioritas RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 yang terdiri dari:

- a. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial
- b. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun ke-unggulan ekonomi
- c. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan
- d. Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan
- e. Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas
- f. Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan
- g. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa
- h. Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi
- i. Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

3. Prioritas Ketiga

Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

3.4.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2026

Proyeksi atas penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023-2026 terdiri atas dua komponen, yaitu penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Proyeksi Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2023-2026 dirumuskan melalui perhitungan proyeksi Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Proyeksi SiLPA terbagi atas:

- a. SiLPA Sumber Dana Transfer**, digunakan kembali dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai sumber dana terkait. SiLPA dari Sumber Dana Transfer diantaranya yaitu:
 - 1) SiLPA Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik;
 - 2) SiLPA Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan SiLPA Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR)
- b. SiLPA Fungsional BLUD**, merupakan SiLPA hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah

BLUD. Penggunaan atas SiLPA BLUD kembali pada Perangkat Daerah penghasil pendapatan BLUD yang bersangkutan.

- c. SiLPA dari sumber dana non-earmarked**, yaitu SiLPA yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat non-earmarked.

Pada tahun 2023, komponen penerimaan pembiayaan Provinsi Jawa Timur terdiri dari SiLPA dan Pencairan Dana Cadangan Pilkada Serentak. Demikian juga untuk pengeluaran pembiayaan tahun 2023, terdapat komponen Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Serentak. Selanjutnya terhadap proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2024-2026, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak lagi membentuk dana cadangan maupun pencairan dana cadangan, sehingga proyeksi atas pengeluaran pembiayaan tahun 2023-2026 tersisa pembayaran pokok utang Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3. 9 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2026

No.	Uraian	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN	4.313.926	1.846.857	1.488.162	1.228.053
3.1	Penerimaan Pembiayaan	5.046.325	1.856.034	1.497.339	1.237.229
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	732.399	9.177	9.177	9.177

3.4.4. Kerangka Pendanaan Daerah Indikatif Tahun 2023-2026

Proyeksi atas kerangka pendanaan daerah indikatif tahun 2023-2026 menjadi dasar penghitungan proyeksi pagu indikatif seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023-2026. Melalui analisis dan asumsi atas

pendapatan daerah, belanja daerah, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, maka kerangka pendanaan daerah indikatif tahun 2023-2026 telah dirumuskan pada tabel berikut:

Tabel 3. 10 Kerangka Pendanaan Daerah Indikatif Tahun 2023-2026

No.	Uraian	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1b	PENDAPATAN	32.826.282	31.418.165	25.996.649	25.563.871
1b.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	21.672.944	20.392.169	16.329.297	16.344.593
1b.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	18.104.150	16.792.260	12.656.771	12.708.471
1b.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	95.748	95.093	93.538	85.756
1b.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	471.792	467.563	468.638	482.943
1b.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	3.001.253	3.037.253	3.110.350	3.067.423
1b.2	PENDAPATAN TRANSFER	11.125.134	10.996.697	9.667.352	9.219.278
1b.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1.125.134	10.996.697	9.667.352	9.219.278
1b.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	-	-		
1b.2.3	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH-LAINNYA	-	-		
1b.2.4	BANTUAN KEUANGAN	-	-		
1b.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	28.204	29.299	-	-
1b.3.1	Pendapatan Hibah	28.204	29.299		
1b.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-		
1b.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-		
2b	BELANJA	37.140.208	33.265.022	27.484.811	26.791.924
2b.1	Belanja Operasi	23.364.448	22.319.102	20.350.010	19.886.994
2b.1.1	Belanja Pegawai	8.324.473	9.494.420	9.641.457	9.433.591
2b.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.005.451	8.472.454	7.602.455	7.808.641

No.	Uraian	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2b.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0
2b.1.4	Belanja Subsidi	13.285	49.000	32.045	34.411
2b.1.5	Belanja Hibah	4.847.156	4.163.412	2.936.529	2.457.011
2b.1.6	Belanja Bantuan Sosial	174.084	139.816	137.525	153.340
2b.2	Belanja Modal	2.947.122	2.156.376	1.705.652	1.573.239
2b.2.1	Belanja Modal	2.947.122	2.156.376	1.705.652	1.573.239
2b.3	Belanja Tidak Terduga	699.609	290.099	300.000	300.000
2b.3.1	Belanja Tidak Terduga	699.609	290.099	300.000	300.000
2b.4	Belanja Transfer	10.129.030	8.499.445	5.129.149	5.031.690
2b.4.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	9.550.593	7.560.352	4.302.121	4.194.692
2b.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	578.437	939.093	827.028	836.998
3	PEMBIAYAAN	4.313.926	1.846.857	1.488.162	1.228.053
3.1	Penerimaan Pembiayaan	5.046.325	1.856.034	1.497.339	1.237.229
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	732.399	9.177	9.177	9.177



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



RPD JAWA TIMUR

2025
2026

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2019-2024 telah membuahkan hasil yang diharapkan, akan tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan. Berbagai permasalahan yang dihadapi Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten/kota, provinsi, nasional maupun global. Permasalahan-permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah disajikan pada gambaran umum daerah bab 2, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

1. Rendahnya produktivitas dan nilai tambahnya sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah.

Tidak meratanya distribusi ekonomi di wilayah Jawa Timur, dimana ekonomi Jawa Timur masih didominasi oleh wilayah Gerbangkertosusila Plus dengan

kontribusi diatas 50 persen yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan serta Bojonegoro, Tuban dan Jombang. Sedangkan wilayah Madura Kepulauan berkontribusi kurang dari 5 persen, Kawasan Selingkar Ijen berkontribusi kurang dari 10

persen serta Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) dan Kawasan Selingkar Wilis kontribusinya kurang dari 20 persen. Kawasan yang memiliki potensi agro masih terbatas produktivitas serta nilai tambahnya dalam pengembangan ekonomi wilayahnya.

2. Kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan belum merata

Di berbagai belahan dunia, terutama di beberapa negara berkembang, terdapat tantangan serius terkait belum meratanya kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi. Permasalahan ini menciptakan dampak yang signifikan pada ketahanan pangan dan ketahanan energi, mengakibatkan kerentanan masyarakat terhadap fluktuasi harga pangan global dan ketergantungan pada sumber energi yang tidak berkelanjutan.

Beberapa permasalahan yang muncul diantaranya ketergantungan pada impor pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ketergantungan ini membuat negara tersebut rentan terhadap fluktuasi harga global dan perubahan kebijakan

perdagangan internasional, praktek-praktek pertanian yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan lahan pertanian untuk perumahan sehingga memperngaruhi penurunan produktivitas pertanian sehingga hal ini mengancam ketersediaan pangan dalam jangka panjang. Dan salah satu upaya yang harus dilakukan adalah pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang di Jawa Timur belum termanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

3. Sarana prasarana pelayanan dasar publik serta konektivitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah belum merata.

Belum meratanya sarana prasarana pelayanan dasar publik berdampak terhadap perkembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan distribusi manfaat pembangunan secara keseluruhan. Selain itu masih belum seimbangannya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi antara wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Timur disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur yang

belum merata baik infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air maupun transportasi.

4. Potensi konflik sosial dan relatif tingginya angka kekerasan terhadap Perempuan dan anak serta perkawinan anak

Diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya dapat menciptakan ketimpangan gender yang dapat menjadi pemicu konflik sosial. Kurangnya Program pemberdayaan ekonomi untuk perempuan dan pemuda guna mengurangi ketergantungan ekonomi yang mungkin menjadi faktor penyebab perkawinan anak, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak serta rendahnya tingkat pendidikan dapat menciptakan lingkungan di mana kekerasan dapat dianggap wajar.

5. Tingkat kesejahteraan Masyarakat tergolong masih rendah;

Salah satu permasalahan mendasar adalah tingginya tingkat kemiskinan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuh-

an dasar seperti makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini harus menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, meskipun secara prosentase kemiskinan di Jawa Timur masuk dalam kategori menengah tetapi secara jumlah absolut Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia.

6. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia;

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia sangat erat dengan kualitas dan fasilitas Pendidikan disebabkan kurangnya akses dan kualitas Pendidikan, tingginya angka putus sekolah, terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

7. Kesadaran Masyarakat masih rendah dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal.

Beberapa kompleksitas tantangan dan permasalahan dalam upaya pelestarian warisan budaya antara lain:

- a. Ancaman globalisasi dan digitalisasi yang berpotensi menyebabkan hilangnya warisan budaya

- b. Lemahnya pendidikan formal dan informal tentang warisan budaya.
- c. Rendahnya kesadaran, partisipasi serta minat masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
- d. Terbatasnya pelaku budaya

Kondisi diatas banyak dipengaruhi atas kondisi kurangnya pendidikan formal dan informal tentang nilai-nilai budaya lokal dapat mengakibatkan minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melestarikan warisan budaya. Kondisi tersebut dapat juga dipengaruhi kondisi teknologi global dan media sosial dapat menciptakan tren dan norma global yang merata, mengaburkan perbedaan budaya lokal dan mengurangi keinginan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional.

8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

Tekanan terhadap lingkungan hidup semakin meningkat seiring dengan terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, perubahan pola hidup masya-

rakat, serta perubahan iklim. Kondisi kualitas lingkungan hidup yang menurun sangat erat kaitannya dengan peningkatan kejadian bencana terutama bencana hidrometeorologi yang meningkat seiring dengan adanya perubahan iklim. Oleh karena itu peningkatan kapasitas masyarakat terhadap risiko bencana merupakan aspek penting dalam meminimalisir dampak kejadian bencana.

9. Perlunya peningkatan tata kelola pemerintah yang bersih dan adaptif.

Seiring dengan kompleksitas tuntutan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih memiliki beberapa proses bisnis dalam pelayanan yang birokrasinya begitu panjang. Dalam praktiknya, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di era penyederhanaan birokrasi yang harusnya terpangkas namun pada kenyataannya masih melewati banyak tahapan. Selain itu masih banyak terdapat duplikasi tugas dan fungsi pada Organisasi Perangkat Daerah dan gemuknya Unit Organisasi yang berpengaruh besar pada belanja aparatur. Perlunya menciptakan aparatur

pemerintah yang memiliki kapasitas, integritas dan profesionalitas sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Seiring berkembangnya waktu pemerintahan juga memerlukan sistem kerja yang dinamis dan adaptif, sehingga dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memfokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

Penguatan kualitas tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik tentunya beriringan dengan kondisi

Trantibumlinmas. Dimana ketika Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih dan adaptif menciptakan lingkungan pada masyarakat yang aman dan reponsif pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan terkait penanganan gangguan trantibum masih belum optimal. Kondisi ini dipicu dikarenakan belum optimalnya integrasi sistem penyelesaian gangguan trantibumlinmas dengan instansi terkait, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam pelaporan, dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibumlinmas dan belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi/pengaduan gangguan Trantibumlinmas.

4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Dari hasil kajian terhadap kondisi Provinsi Jawa Timur dari berbagai aspek pembangunan dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat global, nasional, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Provinsi Jawa Timur.

Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan

sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa

datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 2 tahun ke depan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

4.2.1 Isu Global

Isu global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence). Sementara itu, adanya pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru (new normal).

Isu strategis dan tantangan memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan

disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut dan menjadi isu global, meliputi:

1. Perkembangan demografi global;
2. Geopolitik dan geoekonomi;
3. Perkembangan teknologi;
4. Peningkatan urbanisasi dunia;
5. Konstelasi perdagangan global;
6. Tata kelola keuangan global;
7. Pertumbuhan kelas menengah (middle class);
8. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumberdaya alam;
9. Perubahan iklim, dan
10. Pemanfaatan luar angkasa (space economy);
11. Perubahan Iklim, daya tampung air dan udara serta daya dukung sumber daya alam.

4.2.2 Isu Nasional

Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan

pembangunan sebelumnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan

lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran pembangunan. Beberapa isu dan tantangan pembangunan ke depan antara lain:

1. Rendahnya Produktivitas di Tengah persaingan global yang semakin meningkat;
2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, Teknologi, dan inovasi;
3. Kesenjangan antar wilayah menjadi tantangan yang harus diatasi
4. Persebaran penduduk dan tenaga kerja terdidik dan terampil terpusat di wilayah Jawa dan Sumatra
5. Variasi capaian pembangunan dan kinerja sistem kesehatan antar daerah sangat tinggi
6. Kinerja sarana prasarana seperti ketenagalistrikan, telekomunikasi, perumahan dan permukiman, dan sumber daya air, masih tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara lain, utamanya negara kontinental.
7. Belum optimalnya konektivitas menyebabkan rendahnya kinerja logistik dan daya saing global dibandingkan dengan negara-negara di Asia Pasifik;
8. Terbatasnya pemenuhan sarana dan prasarana dasar berdampak pada kesehatan Masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, kualitas lingkungan hidup, serta produktivitas dan kesejahteraan Masyarakat;
9. Semakin meningkatnya tiga krisis planet bumi (krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi dan limbah) serta posisi Indonesia di cincin api Pasifik termasuk masih adanya potensi konflik sosial merupakan ancaman bencana
10. Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di beberapa daerah belum berjalan dengan efektif
11. Terbatasnya kapasitas tata Kelola pemerintah daerah;
12. Terbatasnya kapasitas fiskal daerah mengakibatkan belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan

4.2.3 Isu Regional

Isu utama di wilayah Jawa adalah padatnya jumlah penduduk dan terkonsentrasinya pengem-
 bangun industri di pesisir utara Wilayah Jawa serta kurangnya pengelolaan potensi wilayah

khususnya di wilayah selatan. Kondisi ini mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan, tingginya kebutuhan pangan, tingginya jumlah tenaga kerja informal dan pengangguran, serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat pengembangan industri di Wilayah Jawa dan menjadi isu regioanal antara lain yaitu:

1. Rendahnya penggunaan teknologi tinggi pada industri.
2. Masih terdapatnya beberapa faktor penghambat perkembangan sumber daya manusia seperti (1) masih terbatasnya akses pendidikan pada daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau; (2) tingginya PTM dan besarnya jumlah penduduk yang mengalami stunting dan insidensi TB; (3) pelayanan kesehatan lansia menjadi tantangan dengan tingginya penduduk lansia; dan (4) masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha.
3. Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh sumber energi fosil dengan bauran pembangkit listrik terbarukan relatif rendah;
4. Pemanfaatan infrastruktur TIK belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif;
5. Kebutuhan rumah tangga di Wilayah Jawa terhadap hunian yang layak dan terjangkau juga masih belum dapat terpenuhi;
6. Kapasitas fiskal di Jawa sudah tinggi, terutama di wilayah barat dan timur;
7. Permasalahan lingkungan utamanya meliputi kelangkaan air, potensi banjir di berbagai wilayah dan banjir rob yang terjadi pada pesisir utara Wilayah Jawa serta pencemaran udara dan air;
8. Wilayah Jawa masih dihadapkan pada kondisi rawan bencana alam.

4.2.4 Isu strategis RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026

Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan di Provinsi Jawa Timur.
- b. Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau dipecahkan secara simultan hasilnya saling

- mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan Provinsi Jawa Timur lainnya.
- c. Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian target-target pembangunan Provinsi Jawa Timur di berbagai bidang.
 - d. Merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan utama di Provinsi Jawa Timur,
 - e. Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian bidang pembangunan lainnya di Provinsi Jawa Timur.
 - f. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi kewenangan, kebijakan dan implementasi.

Isu strategis RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, meliputi:

1. Percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal

Isu strategis mengenai percepatan pemulihan ekonomi

daerah melalui peningkatan produk-tivitas dan nilai tambah sumber daya lokal menyoroti upaya untuk menggerakkan pertumbuhan eko-nomi regional dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal. Memberdayakan dan mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah sebagai tulang punggung ekonomi local Ini dapat dilakukan melalui akses lebih baik ke pembiayaan, pelatihan, dan pasar.

Percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.

2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan

Ketersediaan infrastruktur di Jawa Timur masih memerlukan peningkatan dari aspek kualitas maupun pemerataan. Infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air, maupun transportasi yang terintegrasi dengan penataan ruang termasuk mempertim-bangkan

daya dukung dan daya tampung lingkungan serta responsif terhadap bencana dan krisis iklim dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan berke-lanjutan. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sumber daya lokal guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah.

3. Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Sanitasi & Sosial Dasar Khususnya Peningkatan Lapangan Kerja, Penanganan Stunting, dan Penanggulangan Kemiskinan

Pemenuhan kebutuhan layanan dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, dan Sanitasi merupakan bagian dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), diperlukan sebagai upaya peningkatan kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya terkait Pemenuhan sosial dasar dalam konteks peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan, memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan suatu masyarakat.

4. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal

Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal mencerminkan pentingnya memahami, menghargai, dan memelihara identitas budaya suatu masyarakat dalam konteks globalisasi dan perubahan social. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal membentuk fondasi kuat untuk membangun masyarakat yang beragam namun tetap kokoh dalam solidaritas, menciptakan keseimbangan antara globalisasi dan keberlanjutan budaya lokal.

5. Pemerataan kemandirian pangan & pemanfaatan potensi energi baru terbarukan

Pemerataan kemandirian pangan & pemanfaatan potensi energi baru terbarukan diperlukan untuk mendukung ketahanan nasional dan daerah serta menjawab tantangan krisis pangan global dan perubahan iklim. Pemerataan kemandirian pangan mengacu pada upaya untuk menyediakan akses yang merata terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemandirian dan ketahanan pangan ditopang oleh 3 pilar : ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Pemanfaatan potensi energi mencakup optimalisasi

penggunaan sumber daya energi yang tersedia, termasuk energi terbarukan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Untuk itu dalam rangka mendukung komitmen antisipasi perubahan iklim dan Pembangunan berkelanjutan, maka ketahanan energi, transisi energi serta penguatan Kerjasama untuk pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi perhatian khusus di Jawa Timur.

Penting untuk menciptakan kebijakan dan strategi pembangunan yang mempertimbangkan interkoneksi antara produksi pangan dan sumber daya energi. Dengan demikian, dapat diciptakan lingkungan yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing tinggi bagi masyarakat lokal dan wilayah secara keseluruhan.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Bencana

Ancaman terhadap penurunan daya dukung dan daya tampung cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk serta aktivitas perekonomian termasuk pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman, serta industri dan perdagangan. Peningkatan aktivitas pereko-

nomian merupakan pen-yumbang peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim.

Indikasi terjadinya perubahan iklim saat ini secara langsung mulai terasa dan ditandai dengan adanya kenaikan temperatur serta curah hujan yang ekstrem. Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi keberlangsungan berbagai sektor kehidupan termasuk sektor perekonomian, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan terus meningkat secara eksponensial jika intervensi kebijakan terhadap perubahan iklim tidak dilakukan atau Business As Usual (BAU). Empat sektor prioritas diperkirakan bisa mengalami kerugian yang cukup signifikan akibat perubahan iklim adalah yaitu sektor pesisir dan laut, sektor pertanian, sektor kesehatan, serta sektor sumber daya air. Kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang pasang, dan puting beliung sebagai ancaman dari perubahan iklim mendominasi kejadian bencana di Indonesia termasuk di Jawa Timur.

Peningkatan kapasitas dalam hal kesiapsiagaan dengan melibatkan pengembangan sistem peringatan dini yang efektif dan merata, pelatihan masyarakat untuk merespon cepat ketika bencana terjadi, serta simulasi dan

latihan evakuasi sangat dibutuhkan. Peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap bencana dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana pada pembangunan berkelanjutan juga perlu dilaksanakan dengan mengintegrasikan rencana penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

7. Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Penguatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan

kualitas pelayanan publik. Proses birokrasi yang rumit dapat menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, sehingga penyederhanaan prosedur dan pelayanan yang efisien sangat penting. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan SDM di sektor publik sangat penting. Pendidikan, pelatihan, dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya bagi pegawai pemerintah dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sehingga dapat

memberikan pelayanan yang berkualitas.

Optimalisasi penanganan gangguan Trantibumlinmas sejalan dengan penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan langkah esensial untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kombinasi strategi penegakan hukum yang humanis, edukatif dan persuasif, serta partisipasi masyarakat, dan reformasi tata kelola pemerintahan merupakan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang berkelanjutan.

Kombinasi strategis dimaksudkan untuk membangun sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan strategis dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Trantibumlinmas, melalui peningkatan koordinasi dan kerja sama antar instansi, pemusatan data gangguan dan kegiatan dengan menggunakan sistem informasi, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi melalui saluran pengaduan, sehingga integrasi data dan penanganan gangguan Trantibumlinmas di Jawa Timur dapat dioptimalkan.



BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

RPD JAWA TIMUR

2025
2026





BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan (goal) pembangunan adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam menjawab isu strategis Pembangunan daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna merealisasikan pelaksanaan program-program Pembangunan di Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2026, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu dua tahun ke depan.

Sasaran (objective) pembangunan adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dua tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani dalam dua tahun mendatang serta isu strategis aktual, maka tujuan dan sasaran yang menjadi acuan pembangunan daerah tahun 2025-2026, adalah sebagai berikut:

5.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2026

1. **Tujuan Pertama**, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya nilai tambah ekonomi; (kalimat kinerja)
 - b. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman dan sumber daya air;
 - c. Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat, laut dan udara.
 - d. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
2. **Tujuan Kedua**, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, yang dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran pembangunan, sebagai berikut:

- a. Menurunnya penduduk miskin perdesaan;
 - b. Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 - c. Menurunnya tingkat pengangguran;
3. **Tujuan Ketiga**, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
- a. Meningkatnya kualitas Pendidikan;
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat;
 - c. Pelestarian nilai - nilai budaya lokal;
 - d. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak;
 - e. Meningkatnya pemberdayaan Perempuan.
4. **Tujuan Keempat**, Mewujudkan pemerintahan yang baik, yang dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
- a. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan dan SDM Aparatur yang berkualitas
 - b. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah;;
 - c. Meningkatnya pelayanan publik berbasis digital dan terintegrasi;
 - d. Meningkatnya kualitas kebijakan dan pelayanan administratif;
 - e. Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum Masyarakat.
5. **Tujuan Kelima**, mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya aksesibilitas ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi berkelanjutan;
 - c. Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana.

5.2. Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2026

Kinerja tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 1 Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		Kondisi Awal	TARGET		KONDISI AKHIR 2026
				2023	2025	2026	
1		2		3	4		5
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	1	Pertumbuhan Ekonomi	5,02 (TW3 c to c)	4,95 - 5,20	5,15 - 5,30	5,15 - 5,30
		1	Indeks Gini	0,387 (Maret)	0,3870 - 0,3650	0,3760 - 0,3540	0,3760 - 0,3540
2	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	2	Persentase Penduduk Miskin	10,35 (Maret)	9,95 - 9,75	9,45 - 8,30	9,45 - 8,30
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,88	4,43 - 3,93	4,41 - 3,91	4,41 - 3,91
3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,65	75,7 - 75,79	76,25 - 76,34	76,25 - 76,34
		3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,99	92,47-93,47	92,69-93,69	92,69-93,69
4	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik	4	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	80,11 (2022)	81.80-82.40	82,50-83,10	82,50-83,10
5	Mewujudkan Pembangunan	5	Indeks Kualitas	69,23*	69,59 - 69,96	69,61 - 69,96	69,61 - 69,96

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		Kondisi Awal	TARGET		KONDISI AKHIR 2026
				2023	2025	2026	
1		2		3	4		5
	yang Berkualitas dan Berkelanjutan		Lingkungan Hidup (IKLH)				
		5	Indeks Risiko Bencana (IRB)	101,65	100,65–99,65	99,65–98,65	99,65–98,65

**) angka sementara*

****) angka sangat sementara*

Tabel 5. 2 Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		KONDISI AKHIR
				2023	2025	2026	2026
1		2	3	4	6	7	8
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Nilai tambah Ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan	-1,39 (2022)	0,25	0,25	0,25
			Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Hortikultura	6,15 (2022)	1	1	1
			Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	79,85 (2022)	79,90	79,95	79,95
			Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Peternakan	1,79 (2022)	1,3	1,3	1,3
			Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan	5,71 (2022)	1,5	1,5	1,5

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		KONDISI AKHIR
				2023	2025	2026	2026
1		2	3	4	6	7	8
			Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perkebunan	-0,28 (2022)	1	1,5	1,5
			Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,97 (2022)	1,9	1,9	1,9
			Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	3,96 (Tw 3 c toc)	4,96	5,97	5,97
			Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,15 (Tw 3 c toc)			
			Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM	7,19 (2022)	3,5	3,53	3,53

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		KONDISI AKHIR
				2023	2025	2026	2026
1		2	3	4	6	7	8
			Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata	13,53 (2022)	6,6	6,6	6,6
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman dan Sumber Daya Air	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	86,85**	90,16	90,17	90,17
			Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	68,90 (2022)	69,05	69,10	69,10
		Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara	Indeks Konektivitas	0,810 (2022)	0,769	0,770	0,770

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		KONDISI AKHIR	
				2023	2025	2026	2026	
1		2	3	4	6	7	8	
			Indeks Aksesibilitas	76,17 (2022)	76,89	77,29	77,29	
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	100,1	117	120	120	
				(s.d. TW III)				
2	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan	13,98 (Maret)	13,28- 12,68	12,78- 11,90	12,78- 11,90	
			Persentase Desa Mandiri	36,25	41	45	45	
		Meningkatnya Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	1,30 (2022)	1,36	1,38	1,38	
		Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Kesempatan Kerja		94,89 -96,47	94,92 -	94,92 96,49	94,92 - 96,49
			Indeks Pembangunan Pemuda	56,50*	57,50	57,75	57,75	
3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,642	0,68	0,69	0,69	
			Tingkat Kegemaran Membaca	69,78	71,75	72,00	72,00	

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		KONDISI AKHIR
				2023	2025	2026	2026
1		2	3	4	6	7	8
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,844	0,851	0,854	0,854
			Total Fertility Rate (TFR)	2,00 (2022)	1,98	1,99	1,99
		Meningkatnya Pelestarian Nilai - Nilai Budaya Lokal	Jumlah Warisan Budaya Yang Dilestarikan	20	26	31	31
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,1 (2022)	68,00	69,00	69,00
			Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 penduduk perempuan	4,67 (2022)	3,70	3,50	3,50
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,440 (2022)	0,420	0,415	0,415
4		Meningkatnya tata kelola Pemerintahan	Persentase Keselarasan	99,35 (2022)	100	100	100

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		KONDISI AKHIR
				2023	2025	2026	2026
1		2	3	4	6	7	8
Mewujudkan Pemerintahan yang Baik	dan SDM Aparatur yang berkualitas	Dokumen Perencanaan					
		Indeks Inovasi Daerah	71,38	73	74	74	
		Persentase lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	100 (2022)	100	100	100	
		Indeks Pembangunan Statistik	2,21	3,00	3,15	3,15	
			Persentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi minimal 20 JP	27,56 (2022)	30	31	31
			Opini BPK	WTP (2022)	WTP	WTP	WTP
			Indeks Integritas Pemerintah Prov. Jatim	73,11 (2022)	75	75,5	75,5

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		KONDISI AKHIR
				2023	2025	2026	2026
1		2	3	4	6	7	8
			Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	100 (2022)	100	100	100
			Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	91,44 (2022)	92,2	92,3	92,3
			Indeks Profesionalitas ASN	86,27 (2022)	88	89	89
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	66,63 (2022)	58,5	58,5	58,5
		Meningkatnya pelayanan publik berbasis digital dan terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,30 (2022)	4,1	4,2	4,2
			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	548	570	590	590

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		KONDISI AKHIR
				2023	2025	2026	2026
1		2	3	4	6	7	8
		Meningkatnya Kualitas kebijakan dan pelayanan administratif	Persentase Rekomendasi Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama yang menjadi Kebijakan	90 (2022)	95,5	96	96
			Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	87	87	87	87
			Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian	88	90	91	91
			Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan	100 (2022)	100	100	100

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		KONDISI AKHIR
				2023	2025	2026	2026
1		2	3	4	6	7	8
			Persentase produk hukum di Jawa Timur yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan	100	100	100	100
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	82,1 (2022)	70	72	72
			Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Timur	83,83 (2022)	87,9	88,9	88,9
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83,91 (2022)	86	87	87

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		KONDISI AKHIR
				2023	2025	2026	2026
1		2	3	4	6	7	8
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penghubung	90,18 (2022)	80	80	80
			Nilai IKM Pengguna Layanan di Lingkungan Sekretariat Daerah	85,08 (2022)	89,47	89,57	89,57
			Nilai IKM Pengguna Layanan Keprotokolan dan Materi Komunikasi Pimpinan	86,76 (2022)	89,20	89,25	89,25
		Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Persentase Kejadian Poleksosbud terhadap Tahun Sebelumnya	75,90 (2022)	90,5	91	91
			Indeks Demokrasi Indonesia	81,31 (2022)	85,5	85,7	85,7

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		KONDISI AKHIR
				2023	2025	2026	2026
1		2	3	4	6	7	8
			Persentase penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	100,55	90	95	95
5	Mewujudkan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,86	56,13	56,13	56,13
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,73	84,08	84,14	84,14
			Indeks Kualitas Lahan	49,70	47,78	47,78	47,78
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	77,99	82,46	82,46	82,46
		Meningkatnya Aksesibilitas Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi Berkelanjutan	Persentase Rasio Elektrifikasi	99,62 (s.d juni)	99,9	99,95	99,95
			Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	9,36 (2022)	12,15	12,70	12,70
		Meningkatnya Kapasitas Daerah	Indeks Kapasitas Daerah	0,65	0,68 - 0,69	0,69 - 0,70	0,69 - 0,70

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		KONDISI AKHIR
				2023	2025	2026	2026
1		2	3	4	6	7	8
		Ketangguhan terhadap Bencana					

**) angka sementara*

****) angka sangat sementara*



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

RPD JAWA TIMUR

2025
2026



BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, arah kebijakan dan program prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026.

Strategi Pembangunan Tahun 2025-2026 akan ditempuh melalui dua strategi, yaitu:

6.1. Strategi umum

Strategi umum dalam mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan dua tahun mendatang meliputi:

1. Penegasan Nilai-nilai Luhur Budaya dan Keagamaan sebagai Perspektif dan Spirit dalam Pembangunan

Identitas sosial dan karakter masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya dan agama merupakan modal dasar pembangunan yang penting. Kekayaan nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan yang kental dan khas di Provinsi Jawa Timur membuktikan dapat menjadi perekat dalam pembangunan ketentraman dan kedamaian sosial. Karakteristik ini harus terus dikembangkan menjadi karakter dasar masyarakat Jawa Timur, yang dimanifestasikan pada seluruh aspek kehidupan.

2. Pembangunan berkelanjutan yang inklusif bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan Jawa Timur untuk menghadapi disrupsi ekonomi maupun ketidakpastian masa depan (uncertain future).

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antargenerasi pada masa kini maupun masa mendatang. Secara umum Pembiayaan Pembangunan dan Perencanaan Keuangan Daerah adalah isu terpenting dari 4 (empat) pilar pemerintahan daerah, yaitu: (a)

Kepemimpinan Kepala Daerah, (b) *Financial Capacity dan Financing Management*, (c) *Innovation*, dan (d) Program Unggulan yang bertumpu kebutuhan pokok masyarakat. Keempat pilar di atas secara berurutan menjadi strategi sekaligus pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi Jawa Timur.

3. Pemenuhan hak dan ruang kepada perempuan (Pengarutamaan Gender), perlindungan anak dan kelompok rentan dalam berpartisipasi pada proses pembangunan (Right Based Development)

Pendekatan Pembangunan berbasis hak (Right based development) didasari oleh pemahaman bahwa setiap manusia adalah pemegang hak. Mengasumsikan bahwa seluruh manusia, termasuk anak-anak, harus memperoleh kesempatan yang sama untuk merealisasikan seluruh potensi yang mereka miliki.

4. Memperluas akses dan kesempatan kepada warga untuk memperoleh apa yang dianggap bermakna bagi dirinya (Development as Freedom)

Memaknai pembangunan sebagai kebebasan yang terefleksi pada empat hal pokok: (a) Kemampuan dan kesem-

patan yang setara bagi setiap warga negara untuk memperoleh akses ke sumber daya ekonomi; (b) Mendapatkan peluang yang sama untuk bisa mengelola aset-aset produktif bagi penguatan individu dan masyarakat; (c) Memiliki kebebasan politik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan publik; dan (d) Mendapat fasilitas untuk menyuarakan kritik publik dalam konteks perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

5. Pembangunan berbasis kawasan merupakan strategi pembangunan yang bukan hanya melihat dari pentingnya pendekatan sektoral seperti infrastruktur, namun juga dari pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya ekonomi dengan menyentuh isu-isu dasar dan pelayanan sosial. *From Sectoral to Spatial Approach* ini menerapkan strategi pembangunan dengan berbasis kewilayahan dengan harapan akan mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan desa kota dan antardaerah. Perubahan konsep tersebut akan mengikis ego sektoral di internal pemerintahan.

6. Kesenjangan sosial-ekonomi antar golongan dan

antardaerah di Indonesia masih menjadi masalah utama pembangunan yang harus diatasi dengan langkah yang nyata, sistematis dan sungguh-sungguh. Upaya mengatasi kesenjangan tidak bisa lagi dilakukan dengan perencanaan “business as usual”, tapi perlu pendekatan yang berbeda, yakni perencanaan yang mengutamakan pencapaian tujuan dengan pendekatan holistik-integratif-tematik-spasial. Perencanaan yang benar-benar didasarkan pada pemahaman fakta (evidence-based) tentang kompleksitas, dinamika dan keragaman masalah di setiap daerah.

7. Percepatan Pembangunan melalui Inovasi di Segala Bidang Berbasis *Information Communication Technology* (ICT)

Eskalasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

begitu cepat, memberikan pengaruh yang besar bagi perilaku dan kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi 4.0 menjadi isu strategis di tingkat global dan nasional, demikian pula di Provinsi Jawa Timur. Peran *Information and Communication Technology* (ICT) sangat mendukung inovasi daerah di segala bidang dan menjadi daya ungkit bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan di berbagai bidang. Inovasi pembangunan di segala bidang menjadi lebih nyata dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah provinsi Jawa Timur akan menempatkan pemanfaatan ICT dalam mendukung inovasi dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

6.2. Strategi Khusus

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, strategi khusus Pembangunan Tahun 2025-2026, adalah sebagai berikut.

Tabel 6. 1 Strategi khusus Pembangunan Tahun 2025-2026

	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan	1. Meningkatnya Nilai tambah Ekonomi 2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman dan Sumber Daya Air	Penguatan Daya Saing dan Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dasar perumahan permukiman dan pengelolaan jaringan irigasi

	Tujuan	Sasaran	Strategi
	Pemerataan Pembangunan	3. Meningkatkan Konektivitas Jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara	Peningkatan jaringan transportasi untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan
2	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	1. Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan	Peningkatan pembinaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa
		2. Meningkatnya Kemandirian PPKS	Peningkatan kualitas program pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi PPKS
		3. Menurunnya Tingkat Pengangguran	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Perluasan Akses Kesempatan Kerja
3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Peningkatan Akses, Mutu Pelayanan Sektor Pendidikan
		2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Perlusan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan serta mendorong masyarakat terhadap program keluarga berencana
		3. Pelestarian Nilai - Nilai Budaya Lokal	Peningkatan Jumlah Warisan Budaya Benda dan Tak Benda
		4. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
		5. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial
4	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik	1. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan dan SDM Aparatur yang berkualitas	Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
		2. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	
		3. Meningkatnya pelayanan publik berbasis digital dan terintegrasi	
		4. Meningkatnya Kualitas kebijakan dan pelayanan administratif	
		5. Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Mengoptimalkan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan Penguatan Pemahaman Wawasan Nusantara kepada Masyarakat
5	Mewujudkan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		2. Meningkatnya Aksesibilitas Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi Berkelanjutan	
		3. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana	Penguatan kesiapsiagaan, dan penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana

6.3. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan Pembangunan yang dirumuskan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi Pembangunan tahun 2025-2026. Pada sisi lain, Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur harus sinergis dan selaras dengan arah pembangunan sesuai dengan dokumen Rancangan Akhir RPJPN tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Pembangunan tahap pertama RPJPN tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi yang diwujudkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,6 – 6,1 persen yang didukung dengan pertumbuhan ekonomi pulau jawa sebesar 5,6 - 5,9 persen.

Transformasi Sosial dititik beratkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar, perlindungan sosial serta peningkatan kualitas SDM. Transformasi ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan hilirisasi sumber daya unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja. Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga pengelola regulasi dan peningkatan kualitas ASN, peningkatan pelayanan publik

berbasis teknologi informasi. Lalu, untuk supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia difokuskan pada pembaruan substansi hukum, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum. Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial. Berdasarkan hal diatas, maka Arah Pembangunan Wilayah Jawa adalah Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan.

Arah pembangunan diwujudkan melalui 5 (lima) prioritas yaitu:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing global (talenta global); serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada Kawasan afirmasi 3T;
2. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan strategis perkotaan, kawasan industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan;
3. Percepatan pembangunan berbasis pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan

kawasan konservasi strategis pada pengembangan multi-infrastruktur dan maritime backbone dan global/major port yang mumpuni guna menurunkan logistic dan production cost dan meningkatkan daya saing industri di Jawa. Selain itu, industri di Jawa perlu kawasan lindung dan geopark; termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan;

4. Pembangunan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas *multi-infrastructure backbone* dan *feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginter-

koneksikan antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar;

5. Penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

Berdasarkan arah pembangunan nasional yang tertuang dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, maka arah kebijakan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tahun 2025: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan

Tahun 2026: Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

6.4. Arah Kebijakan Kewilayahan

Perumusan kebijakan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan ekonomi kabupaten/kota, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan

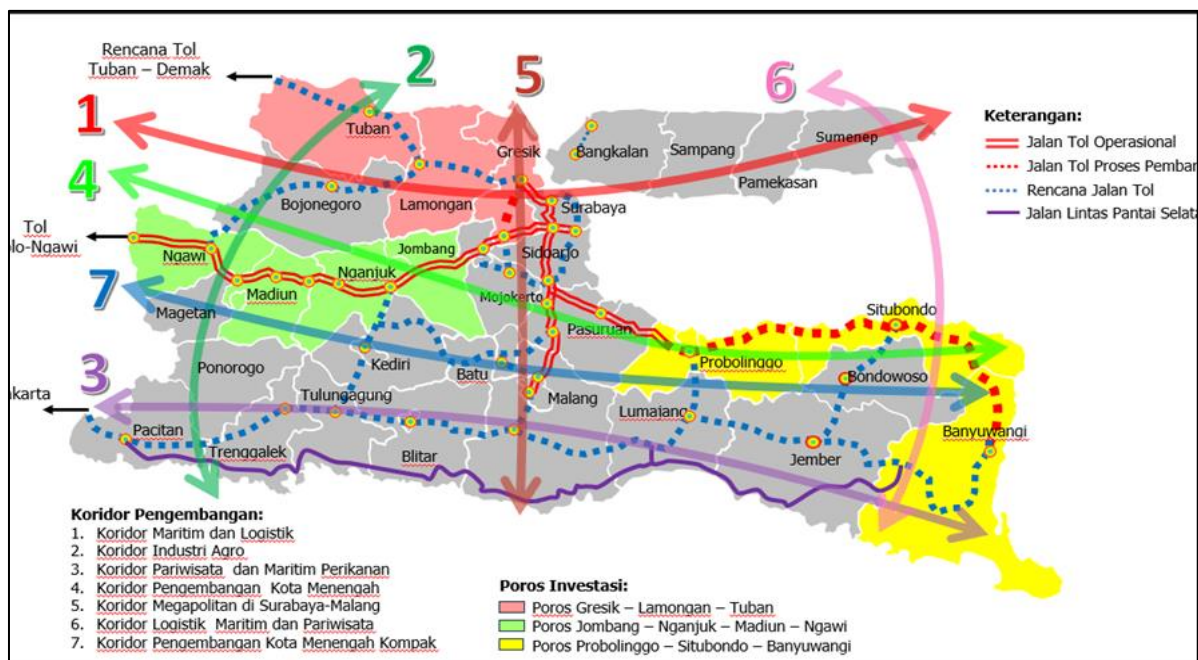
antarsektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan.
2. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerataan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan layanan transportasi dalam rangka mendukung mobilitas orang dan barang, peningkatan layanan dasar permukiman, peningkatan layanan infrastruktur sumber daya air, peningkatan jaringan prasarana lainnya.
4. Peningkatan jaringan Infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan sistem permukiman serta peningkatan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif.
5. Pengintegrasian antara koridor pertumbuhan wilayah utara-selatan dan kepulauan bagi terselenggaranya nilai tambah sinergi antar wilayah dan mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.
6. Peningkatan preservasi dan konservasi pada Kawasan lindung dengan prinsip pelestarian biodiversitas dan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap penanggulangan bencana.
7. Perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.
8. Perwujudan Kawasan strategis provinsi yang terpadu dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya, serta perlindungan terhadap kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

6.4.1. Koridor dan Poros Pengembangan Jawa Timur

Berdasarkan persamaan karakteristik potensi pengembangan terdapat 7 (tujuh) fokus pengembangan yaitu : 1) Koridor Maritim dan Logistik di Tuban-Gresik-Bangkalan-Sumenep (Jalur Utara); 2) Koridor Industri Agro di Tuban-Madiun-Magetan-Pacitan (Jalur Utara-Selatan sisi Barat); 3) Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan di Pacitan-Prigi-Sendangbiru-Jember-Banyuwangi (Jalur Selatan); 4) Koridor Pengembangan Kota Menengah di Madiun-Nganjuk-Kediri-Jombang-Pasuruan-Situbondo (Jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda); 5) Koridor Megapolitan di Surabaya-Malang; 6) Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata di Banyuwangi-Situbondo-Sumenep (Jalur Utara-Selatan sisi Timur); dan 7) Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak (*Smart and Compact*) di Magetan-Trenggalek – Tulungagung - Malang (Dampit) – Lumajang - Jember-Banyuwangi (Kalibaru) (Jalur Tengah).

Gambar 6. 1 Koridor dan Poros Pembangunan Jawa Timur



Selanjutnya dilihat dari perkembangan investasi di Jawa Timur, dapat diidentifikasi potensi pengembangan industri yang terbagi menjadi 3 (tiga) poros pengembangan, yaitu : Poros Gresik – Lamongan – Tuban, Poros Jombang – Nganjuk – Madiun – Ngawi, dan Poros Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi. Ketiga poros ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru dengan memanfaatkan infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, sumber daya air dan energi), kawasan industri, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

6.4.2. Arah Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur

Dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Jawa Timur, maka dibutuhkan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut secara umum memuat 3 (tiga) pilar utama pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Adapun prasyarat keberhasilan percepatan pembangunan ekonomi

di Jawa Timur yaitu adanya pembagian peran Pemerintah dan Dunia Usaha, Penguatan Konektivitas antar wilayah, optimalisasi pusat-pusat kegiatan ekonomi, serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pemerintah berupaya untuk melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan melalui pembagian Kawasan Percepatan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada

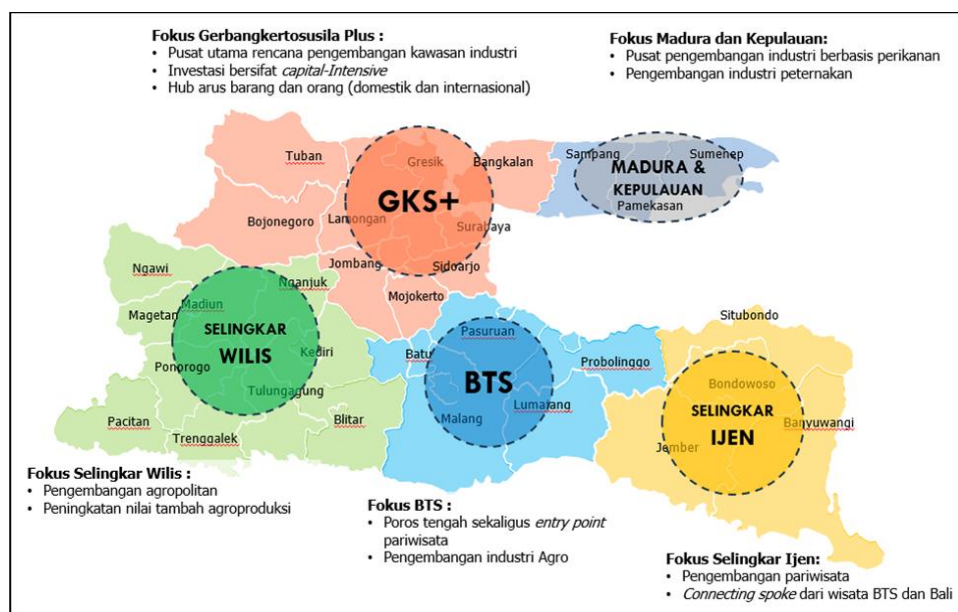
Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Selingkar Ijen dan kepulauan Madura.

Melalui pembagian Kawasan percepatan ekonomi, diharapkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu terhadap optimalisasi pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dan penyediaan infrastruktur kewilayahan dapat mendukung aktivitas ekonomi dalam kawasan ataupun fasilitasi pergerakan arus barang dan orang. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan terdiri dari 2 (dua) yaitu pusat pertumbuhan primer yang akan dijadikan kawasan prioritas dan pusat pertumbuhan lateral yang akan

menjadi kawasan pendukung kawasan prioritas.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan primer di Provinsi Jawa Timur merupakan pusat-pusat pertumbuhan yang dari sisi skala mempunyai leverage dan kesamaan arah pengembangan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara keseluruhan, yang terdiri dari Kawasan Gerbangkertosusila Plus, Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Selingkar Wilis. Sedangkan pusat pertumbuhan lateral merupakan pusat-pusat pertumbuhan dengan fokus untuk pengembangan sumber-sumber pertumbuhan non-tradisional, yang terdiri dari Kawasan Selingkar Ijen dan Kawasan Madura dan Kepulauan sebagaimana tergambar pada Gambar berikut ini.

Gambar 6. 2 Peta Kawasan Pusat Pertumbuhan Wilayah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur



Berikut Kawasan yang menjadi fokus utama dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur :

1. Kawasan Gerbangkertosusila Plus

Kawasan Gerbangkertosusila Plus meliputi Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Di sebagian kawasan ini juga memiliki potensi hamparan minyak bumi serta keanekaragaman warisan geologi lainnya yang dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya. Kawasan Gerbangkertosusila ini difokuskan arah pengembangannya pada bidang industri, khususnya yang bersifat *capital intensive* serta memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) terdidik dan terlatih serta hub arus barang dan orang.

Beberapa proyek yang menjadi prioritas Provinsi Jawa Timur di Kawasan Gerbangkertosusila Plus antara lain adalah Indonesia *Islamic Sciene Park* (IISP). IISP merupakan kawasan yang diproyeksikan menjadi destinasi wisata halal/syariah bertaraf internasional dan menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai pusat Destinasi Wisata Halal/Syariah dunia. Rencana pengembangan Kawasan IISP terletak di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM).

Sebagai bagian dari *Sustainable Urban Mobility Plan* (SUMP), dalam rangka pelayanan Transportasi Publik di Gerbangkertosusila diantaranya akan dikembangkan Surabaya *Regional Railways Line* (SRRL) yang merupakan pengembangan sistem komuter elektrifikasi untuk mengurangi kemacetan dan polusi perkotaan dengan beralihnya masyarakat dengan menggunakan transportasi umum. Rencana jaringan pelayanan akhir SRRL antara lain Jalur Lamongan (Lamongan – Surabaya Pasar Turi), Jalur Kota (Surabaya Pasar Turi – Surabaya Gubeng), Jalur Sidoarjo (Surabaya Gubeng – Sidoarjo), Jalur Mojokerto (Surabaya Wonokromo – Mojokerto), Jalur Penghubung (Sidoarjo – Tarik), dan Jalur Percabangan Indro (Kandangan).

Kemudian dalam memberikan pilihan layanan transportasi publik terhadap masyarakat juga dikembangkan layanan Bus Trans Jatim Koridor I dengan rute Sidoarjo – Gresik (via Suarabya), Koridor II dengan rute II Surabaya – Mojokerto, dan Koridor III dengan rute Gresik – Mojokerto. Selanjutnya, untuk mendukung Pengembangan Pasar Induk Puspa Agro terdapat rencana pembangunan Jalan Akses menuju Pasar Induk Puspa Agro di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mendukung jaringan persampahan regional di wilayah Gerbangkertasusila Plus maka provinsi Jawa Timur mengupayakan Fasilitasi TPA Regional Sampah Gerbangkertasusila. Pada aspek infrastruktur sumber daya air, dilakukan Pengendalian Banjir di Kali Lamong dan Pembangunan Bendungan Karangnongko.

Di sisi lain, adanya *geopark* yang berfokus pada pelestarian warisan geologi (*geoheritage*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan keragaman budaya (*cultural diversity*) untuk kesejahteraan masyarakat. Diantaranya adalah *Geopark* rintisan (*aspiring*) Bawean Gresik dengan keanekaragaman flora dan fauna serta *Geopark* Nasional Bojonegoro dengan melimpahnya potensi tambang minyak bumi. Dengan penetapan status *geopark*, diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pelestarian keberagaman warisan geologi, ekologi maupun warisan budaya setempat.

2. Kawasan Bromo – Tengger – Semeru

Kawasan Bromo – Tengger – Semeru meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang dan Kota Probolinggo. Kawasan ini memiliki keragaman geologi (*geodiversity*) melalui bentang alam yang unik, termasuk kawah vulkanik, padang pasir, dan gunung berapi. Kawasan Bromo – Tenger – Semeru ~~dengan~~ memiliki fokus utama arah pengembangannya pada sektor pariwisata dan agroproduksi serta agroindustri.

Beberapa infrastruktur pengelolaan sumber daya air di Kawasan Bromo – Tengger – Semeru mencakup Pengendalian Banjir di Kali Kedunglarangan dan Pembangunan Tanggul di Sungai Jatiroto. Pada sisi infrastruktur air minum dan air limbah Provinsi Jawa Timur mengupayakan Penyiapan SPAM Regional Probolinggo-Lumajang,

Pada sisi infrastruktur Jalan, proyek yang menjadi prioritas di wilayah BTS adalah rencana Jalan Lintas Selatan. Rencana Jalan Lintas Selatan di Kawasan Bromo-Tengger-Semeru melewati Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Panjang Trase Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Malang sepanjang 98,10 km dan sudah terbangun sepanjang 50,86 km. Panjang trase Jalan Lintas Selatan Kabupaten Lumajang sebesar 57,07 km dan sudah terbangun sepanjang 30,50 km.

Sebagai salah satu konsep pembangunan holistik yang berkelanjutan, *aspiring* (*rintisan*) *Geopark* Bromo – Tengger – Semeru juga

diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan ekosistem, budaya, dan ekonomi lokal.

3. Kawasan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Kawasan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan. Kawasan ini memiliki kekayaan geologi yang signifikan berupa jejak sejarah geologi, biodiversitas, arkeologi, dan nilai-nilai sejarah lokal. Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan memiliki fokus utama arah pengembangannya pada sektor agroproduksi dan agroindustri serta sektor pariwisata.

Beberapa proyek yang menjadi prioritas Provinsi Jawa Timur di pada bidang infrastruktur transportasi di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan antara lain Jalan Lintas Selatan (Pansela). Trase Jalan Lintas Selatan di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan melewati Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar.

Panjang trase Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Pacitan sepanjang 86,01 km dan sudah terbangun seluruhnya. Panjang trase Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Trenggalek sepanjang 81,51 km dan sudah terbangun sepanjang 40,11 km. Panjang trase Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Tulungagung sepanjang 51,38 km dan sudah terbangun sepanjang 24,04 km. Panjang trase Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Blitar sepanjang 62,78 km dan sudah terbangun 22 km.

Dalam mendukung adanya Jalan Lintas Selatan tersebut serta simpul transportasi berupa bandara di Kabupaten Kediri maka terdapat pengembangan Jalan Tol Kertosono-Kediri-Tulungagung, pengembangan Jalan Tol Kertosono-Kediri-Tulungagung terbagi menjadi 2 trase yaitu Jalan Tol Kertosono – Kediri dan Jalan Tol Kediri-Tulungagung.

Selain itu, dalam meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan maupun dengan kawasan lainnya di Provinsi Jawa Timur terdapat pengembangan Jalan Selingkar Wilis dimana jalan tersebut berupa jalan nasional. Pengembangan Jalan Selingkar Wilis bertujuan untuk memenuhi standar lebar sesuai ketentuan teknis.

Dalam hal mendukung jaringan persampahan di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas selatan, Provinsi Jawa Timur mengupayakan Fasilitasi Penyiapan TPA Regional Kabupaten/Kota Kediri. Pada Sisi infrastuktur

sumber daya air, terdapat rencana Pembangunan Bendungan Bagong dan Pengendalian Banjir Sungai Grindulu. Selain itu, untuk mendukung pengembangan pariwisata di wilayah Selingkar Wilis dan Lintas Selatan Provinsi Jawa Timur merencanakan proyek Revitalisasi Kawasan Pariwisata Telaga Sarangan.

Untuk mendukung potensi pariwisata di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, *Unesco Global Geopark* Gunung Sewu yang sebagian terletak di Kabupaten Pacitan menjadi salah satu daya tarik Kawasan ini. Selain itu, terdapat *geopark* rintisan (aspiring) Tulungagung yang memiliki keunggulan lanskap karst tropis dan situs arkeologi prasejarah berupa jejak manusia purba menjadikannya daya tarik tersendiri di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Potensi-potensi tersebut menjadikan kawasan ini sebagai tujuan pariwisata yang berkelanjutan

4. Kawasan Madura dan Kepulauan

Kawasan Madura dan Kepulauan merupakan Kawasan Pendukung dari Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila. Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan meliputi Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep dengan fokus pengembangan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pengelolaan energi dan pariwisata.

Beberapa proyek yang menjadi prioritas Provinsi Jawa Timur di Kawasan Madura dan Kepulauan antara lain adalah penyediaan sarana prasarana transportasi diantaranya adalah Penyediaan Kapal Perintis dan Pengembangan Pelabuhan kepulauan

5. Kawasan Selingkar Ijen merupakan Kawasan Pendukung dari Kawasan Prioritas Bromo – Tengger – Semeru.

Kawasan Selingkar Ijen merupakan Kawasan Pendukung dari Kawasan Prioritas BTS meliputi Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo dengan fokus pengembangan pada sektor pariwisata, pertanian dan perkebunan. Keindahan alam yang terletak di wilayah sekitar Selingkar Ijen, ditambah dengan kekayaan geologis, biodiversitas, dan keragaman budaya, semakin memperkuat potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kawasan Selingkar Ijen.

Beberapa proyek yang menjadi prioritas Provinsi Jawa Timur di Kawasan Selingkar Ijen yang merupakan Kawasan Pendukung dari Kawasan Prioritas BTS antara lain pengembangan Jalan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi dan Jalan Lintas Selatan (Pansela). Trase Jalan Lintas Selatan di Kawasan Selingkar Ijen melewati Kabupaten Jember dan Kabuptaen Banyuwangi. Panjang trase Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Jember

sepanjang 91,55 km dan sudah terbangun sepanjang 32,10 km. Panjang trase Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Banyuwangi sepanjang 100 km dan sudah terbangun 87,20 km

Keberadaan *Unesco Global Geopark* (UGGp) Ijen yang berada di wilayah Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi menjadi media yang cukup efektif terkait pariwisata yang berkelanjutan melalui upaya-upaya pelestarian lingkungan (konservasi), edukasi dan pemberdayaan ekonomi di wilayah Selingkar Ijen.

6.5. *Cascading* Kinerja

Cascading kinerja strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, adalah sebagaimana tabel 6.2 berikut

Tabel 6. 2 Cascading Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Nomenklatur

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1		2		3		4		5	6	7
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	1.1	Pertumbuhan Ekonomi	1.1.1	Meningkatnya Nilai tambah Ekonomi	1.1.1.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan produktivitas tanaman pangan utama
										Persentase Peningkatan produktivitas hortikultura utama
						1.1.1.2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Hortikultura	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Hortikultura	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Indeks Peternakan
										Peningkatan kawasan tanaman pangan dan hortikultura
						1.1.1.3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (Ake) Konsumsi (Kkal/Kap/Hari)
			Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi gram/kap/hari							
1.1.1.4	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Peternakan	Meningkatnya Produksi Daging, Susu, Telur, dan Jumlah Ternak	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan produksi daging						
				Persentase Peningkatan produksi susu						
					Persentase Peningkatan produksi telur					
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian			Persentase Peningkatan populasi ternak di wilayah sumber bibit
						1.1.1.5	Persentase Pertumbuhan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Program Pengelolaan	Jumlah produksi perikanan tangkap

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
			PDRB Sub Kategori Perikanan		Perikanan Tangkap	Persentase Pertumbuhan Nilai Tukar Nelayan (NTN)
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
			1.1.1.6 Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perkebunan	Meningkatnya Produksi Perkebunan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi tanaman semusim Perkebunan
						Persentase pemenuhan kebutuhan benih tanaman perkebunan
						Persentase Peningkatan benih bersertifikat
						Persentase Peningkatan produksi tanaman tahunan Perkebunan
			1.1.1.7 Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan	Program Pengelolaan Hutan	Jumlah Penggunaan, Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
						Persentase Penurunan Gangguan Hutan
						Jumlah produksi hasil hutan kayu
						Persentase luas areal rehabilitasi di Jawa Timur
						Persentase Peningkatan unit usaha tertib penatausahaan hasil hutan

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1		2		3		4		5	6	7
										Jumlah bibit tanaman hutan yang beredar
										Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Pacitan
										Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Madiun
										Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Trenggalek
										Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Malang
										Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Nganjuk
										Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Bojonegoro
										Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Lumajang
										Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Jember
										Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Banyuwangi
										Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Sumenep
						1.1.1.8	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori	Meningkatnya Produksi Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan unit usaha industri

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		
1	2	3	4	5	6	7		
			Industri Pengolahan					
			1.1.1.9	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Meningkatnya Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	
						Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			1.1.1.1.0	Persentase Pertumbuhan PDRB KUKM	Meningkatnya pemberdayaan Koperasi dan UKM	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UKM yang telah diberdayakan	
			1.1.1.1.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pariwisata	Meningkatnya Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	
		1.1.2	1.1.2.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan dan	Meningkatnya Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum yang layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum yang layak

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1		2		3		4		5	6	7
					dan Sumber Daya Air		Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak
								Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh
						1.1.2.2	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Meningkatnya Indeks Ketahanan Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Ketahanan Air
				1.1.3	Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara	1.1.3.1	Indeks Konektivitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase terpenuhinya kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan
										Persentase tersusunnya dokumen kajian, leger, dan evaluasi penyelenggaraan jalan
										Persentase capaian pelaksanaan pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan
										Persentase capaian pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
										Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Kediri

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
						Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Pacitan
						Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap Wilayah UPT PJJ Surabaya
						Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Banyuwangi
						Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Jember
						Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Malang
						Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Pamekasan
						Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Probolinggo
						Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
						wilayah UPT PJJ Bojonegoro
						Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Kediri
						Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Madiun
						Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Mojokerto
						Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Pacitan
						Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Surabaya
						Persentase Kepuasan Pelayanan Laboratorium Pengujian
						Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Banyuwangi
						Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Jember
						Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
						wilayah UPT PJJ Pamekasan
						Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Probolinggo
						Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Bojonegoro
						Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Madiun
						Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Malang
						Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Mojokerto
			1.1.3.2	Indeks Aksesibilitas	Meningkatnya Penurunan Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Provinsi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
						Persentase Penurunan Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Provinsi
						Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Bangkalan
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
						Pelayanan UPT PPP LLAJ Banyuwangi
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Jember
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Kediri
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Lamongan
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Madiun
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Malang
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Mojokerto
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Probolinggo
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Surabaya
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1		2		3		4		5	6	7
										Pelayanan UPT PPP LLAJ Tulungagung
								Meningkatnya Pengguna Layanan Angkutaan Penyebrangan dan Volume Bongkar Muat di Pelabuhan yang dikelola pemerintah provinsi jawa timur	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Peningkatan Volume Bongkar Muat di Pelabuhan Pengumpan Regional dan/atau yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur
										Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Angkutan Penyeberangan di Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Penyeberangan yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur
										Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPR Lamongan
										Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPR Banyuwangi
	1.2	Indeks Gini	1.2.1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	1.2.1.1	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Meningkatnya Kontribusi Perusahaan PMDN dan UKM terhadap realisasi investasi		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kontribusi Perusahaan PMDN dan UKM terhadap realisasi investasi
									Program promosi penanaman modal,	
									Program pengelolaan data dan Sistem	

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1		2		3		4		5	6	7
									informasi penanaman modal	
									Program pengembangan iklim penanaman modal	
2	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	2.1	Persentase Penduduk Miskin	2.1.1	Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan	2.1.1.1	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan	Meningkatnya jumlah lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, dan lembaga pengelola TTG yang aktif	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif
										Jumlah lembaga pengelola TTG yang aktif
		2.1.1.2		Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya persentase Desa cepat berkembang	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase produk unggulan UEM			
							Persentase Desa cepat berkembang			
2.1.2	Meningkatnya Kemandirian PPKS	2.1.2.1	Persentase PPKS yang Mandiri	Meningkatnya PPKS Penerima manfaat program yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase desa yang melaksanakan kewenangan provinsi terkait pemberdayaan usaha ekonomi desa				
						Persentase PPKS Penerima manfaat program yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial				
2.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2.2.1	Menurunnya Tingkat Pengangguran	2.2.1.1	Tingkat Kesempatan Kerja	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak		

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1		2		3		4		5	6	7
						2.2.1.2	Indeks Pembangunan Pemuda	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah wirausaha muda pemula Persentase efektifitas kordinasi lintas sektor bidang pelayanan kepemudaan Persentase organisasi pemuda yang aktif
3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	3.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	3.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	3.1.1.1	Indeks Pendidikan	Meningkatnya Angka partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 tahun Angka partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PAKET C/SMLB Angka partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PAKET C/SMLB Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Partisipasi lulusan SMK dalam dunia usaha dunia industri Tingkat penyerapan lulusan SMK
						3.1.1.2	Tingkat Kegemaran Membaca	Meningkatnya jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1		2		3		4		5	6	7
										Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan
				3.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3.1.2.1	Indeks Kesehatan	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)
										Persentase Kabupaten/Kota dengan angka kesembuhan penyakit menular sesuai standar
										Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Penemuan Penyakit Tidak Menular dan Keswa sesuai target
										Prevalensi Stunting pada Balita
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
									Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase ketersediaan obat dan vaksin
										Persentase alat kesehatan yang diedarkan sesuai persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan
								Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dengan tenaga kesehatan memiliki izin praktik	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dengan tenaga kesehatan memiliki izin praktik
								Meningkatnya Kabupaten/Kota	Program Pemberdayaan	Persentase Kabupaten/Kota yang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
				yang mengembangkan UKBM sesuai standar	Masyarakat Bidang Kesehatan	mengembangkan UKBM sesuai standar
			3.1.2.2	Total Fertility Rate (TFR)	Meningkatnya Persentase jumlah kesertaan KB aktif (CPR)	Persentase jumlah kesertaan KB aktif (CPR)
				Meningkatnya Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan 5 pilar dalam GDPK	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan 5 pilar dalam GDPK
				Meningkatnya Persentase Kab Kota yang capaian I bangganya diatas 60 %	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KS)	Persentase Kab Kota yang capaian I bangganya diatas 60 %
		3.1.3	3.1.3.1	Jumlah Warisan Budaya Yang Dilestarikan	Meningkatnya pelestarian cagar budaya	Persentase Peningkatan pelestarian cagar budaya
	3.2	3.2.1	3.2.1.1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Meningkatnya Perlindungan Anak	Jumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung perlindungan anak
						Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif
				Meningkatnya Kab/Kota yang melaksanakan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pemenuhan Hak Anak (PHA)

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1		2		3		4		5	6	7
								Pemenuhan Hak Anak (PHA)		
								Meningkatnya Jenis Layanan anak korban kekerasan yang Tersedia	Program Perlindungan Khusus Anak [UPT]	Persentase Jenis Layanan anak korban kekerasan yang Tersedia
						3.2.1.1	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 penduduk perempuan	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Jumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung perlindungan perempuan
										Persentase Jenis Layanan perempuan korban kekerasan yang Tersedia
				3.2.2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	3.2.2.1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Meningkatnya ARG Jawa Timur	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kelembagaan Daerah Responsif Gender
										Persentase ARG Jawa Timur
										Persentase Kab/Kota yang melakukan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan
								Meningkatnya Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai layanan Kualitas Keluarga sesuai Standarisasi
									Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase PD yang memanfaatkan data gender dan anak

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM				
1	2	3	4	5	6	7								
4	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik	4.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	4.1.1.1	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan dan SDM Aparatur yang berkualitas	4.1.1.1.1	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Perangkat Daerah	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Perangkat Daerah				
										4.1.1.2	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis hasil kelitbangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
														Jumlah Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
														Jumlah Inovasi yang diuji coba/diverifikasi
Jumlah Naskah Jurnal														
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan														
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis hasil kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi														
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan														
4.1.1.3	Persentase lembaga yang memanfaatkan	Tersedianya data yang akurat (Database Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi	Jumlah data yang akurat (Database Kependudukan Bersih berdasar Semester)										

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1		2		3		4		5	6	7
							data kependudukan	Bersih berdasar Semester)	Administrasi Kependudukan	
								Meningkatnya pendaftaran penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik
								Meningkatnya pencatatan sipil	Program Pencatatan sipil	Persentase Kartu Identitas Anak(KIA)
										Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun
										Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan
						4.1.1.4	Indeks Pembangunan Statistik	Meningkatnya Persentase data statistik sektoral yang memenuhi prinsip SDI	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang memenuhi prinsip SDI
						4.1.1.5	Persentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi minimal 20 JP	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kelulusan peserta pengembangan kompetensi
										Persentase evaluasi pengembangan kompetensi
										Persentase inovasi hasil pengembangan kompetensi yang dievaluasi
										Persentase kelulusan peserta sertifikasi/uji kompetensi
						4.1.1.6	Opini BPK	Tersusunnya Dokumen Rancangan Perda	Program Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD dan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	
				tentang APBD dan PAPBD serta Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD dan PAPBD	Keuangan Daerah	PAPBD serta Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD dan PAPBD	
			4.1.1.7	Indeks Integritas Pemerintah Prov. Jatim	Meningkatnya Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur	
			4.1.1.8	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	Tersusunnya Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan yang ditindaklanjuti	Program Pelayanan Penghubung	Jumlah Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan yang Ditindaklanjuti
			4.1.1.9	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan			
			4.1.1.10	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)
					Meningkatnya kualitas		Jumlah ASN yang Lulus Uji Kompetensi

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1		2		3		4		5	6	7
								penyelenggaraan kepegawaian daerah	Program Kepegawaian Daerah	Jumlah Capaian Kinerja Minimal BAIK ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
										Persentase Database Kepegawaian yang Lengkap
										Persentase Penyelesaian SK Mutasi ASN
				4.1.2	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	4.1.2.1	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
								Meningkatnya Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Target Pendapatan Asli Daerah
										Service Level Agreement (SLA)
										Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
										Persentase Peningkatan Pajak Daerah
										Persentase Penurunan Temuan Berulang
				4.1.3	Meningkatnya pelayanan publik berbasis digital dan terintegrasi	4.1.3.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi
						4.1.3.2	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Meningkatnya Pengukuran Cyber Security Maturity (CSM)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Pengukuran Cyber Security Maturity (CSM)

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1		2		3		4		5	6	7
			4.1.4	Meningkatnya Kualitas kebijakan dan pelayanan administratif	4.1.4.1	Persentase Rekomendasi Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama yang menjadi Kebijakan	Meningkatnya Rumusan Kebijakan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah yang Ditindaklanjuti	Program Pemerintah dan Otonomi Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah yang Ditindaklanjuti	Persentase Rencana Kerjasama yang Ditindaklanjuti
										Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti
					4.1.4.2	Indeks Kepedulian Sosial	Meningkatnya Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	Program Kesejahteraan Rakyat	Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual	Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar
										Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
										Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual
										Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1		2		3		4		5	6	7
										kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar
										Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar
						4.1.4.3	Persentase Rekomendasi Bidang Perekonomian	Meningkatnya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan
						4.1.4.4	Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan	Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan administrasi Pembangunan	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi Pembangunan
						4.1.4.5	Persentase produk hukum di Jawa Timur yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan	Meningkatnya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum di Jawa Timur	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum di Jawa Timur
								Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Hukum yang telah Berkekuatan Hukum Tetap		Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum yang telah Berkekuatan Hukum Tetap

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	
			4.1.4.6	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Persentase Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Yang Tepat Waktu (Sesuai SOP)	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Yang Tepat Waktu (Sesuai SOP)
			4.1.4.7	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Meningkatnya Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur	Program Penataan Organisasi	<p>Presentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang ditata kelebagaannya sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dievaluasi kelebagaannya</p> <p>Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dievaluasi dalam Implementasi SAKIP</p> <p>Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dievaluasi dalam Pelaksanaan Budaya Kerja</p> <p>Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dievaluasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik</p> <p>Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa</p>

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1		2		3		4		5	6	7
										Timur yang telah dievaluasi dalam Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan
										Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dievaluasi dalam Percepatan Reformasi Birokrasi
										Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah menyusun Anjab, ABK, peta jabatan, dan Evaluasi Jabatan sesuai SOTK yang berlaku
						4.1.4.8	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Penyusunan Perundang-undangan, Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Penyusunan Perundang-undangan, Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan
						4.1.4.9	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penghubung	Meningkatnya Layanan Protokol, Pembinaan Pawarta, Fasilitasi Tamu, Fasilitasi Promosi UKM dan	Program Pelayanan Penghubung	Persentase Layanan Protokol, Pembinaan Pawarta, Fasilitasi Tamu, Fasilitasi Promosi UKM dan Seni Budaya Jatim di Jabodetabek

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		
1	2	3	4	5	6	7		
				Seni Budaya Jatim di Jabodetabek				
			4.1.4.1 0	Nilai IKM Pengguna Layanan di Lingkungan Sekretariat Daerah	Meningkatnya penyediaan administrasi operasional dan kerumahtanggaan pimpinan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase penyediaan administrasi operasional dan kerumahtanggaan pimpinan	
			4.1.4.1 1	Nilai IKM Pengguna Layanan Keprotokolan dan Materi Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya layanan keprotokolan dan materi komunikasi pimpinan terlaksana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase layanan keprotokolan dan materi komunikasi pimpinan terlaksana	
		4.1. 5	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	4.1.5.1	Persentase Kejadian Poleksosbud terhadap Tahun Sebelumnya	Menurunnya Jumlah Kejadian Poleksosbud	Program Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	Jumlah kelembagaan yang melaksanakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
						Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah Kejadian terkait Ekonomi, Sosial dan Budaya	
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Pemantauan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas di Jawa Timur	
							Jumlah Laporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial	

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1		2		3		4		5	6	7
						4.1.5.2	Indeks Demokrasi Indonesia	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peran serta Pemilih Pemula dalam Pengembangan Etika dan Budaya Politik Jumlah Partai Politik yang Melakukan Kaderisasi Jumlah kejadian terkait politik
						4.1.5.3	Persentase penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi pemberdayaan ormas Persentase penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Persentase Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
5	Mewujudkan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	5.1.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	5.1.1.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non Kebakaran	Persentase pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non Kebakaran

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1		2		3		4		5	6	7
									Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya Konsentrasi Parameter Air dan Udara (BOD, COD, TSS, Fecal Coli, Sulfur Dioksida, Nitrogen Dioksida)
									Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	PAD atau Retribusi Daerah
									Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang dilakukan pengawasan langsung
						5.1.1.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang dilakukan pengawasan tidak langsung
									Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya Konsentrasi Parameter Air dan Udara (BOD, COD, TSS, Fecal Coli, Sulfur Dioksida, Nitrogen Dioksida)

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1		2		3		4		5	6	7
									Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan, Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
						5.1.1.3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah Persentase Pengurangan Sampah
									Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Luas lahan kritis yang rehabilitasi
						5.1.1.4	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luasan Taman Kehati Kewenangan Provinsi yang Dikelola
						5.1.2.1	Persentase Rasio Elektrifikasi	Meningkatnya Rumah Tangga Miskin (RTM) yang teraliri listrik	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Dikelola
		5.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas Ketenagalistrika	5.1.2.2	Persentase Bauran Energi			Presentase Meningkatnya	Program Pengendalian Pencemaran	Terkendalinya Konsentrasi Parameter Air dan Udara (BOD,

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	2		3		4		5	6	7
				n dan Pemanfaatan Energi Berkelanjutan		Baru Terbarukan	Kapasitas EBT yang Terbangun	Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	COD, TSS, Fecal Coli, Sulfur Dioksida, Nitrogen Dioksida)
								Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang teraliri listrik
	5.2	Indeks Risiko Bencana (IRB)	5.2.1	Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana	5.2.1.1	Indeks Kapasitas Bencana	Meningkatnya persentase pendampingan pemulihan pasca bencana	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase Peningkatan Kapasitas EBT yang Terbangun
								Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana yang dibentuk
									Persentase korban terdampak bencana yang ditangani
									Persentase pendampingan pemulihan pasca bencana

6.6. Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2026

Dalam upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pada RPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2026, maka dibutuhkan rencana aksi yang dapat menjadi pijakan dalam menyusun Program Ikon yang menjadi prioritas pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan di tingkat Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Program Ikon tersebut antara lain termaktub pada tabel 6.3 sebagaimana berikut:

Tabel 6. 3 Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		
1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial						
1	Program Keluarga Harapan Plus	Jumlah Penerima Bantuan Sosial	50.000 orang	50.000 orang	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
2	Bansos Eks Klient	Jumlah Penerima Bantuan Sosial	878 orang	878 orang	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
3	Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FAKMIS)	Jumlah Penerima Bantuan Sosial	1100 orang	1100 orang	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
4	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Jumlah Penerima Bantuan Sosial	540 orang	540 orang	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
5	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)	Jumlah Penerima Bantuan Sosial	4.000 KPM	4.000 KPM	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
6	Bantuan Sosial bagi Miskin Ekstrem	Jumlah Penerima Bantuan Sosial	5.000 orang	5.000 orang	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
7	Pengurangan beban 26 Penerima Program Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah PPKS yang menerima bantuan dan rehabilitasi sosial	4628 orang	4628 orang	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
8	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melalui Program Jatim Puspa	Jumlah KPM Penerima Program	5.000 KPM	5.000 KPM	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		
9	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah kelompok Penerima pemberdayaan usaha ekonomi	10 kelompok	10 kelompok	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			3 kelompok	3 kelompok	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan
			5 kelompok	5 kelompok	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Peternakan
			16 kelompok	17 kelompok	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
			10 kelompok	10 kelompok	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Dinas Kehutanan
				Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan	
2. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi						
1	Millennial Job Center	Jumlah penerima asistensi	300 orang	300 orang	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM,
			500 orang	500 orang	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			300 orang	300 orang	Program Perekonomian dan Pembangunan	Biro Perekonomian
			150	200	Program Pelayanan Penghubung	Bakorwil I Madiun
			80	84		Bakorwil II Bojonegoro
			150	200		Bakorwil III Malang
			125	125		Bakorwil IV Pamekasan
150	200	Bakorwil V Jember				
2	<i>Service point</i> , Pelatihan, Investasi, <i>Co-working space</i> dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah masyarakat yang difasilitasi di EJSC	150	150	Program Pelayanan Penghubung	Bakorwil I Madiun
			80	84		Bakorwil II Bojonegoro
			150	150		Bakorwil III Malang
			150	150		Bakorwil IV Pamekasan
			150	200		Bakorwil V Jember
3	<i>Science Techno Park Dream Team</i>	Jumlah siswa penerima program	100 siswa	100 siswa	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		
4	Pelatihan kerja di 16 UPT BLK	Jumlah peserta Pelatihan Kerja	3.000 orang	3.000 orang	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Pelatihan intensif 480 jam 16 UPT BLK	Jumlah peserta Pelatihan Kerja	300 orang	300 orang	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Job Market Fair	Jumlah Job Market Fair yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	MTU (Mobile Training Unit)	Jumlah peserta Pelatihan Kerja berbasis MTU	3.000 orang	3.000 orang	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Revitalisasi UPT BLK	Jumlah Balai Latihan kerja yang direvitalisasi	5 BLK	5 BLK	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Promosi Investasi	Pelaku usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Peningkatan Daya Saing Investasi	Pelaku usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan						
1	BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) bagi SMA, SMK, PK-PLK Negeri & Swasta	Jumlah Siswa yang mendapat pendidikan gratis dan berkualitas	684.242 Siswa Negeri	684.242 Siswa Negeri	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			628.440 Siswa Swasta	628.440 Siswa Swasta		
2	Peningkatan Kualitas Sarpras Pendidikan	Jumlah Sekolah yang dilakukan Revitalisasi sarana dan prasarana	25 sekolah	25 sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
3	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan	Jumlah Ula, Wustho, Guru/Ustadzah yang mendapatkan bantuan	1.059.283 siswa dan guru	1.059.283 siswa dan guru	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Pendidikan

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		
	Guru Swasta (BPPDGS) atau BOSDA MADIN					
4	Revitalisasi SMK melalui Sekolah Pengampu	Jumlah SMK yang dilakukan revitalisasi	15 lembaga	15 lembaga	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
5	<i>Double Track</i>	Jumlah siswa SMA/MA yang mendapatkan program	11.000 siswa	11.000 siswa	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
6	Peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang menerima bantuan	16.701 Guru GTT dan PTT	16.701 Guru GTT dan PTT	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
7	Beasiswa untuk SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata)	Jumlah siswa SMK yang mendapat beasiswa	50 siswa	50 siswa	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
8	MILEA	Jumlah siswa dan Guru yang mengikuti program Keterampilan	1.250 siswa dan 500 Guru SMK	1.250 siswa dan 500 Guru SMK	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
9	Pendidikan Kesetaraan berbasis vokasi (kejar paket)	Jumlah kab/kota yang menerima Pendidikan Kesetaraan berbasis Vokasi	13 kab/kota	13 kab/kota	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Pendidikan
10	SMK Pengimbas	Jumlah SMK yang menerima program	5 SMK	5 SMK	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
11	SMA <i>Boarding</i>	Jumlah SMA <i>Boarding</i> yg dikelola	5 SMA	5 SMA	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
12	Peningkatan Kesejahteraan Kinerja Guru Non PNS jenjang TK/SD/SMP	Jumlah Guru Non PNS jenjang TK/SD/SMP yang mendapatkan bantuan	360 orang	360 orang	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Pendidikan
13	Peningkatan Kesejahteraan Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	Jumlah Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS yang mendapatkan bantuan	6.270 orang	6.270 orang	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Pendidikan

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		
14	Desa Sehat (Pelayanan Kesehatan Desa melalui Ponkesdes dan Dokter Umum Di Puskesmas Sesuai Standar)	Jumlah Perawat dan Dokter umum yang menerima dan melaksanakan program	2.700 orang	2.700 orang	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Kesehatan
15	Penyediaan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas (TANTISTAS)	Jumlah orang menerima pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas	3.600 orang	3.600 orang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
16	Perluasan akses dan penguatan fasilitas kesehatan	Jumlah Dokter yang ditempatkan di Puskesmas sangat terpencil	9 dokter	9 dokter	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Kesehatan
17	Pemenuhan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan bahari husada (rumah sakit terapung)	Frekuensi kunjungan kesehatan kepulauan	4 kali	4 kali	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Mohammad Noer Pamekasan
18	Konseling dari pintu ke pintu (KOPIPU)	Jumlah KK yang mendapat manfaat konseling	100.000 KK	100.000 KK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Kesehatan
19	Santri Jatim Sehat Dan Berkah (SAJADAH)	Jumlah Pesantren yang menerima program	300 pesantren	300 pesantren	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Kesehatan
20	Bunda Anak Impian (BUAIAN)	Jumlah Ibu Hamil yang menerima pendampingan	2.000 ibu hamil	2.000 ibu hamil	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Kesehatan
21	Penguatan RSUD dan RSUD Rujukan di 5 Koridor	Jumlah RS yang mendapatkan penguatan	7 RS	7 RS	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RS Paru Jember
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Mohammad Noer Pamekasan
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD dr. Soetomo
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD dr. Saiful Anwar

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD dr. Soedono Madiun
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Haji Provinsi Jawa Timur
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RS Jiwa Menur
4. Pengembangan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan						
1	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dikembangkan (air curah) (Lt/dtk)	3.000	3.100	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2	Penyediaan Akses Sanitasi Layak	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama sistem pengelolaan persampahan regional (kegiatan)	4	4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Jumlah KK yang dilayani pembangunan IPAL komunal (KK)	50	50	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
3	Penanganan desa rawan kekeringan	Jumlah Penanganan desa rawan kekeringan (Desa)	40	40	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
4	Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)	Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (persentase)	69,05%	69,10%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
5	Penanganan Banjir	Penanganan Banjir pada WS Kewenangan Provinsi (Wilayah Sungai)	5 lokasi	5 lokasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
6	Penanganan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan kewenangan Provinsi yang ditangani (Km)	1671,57 km	1671,57 km	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		
		Jumlah Jembatan yang ditangani (unit)	995 unit	995 unit		
7	Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	10 Ha	10 Ha	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
8	Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu)	Jumlah Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) (Unit)	1.600 unit	1.600 unit	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
9	Pemenuhan Alat Keselamatan Jalan dengan teknologi terbaru	Persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan (%)	53,35	54,09	Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
10	Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang	Jumlah pembangunan pintu perlintasan dan pos jaga KA (unit)	5 unit	5 unit	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
11	Mudik Balik Gratis	Jumlah penumpang mudik balik gratis Moda Bus (orang)	6400	6400	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Jumlah kendaraan bermotor yang diangkut (unit)	400	400	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Jumlah penumpang mudik balik gratis Moda Kapal Laut (orang)	3600	3600	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
12	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (Pelabuhan Pengumpan Regional)	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun dan dikembangkan (unit)	1 unit	1 unit	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
13	Pengembangan Layanan Bus Trans Jatim	Jumlah Koridor yang dilayani Bus Trans Jatim	6 koridor	7 koridor	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
14	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan dikembangkan (pelabuhan)	1 pelabuhan	1 pelabuhan	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		
15	Pembangunan dan Pengembangan Bandara	Jumlah Bandara yang dikembangkan (bandara)	1 bandara	1 bandara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan
16	Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B	Jumlah Terminal Tipe B yang dibangun dan dikembangkan (terminal)	3 terminal	3 terminal	Program Penyelenggaraan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
17	Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	60 Instansi	65 Instansi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas						
1	<i>Vocational training</i> pasca kepulangan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Wanita	Jumlah penerima manfaat pemberdayaan	160 orang	160 orang	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Pengembangan shelter sebagai pusat konsultasi dan pendampingan problem keluarga PMI (Pekerja Migran Indonesia) Wanita	Jumlah shelter yang dikembangkan	1 shelter	1 shelter	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Pembentukan karakter pemuda yang diilhami nilai-nilai agama, budaya lokal dan toleransi	Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan	250 orang	250 orang	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Jumlah penerima manfaat	500 orang	500 orang	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
					Program Peningkatan kualitas keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
					Program perlindungan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		
					Program perlindungan khusus anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
5	Peningkatan Literasi Digital Masyarakat	Indeks Literasi Digital	3,60	3,63	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Tunjangan kehormatan bagi Imam Masjid di Kampung, Pesisir dan Pulau Terluar	Jumlah penerima tunjangan kehormatan	11.000 orang	11.000 orang	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
7	Tunjangan Kehormatan untuk Hafidz Hafidzoh	Jumlah penerima tunjangan kehormatan	6.500 orang	6.500 orang	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
8	Bantuan Beasiswa S1 bagi Guru Madrasah Diniyah	Jumlah penerima beasiswa	300 orang	300 orang	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
9	Beasiswa S1 Ma'had Aly	Jumlah penerima beasiswa	300 orang	300 orang	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
10	Mahasiswa S2 bagi Guru Madrasah Diniyah	Jumlah penerima beasiswa	300 orang	300 orang	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
11	Tali Asih Perintis kemerdekaan	Jumlah penerima tali asih kehormatan	100 orang	100 orang	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
6. Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan						
1	Pengembangan Pusat Agropolitan	Jumlah kelompok kawasan agropolitan	10 kelompok	10 kelompok	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah penerima manfaat kelompok Agropolitan Bidang Peternakan	2 kelompok	2 kelompok	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan
		Jumlah kelompok penerima manfaat program Agropolitan Bidang Perikanan	6 kelompok	7 kelompok	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah penerima program upaya peningkatan unit usaha agribisnis	21 kelompok	21 kelompok	Program Perekonomian dan pembangunan	Biro Perekonomian
2	Penguatan SDM Pertanian	Jumlah penerima manfaat Kegiatan Pelatihan,	500 orang	500 orang	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		
		Penyuluhan, Pemberdayaan				
		Jumlah Kelompok yang mendapatkan penyuluhan	150 kelompok	150 kelompok	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Perkebunan
		Jumlah penerima manfaat Kegiatan Pelatihan, Bimtek, Pemberdayaan peternak	100 orang	100 orang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan
		Jumlah penerima manfaat Kegiatan Pelatihan, Bimtek	320 orang	325 orang	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
				Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		
3	Ketahanan Pangan	Jumlah penerima program upaya peningkatan ketahanan pangan	3 kelompok	3 kelompok	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	Petik olah kemas jual	Jumlah produk yang diinisiasi	3 produk	3 produk	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,
		Jumlah luasan budidaya perkebunan yang ditangani	7.300 hektar	7.300 hektar	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan,
		Jumlah kelompok yang didukung sarana panen, pasca panen dan pengolahan/alsintan	100 kelompok	100 kelompok	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan
		Jumlah produk olahan hasil ternak yang diinisiasi	2 produk	2 produk	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Peternakan
		Jumlah produk yang diinisiasi	3 produk	3 produk	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produk yang diinisiasi	5 produk	5 produk	Program Perekonomian dan Pembangunan	Biro Perekonomian

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		
5	Pengelolaan Hutan Lestari	Jumlah unit pengelola manajemen yg melaksanakan pengelolaan hutan berkelanjutan	1 unit	1 unit	Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
6	Asuransi Petani	Jumlah petani yang mendapatkan manfaat program asuransi petani	7.000 orang	7.400 orang	Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah petani yang mendapatkan manfaat program asuransi petani	10.100 orang	10.100 orang	Program Perekonomian dan Pembangunan	Biro Perekonomian
		Jumlah petani yang mendapatkan manfaat program asuransi petani lingkup Peternakan	3.000 orang	3.000 orang	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Peternakan
		Jumlah petani yang mendapatkan manfaat program asuransi petani lingkup Kelautan dan perikanan	100 orang	100 orang	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah petani yang mendapatkan manfaat program asuransi petani lingkup Kelautan dan perikanan	100 orang	100 orang	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
7. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa						
1	Communal Branding	jumlah Kapasitas SDM UKM yang mendapatkan manfaat program communal branding			Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM
2	One Pesantren One Product	Jumlah Pesantren yang mendapatkan program pemberdayaan	100 pesantren	100 pesantren	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UKM,
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM,
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Biro Perekonomian

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		
3	Pengembangan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan manfaat program Pengembangan Koperasi	100 koperasi	100 koperasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UKM,
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM,
4	Penguatan akses permodalan bagi KUKM	Jumlah KUKM yang difasilitasi akses permodalan	500 KUKM	500 KUKM	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan UKM,
5	Pemberdayaan BUMDesa	Jumlah BUMDesa yang mendapatkan program pemberdayaan	200 BUMDES	200 BUMDES	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Desa Berdaya	Jumlah Desa yang mendapatkan program pemberdayaan	132 Desa	132 Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Pemuda Wirausaha	Jumlah pemuda yang mendapatkan manfaat program wirausaha	150 orang	150 orang	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
8	Promosi Perdagangan	Pelaku usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM
9	Stabilisasi Harga	Frekuensi pelaksanaan Pasar Murah / Operasi Pasar	12 kali	12 kali	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Biro Perekonomian
10	Peningkatan Daya Saing Produk	Pelaku usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan UKM
8. Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi						
1	Pembangunan Zona Integritas menuju	Pencanangan Predikat WBK/WBBM pada PD/Unit	2 unit	2 unit	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		
	Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM)	kerja di Lingkungan Provinsi Jawa Timur				
2	Pengolahan system informasi data dan pengadaan ASN	Jumlah kegiatan Pengolahan system informasi data dan pengadaan ASN	3 kegiatan	3 kegiatan	Program Kepegawaian Daerah.	Badan Kepegawaian Daerah
3	Pendapatan Pajak dan Retribusi	Presentase Kenaikan Jumlah Pendapatan Pajak dan Retribusi	1%	1%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
4	Jatim <i>Super Apps</i>	Jumlah aplikasi yang terintegrasi dengan super apps	3 aplikasi	5 aplikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Satu Data Jawa Timur	Jumlah analisis data yang telah dilakukan	12 hasil analisis	12 hasil analisis	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Keamanan Siber	Jumlah aplikasi yang diamankan	496 aplikasi	496 aplikasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan	4 kegiatan	5 kegiatan	Program Riset dan Inovasi Daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah
8	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Jumlah kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang dilakukan	5 kegiatan	5 kegiatan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
9	Pelayanan Penghubung	Persentase pelaksanaan pelayanan badan penghubung	90%	90%	Program Pelayanan Penghubung	Badan Penghubung Daerah
10	Sistem Integrasi Jaga Lindungi Masyarakat Jawa Timur (SIJALINMAJA)	Persentase penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur	80%	85%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		
11	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan Reformasi Birokrasi dengan kategori sangat baik	20 PD	25 PD	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
12	Bantuan hukum untuk masyarakat miskin	Jumlah perkara yang menerima dana bantuan hukum	100 perkara	100 perkara	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
13	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi minimal 20JP	30%	31%	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9. Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup						
1	Peningkatan Pembinaan, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat Pembinaan, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Adiwiyata Tingkat Provinsi, Eco Pesantren dan Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup	400	400	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
2	Pembinaan Pengelolaan Sampah	Jumlah Penerima Desa Berseri	130	130	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Titik Pantau Kualitas Lingkungan (Air dan Udara)	80	80	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
4	Rehabilitasi Kerusakan Lahan	Luasan Lahan yang dilakukan Rehabilitasi (Ha)	0.5	0.5	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman KEHATI Provinsi yang terkelola (Unit)	3	3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		
6	Pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Jumlah Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi	225	225	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
7	Pengelolaan Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Dikelola	70	70,5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
8	Desa Tangguh Bencana (Destana)	Jumlah Pembentukan Desa Tangguh Bencana/Destana (Desa/Kelurahan)	40	40	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Peringatan Dini Bencana (Early Warning System)	Pengadaan Peringatan Dini Bencana (Early Warning System) (Unit)	5	5	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada saat Darurat Bencana	Jumlah Paket Kebutuhan Dasar pada saat Darurat Bencana (Paket)	5000	5000	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Pemulihan Sarana Prasarana Pasca Bencana	Jumlah Lokasi Pemulihan Sarana Prasarana Pasca Bencana (Lokasi)	12	12	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Kampung Siaga Bencana (KSB) Berdaya	Jumlah kampung siaga yang mendapatkan aloksi program	2 KSB	2 KSB	Program penanganan bencana	Dinas Sosial
13	Karang Taruna siaga bencana berbasis budaya (KANCANA BERDAYA)	Jumlah karang taruna yang mendapatkan aloksi program	2 karang taruna	2 karang taruna	Program Penangan Bencana	Dinas Sosial
14	Intergrasi Perpusda – Museum – Galeri Seni	Jumlah kegiatan yang dilakukan	2 kegiatan	2 kegiatan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15	Ecotourism	Jumlah kegiatan yang dilakukan	2 kegiatan	2 kegiatan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16	Penghargaan bagi para pelaku olahraga yang	Jumlah penerima penghargaan	150 orang	150 orang	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		
	berprestasi Nasional dan Internasional					
17	DAS Berkualitas	Luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dinilai keberhasilannya	400 Ha	400 Ha	Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
					Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Dinas Kehutanan
					Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan
					Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Dinas Kehutanan
18	Peningkatan Rasio Elektrifikasi	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mendapatkan fasilitas	1.000 Rumah Tangga Miskin	1.000 Rumah Tangga Miskin	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
19	Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Lembaga/Rumah Tangga yang mendapatkan fasilitas	100 Lembaga/Rumah Tangga	100 Lembaga/Rumah Tangga	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

6.7. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Tabel 6. 4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[TUJUAN-1] Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Pertumbuhan Ekonomi	4,90 - 5,15	4,95 - 5,20		5,00 - 5,25		5,00 - 5,25	
		[SASARAN-1.1.1] Meningkatkan Nilai tambah Ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan	(0,67) -1,47	0,25%		0,25%		0,25%	
			Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM	6,5-7,5	3,50%		3,53%		3,53%	
			Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata	12,4	6,60%		6,60%		6,60%	
			Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Hortikultura	3,82-4,9	1,00%		1,00%		1,00%	
			Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		0,420 Indeks		0,415 Indeks		0,415 Indeks	
			Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Peternakan	1,21 - 2,46	1,30%		1.3 %		1,30%	
			Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan	1,90 - 4,90	1,50%		1.5 %		1,50%	
			Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perkebunan	0,62 - 2,78	1,00%		1,50%		1,50%	
			Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu		1,90%		1,90%		1,90%	

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	3,51-6,41	4,96%		5,97%		5,97%	
			Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,99-6,07	5,03%		6,04%		6,04%	
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN										
1	02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi (kcal/kap/hari)	2.068,37 kcal/kap/hari	2.077,41 kcal/kap/hari	2.583.012.118	2.082,00 kcal/kap/hari	2.595.032.513	2.082,00 kcal/kap/hari	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi (gram/kap/hari)	60,66 gram/kap/hari	60,66 gram/kap/hari	0	60,66 gram/kap/hari	0	60,66 gram/kap/hari	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	1%	1%	138.214.450	1%	138.857.650	1%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	80%	80%	252.817.899	80%	253.994.421	80%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4	03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan produktivitas tanaman pangan utama	1,14%	0,01%	27.522.866.040	0,01%	27.435.224.014	0,01%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Persentase Peningkatan produktivitas hortikultura utama	19,70%	1%	0	1%	0	1%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Indeks Per-tanaman (%)	0,01%	0,01%	12.469.206.967	0,01%	12.527.234.100	0,01%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Peningkatan kawasan tanaman pangan dan hortikultura	0 lokasi	5 lokasi	0	6 lokasi	0	11 lokasi	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
6	03.27.05	PROGRAM PENGEN-DALIAN DAN PE-NANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penurunan kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan DPI	3,75%	3,60%	14.371.719.012	3,50%	14.438.599.741	3,50%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
7	03.27.07	PROGRAM PENYULU-HAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas petani melalui Penyuluhan Pertanian (orang)	300 orang	300 orang	6.610.416.556	300 orang	6.641.179.019	600 orang	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWIJA										
1	03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan produksi benih tanaman pangan	4,19%	1%	11.000.000.000	1%	10.000.000.000	1%	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWIJA
UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA										
1	03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi benih hortikultura	5%	1%	451.038.902	1%	412.686.041	1%	UPT PENGEM-BANGAN BENIH HORTIKULTURA
UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA										
1	03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan produksi kebun agribisnis TPH	-5%	1%	619.853.356	1,50%	567.145.819	2,50%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
1	02.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase penerbitan izin USP koperasi	100 Persen	100 Persen	1.500.000.000	100 Persen	1.410.000.000	100 Persen	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkualitas	64 Persen	65 Persen	3.500.000.000	66 Persen	3.290.000.000	66 Persen	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	23 Persen	24 Persen	750.000.000	25 Persen	705.000.000	25 Persen	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4	02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	97 Persen	97 Persen	3.500.000.000	97 Persen	3.290.000.000	97 Persen	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5	02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	70 Persen	72 Persen	10.000.000.000	73 Persen	9.400.000.000	73 Persen	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6	02.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang telah diberdayakan	34 Persen	35 Persen	40.500.000.000	35 Persen	38.070.000.000	35 Persen	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7	02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UKM yang telah dikembangkan	34 Persen	35 Persen	11.000.000.000	35 Persen	10.340.000.000	35 Persen	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA										
1	03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata (DTW)	1 Persen	1 Persen	5.576.236.423	1 Persen	5.389.452.040	1 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	03.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase peningkatan cakupan pemasaran dalam negeri dan luar negeri	10 Persen	10 Persen	3.983.960.143	10 Persen	3.850.511.437	10 Persen	DINAS KE-BUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	03.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase peningkatan pemanfaatan dan perlindungan HAKI produk-produk kreatif	10 Persen	10 Persen	3.901.564.023	10 Persen	3.770.875.298	10 Persen	DINAS KE-BUDAYAAN DAN PARIWISATA
4	03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	9 Persen	9 Persen	5.374.228.928	9 Persen	5.194.211.089	9 Persen	DINAS KE-BUDAYAAN DAN PARIWISATA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN										
1	03.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Guna	10 Ha	10 Ha	11.135.343.146	10 Ha	10.188.479.649	20 Ha	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah produksi garam rakyat	306.000 Ton	318.362 Ton		0 324.729 Ton		0 643.091 Ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Persentase kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sesuai dengan Rencana Zonasi	6,50%	6,50%		0 6,50%		0 13%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	03.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	609.000 Ton	621.180 Ton	54.460.334.042	633.603,60 Ton	49.829.448.252	1.254.783,60 Ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.339.505,74 Ton	1.366.295,55 Ton	52.845.677.180	1.393.621,77 Ton	48.352.089.327	2.759.917,62 Ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	03.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	98%	98%	5.994.034.838	98%	5.484.348.453	98%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5	03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan UPI yang bersertifikat	1.093.955,63 Ton	1.115.834,74 Ton	21.144.951.939	1.138.151,43 Ton	19.346.948.691	2.253.986,17 Ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN										
1	03.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	609.000 Ton	621.180 Ton	341.465.377	633.603,6 Ton	312.429.801	1.254.783,60 Ton	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN										
1	03.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	609.000 Ton	621.180 Ton	254.427.669	633.603,6 Ton	232.793.107	1.254.783,60 Ton	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP										
1	03.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	609.000 Ton	621.180 Ton	42.793.065	633.603,6 Ton	39.154.274	1.254.783,60 Ton	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
DINAS PERKEBUNAN										
1	03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi tanaman semusim Perkebunan	1%	1%	39.449.076.970	1%	36.094.632.434	1%	DINAS PERKEBUNAN
			Persentase pemenuhan kebutuhan benih tanaman perkebunan	4%	5%	0	5%	0	5%	DINAS PERKEBUNAN
			Persentase peningkatan benih bersertifikat	2%	2%	0	2%	0	2%	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase peningkatan produksi tanaman tahunan Perkebunan	0,50%	0,50%	0	0,50%	0	0,50%	DINAS PERKEBUNAN
2	03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan yang difasilitasi sektor hilir	100%	100%	2.481.392.657	100%	2.270.394.208	100%	DINAS PERKEBUNAN
3	03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Pengendalian OPT dan Penanggulangan bencana perkebunan	5%	6%	700.371.289	8%	640.817.129	8%	DINAS PERKEBUNAN
4	03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan jumlah kelompok tani terakses informasi teknologi pertanian	5%	5%	23.783.598.839	5%	21.761.225.458	5%	DINAS PERKEBUNAN
DINAS PETERNAKAN										
1	03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi daging	0%	1,50%	63.922.828.499	1,50%	58.221.764.040	1,50%	DINAS PETERNAKAN
			Persentase peningkatan produksi susu	0%	0,50%	0	0,50%	0	0,50%	DINAS PETERNAKAN
			Persentase peningkatan produksi telur	0%	1,80%	0	1,80%	0	1,80%	DINAS PETERNAKAN
2	03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan populasi ternak di wilayah sumber bibit	0%	1%	5.000.000.000	1%	5.000.000.000	1%	DINAS PETERNAKAN
3	03.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Wilayah Terkendali PHMS	0%	10%	4.500.000.000	15%	4.000.000.000	15%	DINAS PETERNAKAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH	0%	5%	0	5%	0	5%	DINAS PETERNAKAN
4	03.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pengawasan Izin Usaha Obat Hewan	0%	10%	50.000.000	10%	50.000.000	10%	DINAS PETERNAKAN
5	03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Agribisnis Peternakan	0%	5%	13.500.000.000	5%	12.500.000.000	5%	DINAS PETERNAKAN
DINAS KEHUTANAN										
1	03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah Penggunaan, Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Unit	4 Unit	8.858.701.117	4 Unit	8.105.425.658	8 Unit	DINAS KEHUTANAN
			Jumlah bibit tanaman hutan yang beredar	515.000 Batang	400.000 Batang	0	410.000 Batang	0	810.000 Batang	DINAS KEHUTANAN
			Jumlah produksi hasil hutan kayu	4.200.000 M3	4.100.000 M3	0	4.100.000 M3	0	8.200.000 M3	DINAS KEHUTANAN
			Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Banyuwangi	0,15%	0,08%	0	0,08%	0	0,08%	DINAS KEHUTANAN
			Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Bojonegoro	0,15%	0,13%	0	0,13%	0	0,13%	DINAS KEHUTANAN
			Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Jember	0,16%	0,13%	0	0,13%	0	0,13%	DINAS KEHUTANAN
			Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Lumajang	0,18%	0,16%	0	0,16%	0	0,16%	DINAS KEHUTANAN
			Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Madiun	0,08%	0,06%	0	0,06%	0	0,06%	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Malang	0,01%	0,01%	0	0,01%	0	0,01%	DINAS KEHUTANAN
			Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Nganjuk	0,23%	0,19%	0	0,19%	0	0,19%	DINAS KEHUTANAN
			Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Pacitan	0,01%	0,02%	0	0,02%	0	0,02%	DINAS KEHUTANAN
			Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Sumenep	0,12%	0,05%	0	0,05%	0	0,05%	DINAS KEHUTANAN
			Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Trenggalek	0,12%	0,12%	0	0,12%	0	0,12%	DINAS KEHUTANAN
			Persentase luas areal rehabilitasi di Jawa Timur	0,39%	0,07%	0	0,07%	0	0,07%	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Peningkatan unit usaha tertib penatausahaan hasil hutan	5%	5%	0	5%	0	5%	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Penurunan Gangguan Hutan	2%	1%	0	1%	0	1%	DINAS KEHUTANAN
2	03.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	237943,38 Ha	32179,68 Ha	3.681.679.541	32179,68 Ha	3.368.617.975	32179,68 Ha	DINAS KEHUTANAN
			Persentase nilai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi Tahura Raden Soerjo dengan metode METT	82%	82%	0	82%	0	82%	DINAS KEHUTANAN
3	03.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan	80%	70%	3.669.339.121	70%	3.357.326.889	70%	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								
			Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Banyuwangi	80%	70%	0	70%	0	70%	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Bojonegoro	80%	70%	0	70%	0	70%	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Jember	80%	70%	0	70%	0	70%	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Lumajang	80%	70%	0	70%	0	70%	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Madiun	80%	70%	0	70%	0	70%	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Malang	80%	70%	0	70%	0	70%	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Nganjuk	80%	70%	0	70%	0	70%	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Pacitan	80%	70%	0	70%	0	70%	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Sumenep	80%	70%	0	70%	0	70%	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan	80%	70%	0	70%	0	70%	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			di CDK Wilayah Trenggalek							
4	03.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Luas DAS yang Terkelola	0,58%	0,53%	646.904.470	0,53%	591.896.715	0,53%	DINAS KEHUTANAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
1	03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Izin yang diterbitkan	135,090 Dokumen	135,100 Dokumen	425.000.000	135,200 Dokumen	575.000.000	135,200 Dokumen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Rekomendasi Sarana Distribusi Perdagangan	10 Dokumen	10 Dokumen	500.000.000	11 Dokumen	800.000.000	11 Dokumen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi Bahan Makanan	2.00 Persen	3.00 Persen	2.290.000.000	3.00 Persen	3.110.000.000	3.00 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	6.85 Persen	2 Persen	1.250.000.000	2 Persen	2.325.000.000	2 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5	03.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	80 Persen	90 Persen	2.600.000.000	92 Persen	2.480.000.000	92 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6	03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	90 Pelaku Usaha	125 Pelaku Usaha	2.010.000.000	150 Pelaku Usaha	1.760.000.000	150 Pelaku Usaha	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7	03.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan unit usaha industri	1.20 Persen	1.20 Persen	7.140.000.000	1.20 Persen	3.940.000.000	1.20 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	03.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	10 Persen	10 Persen	100.000.000	10 Persen	100.000.000	10 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9	03.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang telah terdaftar dalam SIINas	20 Persen	20 Persen	150.000.000	20 Persen	150.000.000	20 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
[SASARAN-1.1.2] Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman dan Sumber Daya Air			Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	90,15	90,16%		90,17%		90,17%	
			Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	69	69,05%		69,10%		69,10%	
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR										
1	01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Ketahanan Air	3.10 Indeks	3.15 Indeks	149.261.313.356	3.20 Indeks	136.569.285.163	3.20 Indeks	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA										
1	01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	100 persen	100 persen	65.767.792.378	100 persen	60.175.407.745	100 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2	01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sistem Persampahan Regional yang Dikembangkan	21.50 persen	26.35 persen	2.567.583.880	28.65 persen	2.349.256.396	28.65 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	95 persen	97.5 persen	1.694.605.361	100 persen	1.550.509.222	100 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
4	01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase Regional yang Dikembangkan	8.33 persen	9.35 persen	4.827.057.694	11.23 persen	4.416.602.024	11.23 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
5	01.03.07	PROGRAM PENGEM-BANGAN PER-MUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	0 persen	100 persen	3.853.848.594	100 persen	4.046.541.024	100 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
6	01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung	100 persen	100 persen	285.109.854.447	100 persen	259.928.574.504	100 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
			Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	100 persen	100 persen	7.500.000.000	100 persen	7.800.000.000	100 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
7	01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	33.33 persen	36.40 persen	671.851.115	38.46 persen	614.722.090	38.46 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
8	01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan	83 poin	83.50 poin	563.971.902	84 poin	516.016.092	84 poin	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
			Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi	100 persen	100 persen	563.971.902	100 persen	516.016.092	100 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
9	01.03.12	PROGRAM PENYELenggaraAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	80 Poin	82.5 Poin	5.280.664.180	85 Poin	4.831.637.321	85 Poin	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
10	01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Kegiatan Mitigasi Bencana yg Ditangani pada Wilayah Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jawa Timur	6 persen	8 persen	566.511.707	9 persen	518.339.931	9 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
11	01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	12.18 persen	12.80 persen	51.204.561.374	13.00 persen	46.850.521.322	13.00 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										DAN CIPTA KARYA
12	01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	24 persen	25 persen	6.494.343.962	26 persen	5.942.115.157	26 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
13	02.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	100 persen	100 persen	385.137.582	100 persen	352.388.459	100 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
14	02.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	100 persen	100 persen	85.586.129	100 persen	78.308.546	100 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
15	02.10.10	PROGRAM PENAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun	100 persen	100 persen	710.364.873	100 persen	649.960.936	100 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
[SASARAN-1.1.3] Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara			Indeks Konektivitas	0,848	0,769 Indeks		0,770 Indeks		0,770 Indeks	
			Indeks Aksesibilitas	76,55	76,89 Indeks		77,29 Indeks		77,29 Indeks	
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA										

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tersusunnya dokumen kajian, leger, dan evaluasi penyelenggaraan jalan	100%	100%	379.254.932.583	100%	347.006.025.023	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase capaian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase capaian pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Kediri	92.85 %	76.81 %	0	77.00 %	0	77.00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Pacitan	96.68 %	77.93 %	0	77.76 %	0	77.76 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap Wilayah UPT PJJ Surabaya	100%	89.21 %	0	89.96 %	0	89.96 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Banyuwangi	59,12%	47.72 %	0	47.72 %	0	47.72 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Jember	55.09 %	51.76 %	0	51.76 %	0	51.76 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi	63.57 %	39.35 %	0	39.38 %	0	39.38 %	DINAS PEKERJAAN

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Malang							UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Pamekasan	20.44 %	17.61 %	0	17.61 %	0	17.61 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Probolinggo	62.81 %	48.87 %	0	48.88 %	0	48.88 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Bojonegoro	65.46 %	65.36 %	0	65.36 %	0	65.36 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Kediri	60.52 %	59.33 %	0	59.33 %	0	59.33 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Madiun	97.35 %	62.35 %	0	62.35 %	0	62.35 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Mojokerto	82.37 %	81.03 %	0	81.03 %	0	81.03 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Pacitan	59.14 %	58.89 %	0	58.89 %	0	58.89 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi	82.27 %	66.37 %	0	66.43 %	0	66.43 %	DINAS PEKERJAAN

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Surabaya							UMUM BINA MARGA
			Persentase Kepuasan Pelayanan Laboratorium Pengujian	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase terpenuhinya kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Banyuwangi	100%	89.52 %	0	89.25 %	0	89.25 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Jember	92.45 %	90.00 %	0	91.41 %	0	91.41 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Pamekasan	94.39 %	88.63 %	0	88.44 %	0	88.44 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Probolinggo	88.64 %	88.95 %	0	88.70 %	0	88.70 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Bojonegoro	94.64 %	70.80 %	0	71.51 %	0	71.51 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Madiun	91.72 %	93.52 %	0	93.75 %	0	93.75 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Malang	93.47 %	86.88 %	0	87.11 %	0	87.11 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Mojokerto	88.18 %	95.72 %	0	95.44 %	0	95.44 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DINAS PERHUBUNGAN										
1	02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Provinsi	2%	2%	163.660.447.776	2%	150.349.306.267	2%	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Bangkalan	87.85 indeks	88.11 indeks	0	88.38 indeks	0	88.38 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Banyuwangi	78.40 indeks	78.79 indeks	0	79.19 indeks	0	79.19 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Jember	90.43 indeks	90.61 indeks	0	90.79 indeks	0	90.79 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Kediri	91.78 indeks	87.49 indeks	0	87.75 indeks	0	87.75 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Lamongan	96.40 indeks	93.41 indeks	0	93.59 indeks	0	93.59 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap	90.17 indeks	90.35 indeks	0	90.53 indeks	0	90.53 indeks	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan UPT PPP LLAJ Madiun							
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Malang	84.22 indeks	84.56 indeks	0	84.90 indeks	0	84.90 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Mojokerto	86.79 indeks	87.05 indeks	0	87.31 indeks	0	87.31 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Probolinggo	88.25 indeks	88.51 indeks	0	88.78 indeks	0	88.78 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Surabaya	90.43 indeks	90.61 indeks	0	90.79 indeks	0	90.79 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Tulungagung	88.66 indeks	88.93 indeks	0	89.19 indeks	0	89.19 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	77.37 Indeks	77.76 Indeks	0	78.15 Indeks	0	78.15 Indeks	DINAS PERHUBUNGAN
2	02.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Volume Bongkar Muat di Pelabuhan Pengumpan Regional dan/atau yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur	1.09 %	1,12%	33.307.357.033	1,15%	30.476.231.686	1,15%	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap	81.25 indeks	81.58 indeks	0	81.90 indeks	0	81.90 indeks	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan UPT PPR Banyuwangi							
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPR Lamongan	82.01 indeks	82.34 indeks	0	82.67 indeks	0	82.67 indeks	DINAS PERHUB-UNGAN
			Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Angkutan Penyeberangan di Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Penyeberangan yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur	0.50 %	0.53 %	0	0.55 %	0	0.55 %	DINAS PERHUB-UNGAN
3	02.15.05	PROGRAM PENGEL-OLAAAN PERKERETAAPIAN	Persentase keselamatan di perlintasan Sebidang Kereta Api Jalan Provinsi	100%	100%	3.509.039.830	100%	3.509.039.830	100%	DINAS PERHUB-UNGAN
[TUJUAN-1] Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan			Indeks Gini	0,3980 - 0,3760	0,3870 - 0,3650 Indeks		0,3760 - 0,3540 Indeks		0,3760 - 0,3540 Indeks	
[SASARAN-1.2.1] Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal			Nilai Realisasi Penanaman Modal	115	117 Trilyun Rupiah		120 Trilyun Rupiah		120 Trilyun Rupiah	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
1	02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Kualitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal	4.00 Indeks	4.00 Indeks	1.335.106.600	4.00 Indeks	1.238.585.900	4.00 Indeks	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Komitmen/Rencana Penanaman Modal	35 Trilyun	35 Trilyun	1.560.622.300	35 Trilyun	1.393.906.100	35 Trilyun	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	88 Indeks	88 Indeks	3.755.907.400	88 Indeks	3.487.553.400	88 Indeks	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kontribusi Perusahaan PMDN dan UKM terhadap realisasi investasi	50 Persen	50 Persen	1.125.079.200	50 Persen	1.013.901.500	50 Persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	02.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Yang Dapat Diakses	100 Persen	100 Persen	1.121.918.300	100 Persen	1.008.015.800	100 Persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
[TUJUAN-2] Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran			Persentase Penduduk Miskin	10,05 – 9,05	9,95 – 9,75 %		9,45 – 8,30 %		9,45 – 8,30 %	
[SASARAN-2.1.1] Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan			Persentase Penduduk Miskin Perdesaan	14,86 – 13,09	13,28-12,68 %		12,78-11,90 %		12,78-11,90 %	
			Persentase Desa Mandiri	20,59	41,00%		45,00%		45,00%	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1	02.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang di-proses penetapan dalam penataan desa	36.1 persen	20 persen	200.630.636	20 persen	183.570.558	20 persen	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	02.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase peningkatan kerjasama desa	25 persen	15 persen	730.499.460	15 persen	668.383.433	15 persen	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	02.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa cepat berkembang	30 persen	33 persen	11.214.801.098	36 persen	10.261.181.111	36 persen	DINAS PEMBERDAYAAN

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										MASYARAKAT DAN DESA
			Persentase desa yang melaksanakan kewenangan provinsi terkait pemberdayaan usaha ekonomi desa	7 persen	9 persen	0	9 persen	0	9 persen	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4	02.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	3,99 persen	4,1 persen	5.763.383.172	4,2 persen	5.273.309.622	4,2 persen	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah lembaga pengelola TTG yang aktif	5 lembaga	10 lembaga	0	10 lembaga	0	20 lembaga	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Persentase produk unggulan UEM	4 persen	4 persen	0	4 persen	0	12 persen	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
[SASARAN-2.1.2] Meningkatnya Kemandirian PPKS			Persentase PPKS yang Mandiri	1,34	1,36%		1,38%		1,38%	
DINAS SOSIAL										
1	01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Penerima manfaat program yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100%	9.689.506.405	100%	9.952.852.935	100%	DINAS SOSIAL
2	01.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%	100%	27.515.200	100%	28.263.023	100%	DINAS SOSIAL

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sidoarjo	100%	100%	66.678.843.145	100%	68.491.076.011	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Banyuwangi	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Situbondo	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sumenep	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Rehabilitasi Sosial Mar-sudi Putra Surabaya							
			Persentase Pemerlu Pelayan-an Kesejahteraan So-sial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayan-an Kesejahteraan So-sial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayan-an Kesejahteraan So-sial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayan-an Kesejahteraan So-sial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayan-an Kesejahteraan So-sial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kronis Tuban	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan di dalam LKS	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS SOSIAL
4	01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	177.796.172.500	100%	182.628.410.914	100%	DINAS SOSIAL

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	01.06.06	PROGRAM PE-NANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terdampak psikososial yang ditangani	100%	100%	14.772.456.810	100%	15.173.950.454	100%	DINAS SOSIAL
[TUJUAN-2] Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,45 – 3,95	4,43 – 3,93 %		4,41 – 3,91 %		4,41 – 3,91 %	
[SASARAN-2.2.1] Menurunnya Tingkat Pengangguran			Tingkat Kesempatan Kerja		94,89 - 96,47 %		94,92 - 96,49 %		94,92 - 96,49 %	
			Indeks Pembangunan Pemuda	56,8	57,50 Indeks		57,75 Indeks		57,75 Indeks	
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI										
1	02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100%	100%	304.289.073	100%	278.414.683	100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase Kab/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	8%	40%	0	50%	0	50%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya di Jawa Timur	73%	75%	68.686.135.539	76%	62.080.307.141	76%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK BOJONEGORO bersertifikat kompetensi	62.5 %	75%	0	80%	0	80%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK JEMBER bersertifikat kompetensi	80%	92.7 %	0	94.9 %	0	94.9 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK JOMBANG bersertifikat kompetensi	75%	80%	0	80%	0	80%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK KEDIRI bersertifikat kompetensi	75%	90%	0	90%	0	90%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase lulusan UPT BLK MADIUN bersertifikat kompetensi	80%	80%	0	80%	0	80%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK MOJOKERTO bersertifikat kompetensi	90%	85%	0	85%	0	85%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK NGANJUK bersertifikat kompetensi	64%	64.11 %	0	64.4 %	0	64.4 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK PONOROGO bersertifikat kompetensi	68%	70%	0	70%	0	70%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK SINGOSARI bersertifikat kompetensi	80%	85%	0	87%	0	87%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK SITUBONDO bersertifikat kompetensi	60%	90%	0	90%	0	90%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK SUMENEP bersertifikat kompetensi	80%	80%	0	85%	0	85%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK SURABAYA bersertifikat kompetensi	90%	91%	0	92%	0	92%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK TUBAN bersertifikat kompetensi	80%	80%	0	80%	0	80%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK TULUNGAGUNG bersertifikat kompetensi	85%	75%	0	80%	0	80%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK WONOJATI bersertifikat kompetensi	90%	72%	0	80%	0	80%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK PASURUAN bersertifikat kompetensi	75%	75%	0	78%	0	78%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase pertumbuhan tingkat produktivitas tenaga kerja perusahaan alumni BLP2TK	0%	6.5 %	0	7%	0	7%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0 ORANG	344000 ORANG	6.444.101.247	355000 ORANG	6.066.209.233	695000 ORANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase perlindungan PMI (pra dan purna penempatan)	0%	60%	0	61.25 %	0	61.25 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Jombang	80%	70%	0	70%	0	70%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Nganjuk	31%	41.3 %	0	46.02 %	0	46.02 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Tuban	80%	70%	0	75%	0	75%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Bojonegoro	72%	70%	0	70%	0	70%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Jember	75%	85%	0	85%	0	85%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Kediri	55%	72%	0	75%	0	75%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Madiun	65%	65%	0	65%	0	65%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Mojokerto	75%	80%	0	80%	0	80%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Pasuruan	55%	63%	0	65%	0	65%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Ponorogo	67%	69%	0	70%	0	70%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Singosari	80%	67%	0	70%	0	70%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Situbondo	65%	75%	0	75%	0	75%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Sumenep	75%	75%	0	80%	0	80%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Surabaya	90%	80%	0	80%	0	80%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Tulungagung	73%	55%	0	60%	0	60%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Wonojati	80%	65%	0	70%	0	70%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4	02.07.05	PROGRAM HUB-UNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak	20%	20%	2.032.670.572	20%	1.859.827.981	20%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5	02.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	80%	81%	7.000.000.000	82%	7.000.000.000	82%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Prosentase perusahaan yang melaksanakan pengujian K3 L sesuai peraturan perundangan - undangan	5%	6%	0	6%	0	6%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6	03.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase transmigran yang ditempatkan	80%	80%	941.447.423	80%	861.394.012	80%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
1	02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah wirausaha muda pemula	150 Orang	160 Orang	7.907.730.419	170 Orang	7.235.318.156	170 Orang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Persentase efektifitas koordinasi lintas sektor bidang pelayanan kepemudaan	90 Persen	80 Persen	0	80 Persen	0	80 Persen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Persentase organisasi pemuda yang aktif	100 Persen	90 Persen	0	90 Persen	0	90 Persen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	7.06 Persen	7,06 Persen	244.510.934.139	7.5 Persen	223.719.614.541	7.5 Persen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Angka partisipasi masyarakat berolahraga	34,5 Persen	34,5 Persen	0	34,6 Persen	0	34,6 Persen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah atlet pelajar dan paralimpik pelajar yang berprestasi tingkat nasional	275 Orang	275 Orang	0	300 Orang	0	300 Orang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	02.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pramuka Garuda Provinsi Jawa Timur	5 Persen	6 Persen	18.830.660.175	6,05 Persen	17.229.446.408	6,05 Persen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[TUJUAN-3] Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,16 - 75,25	75,7 - 75,79 Indeks		76,25 - 76,34 Indeks		76,25 - 76,34 Indeks	
		[SASARAN-3.1.1] Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,67	0,68 Indeks		0,69 Indeks		0,69 Indeks	
			Tingkat Kegemaran Membaca	71,5	71,75 Indeks		72,00 Indeks		72,00 Indeks	
DINAS PENDIDIKAN										
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 tahun	73,4 Persen	74,88 Persen	3.345.183.492.450	75,62 Persen	3.060.646.112.893	75,62 Persen	DINAS PENDIDIKAN
			Angka partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PAKET C/SMLB	98,78 Persen	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN
			Angka partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PAKET C/SMLB	74,99 Persen	76,5 Persen	0	77,26 Persen	0	77,26 Persen	DINAS PENDIDIKAN
			Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	65,7 Persen	67,02 Persen	0	67,69 Persen	0	67,69 Persen	DINAS PENDIDIKAN
			Partisipasi lulusan SMK dalam dunia usaha dunia industri	65 Persen	68 Persen	0	70 Persen	0	70 Persen	DINAS PENDIDIKAN
			Tingkat penyerapan lulusan SMK	86,76 Persen	88,5 Persen	0	89,39 Persen	0	89,39 Persen	DINAS PENDIDIKAN
2	01.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar jenjang SMA	14,96 Persen	16,10 Persen	600.000.000	17,24 Persen	630.000.000	17,24 Persen	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar jenjang SLB	11,68 Persen	14,18 Persen	0	16,68 Persen	0	16,68 Persen	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar jenjang SMK	19,01 Persen	19,56 Persen	0	20,11 Persen	0	20,11 Persen	DINAS PENDIDIKAN
3	01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan layanan kebutuhan profesi	75,67 Persen	77,76 Persen	3.063.718.883	79,85 Persen	2.803.203.914	79,85 Persen	DINAS PENDIDIKAN
4	01.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase lembaga yang mendapatkan rekomendasi	35 Persen	36 Persen	600.000.000	37 Persen	630.000.000	37 Persen	DINAS PENDIDIKAN
5	01.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Kemampuan Literasi peserta didik jenjang SMA	64,65 Persen	71,28 Persen	600.000.000	74,84 Persen	630.000.000	74,84 Persen	DINAS PENDIDIKAN
			Kemampuan Literasi peserta didik jenjang SLB	66,59 Persen	73,41 Persen	0	77,08 Persen	0	77,08 Persen	DINAS PENDIDIKAN
			Kemampuan Literasi peserta didik jenjang SMK	51,14 Persen	56,38 Persen	0	59,2 Persen	0	59,2 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 SURABAYA										
1	01.01.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 1 Surabaya	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 1 SURABAYA
SMK NEGERI 5 SURABAYA										
1	01.01.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 5 Surabaya	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 5 SURABAYA
SMK NEGERI 6 SURABAYA										
1	01.01.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 6 Surabaya	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 6 SURABAYA
SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO										

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO										
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
SMK NEGERI 2 MALANG										
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 2 Malang	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 2 MALANG
SMK NEGERI 4 MALANG										
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 4 Malang	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 4 MALANG
SMK NEGERI 11 MALANG										
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 11 Malang	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 11 MALANG
SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG										
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 1 Singosari Malang	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO										
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 1 Panji Situbondo	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI										
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SMK NEGERI 2 BONDOWOSO										
1	01.01.02	PROGRAM PENGEL-OLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 2 Bondowoso	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
SMK NEGERI 5 JEMBER										
1	01.01.02	PROGRAM PENGEL-OLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 5 Jember	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 5 JEMBER
SMK NEGERI 3 MADIUN										
1	01.01.02	PROGRAM PENGEL-OLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 3 Madiun	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 3 MADIUN
SMK NEGERI 1 PACITAN										
1	01.01.02	PROGRAM PENGEL-OLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 1 Pacitan	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 1 PACITAN
SMK NEGERI 2 PASURUAN										
1	01.01.02	PROGRAM PENGEL-OLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 2 Pasuruan	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 2 PASURUAN
SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG										
1	01.01.02	PROGRAM PENGEL-OLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI										
1	01.01.02	PROGRAM PENGEL-OLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
SMK NEGERI 1 PP TEGALAMPEL BONDOWOSO										

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01.01.02	PROGRAM PENGEL-OLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 1 Tegalampel Bondowoso	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 per- sen	13.898.893	89,39 per- sen	SMK NEGERI 1 PP TEGALAMPEL BONDOWOSO
SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO										
1	01.01.02	PROGRAM PENGEL-OLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 per- sen	13.898.893	89,39 per- sen	SMK NEGERI 1 JENANGAN PO-NOROGO
SMK NEGERI 2 NGANJUK										
1	01.01.02	PROGRAM PENGEL-OLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 2 Nganjuk	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 per- sen	9.910.747	89,39 per- sen	SMK NEGERI 2 NGANJUK
SMK NEGERI 1 BANYUWANGI										
1	01.01.02	PROGRAM PENGEL-OLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 1 Banyuwangi	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 per- sen	9.910.747	89,39 per- sen	SMK NEGERI 1 BANYUWANGI
SMK NEGERI 1 LUMAJANG										
1	01.01.02	PROGRAM PENGEL-OLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 1 Lumajang	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 per- sen	9.910.747	89,39 per- sen	SMK NEGERI 1 LUMAJANG
SMK NEGERI KALIBARU BANYUWANGI										
1	01.01.02	PROGRAM PENGEL-OLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN Kalibaru Banyuwangi	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 per- sen	9.910.747	89,39 per- sen	SMK NEGERI KALIBARU BANYUWANGI
SMK NEGERI 6 JEMBER										
1	01.01.02	PROGRAM PENGEL-OLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 6 Jember	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 per- sen	9.910.747	89,39 per- sen	SMK NEGERI 6 JEMBER
SMK NEGERI DARUL ULUM MUNCAR BANYUWANGI										
1	01.01.02	PROGRAM PENGEL-OLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN Darul Ulum Muncar Banyuwangi	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 per- sen	9.910.747	89,39 per- sen	SMK NEGERI DARUL ULUM MUNCAR BANYUWANGI
SMK NEGERI 1 PASURUAN										

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 1 Pasuruan	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 1 PASURUAN
SMK NEGERI 2 TUBAN										
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 2 Tuban	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 2 TUBAN
SMK NEGERI 1 GRATI PASURUAN										
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 1 Grati Pasuruan	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 1 GRATI PASURUAN
SMK NEGERI 1 PUNGGING MOJOKERTO										
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 1 Pungging Mojokerto	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 1 PUNGGING MOJOKERTO
SMK NEGERI 10 SURABAYA										
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 10 Surabaya	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 10 SURABAYA
SMK NEGERI 2 BATU										
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 2 Batu	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 2 BATU
SMK NEGERI 2 JIWAN MADIUN										
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 2 Jiwan Madiun	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 2 JIWAN MADIUN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO										
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 2 Probolinggo	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO
SMK NEGERI 7 SURABAYA										

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 7 Surabaya	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 7 SURABAYA
SMK NEGERI 1 BENDO MAGETAN										
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 1 Bendo Magetan	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 1 BENDO MAGETAN
SMK NEGERI 1 NGANJUK										
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 1 Nganjuk	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 1 NGANJUK
SMK NEGERI 1 GEMPOL PASURUAN										
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 1 Gempol Pasuruan	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 1 GEMPOL PASURUAN
SMK NEGERI RENGEL TUBAN										
1	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN Rengel Tuban	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI RENGEL TUBAN
[SASARAN-3.1.2] Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			Indeks Kesehatan	0,848	0,851 indeks		0,854 indeks		0,854 indeks	
			Total Fertility Rate (TFR)		0,0198		1,99%		1,99%	
DINAS KESEHATAN										
1	01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	94,42 per100.000K elahiranHidup	93,42 per100.000 KelahiranHidup	410.827.897.561	93 per100.000K elahiranHidup	375.894.269.140	93 per100.000 KelahiranHidup	DINAS KESEHATAN
			Persentase Kabupaten/Kota dengan angka kesembuhan penyakit menular sesuai standar	50,40%	55%	0	58%	0	58%	DINAS KESEHATAN

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Penemuan Penyakit Tidak Menular dan Keswa sesuai target	60%	63%	0	65%	0	65%	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Stunting pada Balita	14%	13,90%	0	13,80%	0	13,80%	DINAS KESEHATAN
2	01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dengan tenaga kesehatan memiliki izin praktik	100%	100%	1.661.920.018	100%	1.520.603.187	100%	DINAS KESEHATAN
3	01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	90%	95%	308.110.066	95%	281.910.768	95%	DINAS KESEHATAN
			Persentase alat kesehatan yang diedarkan sesuai persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan	95%	95%	0	95%	0	95%	DINAS KESEHATAN
4	01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan UKBM sesuai standar	84%	86%	1.280.541.635	88%	1.171.654.274	88%	DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO										
1	01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	95%	95,50%	28.853.878.584	95,50%	26.400.367.810	95,50%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR										

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	80%	82,50%	23.526.194.406	85%	21.525.708.708	85%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN										
1	01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	91,45%	91,59%	41.097.370.312	91,72%	37.602.767.652	91,72%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR										
1	01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	100%	85%	2.891.955.310	85%	2.646.045.787	85%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR										
1	01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	90,64%	83,75%	2.851.675.054	84%	2.609.190.653	84%	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU										
1	01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	93,37%	93,37%	1.283.791.940	85%	1.174.628.198	85%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RUMAH SAKIT PARU JEMBER										
1	01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	82%	91,03%	85.586.129.328	91,67%	78.308.546.531	91,67%	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS										
1	01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	85%	85%	20.586.561.465	85%	18.836.039.427	85%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA HUSADA										
1	01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	91,17%	92%	1.291.172.888	93%	1.181.381.527	93%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA HUSADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH										
1	01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	80%	81%	1.283.791.940	81%	1.174.628.198	81%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR										
1	01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	80%	85%	9.699.304.865	85%	8.874.550.962	85%	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA										
1	01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	83%	83%	1.283.791.940	85%	1.174.628.198	85%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN										
1	01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	78%	82%	140.032.717.759	83%	128.125.417.992	83%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN
RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO PROVINSI JAWA TIMUR										
1	01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	90%	92%	5.563.098.406	93%	5.090.055.524	93%	RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO PROVINSI JAWA TIMUR
UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI										
1	01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	80%	80%	100.000.000	80%	100.000.000	80%	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN										
1	02.14.02	PROGRAM PENGEN-DALIAN PENDUDUK	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan 5 pilar dalam GDPK	73%	75%	295.850.740	78%	262.190.653	78%	DINAS PEM-BERDAYAAN PER-EMPUAN,

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta yang terpapar isi pesan program prmbangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	0%	100%	116.291.351	100%	106.402.834	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
3	02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kabupaten/Kota yang capaian iBangganya diatas 60%	21,05%	26,32%	575.297.567	31,58%	522.127.096	31,58%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
[SASARAN-3.1.3] Meningkatkan Pelestarian Nilai - Nilai Budaya Lokal			Jumlah Warisan Budaya Yang Dilestarikan		26 Warisan Budaya		31 Warisan Budaya		31 Warisan Budaya	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA										
1	02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	7,09 Persen	7,09 Persen	6.936.159.901	7,09 Persen	6.703.822.847	7,09 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase peningkatan kesenian yang tereaktualisasi	2 Persen	2 Persen	2.741.564.023	2 Persen	2.649.731.234	2 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan pembinaan sejarah	5 Persen	5 Persen	1.404.229.160	5 Persen	1.357.192.403	5 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4	02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase peningkatan pelestarian cagar budaya	2,4 Persen	2,4 Persen	2.040.119.742	2,4 Persen	1.971.782.879	2,4 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5	02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan tatakelola museum Mpu Tantular	5 Persen	5 Persen	3.500.000.000	5 Persen	3.382.762.263	5 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[TUJUAN-3] Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,35–93,35	92,47–93,47 %		92,69–93,69 %		92,69–93,69 %	
		[SASARAN-3.2.1] Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	67,59	68,00 indeks		69,00 indeks		69,00 indeks	
			Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 penduduk perempuan		3,7 rasio		3,5 rasio		3,5 rasio	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN										
1	02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung perlindungan perempuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.810.886.347	1 Dokumen	1.682.412.252	2 Dokumen	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
			Persentase Jenis Layanan Perempuan Korban Kekerasan yang Tersedia	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100%	100%	1.186.441.259	100%	1.077.052.239	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
3	02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung perlindungan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	854.701.021	1 Dokumen	731.004.492	2 Dokumen	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
			Persentase Jenis Layanan Anak Korban Kekerasan yang Tersedia	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
		[SASARAN-3.2.2] Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,420 Indeks		0,415 Indeks		0,415 Indeks	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN										
1	02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kelembagaan Daerah Responsif Gender	65,78%	71,05%	1.187.094.398	76,31%	1.069.146.614	76,31%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
			Persentase ARG Jawa Timur	40%	42%	0	44%	0	44%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
			Persentase Kab/Kota yang melakukan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan	100%	100%	0	100%	0	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai layanan kualitas keluarga sesuai standarisasi	0%	21%	1.210.358.185	26%	1.107.438.682	26%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
3	02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Gender dan Anak	80 persen	81 persen	362.613.646	82 persen	348.786.238	82 persen	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[TUJUAN-4] Mewujudkan Pemerintahan yang Baik			Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	79,55-80,15	81,80-82,40 Indeks		82,50-83,10 Indeks		82,50-83,10 Indeks	
[SASARAN-4.1.1] Meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan SDM Aparatur yang berkualitas			Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100	100,00%		100,00%		100,00%	
			Indeks Profesionalitas ASN	87	88 Indeks		89 Indeks		89 Indeks	
			Indeks Inovasi Daerah		73 Indeks		74 Indeks		74 Indeks	
			Persentase lembaga yang memanfaatkan data kependudukan		100,00%		100,00%		100,00%	
			Indeks Pembangunan Statistik		3,00 Indeks		3,15 Indeks		3,15 Indeks	
			Persentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi minimal 20 JP		30,00%		31,00%		31,00%	
			Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP	
			Indeks Integritas Pemerintah Prov. Jatim	77	75 Indeks		75,5 Indeks		75,5 Indeks	
			Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	100	100,00%		100,00%		100,00%	
			Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	92	92,2 Indeks		92,3 Indeks		92,3 Indeks	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN										
1	02.12.02	PROGRAM PEN-DAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP Elektronik	99,40%	99,60%	357.067.043	99,70%	326.704.822	99,70%	DINAS PEM-BERDAYAAN PER-EMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	98%	98,50%	56.536.485	98,70%	51.729.059	98,70%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
3	02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah data yang akurat (Database Kependudukan Bersih berdasar Semester)	2 Dokumen	2 Dokumen	391.900.560	2 Dokumen	345.821.526	4 Dokumen	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
4	02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah data yang dimanfaatkan oleh lembaga	0 data	3 data	197.205.302	3 data	188.939.715	3 data	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang memenuhi prinsip SDI	30 Persen	30 Persen	1.611.494.000	35 Persen	1.417.221.000	35 Persen	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										
1	02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1:296 Rasio	1:296 Rasio	2.780.092.955	1:296 Rasio	2.543.695.342	1:296 Rasio	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	02.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Menjadi Koleksi Nasional	58 Persen	58 Persen	295.272.146	58 Persen	270.164.485	58 Persen	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang di lestarikan	10 Persen	10 Persen	0	10 Persen	0	10 Persen	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	51 Persen	51 Persen	0	51 Persen	0	51 Persen	DINAS PER-PUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)	50 Persen	50 Persen	930.595.957	50 Persen	851.465.271	50 Persen	DINAS PER-PUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4	02.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	75,5 Persen	75,5 Persen	368.020.356	75,5 Persen	336.726.750	75,5 Persen	DINAS PER-PUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
5	02.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	60 Persen	60 Persen	77.027.516	60 Persen	70.477.692	60 Persen	DINAS PER-PUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
1	05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Perangkat Daerah	88%	89%	19.855.982.004	90%	18.167.582.795	90%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Ekonomi Dan Sumberdaya Alam Yang Tercapai	80%	81%	44.761.545.639	82%	40.955.369.836	82%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur Dan Wilayah Yang Tercapai	80%	81%	0	82%	0	82%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Yang Tercapai	80%	81%	0	82%	0	82%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
1	05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	48.72 %	48.73 %	5.417.235.846.887	48.74 %	5.380.526.867.751	48.74 %	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	13.210.458.703	1 Laporan	12.087.143.421	1 Laporan	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH										
1	05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah ASN yang Lulus Uji Kompetensi	1650 Orang	1750 Orang	20.189.132.515	1800 Orang	22.208.045.767	3550 Orang	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Capaian Kinerja Minimal BAIK ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	46000 Pegawai	51255 Pegawai	0	51755 Pegawai	0	51755 Pegawai	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Persentase Database Kepegawaian yang Lengkap	99,70%	99,70%	0	99,75%	0	99,75%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Persentase Penyelesaian SK Mutasi ASN	93%	93%	0	94%	0	94%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
1	05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase kelulusan peserta pengembangan kompetensi	90%	90.1 %	37.360.038.143	90.2 %	34.183.229.319	90.2 %	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase evaluasi pengembangan kompetensi	70%	70.1 %	0	70.2 %	0	70.2 %	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Persentase inovasi hasil pengembangan kompetensi yang dievaluasi	84%	84.1 %	0	84.2 %	0	84.2 %	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Persentase kelulusan peserta sertifikasi/uji kompetensi	80%	80.1 %	0	80.2 %	0	80.2 %	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH										
1	05.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi	9 Rekomendasi	10 Rekomendasi	2.396.411.621	10 Rekomendasi	2.192.639.303	10 Rekomendasi	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
INSPEKTORAT										
1	06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur	3 Level	3 Level	10.828.050.000	3 Level	10.840.000.000	3 Level	INSPEKTORAT
2	06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur	3 Level	3 Level	7.140.450.000	3 Level	7.153.000.000	3 Level	INSPEKTORAT
[SASARAN-4.1.2] Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah			Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	58,5	58,50%		58,50%		58,50%	
BADAN PENDAPATAN DAERAH										
1	05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	80%	80%	723.958.946	80%	662.399.074	80%	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Target Pendapatan Asli Daerah	16813 Milyar Rupiah	12678 Milyar Rupiah	13.989.662.691	12723 Milyar Rupiah	12.800.089.926	25401 Milyar Rupiah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Persentase Peningkatan Pajak Daerah	2.2 %	2.3 %	0	2.3 %	0	2.3 %	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	1%	1%	0	1%	0	1%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Persentase Penurunan Temuan Berulang	0.03 %	0.03 %	0	0.03 %	0	0.03 %	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Service Level Agreement (SLA)	96%	96%	0	96%	0	96%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
[SASARAN-4.1.3] Meningkatkan pelayanan publik berbasis digital dan terintegrasi			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4	4,1 Indeks		4,2 Indeks		4,2 Indeks	
			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)		570 Indeks		590 Indeks		590 Indeks	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	02.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas Informasi publik Pemerintah Daerah	3.5 Poin	3.5 Poin	8.100.480.000	3.7 Poin	6.937.895.094	3.7 Poin	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	02.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	65 Persen	65 Persen	7.106.149.000	70 Persen	6.946.846.000	70 Persen	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pengukuran Cyber Security Maturity (CSM)	3.8 Poin	3.8 Poin	923.229.000	4 Poin	874.276.000	4 Poin	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
[SASARAN-4.1.4] Meningkatkan Kualitas kebijakan dan pelayanan administratif			Persentase Rekomendasi Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama yang menjadi Kebijakan		95.5		96		96	

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Nilai IKM Pengguna Layanan di Lingkungan Sekretariat Daerah		89,47		89,57		89,57	
			Nilai IKM Pengguna Layanan Keprotokolan dan Materi Komunikasi Pimpinan		89,2		89,25		89,25	
			Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti		87,00%		87,00%		87,00%	
			Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian		90,00%		91,00%		91,00%	
			Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan	100	100,00%		100,00%		100,00%	
			Persentase produk hukum di Jawa Timur yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan	100	100,00%		100,00%		100,00%	
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa		70		72%		72%	
			Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Timur	86	87,9		88,9		88,9	
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	85	86 Indeks		87 Indeks		87 Indeks	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penghubung	92	80 Indeks		80 Indeks		80 Indeks	

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SEKRETARIAT DPRD										
1	04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Penyusunan Perundang-undangan, Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan	85 Indeks	86 Indeks	132.596.659.272	86 Indeks	121.321.664.433	86 Indeks	SEKRETARIAT DPRD
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI										
1	05.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Layanan Protokol, Pembinaan Pawarta, Fasilitasi Tamu, Fasilitasi Promosi UKM dan Seni Budaya Jatim di Jabodetabek	90%	80%	3.550.480.665	80%	3.248.575.237	80%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
SEKRETARIAT DAERAH (BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH)										
1	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Rumusan Kebijakan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah yang Ditindaklanjuti	100%	91%	6.105.171.096	92 %	5.586.034.543	92 %	SEKRETARIAT DAERAH (BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH)
			Persentase Rencana Kerjasama yang Ditindaklanjuti	100%	91%					SEKRETARIAT DAERAH (BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH)
			Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	100%	91%					SEKRETARIAT DAERAH (BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH)
SEKRETARIAT DAERAH (BIRO UMUM)										

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Penyediaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtangaan Pimpinan	86%	87%	251.865.455.150	87,5%		87,5%	SEKRETARIAT DAERAH (BIRO UMUM)
SEKRETARIAT DAERAH (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN)										
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Keprotokolan dan Materi Komunikasi Pimpinan terlaksana	95%	97%	46.347.625.253	97.5 %		97.5 %	SEKRETARIAT DAERAH (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN)
SEKRETARIAT DAERAH (BIRO HUKUM)										
1	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum di Jawa Timur	100%	100%	4.558.794.819	100%	4.171.150.150	100%	SEKRETARIAT DAERAH (BIRO HUKUM)
			Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum yang telah Berkekuatan Hukum Tetap	40%	40%		40%		40%	SEKRETARIAT DAERAH (BIRO HUKUM)
SEKRETARIAT DAERAH (BIRO ORGANISASI)										
1	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Presentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang ditata kelebagaannya sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	100%	100%	3.410.134.818	100%	3.120.163.316	100%	SEKRETARIAT DAERAH (BIRO ORGANISASI)
			Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dievaluasi kelebagaannya	100 PD Kab/Kota	110 PD Kab/Kota		225 PD Kab/Kota		225 PD Kab/Kota	SEKRETARIAT DAERAH (BIRO ORGANISASI)
			Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dievaluasi dalam Implementasi SAKIP	100%	100%		100%		100%	SEKRETARIAT DAERAH (BIRO ORGANISASI)
			Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah	100%	100%		100%		100%	SEKRETARIAT DAERAH (BIRO ORGANISASI)

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dievaluasi dalam Pelaksanaan Budaya Kerja							
			Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dievaluasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik	100%	100%		100%		100%	SEKRETARIAT DAERAH (BIRO ORGANISASI)
			Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dievaluasi dalam Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	100%	100%		100%		100%	SEKRETARIAT DAERAH (BIRO ORGANISASI)
			Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dievaluasi dalam Percepatan Reformasi Birokrasi	100%	100%		100%		100%	SEKRETARIAT DAERAH (BIRO ORGANISASI)
			Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah menyusun Anjab, ABK, peta jabatan, dan Evaluasi Jabatan sesuai SOTK yang berlaku	100%	100%		100%		100%	SEKRETARIAT DAERAH (BIRO ORGANISASI)
		[SASARAN-4.1.5] Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Persentase Kejadian Poleksosbud terhadap Tahun Sebelumnya	91	90,50%		91,00%		91,00%	
			Indeks Demokrasi Indonesia	85,2	85,5 Indeks		85,7 Indeks		85,7 Indeks	
			Persentase penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	85%	90,00%		95,00%		95,00%	

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1	01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.	80%	80%	5.505.405.757	85%	5.490.168.215	85%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	80%	85%	0	90%	0	90%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	80%	85%	0	95%	0	95%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	75%	80%	600.000.000	85%	600.000.000	85%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
1	08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Kelembagaan yang Melaksanakan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	75 Jumlah	77 Jumlah	6.143.000.000	79 Jumlah	6.388.000.000	156 Jumlah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah Partai Politik yang Melakukan Kaderisasi	11 Partai Politik	11 Partai Politik	102.300.795.000	11 Partai Politik	102.495.795.000	22 Partai Politik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Kejadian Terkait Politik	14 Kejadian	13 Kejadian	0	11 Kejadian	0	11 Kejadian	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Persentase Peran serta Pemilih Pemula dalam Pengembangan Etika dan Budaya Politik	0.048 %	0.049 %	0	0.050 %	0	0.050 %	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Ormas	0 Persen	92 Persen	2.800.000.000	94 Persen	2.250.000.000	94 Persen	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Kejadian terkait Ekonomi, Sosial dan Budaya	90 Kejadian	88 Kejadian	2.200.000.000	86 Kejadian	2.310.000.000	86 Kejadian	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Laporan Pemantauan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas di Jawa Timur	4 Laporan	4 Laporan	48.100.000.000	4 Laporan	33.900.000.000	8 Laporan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial	3 laporan	3 laporan	0	3 laporan	0	6 laporan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
[TUJUAN-5] Mewujudkan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,31 - 69,96	69,59 - 69,96 Indeks		69,61 - 69,96 Indeks		69,61 - 69,96 Indeks	
[SASARAN-5.1.1] Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Air (IKA)	56,13	56,13 Indeks		56,13 Indeks		56,13 Indeks	

NO	KODE PRO-GRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,07	84,08 Indeks		84,14 Indeks		84,14 Indeks	
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	47,34	47,78 Indeks		47,78 Indeks		47,78 Indeks	
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	85,45	82,46 Indeks		82,46 Indeks		82,46 Indeks	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
1	02.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Terjamin Kualitasnya	100 persen	100 persen	471.000.000	100 persen	371.000.000	100 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	50 ha	0.5 ha	3.720.000.000	0.5 ha	3.680.000.000	1 ha	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			BOD	7.85 mg/liter	7.84 mg/liter	0	7.83 mg/liter	0	7.83 mg/liter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			COD	29.38 mg/liter	29.37 mg/liter	0	29.36 mg/liter	0	29.36 mg/liter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Fecal Coli	1853.97 MPN/100ml	1853.95 MPN/100ml	0	1853.90 MPN/100ml	0	1853.90 MPN/100ml	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Nitrogen dioksida	12.32 µg/m³	12.31 µg/m³	0	12.30 µg/m³	0	12.30 µg/m³	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			PAD atau Retribusi Daerah	1.3 milyar	1.35 milyar	0	1.2 milyar	0	2.55 milyar	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Sulfur Dioksida	9.41 µg/m³	9.40 µg/m³	0	9.39 µg/m³	0	9.39 µg/m³	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			TSS	66.27 mg/liter	66.26 mg/liter	0	66.25 mg/liter	0	66.25 mg/liter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan Taman Kehati Kewenangan Provinsi yang Dikelola	27 ha	27 ha	2.340.000.000	27 ha	2.074.000.000	27 ha	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	02.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola	64 persen	70 persen	432.500.000	70.5 persen	407.500.000	70.5 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang dilakukan pengawasan langsung	10 persen	11 persen	1.245.000.000	12 persen	1.175.000.000	12 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang dilakukan pengawasan tidak langsung	27 persen	30 persen	0	32 persen	0	32 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	02.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diberikan fasilitasi pengakuan keberadaan MHA kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang menjadi kewenangan Provinsi	100 persen	100 persen	55.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	02.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan, Peningkatan Pendidikan,	450 Kelompok Masyarakat	400 Kelompok Masyarakat	300.000.000	400 Kelompok Masyarakat	280.000.000	800 Kelompok Masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup							
8	02.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan perolehan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	11.5 persen	2 persen	300.000.000	1 persen	300.000.000	3 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	02.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan yang Ditindaklanjuti/Ditangani	100 persen	100 persen	475.000.000	100 persen	445.000.000	100 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	02.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PER-SAMPAHAN	Persentase penanganan sampah	42.86 persen	45 persen	1.132.500.000	45 persen	1.082.500.000	45 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Presentase pengurangan sampah	13.7 persen	15 persen	0	17 persen	0	17 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[SASARAN-5.1.2] Meningkatkan Aksesibilitas Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi Berkelanjutan			Persentase Rasio Elektrifikasi	99,8	99,90%		99,95%		99,95%	
			Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	10,01	12,15%		12,70%		12,70%	
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL										
1	03.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGELOLOGIAN	Presentase Pengusahaan Air Tanah yang taat aturan	94 Persen	94 Persen	3.285.924.000	94 Persen	3.200.000.000	94 Persen	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
			IKM (UPT)	96 Nilai	96 Nilai	0	96 Nilai	0	96 Nilai	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
2	03.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase kegiatan pertambangan yang berizin	87 Persen	87 Persen	4.604.522.000	87 Persen	4.380.000.000	87 Persen	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
			Jumlah Sertifikat uji Mineral batuan	120 sertifikat Hasil uji	120 sertifikat Hasil uji	120.000.000	120 sertifikat Hasil uji	120.000.000	360 sertifikat Hasil uji	DINAS ENERGI DAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										SUMBERDAYA MINERAL
3	03.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Presentase Peningkatan Kapasitas EBT yang Terbangun	2.5 Persen	2.5 Persen	9.079.783.000	2.5 Persen	7.500.000.000	2.5 Persen	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
4	03.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang teraliri listrik	7.17 Persen	3.35 Persen	6.177.960.000	2.60 Persen	5.000.000.000	13.13 Persen	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
[TUJUAN-5] Mewujudkan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan			Indeks Risiko Bencana (IRB)	101,65-99,62	99,62-97,62 Indeks		97,62-95,67 Indeks		97,62-95,67 Indeks	
[SASARAN-5.2.1] Meningkatkan Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana			Indeks Kapasitas Bencana	0,66-0,67	0,68 - 0,69 poin		0,69 - 0,70 poin		0,69 - 0,70 poin	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										
1	01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	56,24 persen	57,70 persen	47.903.581.907	59,15 persen	43.830.231.630	59,15 persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Persentase korban terdampak bencana yang ditangani	100 persen	100 persen	0	100 persen	0	100 persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Persentase pendampingan pemulihan Pasca Bencana	80 persen	80 persen	0	80 persen	0	80 persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

RPD JAWA TIMUR

2025
2026

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan selama 2 tahun kedepan tidak terlepas dari kerangka pendanaan yang diproyeksikan sebagaimana tertuang dalam Bab III. Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh penerapan Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama 2 tahun kedepan, maka dialokasikan anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2025-2026 mendatang, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Daerah Indikatif Tahun 2025-2026

No.	Uraian	2025	2026
2b	BELANJA	27.484.811	26.791.924
2b.1	Belanja Operasi	20.350.010	19.886.994
2b.1.1	Belanja Pegawai	9.641.457	9.433.591
2b.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.602.455	7.808.641
2b.1.3	Belanja Bunga	0	0
2b.1.4	Belanja Subsidi	32.045	34.411
2b.1.5	Belanja Hibah	2.936.529	2.457.011
2b.1.6	Belanja Bantuan Sosial	137.525	153.340
2b.2	Belanja Modal	1.705.652	1.573.239
2b.2.1	Belanja Modal	1.705.652	1.573.239
2b.3	Belanja Tidak Terduga	300.000	300.000
2b.3.1	Belanja Tidak Terduga	300.000	300.000
2b.4	Belanja Transfer	5.129.149	5.031.690
2b.4.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	4.302.121	4.194.692

No.	Uraian	2025	2026
2b.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	827.028	836.998

7.2. Program Perangkat Daerah Beserta Pagu Indikatif Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026

Rencana Program-program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2026 oleh Perangkat Daerah beserta indikasi kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 7. 2 Program Perangkat Daerah Beserta Pagu Indikatif Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PENDIDIKAN						8.702.682.221.991		8.580.383.116.033		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 tahun	73,4 Persen	74,88 Persen	3.345.183.492.450	75,62 Persen	3.060.646.112.893	75,62 Persen	DINAS PENDIDIKAN
			Angka partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PAKET C/SMLB	98,78 Persen	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN
			Angka partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PAKET C/SMLB	74,99 Persen	76,5 Persen	0	77,26 Persen	0	77,26 Persen	DINAS PENDIDIKAN
			Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	65,7 Persen	67,02 Persen	0	67,69 Persen	0	67,69 Persen	DINAS PENDIDIKAN
			Partisipasi lulusan SMK dalam dunia usaha dunia industri	65 Persen	68 Persen	0	70 Persen	0	70 Persen	DINAS PENDIDIKAN
			Tingkat penyerapan lulusan SMK	86,76 Persen	88,5 Persen	0	89,39 Persen	0	89,39 Persen	DINAS PENDIDIKAN
2	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar jenjang SMA	14,96 Persen	16,10 Persen	600.000.000	17,24 Persen	630.000.000	17,24 Persen	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar jenjang SLB	11,68 Persen	14,18 Persen	0	16,68 Persen	0	16,68 Persen	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar jenjang SMK	19,01 Persen	19,56 Persen	0	20,11 Persen	0	20,11 Persen	DINAS PENDIDIKAN
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan layanan kebutuhan profesi	75,67 Persen	77,76 Persen	3.063.718.883	79,85 Persen	2.803.203.914	79,85 Persen	DINAS PENDIDIKAN
4	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase lembaga yang mendapatkan rekomendasi	35 Persen	36 Persen	600.000.000	37 Persen	630.000.000	37 Persen	DINAS PENDIDIKAN
5	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Kemampuan Literasi peserta didik jenjang SMA	64,65 Persen	71,28 Persen	600.000.000	74,84 Persen	630.000.000	74,84 Persen	DINAS PENDIDIKAN
			Kemampuan Literasi peserta didik jenjang SLB	66,59 Persen	73,41 Persen	0	77,08 Persen	0	77,08 Persen	DINAS PENDIDIKAN
			Kemampuan Literasi peserta didik jenjang SMK	51,14 Persen	56,38 Persen	0	59,2 Persen	0	59,2 Persen	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	90 Persen	96 Persen	5.352.635.010.658	97 Persen	5.515.043.799.226	97 Persen	DINAS PENDIDIKAN
			Indeks Profesoanalitas ASN	80 Persen	85 Persen	0	90 Persen	0	90 Persen	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase Peningkatan Pendapatan	3 Persen	5 Persen	0	8 Persen	0	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase Realisasi anggaran	90 Persen	95 Persen	0	98 Persen	0	98 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 SURABAYA						2.016.887.421		1.846.281.071		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 1 Surabaya	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 1 SURABAYA
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMK Negeri 1 Surabaya	3 Persen	5 Persen	2.002.674.101	8 Persen	1.832.382.178	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 5 SURABAYA						871.192.582		798.007.264		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 5 Surabaya	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 5 SURABAYA
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMK Negeri 5 Surabaya	3 Persen	5 Persen	856.979.262	8 Persen	784.108.371	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 6 SURABAYA						747.326.310		684.673.622		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 6 Surabaya	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 6 SURABAYA
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMK Negeri 6 Surabaya	3 Persen	5 Persen	733.112.990	8 Persen	670.774.729	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO						1.751.478.359		1.603.440.343		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo	3 Persen	5 Persen	1.737.265.039	8 Persen	1.589.541.450	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO						907.816.962		831.517.389		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo	3 Persen	5 Persen	893.603.642	8 Persen	817.618.496	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 MALANG						1.016.715.594		931.156.124		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 2 Malang	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 2 MALANG

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMK Negeri 2 Malang	3 Persen	5 Persen	1.002.502.274	8 Persen	917.257.231	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 MALANG						901.245.937		825.505.114		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 4 Malang	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 4 MALANG
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMK Negeri 4 Malang	3 Persen	5 Persen	887.032.617	8 Persen	811.606.221	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 11 MALANG						450.907.130		413.459.637		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 11 Malang	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 11 MALANG
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMK Negeri 11 Malang	3 Persen	5 Persen	436.693.810	8 Persen	399.560.744	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG						692.876.064		634.853.404		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 1 Singosari Malang	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMK Negeri 1 Singosari Malang	3 Persen	5 Persen	678.662.744	8 Persen	620.954.511	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO						1.590.614.492		1.456.255.096		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 1 Panji Situbondo	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMK Negeri 1 Panji Situbondo	3 Persen	5 Persen	1.576.401.172	8 Persen	1.442.356.203	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI						389.311.328		357.101.466		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi	3 Persen	5 Persen	375.098.008	8 Persen	343.202.573	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 BONDOWOSO						690.196.080		632.401.305		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 2 Bondowoso	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMK Negeri 2 Bondowoso	3 Persen	5 Persen	675.982.760	8 Persen	618.502.412	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 5 JEMBER						982.858.303		900.177.795		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 5 Jember	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 5 JEMBER
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMK Negeri 5 Jember	3 Persen	5 Persen	968.644.983	8 Persen	886.278.902	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 3 MADIUN						591.004.371		541.644.092		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 3 Madiun	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 3 MADIUN
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMK Negeri 3 Madiun	3 Persen	5 Persen	576.791.051	8 Persen	527.745.199	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 PACITAN						317.838.745		291.706.359		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 1 Pacitan	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 1 PACITAN
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMK Negeri 1 Pacitan	3 Persen	5 Persen	303.625.425	8 Persen	277.807.466	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 PASURUAN						536.547.243		491.817.577		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 2 Pasuruan	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 2 PASURUAN
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMK Negeri 2 Pasuruan	3 Persen	5 Persen	522.333.923	8 Persen	477.918.684	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG						602.082.190		551.779.939		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung	3 Persen	5 Persen	587.868.870	8 Persen	537.881.046	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI						864.177.956		791.589.107		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi	3 Persen	5 Persen	849.964.636	8 Persen	777.690.214	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 PP TEGALAMPEL BONDOWOSO						236.883.523		217.634.943		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 1 Tegalampel Bondowoso	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 1 PP TEGALAMPEL BONDOWOSO
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMK Negeri 1 Tegalampel Bondowoso	3 Persen	5 Persen	222.670.203	8 Persen	203.736.050	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO						871.409.667		798.205.889		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo	86,76 persen	88,5 persen	14.213.320	89,39 persen	13.898.893	89,39 persen	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo	3 Persen	5 Persen	857.196.347	8 Persen	784.306.996	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 NGANJUK						185.412.329		194.120.720		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 2 Nganjuk	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 2 NGANJUK
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN 2 Nganjuk	3 Persen	5 Persen	175.438.070	8 Persen	184.209.973	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 BANYUWANGI						524.974.260		529.910.748		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 1 Banyuwangi	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 1 BANYUWANGI
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN 1 Banyuwangi	3 Persen	5 Persen	515.000.001	8 Persen	520.000.001	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 LUMAJANG						319.034.260		326.697.248		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 1 Lumajang	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 1 LUMAJANG
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN 1 Lumajang	3 Persen	5 Persen	309.060.001	8 Persen	316.786.501	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI KALIBARU BANYUWANGI						1.392.178.538		1.502.691.368		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN Kalibaru Banyuwangi	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI KALIBARU BANYUWANGI

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN Kalibaru, Banyuwangi	3 Persen	5 Persen	1.382.204.279	8 Persen	1.492.780.621	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 6 JEMBER						294.974.260		309.410.748		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 6 Jember	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 6 JEMBER
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN 6 Jember	3 Persen	5 Persen	285.000.001	8 Persen	299.500.001	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI DARUL ULUM MUNCAR BANYUWANGI						1.034.550.280		1.341.859.574		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN Darul Ulum Muncar Banyuwangi	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI DARUL ULUM MUNCAR BANYUWANGI
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN Darul Ulum, Muncar Banyuwangi	3 Persen	5 Persen	1.024.576.021	8 Persen	1.331.948.827	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 PASURUAN						1.465.581.338		1.596.522.463		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 1 Pasuruan	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 1 PASURUAN
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN 1 Pasuruan	3 Persen	5 Persen	1.455.607.079	8 Persen	1.586.611.716	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 TUBAN						1.002.906.587		1.082.277.661		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 2 Tuban	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 2 TUBAN
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN 2 Tuban	3 Persen	5 Persen	992.932.328	8 Persen	1.072.366.914	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 GRATI PASURUAN						264.084.060		279.267.148		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 1 Grati Pasuruan	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 1 GRATI PASURUAN
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN 1 Grati, Pasuruan	3 Persen	5 Persen	254.109.801	8 Persen	269.356.401	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 PUNGGING MOJOKERTO						427.793.436		452.799.075		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 1 Punggging Mojokerto	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 1 PUNGGING MOJOKERTO

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN 1 Pungging, Mojokerto	3 Persen	5 Persen	417.819.177	8 Persen	442.888.328	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 10 SURABAYA						1.278.794.260		1.380.236.348		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 10 Surabaya	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 10 SURABAYA
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN 10 Surabaya	3 Persen	5 Persen	1.268.820.001	8 Persen	1.370.325.601	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 BATU						235.938.961		258.471.919		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 2 Batu	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 2 BATU
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN 2 Batu	3 Persen	5 Persen	225.964.702	8 Persen	248.561.172	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 JIWAN MADIUN						902.474.260		969.910.748		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 2 Jiwon Madiun	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 2 JIWAN MADIUN
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN 2 Jiwon, Madiun	3 Persen	5 Persen	892.500.001	8 Persen	960.000.001	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO						534.974.260		571.660.748		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 2 Probolinggo	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN 2 Probolinggo	3 Persen	5 Persen	525.000.001	8 Persen	561.750.001	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 7 SURABAYA						213.627.260		219.673.748		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 7 Surabaya	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 7 SURABAYA
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN 7 Surabaya	3 Persen	5 Persen	203.653.001	8 Persen	209.763.001	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 BENDO MAGETAN						285.599.260		299.316.748		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 1 Bendo Magetan	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 1 BENDO MAGETAN
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN 1 Bendo, Magetan	3 Persen	5 Persen	275.625.001	8 Persen	289.406.001	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SMK NEGERI 1 NGANJUK						175.349.260		183.554.498		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 1 Nganjuk	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 1 NGANJUK
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN 1 Nganjuk	3 Persen	5 Persen	165.375.001	8 Persen	173.643.751	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 GEMPOL PASURUAN						50.870.513		52.442.898		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN 1 Gempol Pasuruan	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI 1 GEMPOL PASURUAN
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN 1 Gempol, Pasuruan	3 Persen	5 Persen	40.896.254	8 Persen	42.532.151	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI RENGEL TUBAN						204.399.260		208.035.748		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan lulusan SMKN Rengel Tuban	86,76 persen	88,5 persen	9.974.259	89,39 persen	9.910.747	89,39 persen	SMK NEGERI RENGEL TUBAN
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN Rengel, Tuban	3 Persen	5 Persen	194.425.001	8 Persen	198.125.001	8 Persen	DINAS PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN						707.175.512.149		680.481.513.880		
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	94,42 per100.000KehamilanHidup	93,42 per100.000KehamilanHidup	410.827.897.561	93 per100.000KehamilanHidup	375.894.269.140	93 per100.000KehamilanHidup	DINAS KESEHATAN
			Persentase Kabupaten/Kota dengan angka kesembuhan penyakit menular sesuai standar	50,4 %	55 %	0	58 %	0	58 %	DINAS KESEHATAN
			Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Penemuan Penyakit Tidak Menular dan Keswa sesuai target	60 %	63 %	0	65 %	0	65 %	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Stunting pada Balita	14 %	13,90 %	0	13,80 %	0	13,80 %	DINAS KESEHATAN
2	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dengan tenaga kesehatan memiliki izin praktik	100 %	100 %	1.661.920.018	100 %	1.520.603.187	100 %	DINAS KESEHATAN
3	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	90 %	95 %	308.110.066	95 %	281.910.768	95 %	DINAS KESEHATAN
			Persentase alat kesehatan yang diedarkan sesuai persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan	95 %	95 %	0	95 %	0	95 %	DINAS KESEHATAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan UKBM sesuai standar	84 %	86 %	1.280.541.635	88 %	1.171.654.274	88 %	DINAS KESEHATAN
5	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	90 %	91 %	293.097.042.869	91,5 %	301.613.076.511	91,5 %	DINAS KESEHATAN
			Persentase indikator program yang tercapai	90 %	92 %	0	93 %	0	93 %	DINAS KESEHATAN
			Indeks profesionalitas ASN	76,46 indeks	77 indeks	0	78 indeks	0	78 indeks	DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO						1.392.479.208.222		1.314.523.506.922		
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	95 %	95,5 %	28.853.878.584	95,5 %	26.400.367.810	95,5 %	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran RSUD Dr. Soetomo	93 %	93,5 %	1.363.625.329.638	94 %	1.288.123.139.112	94 %	DINAS KESEHATAN
			Persentase Indikator Program RSUD Dr. Soetomo yang tercapai	95 %	95,5 %	0	96 %	0	96 %	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Dr. Soetomo	93,5 indeks	94 indeks	0	94,5 indeks	0	94,5 indeks	DINAS KESEHATAN
			Indeks profesionalitas ASN RSUD Dr. Soetomo	85,09 indeks	85,5 indeks	0	86 indeks	0	86 indeks	DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR						1.025.782.294.214		966.436.040.557		
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	80 %	82,50 %	23.526.194.406	85 %	21.525.708.708	85 %	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Anggaran RSUD Dr. Saiful Anwar	90 %	90 %	1.002.256.099.808	90 %	944.910.331.849	90 %	DINAS KESEHATAN
			Persentase Indikator Program RSUD Dr. Saiful Anwar yang Tercapai	80 %	80 %	0	80 %	0	80 %	DINAS KESEHATAN
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Dr. Saiful Anwar	82 indeks	83 indeks	0	84 indeks	0	84 indeks	DINAS KESEHATAN
			Indeks Profesionalitas ASN RSUD Dr. Saiful Anwar	90 indeks	91 indeks	0	91,5 indeks	0	91,5 indeks	DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN						377.149.084.569		362.322.323.167		

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	91,45 %	91,59 %	41.097.370.312	91,72 %	37.602.767.652	91,72 %	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran RSUD dr. Soedono Madiun	94 %	94,24 %	336.051.714.257	94,47 %	324.719.555.515	94,47 %	DINAS KESEHATAN
			Persentase indikator program RSUD dr. Soedono Madiun yang tercapai	75 %	75 %	0	75 %	0	75 %	DINAS KESEHATAN
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soedono Madiun	89,4 indeks	89,62 indeks	0	89,85 indeks	0	89,85 indeks	DINAS KESEHATAN
			Indeks Profesionalitas ASN RSUD dr. Soedono Madiun	85,60 indeks	85,81 indeks	0	86,03 indeks	0	86,03 indeks	DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR						307.429.771.076		297.768.099.492		
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	100 %	85 %	2.891.955.310	85 %	2.646.045.787	85 %	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Anggaran RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	94,25 %	90 %	304.537.815.766	90,5 %	295.122.053.705	90,5 %	DINAS KESEHATAN
			Persentase Indikator Program RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang Tercapai	100 %	80 %	0	80 %	0	80 %	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	92 indeks	91 indeks	0	91,5 indeks	0	91,5 indeks	DINAS KESEHATAN
			Indeks Profesionalitas ASN RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	88,25 indeks	72 indeks	0	72,5 indeks	0	72,5 indeks	DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA MENUR						122.956.428.143		121.277.841.135		
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	90,64 %	83,75 %	2.851.675.054	84 %	2.609.190.653	84 %	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran Rumah Sakit Jiwa Menur	92 %	90 %	120.104.753.089	90 %	118.668.650.482	90 %	DINAS KESEHATAN
			Persentase Indikator Program Rumah Sakit Jiwa Menur yang Tercapai	80 %	80 %	0	80 %	0	80 %	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Jiwa Menur	90.64 indeks	83,75 indeks	0	84 indeks	0	84 indeks	DINAS KESEHATAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Indeks profesionalitas ASN Rumah Sakit Jiwa Menur	89 indeks	85 indeks	0	85 indeks	0	85 indeks	DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU						153.622.091.695		147.038.409.569		
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	93,37 %	93,37 %	1.283.791.940	85 %	1.174.628.198	85 %	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Anggaran RSUD Karsa Husada Batu	98 %	95,5 %	152.338.299.755	95,75 %	145.863.781.371	95,75 %	DINAS KESEHATAN
			Persentase Indikator Program RSUD Karsa Husada Batu yang Tercapai	100 %	75 %	0	75 %	0	75 %	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Karsa Husada Batu	85 indeks	85,5 indeks	0	86 indeks	0	86 indeks	DINAS KESEHATAN
			Indeks Profesionalitas ASN RSUD Karsa Husada Batu	82 indeks	82 indeks	0	82 indeks	0	82 indeks	DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT PARU JEMBER						149.898.423.590		141.229.669.210		
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	82 %	91,03 %	85.586.129.328	91,67 %	78.308.546.531	91,67 %	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran RS Paru Jember	92 %	92 %	64.312.294.262	92 %	62.921.122.679	92 %	DINAS KESEHATAN
			Persentase Indikator Program RS Paru Jember yang tercapai	89 %	89 %	0	90 %	0	90 %	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RS Paru Jember	94 indeks	90,5 indeks	0	91 indeks	0	91 indeks	DINAS KESEHATAN
			Indeks profesionalitas ASN RS Paru Jember	85 indeks	85 indeks	0	85 indeks	0	85 indeks	DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS						74.821.668.112		72.200.085.801		
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	85 %	85 %	20.586.561.465	85 %	18.836.039.427	85 %	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran RSUD Dungus	88 %	95 %	54.235.106.647	95 %	53.364.046.374	95 %	DINAS KESEHATAN
			Persentase Indikator Program RSUD Dungus yang Tercapai	100 %	75 %	0	75 %	0	75 %	DINAS KESEHATAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Dungus	85 indeks	85 indeks	0	85 indeks	0	85 indeks	DINAS KESEHATAN
			Indeks profesionalitas ASN RSUD Dungus	81 indeks	82 indeks	0	83 indeks	0	83 indeks	DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA HUSADA						63.094.670.506		63.483.357.900		
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	91,17 %	92 %	1.291.172.888	93 %	1.181.381.527	93 %	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA HUSADA
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran RSUD Daha Husada	95 %	96 %	61.803.497.618	97 %	62.301.976.373	97 %	DINAS KESEHATAN
			Persentase Indikator Program RSUD Daha Husada yang Tercapai	90 %	91 %	0	93 %	0	93 %	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Daha Husada	82,25 indeks	82,3 indeks	0	83,1 indeks	0	83,1 indeks	DINAS KESEHATAN
			Indeks profesionalitas ASN RSUD Daha Husada	85 indeks	86 indeks	0	87 indeks	0	87 indeks	DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH						89.420.624.744		87.280.288.497		
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	80 %	81 %	1.283.791.940	81 %	1.174.628.198	81 %	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran RSUD Sumberglagah	90 %	91 %	88.136.832.804	92 %	86.105.660.299	92 %	DINAS KESEHATAN
			Persentase Indikator Program RSUD Sumberglagah yang tercapai	80 %	80 %	0	80 %	0	80 %	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Sumberglagah	91 indeks	80 indeks	0	81 indeks	0	81 indeks	DINAS KESEHATAN
			Indeks profesionalitas ASN RSUD Sumberglagah	76 indeks	77 indeks	0	78 indeks	0	78 indeks	DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR						78.756.655.181		74.393.286.370		
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	80 %	85 %	9.699.304.865	85 %	8.874.550.962	85 %	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	89 %	90 %	69.057.350.316	91 %	65.518.735.408	91 %	DINAS KESEHATAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Indikator Program Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang Tercapai	75 %	75 %	0	75 %	0	75 %	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	85 indeks	92 indeks	0	92 indeks	0	92 indeks	DINAS KESEHATAN
			Indeks profesionalitas ASN Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	86 indeks	86 indeks	0	86 indeks	0	86 indeks	DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA						73.662.040.028		72.167.432.878		
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	83 %	83 %	1.283.791.940	85 %	1.174.628.198	85 %	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Anggaran RSUD Husada Prima	96 %	94 %	72.378.248.088	95 %	70.992.804.680	95 %	DINAS KESEHATAN
			Persentase Indikator Program RSUD Husada Prima yang Tercapai	75 %	75 %	0	75 %	0	75 %	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Husada Prima	85 indeks	85 indeks	0	85 indeks	0	85 indeks	DINAS KESEHATAN
			Indeks Profesionalitas ASN RSUD Husada Prima	89 indeks	87 indeks	0	87 indeks	0	87 indeks	DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN						207.526.441.997		192.899.829.674		
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	78 %	82 %	140.032.717.759	83 %	128.125.417.992	83 %	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran RSUD Mohammad Noer Pamekasan	98 %	90 %	67.493.724.238	91 %	64.774.411.682	91 %	DINAS KESEHATAN
			Persentase Indikator Program RSUD Mohammad Noer Pamekasan yang Tercapai	85 %	75 %	0	75 %	0	75 %	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Mohammad Noer Pamekasan	90 indeks	82 indeks	0	83 indeks	0	83 indeks	DINAS KESEHATAN
			Indeks profesionalitas ASN RSUD Mohammad Noer Pamekasan	76 indeks	75 indeks	0	76 indeks	0	76 indeks	DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO PROVINSI JAWA TIMUR						34.778.428.085		34.147.420.051		

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	90 %	92 %	5.563.098.406	93 %	5.090.055.524	93 %	RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO PROVINSI JAWA TIMUR
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur	87,20 %	90 %	29.215.329.679	91 %	29.057.364.527	91 %	DINAS KESEHATAN
			Persentase Indikator Program RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur yang Tercapai	85 %	90 %	0	91 %	0	91 %	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur	89 indeks	90 indeks	0	92 indeks	0	92 indeks	DINAS KESEHATAN
			Indeks profesionalitas ASN RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur	81,49 indeks	83 indeks	0	84 indeks	0	84 indeks	DINAS KESEHATAN
UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI						30.281.116.087		29.086.829.817		
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	80 %	80 %	100.000.000	80 %	100.000.000	80 %	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran UPT Latkesmas Murnajati	93 %	90 %	30.181.116.087	90 %	28.986.829.817	90 %	DINAS KESEHATAN
			Persentase Indikator Program UPT Latkesmas Murnajati yang tercapai	88 %	88 %	0	88 %	0	88 %	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPT Latkesmas Murnajati	80 indeks	80 indeks	0	80 indeks	0	80 indeks	DINAS KESEHATAN
			Indeks profesionalitas ASN UPT Latkesmas Murnajati	88 indeks	85 indeks	0	85 indeks	0	85 indeks	DINAS KESEHATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA						544.528.598.163		512.492.665.426		
1	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tersusunnya dokumen kajian, leger, dan evaluasi penyelenggaraan jalan	100 %	100 %	379.254.932.583	100 %	347.006.025.023	100 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase capaian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase capaian pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Kediri	92.85 %	76.81 %	0	77.00 %	0	77.00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Pacitan	96.68 %	77.93 %	0	77.76 %	0	77.76 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap Wilayah UPT PJJ Surabaya	100 %	89.21 %	0	89.96 %	0	89.96 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Banyuwangi	59,12 %	47.72 %	0	47.72 %	0	47.72 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Jember	55.09 %	51.76 %	0	51.76 %	0	51.76 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Malang	63.57 %	39.35 %	0	39.38 %	0	39.38 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Pamekasan	20.44 %	17.61 %	0	17.61 %	0	17.61 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Probolinggo	62.81 %	48.87 %	0	48.88 %	0	48.88 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Bojonegoro	65.46 %	65.36 %	0	65.36 %	0	65.36 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Kediri	60.52 %	59.33 %	0	59.33 %	0	59.33 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Madiun	97.35 %	62.35 %	0	62.35 %	0	62.35 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Mojokerto	82.37 %	81.03 %	0	81.03 %	0	81.03 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Pacitan	59.14 %	58.89 %	0	58.89 %	0	58.89 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Surabaya	82.27 %	66.37 %	0	66.43 %	0	66.43 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase Kepuasan Pelayanan Laboratorium Pengujian	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase terpenuhinya kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Banyuwangi	100 %	89.52 %	0	89.25 %	0	89.25 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Jember	92.45 %	90.00 %	0	91.41 %	0	91.41 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Pamekasan	94.39 %	88.63 %	0	88.44 %	0	88.44 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Probolinggo	88.64 %	88.95 %	0	88.70 %	0	88.70 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Bojonegoro	94.64 %	70.80 %	0	71.51 %	0	71.51 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Madiun	91.72 %	93.52 %	0	93.75 %	0	93.75 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Malang	93.47 %	86.88 %	0	87.11 %	0	87.11 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Mojokerto	88.18 %	95.72 %	0	95.44 %	0	95.44 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang Tercapai	81.65 %	82.47 %	165.273.665.580	83.29 %	165.486.640.403	83.29 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Indeks Profesionalitas ASN	78.26 %	80.20 %	0	81.00 %	0	81.00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Persentase realisasi anggaran	91.50 %	94.50 %	0	94.70 %	0	94.70 %	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR						285.774.890.600		273.993.384.273		

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Ketahanan Air	3.10 Indeks	3.15 Indeks	149.261.313.356	3.20 Indeks	136.569.285.163	3.20 Indeks	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program Yang Tercapai	93 Persen	94 Persen	136.513.577.244	95 Persen	137.424.099.110	95 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
			Indeks Profesionalitas ASN	83 Indeks	84 Indeks	0	85 Indeks	0	85 Indeks	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
			Persentase Realisasi Anggaran	93 Persen	94 Persen	0	95 Persen	0	95 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA						486.827.211.059		449.991.464.099		
1	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	100 persen	100 persen	65.767.792.378	100 persen	60.175.407.745	100 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sistem Persampahan Regional yang Dikembangkan	21.50 persen	26.35 persen	2.567.583.880	28.65 persen	2.349.256.396	28.65 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
3	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	95 persen	97.5 persen	1.694.605.361	100 persen	1.550.509.222	100 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
4	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase Regional yang Dikembangkan	8.33 persen	9.35 persen	4.827.057.694	11.23 persen	4.416.602.024	11.23 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
5	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	0 persen	100 persen	3.853.848.594	100 persen	4.046.541.024	100 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
6	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Penataan Bangunan Gedung	100 persen	100 persen	285.109.854.447	100 persen	259.928.574.504	100 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
			Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	100 persen	100 persen	7.500.000.000	100 persen	7.800.000.000	100 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	33.33 persen	36.40 persen	671.851.115	38.46 persen	614.722.090	38.46 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
8	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan	83 poin	83.50 poin	563.971.902	84 poin	516.016.092	84 poin	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
			Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi	100 persen	100 persen	563.971.902	100 persen	516.016.092	100 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
9	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	80 Poin	82.5 Poin	5.280.664.180	85 Poin	4.831.637.321	85 Poin	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
10	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Kegiatan Mitigasi Bencana yg Ditangani pada Wilayah Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jawa Timur	6 persen	8 persen	566.511.707	9 persen	518.339.931	9 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
11	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	12.18 persen	12.80 persen	51.204.561.374	13.00 persen	46.850.521.322	13.00 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
12	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	24 persen	25 persen	6.494.343.962	26 persen	5.942.115.157	26 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
13	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	100 persen	100 persen	385.137.582	100 persen	352.388.459	100 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
14	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	100 persen	100 persen	85.586.129	100 persen	78.308.546	100 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
15	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun	100 persen	100 persen	710.364.873	100 persen	649.960.936	100 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang Tercapai	90.62 persen	90.63 persen	45.604.816.155	90.64 persen	45.488.468.934	90.64 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
			Persentase Indikator Program UPT yang Tercapai	90.62 Persen	90.63 Persen	3.374.687.824	90.64 Persen	3.366.078.305	90.64 Persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
			Indeks Profesionalitas ASN	85 poin	85.05 poin	0	85.10 poin	0	85.10 poin	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
			Indeks Profesionalitas ASN UPT	85 Poin	85.05 Poin	0	85.10 Poin	0	85.10 Poin	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
			Persentase Realisasi Anggaran	90 persen	90.05 persen	0	90.10 persen	0	90.10 persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
			Persentase realisasi anggaran UPT	90 Persen	90.05 Persen	0	90.10 Persen	0	90.10 Persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						48.511.824.757		48.334.087.215		
1	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.	80 %	80 %	5.505.405.757	85 %	5.490.168.215	85 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	80 %	85 %	0	90 %	0	90 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	80 %	85 %	0	95 %	0	95 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	75 %	80 %	600.000.000	85 %	600.000.000	85 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %	100 %	42.406.419.000	100 %	42.243.919.000	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Indeks Profesionalitas ASN	64 Nilai	70 Nilai	0	72 Nilai	0	72 Nilai	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase Realisasi Anggaran	96 %	96 %	0	97 %	0	97 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						80.951.982.534		75.681.655.562		
1	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	56,24 persen	57,70 persen	47.903.581.907	59,15 persen	43.830.231.630	59,15 persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Persentase korban terdampak bencana yang ditangani	100 persen	100 persen	0	100 persen	0	100 persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Persentase pendampingan pemulihan Pasca Bencana	80 persen	80 persen	0	80 persen	0	80 persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang tercapai	80 persen	80 persen	33.048.400.627	80 persen	31.851.423.932	80 persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Indeks Profesionalitas ASN	68 Indeks	69 Indeks	0	70 Indeks	0	70 Indeks	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Persentase Realisasi Anggaran	95.79 persen	95.89 persen	0	95.99 persen	0	95.99 persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DINAS SOSIAL						503.177.604.188		516.853.231.250		
1	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Penerima manfaat program yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	100 %	9.689.506.405	100 %	9.952.852.935	100 %	DINAS SOSIAL
2	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	100 %	100 %	27.515.200	100 %	28.263.023	100 %	DINAS SOSIAL
3	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sidoarjo	100 %	100 %	66.678.843.145	100 %	68.491.076.011	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			rehabilitasi sosial di Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang							
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Banyuwangi	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Situbondo	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sumenep	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan Sosial Asuhan Balita Si-doarjo							
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri							
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kronis Tuban	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan di dalam LKS	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
4	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %	177.796.172.500	100 %	182.628.410.914	100 %	DINAS SOSIAL
5	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terdampak psikososial yang ditangani	100 %	100 %	14.772.456.810	100 %	15.173.950.454	100 %	DINAS SOSIAL
6	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	81 Indeks	82 Indeks	234.213.110.128	83 Indeks	240.578.677.913	83 Indeks	DINAS SOSIAL
			Persentase indikator program yang tercapai	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS SOSIAL
			Persentase realisasi anggaran	94 %	95 %	0	96 %	0	96 %	DINAS SOSIAL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						295.246.224.371		291.913.529.749		
1	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100 %	100 %	304.289.073	100 %	278.414.683	100 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase Kab/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	8 %	40 %	0	50 %	0	50 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya di Jawa Timur	73 %	75 %	68.686.135.539	76 %	62.080.307.141	76 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase lulusan UPT BLK BOJONEGORO bersertifikat kompetensi	62.5 %	75 %	0	80 %	0	80 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK JEMBER bersertifikat kompetensi	80 %	92.7 %	0	94.9 %	0	94.9 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK JOMBANG bersertifikat kompetensi	75 %	80 %	0	80 %	0	80 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK KEDIRI bersertifikat kompetensi	75 %	90 %	0	90 %	0	90 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK MADIUN bersertifikat kompetensi	80 %	80 %	0	80 %	0	80 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK MOJOKERTO bersertifikat kompetensi	90 %	85 %	0	85 %	0	85 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK NGANJUK bersertifikat kompetensi	64 %	64.11 %	0	64.4 %	0	64.4 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK PONOROGO bersertifikat kompetensi	68 %	70 %	0	70 %	0	70 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK SINGOSARI bersertifikat kompetensi	80 %	85 %	0	87 %	0	87 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK SITUBONDO bersertifikat kompetensi	60 %	90 %	0	90 %	0	90 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK SUMENEP bersertifikat kompetensi	80 %	80 %	0	85 %	0	85 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK SURABAYA bersertifikat kompetensi	90 %	91 %	0	92 %	0	92 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK TUBAN bersertifikat kompetensi	80 %	80 %	0	80 %	0	80 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK TULUNGAGUNG bersertifikat kompetensi	85 %	75 %	0	80 %	0	80 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK WONOJATI bersertifikat kompetensi	90 %	72 %	0	80 %	0	80 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase lulusan UPT BLK PASURUAN bersertifikat kompetensi	75 %	75 %	0	78 %	0	78 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase pertumbuhan tingkat produktivitas tenaga kerja perusahaan alumni BLP2TK	0 %	6.5 %	0	7 %	0	7 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	0 ORANG	344000 ORANG	6.444.101.247	355000 ORANG	6.066.209.233	695000 ORANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi							
			Persentase perlindungan PMI (pra dan purna penempatan)	0 %	60 %	0	61.25 %	0	61.25 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Jombang	80 %	70 %	0	70 %	0	70 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Nganjuk	31 %	41.3 %	0	46.02 %	0	46.02 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Tuban	80 %	70 %	0	75 %	0	75 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Bojonegoro	72 %	70 %	0	70 %	0	70 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Jember	75 %	85 %	0	85 %	0	85 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Kediri	55 %	72 %	0	75 %	0	75 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Madiun	65 %	65 %	0	65 %	0	65 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Mojokerto	75 %	80 %	0	80 %	0	80 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Pasuruan	55 %	63 %	0	65 %	0	65 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Ponorogo	67 %	69 %	0	70 %	0	70 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Singosari	80 %	67 %	0	70 %	0	70 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Situbondo	65 %	75 %	0	75 %	0	75 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Sumenep	75 %	75 %	0	80 %	0	80 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Surabaya	90 %	80 %	0	80 %	0	80 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Tulungagung	73 %	55 %	0	60 %	0	60 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK Wonojati	80 %	65 %	0	70 %	0	70 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak	20 %	20 %	2.032.670.572	20 %	1.859.827.981	20 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	80 %	81 %	7.000.000.000	82 %	7.000.000.000	82 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Prosentase perusahaan yang melaksanakan pengujian K3 L sesuai peraturan perundangan - undangan	5 %	6 %	0	6 %	0	6 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase transmigran yang ditempatkan	80 %	80 %	941.447.423	80 %	861.394.012	80 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
7	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	80 %	80 %	209.837.580.517	81 %	213.767.376.699	81 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Indeks profesionalitas ASN	80 %	78 %	0	78 %	0	78 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase realisasi anggaran	95 %	95 %	0	95 %	0	95 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN						33.974.703.400		33.370.979.953		
1	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan 5 pilar dalam GDPK	73 %	75 %	295.850.740	78 %	262.190.653	78 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta yang terpapar isi pesan program prmbangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	0 %	100 %	116.291.351	100 %	106.402.834	100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
3	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kabupaten/Kota yang capaian iBangganya diatas 60%	21,05 %	26,32 %	575.297.567	31,58 %	522.127.096	31,58 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
4	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung perlindungan perempuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.810.886.347	1 Dokumen	1.682.412.252	2 Dokumen	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
			Persentase Jenis Layanan Perempuan Korban Kekerasan yang Tersedia	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100 %	100 %	1.186.441.259	100 %	1.077.052.239	100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
6	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung perlindungan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	854.701.021	1 Dokumen	731.004.492	2 Dokumen	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
			Persentase Jenis Layanan Anak Korban Kekerasan yang Tersedia	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
7	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	93,25 %	25.372.459.496	93,50 %	25.551.223.731	93,50 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
			Indeks Profesionalitas ASN	81.3 Indeks	81.5 Indeks	0	81.7 Indeks	0	81.7 Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
			Persentase realisasi anggaran	94,5 %	94,7 %	0	94,8 %	0	94,8 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
8	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kelembagaan Daerah Responsif Gender	65,78 %	71,05 %	1.187.094.398	76,31 %	1.069.146.614	76,31 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
			Persentase ARG Jawa Timur	40 %	42 %	0	44 %	0	44 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
			Persentase Kab/Kota yang melakukan pemberdayaan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			perempuan bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan							PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
9	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai layanan kualitas keluarga sesuai standarisasi	0 %	21 %	1.210.358.185	26 %	1.107.438.682	26 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
10	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Gender dan Anak	80 persen	81 persen	362.613.646	82 persen	348.786.238	82 persen	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
11	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP Elektronik	99,4 %	99,6 %	357.067.043	99,7 %	326.704.822	99,7 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
12	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	98 %	98,5 %	56.536.485	98,7 %	51.729.059	98,7 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
13	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah data yang akurat (Database Kependudukan Bersih berdasar Semester)	2 Dokumen	2 Dokumen	391.900.560	2 Dokumen	345.821.526	4 Dokumen	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
14	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah data yang dimanfaatkan oleh lembaga	0 data	3 data	197.205.302	3 data	188.939.715	3 data	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						207.434.668.434		208.184.270.205		
1	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi (kkal/kap/hari)	2.068,37 kkal/kap/hari	2.077,41 kkal/kap/hari	2.583.012.118	2.082,00 kkal/kap/hari	2.595.032.513	2.082,00 kkal/kap/hari	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi (gram/kap/hari)	60,66 gram/kap/hari	60,66 gram/kap/hari	0	60,66 gram/kap/hari	0	60,66 gram/kap/hari	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	1 %	1 %	138.214.450	1 %	138.857.650	1 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	80 %	80 %	252.817.899	80 %	253.994.421	80 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan produktivitas tanaman pangan utama	1,14 %	0,01 %	27.522.866.040	0,01 %	27.435.224.014	0,01 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Persentase Peningkatan produktivitas hortikultura utama	19,7 %	1 %	0	1 %	0	1 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Indeks Pertanaman (%)	0,01 %	0,01 %	12.469.206.967	0,01 %	12.527.234.100	0,01 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Peningkatan kawasan tanaman pangan dan hortikultura	0 lokasi	5 lokasi	0	6 lokasi	0	11 lokasi	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
6	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penurunan kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan DPI	3,75 %	3,6 %	14.371.719.012	3,5 %	14.438.599.741	3,5 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
7	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas petani melalui Penyuluhan Pertanian (orang)	300 orang	300 orang	6.610.416.556	300 orang	6.641.179.019	600 orang	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
8	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	85 Indeks	85 Indeks	143.486.415.392	85 Indeks	144.154.148.747	85 Indeks	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Persentase Indikator Program yang tercapai	95 %	95 %	0	95 %	0	95 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Persentase Realisasi Anggaran	95 %	95 %	0	95 %	0	95 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWIJA						63.996.099.059		60.399.007.728		
1	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan produksi benih tanaman pangan	4,19 %	1 %	11.000.000.000	1 %	10.000.000.000	1 %	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWIJA
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Ketersediaan Layanan UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija	85 %	87 %	52.996.099.059	89 %	50.399.007.728	89 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA						7.885.429.183		7.969.593.134		
1	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi benih hortikultura	5 %	1 %	451.038.902	1 %	412.686.041	1 %	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Ketersediaan Layanan UPT Pengembangan Benih Hortikultura	85 %	87 %	7.434.390.281	89 %	7.556.907.093	89 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						6.161.409.616		6.019.495.677		
1	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan produksi kebun agribisnis TPH	-5 %	1 %	619.853.356	1,5 %	567.145.819	2,5 %	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Ketersediaan Layanan UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	85 %	87 %	5.541.556.260	89 %	5.452.349.858	89 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP						46.401.663.514		46.114.445.424		
1	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Terjamin Kualitasnya	100 persen	100 persen	471.000.000	100 persen	371.000.000	100 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	50 ha	0.5 ha	3.720.000.000	0.5 ha	3.680.000.000	1 ha	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			BOD	7.85 mg/liter	7.84 mg/liter	0	7.83 mg/liter	0	7.83 mg/liter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			COD	29.38 mg/liter	29.37 mg/liter	0	29.36 mg/liter	0	29.36 mg/liter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Fecal Coli	1853.97 MPN/100ml	1853.95 MPN/100ml	0	1853.90 MPN/100ml	0	1853.90 MPN/100ml	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Nitrogen dioksida	12.32 µg/m ³	12.31 µg/m ³	0	12.30 µg/m ³	0	12.30 µg/m ³	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			PAD atau Retribusi Daerah	1.3 milyar	1.35 milyar	0	1.2 milyar	0	2.55 milyar	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Sulfur Dioksida	9.41 µg/m ³	9.40 µg/m ³	0	9.39 µg/m ³	0	9.39 µg/m ³	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			TSS	66.27 mg/liter	66.26 mg/liter	0	66.25 mg/liter	0	66.25 mg/liter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan Taman Kehati Kewenangan Provinsi yang Dikelola	27 ha	27 ha	2.340.000.000	27 ha	2.074.000.000	27 ha	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola	64 persen	70 persen	432.500.000	70.5 persen	407.500.000	70.5 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang dilakukan pengawasan langsung	10 persen	11 persen	1.245.000.000	12 persen	1.175.000.000	12 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang dilakukan pengawasan tidak langsung	27 persen	30 persen	0	32 persen	0	32 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diberikan fasilitasi pengakuan keberadaan MHA kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang menjadi kewenangan Provinsi	100 persen	100 persen	55.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan, Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	450 Kelompok Masyarakat	400 Kelompok Masyarakat	300.000.000	400 Kelompok Masyarakat	280.000.000	800 Kelompok Masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan perolehan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	11.5 persen	2 persen	300.000.000	1 persen	300.000.000	3 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan yang Ditindaklanjuti/Ditangani	100 persen	100 persen	475.000.000	100 persen	445.000.000	100 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah	42.86 persen	45 persen	1.132.500.000	45 persen	1.082.500.000	45 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Presentase pengurangan sampah	13.7 persen	15 persen	0	17 persen	0	17 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	96 persen	80 persen	35.930.663.514	80 persen	36.249.445.424	80 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Indeks profesionalitas ASN	80 indeks	79.5 indeks	0	80 indeks	0	80 indeks	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase realisasi anggaran	90 persen	90 persen	0	91 persen	0	91 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						45.594.241.630		43.953.555.786		
1	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang diproses penetapan dalam penataan desa	36.1 persen	20 persen	200.630.636	20 persen	183.570.558	20 persen	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase peningkatan kerjasama desa	25 persen	15 persen	730.499.460	15 persen	668.383.433	15 persen	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa cepat berkembang	30 persen	33 persen	11.214.801.098	36 persen	10.261.181.111	36 persen	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Persentase desa yang melaksanakan kewenangan provinsi terkait pemberdayaan usaha ekonomi desa	7 persen	9 persen	0	9 persen	0	9 persen	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	3,99 persen	4,1 persen	5.763.383.172	4,2 persen	5.273.309.622	4,2 persen	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah lembaga pengelola TTG yang aktif	5 lembaga	10 lembaga	0	10 lembaga	0	20 lembaga	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Persentase produk unggulan UEM	4 persen	4 persen	0	4 persen	0	12 persen	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	70 Indeks	80 Indeks	27.684.927.264	80 Indeks	27.567.111.062	80 Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Persentase indikator program yang tercapai	85 persen	85 persen	0	85 persen	0	85 persen	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Persentase realisasi anggaran	95 persen	95 persen	0	95 persen	0	95 persen	DINAS PEMBERDAYAAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PERHUBUNGAN						362.989.659.483		345.624.784.770		
1	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Provinsi	2 %	2 %	163.660.447.776	2 %	150.349.306.267	2 %	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Bangkalan	87.85 indeks	88.11 indeks	0	88.38 indeks	0	88.38 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Banyuwangi	78.40 indeks	78.79 indeks	0	79.19 indeks	0	79.19 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Jember	90.43 indeks	90.61 indeks	0	90.79 indeks	0	90.79 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Kediri	91.78 indeks	87.49 indeks	0	87.75 indeks	0	87.75 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Lamongan	96.40 indeks	93.41 indeks	0	93.59 indeks	0	93.59 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Madiun	90.17 indeks	90.35 indeks	0	90.53 indeks	0	90.53 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Malang	84.22 indeks	84.56 indeks	0	84.90 indeks	0	84.90 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Mojokerto	86.79 indeks	87.05 indeks	0	87.31 indeks	0	87.31 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Probolinggo	88.25 indeks	88.51 indeks	0	88.78 indeks	0	88.78 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Surabaya	90.43 indeks	90.61 indeks	0	90.79 indeks	0	90.79 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Tulungagung	88.66 indeks	88.93 indeks	0	89.19 indeks	0	89.19 indeks	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	77.37 Indeks	77.76 Indeks	0	78.15 Indeks	0	78.15 Indeks	DINAS PERHUBUNGAN
2	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN	Persentase Peningkatan Volume Bongkar Muat di Pelabuhan Pengumpulan Regional dan/atau yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur	1.09 %	1,12 %	33.307.357.033	1,15 %	30.476.231.686	1,15 %	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPR Banyuwangi	81.25 indeks	81.58 indeks	0	81.90 indeks	0	81.90 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPR Lamongan	82.01 indeks	82.34 indeks	0	82.67 indeks	0	82.67 indeks	DINAS PERHUBUNGAN
			Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Angkutan Penyeberangan di Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Penyeberangan yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur	0.50 %	0.53 %	0	0.55 %	0	0.55 %	DINAS PERHUBUNGAN
3	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase keselamatan di perlintasan Sebidang Kereta Api Jalan Provinsi	100 %	100 %	3.509.039.830	100 %	3.509.039.830	100 %	DINAS PERHUBUNGAN
4	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang Tercapai	100 %	90 %	162.512.814.844	90 %	161.290.206.987	90 %	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks Profesionalitas ASN	66.15 %	60 %	0	62 %	0	62 %	DINAS PERHUBUNGAN
			Persentase realisasi anggaran	95.00 %	90.00 %	0	90.00 %	0	90.00 %	DINAS PERHUBUNGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						58.516.327.276		57.261.438.094		
1	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang memenuhi prinsip SDI	30 Persen	30 Persen	1.611.494.000	35 Persen	1.417.221.000	35 Persen	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas Informasi publik Pemerintah Daerah	3.5 Poin	3.5 Poin	8.100.480.000	3.7 Poin	6.937.895.094	3.7 Poin	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	65 Persen	65 Persen	7.106.149.000	70 Persen	6.946.846.000	70 Persen	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pengukuran Cyber Security Maturity (CSM)	3.8 Poin	3.8 Poin	923.229.000	4 Poin	874.276.000	4 Poin	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	81 Persen	80 Persen	40.774.975.276	85 Persen	41.085.200.000	85 Persen	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Indeks profesionalitas ASN	88 Indeks	73 Indeks	0	75 Indeks	0	75 Indeks	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Persentase realisasi anggaran	96.5 Persen	96 Persen	0	97 Persen	0	97 Persen	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						112.222.865.446		105.631.522.300		
1	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase penerbitan izin USP koperasi	100 Persen	100 Persen	1.500.000.000	100 Persen	1.410.000.000	100 Persen	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkualitas	64 Persen	65 Persen	3.500.000.000	66 Persen	3.290.000.000	66 Persen	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	23 Persen	24 Persen	750.000.000	25 Persen	705.000.000	25 Persen	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	97 Persen	97 Persen	3.500.000.000	97 Persen	3.290.000.000	97 Persen	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	70 Persen	72 Persen	10.000.000.000	73 Persen	9.400.000.000	73 Persen	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang telah diberdayakan	34 Persen	35 Persen	40.500.000.000	35 Persen	38.070.000.000	35 Persen	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UKM yang telah dikembangkan	34 Persen	35 Persen	11.000.000.000	35 Persen	10.340.000.000	35 Persen	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
8	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	75 Persen	75 Persen	41.472.865.446	88 Persen	39.126.522.300	88 Persen	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Indeks profesionalitas ASN	74 Indeks	74 Indeks	0	74 Indeks	0	74 Indeks	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Persentase realisasi anggaran	90 Persen	92 Persen	0	93 Persen	0	93 Persen	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						36.333.020.076		35.615.703.547		

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Kualitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal	4.00 Indeks	4.00 Indeks	1.335.106.600	4.00 Indeks	1.238.585.900	4.00 Indeks	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Komitmen/Rencana Penanaman Modal	35 Trilyun	35 Trilyun	1.560.622.300	35 Trilyun	1.393.906.100	35 Trilyun	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	88 Indeks	88 Indeks	3.755.907.400	88 Indeks	3.487.553.400	88 Indeks	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kontribusi Perusahaan PMDN dan UKM terhadap realisasi investasi	50 Persen	50 Persen	1.125.079.200	50 Persen	1.013.901.500	50 Persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Yang Dapat Diakses	100 Persen	100 Persen	1.121.918.300	100 Persen	1.008.015.800	100 Persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	77 Persen	77 Persen	27.434.386.276	77 Persen	27.473.740.847	77 Persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Indeks profesionalitas ASN	86.27 Indeks	86.27 Indeks	0	86.27 Indeks	0	86.27 Indeks	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Persentase realisasi anggaran	90 Persen	90 Persen	0	90 Persen	0	90 Persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA						316.266.943.934		293.099.218.432		
1	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah wirausaha muda pemula	150 Orang	160 Orang	7.907.730.419	170 Orang	7.235.318.156	170 Orang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
			Persentase efektifitas koordinasi lintas sektor bidang pelayanan kepemudaan	90 Persen	80 Persen	0	80 Persen	0	80 Persen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
			Persentase organisasi pemuda yang aktif	100 Persen	90 Persen	0	90 Persen	0	90 Persen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	7.06 Persen	7,06 Persen	244.510.934.139	7.5 Persen	223.719.614.541	7.5 Persen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Angka partisipasi masyarakat berolahraga	34,5 Persen	34,5 Persen	0	34,6 Persen	0	34,6 Persen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah atlet pelajar dan paralimpik pelajar yang berprestasi tingkat nasional	275 Orang	275 Orang	0	300 Orang	0	300 Orang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pramuka Garuda Provinsi Jawa Timur	5 Persen	6 Persen	18.830.660.175	6,05 Persen	17.229.446.408	6,05 Persen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	95 persen	95 persen	45.017.619.201	95 persen	44.914.839.327	95 persen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Indeks Profesionalitas ASN	82 Indeks	81 Indeks	0	81 Indeks	0	81 Indeks	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Persentase realisasi anggaran	95 persen	95 persen	0	95 persen	0	95 persen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						97.458.062.343		94.193.558.718		
1	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata (DTW)	1 Persen	1 Persen	5.576.236.423	1 Persen	5.389.452.040	1 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan cakupan pemasaran dalam negeri dan luar negeri	10 Persen	10 Persen	3.983.960.143	10 Persen	3.850.511.437	10 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase peningkatan pemanfaatan dan perlindungan HAKI produk-produk kreatif	10 Persen	10 Persen	3.901.564.023	10 Persen	3.770.875.298	10 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	9 Persen	9 Persen	5.374.228.928	9 Persen	5.194.211.089	9 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	95 Persen	95 Persen	62.000.000.000	95 Persen	59.923.217.228	95 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Indeks profesionalitas ASN	87 Indeks	87 Indeks	0	87 Indeks	0	87 Indeks	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Persentase realisasi anggaran	95 Persen	95 Persen	0	95 Persen	0	95 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
6	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	7,09 Persen	7,09 Persen	6.936.159.901	7,09 Persen	6.703.822.847	7,09 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase peningkatan kesenian yang tereaktualisasi	2 Persen	2 Persen	2.741.564.023	2 Persen	2.649.731.234	2 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
8	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan pembinaan sejarah	5 Persen	5 Persen	1.404.229.160	5 Persen	1.357.192.403	5 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
9	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase peningkatan pelestarian cagar budaya	2,4 Persen	2,4 Persen	2.040.119.742	2,4 Persen	1.971.782.879	2,4 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
10	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan tatakelola museum Mpu Tantular	5 Persen	5 Persen	3.500.000.000	5 Persen	3.382.762.263	5 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						53.498.377.035		53.605.539.712		
1	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1:296 Rasio	1:296 Rasio	2.780.092.955	1:296 Rasio	2.543.695.342	1:296 Rasio	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Menjadi Koleksi Nasional	58 Persen	58 Persen	295.272.146	58 Persen	270.164.485	58 Persen	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang di lestarikan	10 Persen	10 Persen	0	10 Persen	0	10 Persen	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	51 Persen	51 Persen	0	51 Persen	0	51 Persen	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)	50 Persen	50 Persen	930.595.957	50 Persen	851.465.271	50 Persen	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	75,5 Persen	75,5 Persen	368.020.356	75,5 Persen	336.726.750	75,5 Persen	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
5	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	60 Persen	60 Persen	77.027.516	60 Persen	70.477.692	60 Persen	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
6	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Anggaran	97 %	97 %	49.047.368.105	97 %	49.533.010.172	97 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Indeks Profesional ASN	70 Indeks	70 Indeks	0	70 Indeks	0	70 Indeks	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Persentase indikator program yang tercapai	98 %	98 %	0	98 %	0	98 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						263.698.044.045		251.211.989.670		

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Guna	10 Ha	10 Ha	11.135.343.146	10 Ha	10.188.479.649	20 Ha	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah produksi garam rakyat	306.000 Ton	318.362 Ton	0	324.729 Ton	0	643.091 Ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Persentase kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sesuai dengan Rencana Zonasi	6,50 %	6,50 %	0	6,50 %	0	13 %	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	609.000 Ton	621.180 Ton	54.460.334.042	633.603,60 Ton	49.829.448.252	1.254.783,60 Ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budi-daya	1.339.505,74 Ton	1.366.295,55 Ton	52.845.677.180	1.393.621,77 Ton	48.352.089.327	2.759.917,62 Ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	98 %	98 %	5.994.034.838	98 %	5.484.348.453	98 %	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan UPI yang bersertifikat	1.093.955.63 Ton	1.115.834,74 Ton	21.144.951.939	1.138.151,43 Ton	19.346.948.691	2.253.986,17 Ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	67 Index	68 Index	118.117.702.900	69 Index	118.010.675.298	69 Index	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai	92 %	92 %	0	92 %	0	92 %	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Persentase realisasi anggaran	92 %	92 %	0	92 %	0	92 %	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN						9.010.286.447		8.601.818.381		
1	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	609.000 Ton	621.180 Ton	341.465.377	633.603,6 Ton	312.429.801	1.254.783,60 Ton	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Kegiatan Pelayanan UPT PPP Mayangan yang Tercapai	70 %	75 %	8.668.821.070	80 %	8.289.388.580	80 %	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN						3.928.820.589		3.837.048.071		
1	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	609.000 Ton	621.180 Ton	254.427.669	633.603,6 Ton	232.793.107	1.254.783,60 Ton	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Kegiatan Pelayanan UPT PPP Tamperan yang Tercapai	70 %	75 %	3.674.392.920	80 %	3.604.254.964	80 %	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP						4.118.450.216		4.016.336.587		
1	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	609.000 Ton	621.180 Ton	42.793.065	633.603,6 Ton	39.154.274	1.254.783,60 Ton	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Kegiatan Pelayanan UPT PPP Pondokdadap yang Tercapai	70 %	75 %	4.075.657.151	80 %	3.977.182.313	80 %	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS PERKEBUNAN						96.970.353.048		91.516.834.520		
1	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi tanaman semusim Perkebunan	1 %	1 %	39.449.076.970	1 %	36.094.632.434	1 %	DINAS PERKEBUNAN
			Persentase pemenuhan kebutuhan benih tanaman perkebunan	4 %	5 %	0	5 %	0	5 %	DINAS PERKEBUNAN
			Persentase peningkatan benih bersertifikat	2 %	2 %	0	2 %	0	2 %	DINAS PERKEBUNAN
			Persentase peningkatan produksi tanaman tahunan Perkebunan	0,5 %	0,5 %	0	0,5 %	0	0,5 %	DINAS PERKEBUNAN
2	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan yang difasilitasi sektor hilir	100 %	100 %	2.481.392.657	100 %	2.270.394.208	100 %	DINAS PERKEBUNAN
3	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Pengendalian OPT dan Penanggulangan bencana perkebunan	5 %	6 %	700.371.289	8 %	640.817.129	8 %	DINAS PERKEBUNAN
4	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan jumlah kelompok tani terakses informasi teknologi pertanian	5 %	5 %	23.783.598.839	5 %	21.761.225.458	5 %	DINAS PERKEBUNAN
5	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	100 %	100 %	30.555.913.293	100 %	30.749.765.291	100 %	DINAS PERKEBUNAN
			Persentase realisasi anggaran	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	DINAS PERKEBUNAN
			Indeks Profesionalitas ASN	75 indeks	75 indeks	0	75 indeks	0	75 indeks	DINAS PERKEBUNAN
DINAS PETERNAKAN						157.972.828.499		150.287.105.540		
1	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi daging	0 %	1,5 %	63.922.828.499	1,5 %	58.221.764.040	1,5 %	DINAS PETERNAKAN
			Persentase peningkatan produksi susu	0 %	0,5 %	0	0,5 %	0	0,5 %	DINAS PETERNAKAN
			Persentase peningkatan produksi telur	0 %	1,8 %	0	1,8 %	0	1,8 %	DINAS PETERNAKAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan populasi ternak di wilayah sumber bibit	0 %	1 %	5.000.000.000	1 %	5.000.000.000	1 %	DINAS PETERNAKAN
3	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Wilayah Terkendali PHMS	0 %	10 %	4.500.000.000	15 %	4.000.000.000	15 %	DINAS PETERNAKAN
			Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH	0 %	5 %	0	5 %	0	5 %	DINAS PETERNAKAN
4	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pengawasan Izin Usaha Obat Hewan	0 %	10 %	50.000.000	10 %	50.000.000	10 %	DINAS PETERNAKAN
5	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Agribisnis Peternakan	0 %	5 %	13.500.000.000	5 %	12.500.000.000	5 %	DINAS PETERNAKAN
6	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	85 Indeks	85 Indeks	71.000.000.000	85 Indeks	70.515.341.500	85 Indeks	DINAS PETERNAKAN
			Persentase Indikator Program yang tercapai	94 %	94 %	0	94 %	0	94 %	DINAS PETERNAKAN
			Persentase Realisasi Anggaran	95 %	95 %	0	95 %	0	95 %	DINAS PETERNAKAN
DINAS KEHUTANAN						200.629.787.208		203.462.891.854		
1	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah Penggunaan, Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Unit	4 Unit	8.858.701.117	4 Unit	8.105.425.658	8 Unit	DINAS KEHUTANAN
			Jumlah bibit tanaman hutan yang beredar	515.000 Batang	400.000 Batang	0	410.000 Batang	0	810.000 Batang	DINAS KEHUTANAN
			Jumlah produksi hasil hutan kayu	4.200.000 M3	4.100.000 M3	0	4.100.000 M3	0	8.200.000 M3	DINAS KEHUTANAN
			Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Banyuwangi	0,15 %	0,08 %	0	0,08 %	0	0,08 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Bojonegoro	0,15 %	0,13 %	0	0,13 %	0	0,13 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Jember	0,16 %	0,13 %	0	0,13 %	0	0,13 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Lumajang	0,18 %	0,16 %	0	0,16 %	0	0,16 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Madiun	0,08 %	0,06 %	0	0,06 %	0	0,06 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Malang	0,01 %	0,01 %	0	0,01 %	0	0,01 %	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Nganjuk	0,23 %	0,19 %	0	0,19 %	0	0,19 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Pacitan	0,01 %	0,02 %	0	0,02 %	0	0,02 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Sumenep	0,12 %	0,05 %	0	0,05 %	0	0,05 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Trenggalek	0,12 %	0,12 %	0	0,12 %	0	0,12 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase luas areal rehabilitasi di Jawa Timur	0,39 %	0,07 %	0	0,07 %	0	0,07 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Peningkatan unit usaha tertib penatausahaan hasil hutan	5 %	5 %	0	5 %	0	5 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Penurunan Gangguan Hutan	2 %	1 %	0	1 %	0	1 %	DINAS KEHUTANAN
2	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	237943,38 Ha	32179,68 Ha	3.681.679.541	32179,68 Ha	3.368.617.975	32179,68 Ha	DINAS KEHUTANAN
			Persentase nilai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi Tahura Raden Soerjo dengan metode METT	82 %	82 %	0	82 %	0	82 %	DINAS KEHUTANAN
3	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan	80 %	70 %	3.669.339.121	70 %	3.357.326.889	70 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Banyuwangi	80 %	70 %	0	70 %	0	70 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Bojonegoro	80 %	70 %	0	70 %	0	70 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Jember	80 %	70 %	0	70 %	0	70 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Lumajang	80 %	70 %	0	70 %	0	70 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Madiun	80 %	70 %	0	70 %	0	70 %	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Malang	80 %	70 %	0	70 %	0	70 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Nganjuk	80 %	70 %	0	70 %	0	70 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Pacitan	80 %	70 %	0	70 %	0	70 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Sumenep	80 %	70 %	0	70 %	0	70 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Trenggalek	80 %	70 %	0	70 %	0	70 %	DINAS KEHUTANAN
4	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Luas DAS yang Terkelola	0,58 %	0,53 %	646.904.470	0,53 %	591.896.715	0,53 %	DINAS KEHUTANAN
5	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	60 indeks	62 indeks	183.773.162.959	62 indeks	188.039.624.617	62 indeks	DINAS KEHUTANAN
			Persentase indikator program yang tercapai	93 %	93 %	0	93 %	0	93 %	DINAS KEHUTANAN
			Persentase realisasi anggaran	93 %	93 %	0	93 %	0	93 %	DINAS KEHUTANAN
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL						55.786.025.307		53.530.629.687		
1	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Presentase Pengusahaan Air Tanah yang taat aturan	94 Persen	94 Persen	3.285.924.000	94 Persen	3.200.000.000	94 Persen	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
			IKM (UPT)	96 Nilai	96 Nilai	0	96 Nilai	0	96 Nilai	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
2	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase kegiatan pertambangan yang berizin	87 Persen	87 Persen	4.604.522.000	87 Persen	4.380.000.000	87 Persen	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
			Jumlah Sertifikat uji Mineral batuan	120 sertifikat Hasil uji	120 sertifikat Hasil uji	120.000.000	120 sertifikat Hasil uji	120.000.000	360 sertifikat Hasil uji	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Presentase Peningkatan Kapasitas EBT yang Terbangun	2.5 Persen	2.5 Persen	9.079.783.000	2.5 Persen	7.500.000.000	2.5 Persen	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang teraliri listrik	7.17 Persen	3.35 Persen	6.177.960.000	2.60 Persen	5.000.000.000	13.13 Persen	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
5	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	80 Persen	80 Persen	32.517.836.307	80 Persen	33.330.629.687	80 Persen	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
			Indeks profesionalitas ASN	64 Indeks	64 Indeks	0	66 Indeks	0	66 Indeks	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
			Persentase realisasi anggaran	90 Persen	90 Persen	0	90 Persen	0	90 Persen	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						115.870.450.814		113.125.436.119		
1	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Izin yang diterbitkan	135,090 Dokumen	135,100 Dokumen	425.000.000	135,200 Dokumen	575.000.000	135,200 Dokumen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Rekomendasi Sarana Distribusi Perdagangan	10 Dokumen	10 Dokumen	500.000.000	11 Dokumen	800.000.000	11 Dokumen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi Bahan Makanan	2.00 Persen	3.00 Persen	2.290.000.000	3.00 Persen	3.110.000.000	3.00 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	6.85 Persen	2 Persen	1.250.000.000	2 Persen	2.325.000.000	2 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	80 Persen	90 Persen	2.600.000.000	92 Persen	2.480.000.000	92 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	90 Pelaku Usaha	125 Pelaku Usaha	2.010.000.000	150 Pelaku Usaha	1.760.000.000	150 Pelaku Usaha	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan unit usaha industri	1.20 Persen	1.20 Persen	7.140.000.000	1.20 Persen	3.940.000.000	1.20 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	10 Persen	10 Persen	100.000.000	10 Persen	100.000.000	10 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang telah terdaftar dalam SIINas	20 Persen	20 Persen	150.000.000	20 Persen	150.000.000	20 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	90 Persen	90 Persen	99.405.450.814	90 Persen	97.885.436.119	90 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Indeks Profesionalitas ASN	80 Indeks	85 Indeks	0	90 Indeks	0	90 Indeks	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Persentase realisasi anggaran	93 Persen	93 Persen	0	93 Persen	0	93 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
SEKRETARIAT DAERAH						0		0		
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Keprotokolan dan Materi Komunikasi Pimpinan Terlaksana	95 %	97 %	0	97.5 %	0	97.5 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Presentase Penyediaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Pimpinan	86 %	87 %	0	87.5 %	0	87.5 %	SEKRETARIAT DAERAH
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						1.150.071.660.207		1.053.883.160.457		
1	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual	89 %	90 %	1.118.042.610.823	90 %	1.022.972.910.453	90 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	89 %	90 %	0	90 %	0	90 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	89 %	90 %	0	90 %	0	90 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual	82 %	86 %	0	86 %	0	86 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	82 %	86 %	0	86 %	0	86 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	81 %	86 %	0	86 %	0	86 %	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN Biro Kesejahteraan Rakyat	82 %	82 %	32.029.049.384	82 %	30.910.250.004	82 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase indikator program yang tercapai Biro Kesejahteraan Rakyat	89.16 %	87 %	0	87 %	0	87 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase realisasi anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat	94.28 %	97 %	0	97 %	0	97 %	SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM						17.781.176.242		17.702.929.197		
1	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum di Jawa Timur	100 %	100 %	4.558.794.819	100 %	4.171.150.150	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum yang telah Berkekuatan Hukum Tetap	40 %	40 %	0	40 %	0	40 %	SEKRETARIAT DAERAH
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang Tercapai Biro Hukum	96.23 %	76 %	13.222.381.423	76 %	13.531.779.047	76 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum	75 Nilai	75 Nilai	0	75 Nilai	0	75 Nilai	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum	93 %	95 %	0	95 %	0	95 %	SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEREKONOMIAN						19.999.815.241		19.309.812.772		
1	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Perekonomian	11 Dokumen	11 Dokumen	8.991.352.330	11 Dokumen	8.226.797.237	22 Dokumen	SEKRETARIAT DAERAH
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai Biro Perekonomian	93 %	93 %	11.008.462.911	94 %	11.083.015.535	94 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Indeks Profesionalitas ASN Biro Perekonomian	69 Indeks	75 Indeks	0	77 Indeks	0	77 Indeks	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase realisasi anggaran Biro Perekonomian	90 %	90 %	0	91 %	0	91 %	SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						14.378.704.721		13.904.485.634		
1	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi Pembangunan	16 Dokumen	16 Dokumen	4.887.794.747	16 Dokumen	4.472.174.468	32 Dokumen	SEKRETARIAT DAERAH
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang tercapai Biro Administrasi Pembangunan	100 %	100 %	9.490.909.974	100 %	9.432.311.166	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Indeks Profesionalitas ASN Biro Administrasi Pembangunan	67 Indeks	70 Indeks	0	75 Indeks	0	75 Indeks	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Realisasi Anggaran Biro Administrasi Pembangunan	97 %	97 %	0	97 %	0	97 %	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BIRO ORGANISASI						14.605.335.889		14.525.505.998		
1	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Presentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang ditata kelebagaannya sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	100 %	100 %	3.410.134.818	100 %	3.120.163.316	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dievaluasi kelebagaannya	100 PD Kab/Kota	110 PD Kab/Kota	0	115 PD Kab/Kota	0	225 PD Kab/Kota	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dievaluasi dalam Implementasi SAKIP	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dievaluasi dalam Pelaksanaan Budaya Kerja	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dievaluasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dievaluasi dalam Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dievaluasi dalam Percepatan Reformasi Birokrasi	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah menyusun Anjab, ABK, peta jabatan, dan Evaluasi Jabatan sesuai SOTK yang berlaku	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang tercapai Biro Organisasi	80 %	85 %	11.195.201.071	87 %	11.405.342.682	87 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Indeks Profesionalitas ASN Biro Organisasi	69 Nilai	73.80 Nilai	0	74.80 Nilai	0	74.80 Nilai	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Realisasi Anggaran Biro Organisasi	90 %	91 %	0	92 %	0	92 %	SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM						251.865.455.150		243.486.949.172		

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang tercapai Biro Umum	90 %	90 %	251.865.455.150	90 %	243.486.949.172	90 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum	60 Nilai	70 Nilai	0	70 Nilai	0	70 Nilai	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Realisasi Anggaran Biro Umum	93 %	93 %	0	93.5 %	0	93.5 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Pimpinan	86%	87%	0		0		SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						46.347.625.253		44.270.228.081		
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang tercapai Biro Administrasi Pimpinan	92 %	95.75 %	46.347.625.253	95.85 %	44.270.228.081	95.85 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Indeks Profesionalitas ASN Biro Administrasi Pimpinan	90 Nilai	72 Nilai	0	74 Nilai	0	74 Nilai	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Realisasi Anggaran Biro Administrasi Pimpinan	90 %	93 %	0	93.5 %	0	93.5 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Layanan Keprotokolanan dan Materi Komunikasi Pimpinan terlaksana	95%	97%	0		0		SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						25.701.748.007		25.503.831.616		
1	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Yang Tepat Waktu (Sesuai SOP)	30 %	30 %	6.555.897.507	35 %	5.998.434.665	35 %	SEKRETARIAT DAERAH
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program Yang Tercapai Biro Pengadaan Barang/ Jasa	90 %	90 %	19.145.850.500	90 %	19.505.396.951	90 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Indeks Profesionalitas ASN Biro Pengadaan Barang/ Jasa	80 Indeks	80 Indeks	0	80 Indeks	0	80 Indeks	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang/ Jasa	90 %	90 %	0	92 %	0	92 %	SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						14.954.009.103		14.476.238.590		
1	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Rumusan Kebijakan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah yang Ditindaklanjuti	100 %	91 %	6.105.171.096	92 %	5.586.034.543	92 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Rencana Kerjasama yang Ditindaklanjuti	100 %	91 %	0	92 %	0	92 %	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	100 %	91 %	0	92 %	0	92 %	SEKRETARIAT DAERAH
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang Tercapai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	97 %	92 %	8.848.838.007	94 %	8.890.204.047	94 %	SEKRETARIAT DAERAH
			Indeks Profesionalitas ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	81.5 Nilai	75 Nilai	0	75.5 Nilai	0	75.5 Nilai	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Realisasi Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	94 %	92 %	0	93 %	0	93 %	SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD						408.527.607.243		396.616.834.036		
1	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Penyusunan Perundang-undangan, Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan	85 Indeks	86 Indeks	132.596.659.272	86 Indeks	121.321.664.433	86 Indeks	SEKRETARIAT DPRD
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 Indeks	86 Indeks	275.930.947.971	87 Indeks	275.295.169.603	87 Indeks	SEKRETARIAT DPRD
			Indeks Profesionalitas ASN	85 Indeks	86 Indeks	0	87 Indeks	0	87 Indeks	SEKRETARIAT DPRD
			Persentase Indikator Program yang Tercapai	85 %	85 %	0	85 %	0	85 %	SEKRETARIAT DPRD
			Persentase Realisasi Anggaran	80.5 %	80.5 %	0	80.5 %	0	80.5 %	SEKRETARIAT DPRD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						166.106.089.235		159.863.273.372		
1	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Perangkat Daerah	88 %	89 %	19.855.982.004	90 %	18.167.582.795	90 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Ekonomi Dan Sumberdaya Alam Yang Tercapai	80 %	81 %	44.761.545.639	82 %	40.955.369.836	82 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur Dan Wilayah Yang Tercapai	80 %	81 %	0	82 %	0	82 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Yang Tercapai	80 %	81 %	0	82 %	0	82 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	62 Indeks	62.5 Indeks	101.488.561.592	62.10 Indeks	100.740.320.741	62.10 Indeks	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Persentase Indikator Program yang Tercapai	80 %	81 %	0	82 %	0	82 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Persentase Realisasi Anggaran	94 %	94.50 %	0	95 %	0	95 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						5.549.228.812.240		5.511.396.517.822		
1	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	48.72 %	48.73 %	5.417.235.846.887	48.74 %	5.380.526.867.751	48.74 %	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	13.210.458.703	1 Laporan	12.087.143.421	1 Laporan	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang Tercapai	76 %	76 %	118.782.506.650	76 %	118.782.506.650	76 %	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Persentase Realisasi Anggaran	90 %	90 %	0	90 %	0	90 %	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Indeks Profesionalitas ASN	86.35 Indeks	67.09 Indeks	0	67.09 Indeks	0	67.09 Indeks	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH						669.889.868.894		665.295.007.950		
1	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	80 %	80 %	723.958.946	80 %	662.399.074	80 %	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Target Pendapatan Asli Daerah	16813 Milyar Rupiah	12678 Milyar Rupiah	13.989.662.691	12723 Milyar Rupiah	12.800.089.926	25401 Milyar Rupiah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Persentase Peningkatan Pajak Daerah	2.2 %	2.3 %	0	2.3 %	0	2.3 %	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	1 %	1 %	0	1 %	0	1 %	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Persentase Penurunan Temuan Berulang	0.03 %	0.03 %	0	0.03 %	0	0.03 %	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Service Level Agreement (SLA)	96 %	96 %	0	96 %	0	96 %	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	100 %	100 %	655.176.247.257	100 %	651.832.518.950	100 %	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Indeks Profesionalitas ASN	87,52	80	0	80	0	80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Persentase Realisasi Anggaran	87 %	87 %	0	87 %	0	87 %	BADAN PENDAPATAN DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						387.553.510.079		399.057.316.035		
1	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah ASN yang Lulus Uji Kompetensi	1650 Orang	1750 Orang	20.189.132.515	1800 Orang	22.208.045.767	3550 Orang	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Capaian Kinerja Minimal BAIK ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	46000 Pegawai	51255 Pegawai	0	51755 Pegawai	0	51755 Pegawai	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Persentase Database Kepegawaian yang Lengkap	99,7 %	99,7 %	0	99,75 %	0	99,75 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Persentase Penyelesaian SK Mutasi ASN	93 %	93 %	0	94 %	0	94 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	80.30 Nilai	81.00 Nilai	367.364.377.564	82.00 Nilai	376.849.270.268	82.00 Nilai	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Persentase Realisasi Anggaran	91 %	91 %	0	92 %	0	92 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Persentase Indikator Program yang Tercapai	91 %	91 %	0	92 %	0	92 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						113.455.938.057		109.567.449.531		
1	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase kelulusan peserta pengembangan kompetensi	90 %	90.1 %	37.360.038.143	90.2 %	34.183.229.319	90.2 %	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Persentase evaluasi pengembangan kompetensi	70 %	70.1 %	0	70.2 %	0	70.2 %	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Persentase inovasi hasil pengembangan kompetensi yang dievaluasi	84 %	84.1 %	0	84.2 %	0	84.2 %	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Persentase kelulusan peserta sertifikasi/ uji kompetensi	80 %	80.1 %	0	80.2 %	0	80.2 %	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	100 %	100 %	76.095.899.914	100 %	75.384.220.212	100 %	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Persentase realisasi anggaran	85.4 %	85.5 %	0	85.6 %	0	85.6 %	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Indeks profesionalitas ASN	85.4 Nilai	85.5 Nilai	0	85.6 Nilai	0	85.6 Nilai	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH						31.482.434.817		31.687.867.830		
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %	100 %	29.086.023.196	100 %	29.495.228.527	100 %	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Persentase Realisasi Anggaran	95 %	95 %	0	95 %	0	95 %	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Indeks Profesionalitas ASN	80 Indeks	80 Indeks	0	80 Indeks	0	80 Indeks	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi	9 Rekomendasi	10 Rekomendasi	2.396.411.621	10 Rekomendasi	2.192.639.303	10 Rekomendasi	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI						25.905.795.160		25.052.175.873		
1	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Layanan Protokol, Pembinaan Pawarta, Fasilitasi Tamu, Fasilitasi Promosi UKM dan Seni Budaya Jatim di Jabodetabek	90 %	80 %	3.550.480.665	80 %	3.248.575.237	80 %	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang Tercapai	100 %	100 %	22.355.314.495	100 %	21.803.600.636	100 %	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
			Indeks Profesionalitas ASN	45 Nilai	45 Nilai	0	45 Nilai	0	45 Nilai	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
			Persentase Realisasi Anggaran	95 %	95 %	0	95 %	0	95 %	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN						16.839.321.698		16.974.142.407		
1	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jumlah Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan yang Ditindaklanjuti	16 Rekomendasi	16 Rekomendasi	756.216.206	16 Rekomendasi	691.913.426	32 Rekomendasi	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	73 Nilai	75 Nilai	16.083.105.492	76 Nilai	16.282.228.981	76 Nilai	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
			Presentase Indikator Program yang Tercapai	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
			Presentase Realisasi Anggaran	96 %	96 %	0	96 %	0	96 %	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO						15.027.745.787		15.098.372.817		
1	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jumlah Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan yang Ditindaklanjuti	16 Rekomendasi	16 Rekomendasi	828.784.324	16 Rekomendasi	758.310.912	32 Rekomendasi	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	90 Persen	90 Persen	14.198.961.463	90 Persen	14.340.061.905	90 Persen	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
			Persentase realisasi anggaran	95 Persen	95 Persen	0	95 Persen	0	95 Persen	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
			Indeks profesionalitas ASN	68 Indeks	68 Indeks	0	68 Indeks	0	68 Indeks	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG						16.270.593.984		16.258.744.021		
1	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jumlah Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan yang Ditindaklanjuti	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	1.297.897.000	20 Rekomendasi	1.297.897.000	40 Rekomendasi	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	100 Persen	100 Persen	14.972.696.984	100 Persen	14.960.847.021	100 Persen	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
			Persentase realisasi anggaran	95 Persen	95 Persen	0	95 Persen	0	95 Persen	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
			Indeks profesionalitas ASN	68 Indeks	69 Indeks	0	70 Indeks	0	70 Indeks	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN						16.629.217.566		16.291.823.211		
1	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jumlah Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan yang Ditindaklanjuti	16 Rekomendasi	16 Rekomendasi	4.361.971.700	16 Rekomendasi	3.948.547.213	32 Rekomendasi	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang Tercapai	86 %	88 %	12.267.245.866	90 %	12.343.275.998	90 %	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
			Persentase Realisasi Anggaran	93,50 %	94 %	0	94,50 %	0	94,50 %	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
			Indeks Profesionalitas ASN	83 Indeks	83 Indeks	0	83 Indeks	0	83 Indeks	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER						13.736.876.330		13.686.849.907		
1	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jumlah Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan yang Ditindaklanjuti	24 Rekomendasi	32 Rekomendasi	1.307.132.989	40 Rekomendasi	1.195.984.505	72 Rekomendasi	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
2	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang Tercapai	80 %	81 %	12.429.743.341	82 %	12.490.865.402	82 %	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
			Persentase Realisasi Anggaran	95 %	95 %	0	95 %	0	95 %	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
			Indeks Profesionalitas ASN	77 Indeks	77 Indeks	0	77 Indeks	0	77 Indeks	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
INSPEKTORAT						94.528.803.258		94.569.210.297		
1	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur	3 Level	3 Level	10.828.050.000	3 Level	10.840.000.000	3 Level	INSPEKTORAT
2	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur	3 Level	3 Level	7.140.450.000	3 Level	7.153.000.000	3 Level	INSPEKTORAT

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang Tercapai	90 %	91 %	76.560.303.258	92 %	76.576.210.297	92 %	INSPEKTORAT
			Persentase Realisasi Anggaran	95 %	96 %	0	96 %	0	96 %	INSPEKTORAT
			Indeks Profesionalitas ASN	65,8 Nilai	66 Nilai	0	67 Nilai	0	67 Nilai	INSPEKTORAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						182.846.288.445		169.074.746.142		
1	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Kelembagaan yang Melaksanakan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	75 Jumlah	77 Jumlah	6.143.000.000	79 Jumlah	6.388.000.000	156 Jumlah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah Partai Politik yang Melakukan Kaderisasi	11 Partai Politik	11 Partai Politik	102.300.795.000	11 Partai Politik	102.495.795.000	22 Partai Politik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Kejadian Terkait Politik	14 Kejadian	13 Kejadian	0	11 Kejadian	0	11 Kejadian	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Persentase Peran serta Pemilih Pemula dalam Pengembangan Etika dan Budaya Politik	0,048 %	0,049 %	0	0,050 %	0	0,050 %	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Ormas	0 Persen	92 Persen	2.800.000.000	94 Persen	2.250.000.000	94 Persen	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Kejadian terkait Ekonomi, Sosial dan Budaya	90 Kejadian	88 Kejadian	2.200.000.000	86 Kejadian	2.310.000.000	86 Kejadian	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Laporan Pemantauan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas di Jawa Timur	4 Laporan	4 Laporan	48.100.000.000	4 Laporan	33.900.000.000	8 Laporan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial	3 laporan	3 laporan	0	3 laporan	0	6 laporan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang Tercapai	95 %	95 %	21.302.493.445	95 %	21.730.951.142	95 %	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Indeks Profesionalitas ASN	45,6 Indeks	50 Indeks	0	55 Indeks	0	55 Indeks	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET AWAL	2025		2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Realisasi Anggaran	95 %	95 %	0	95 %	0	95 %	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

RPD JAWA TIMUR

2025
2026

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Indikator kinerja daerah Provinsi Jawa Timur tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2025 dan 2026.

8.1. Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur 2025-2026

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah dalam pencapaian tujuan Pembangunan Daerah periode 2025-2026 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Jawa Timur sampai dengan tahun 2026. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil - hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia, sehingga dapat

menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Disamping hal itu, seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah Jawa Timur diupayakan mampu menjaga keselarasan, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Indikator Kinerja Utama dan target capaian sampai dengan tahun 2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel 8.1

Tabel 8. 1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal 2023	TARGET		Kondisi Akhir 2026
			2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1,1	Pertumbuhan Ekonomi	5,02 (TW3 c to c)	4,95 - 5,20	5,15 - 5,30	5,15 - 5,30
1,2	Persentase Penduduk Miskin	10,35 (Maret)	9,95 - 9,75	9,45 - 8,30	9,45 - 8,30
1,3	Indeks Gini	0,387 (Maret)	0,3870 - 0,3650	0,3760 - 0,3540	0,3760 - 0,3540
1,4	Indeks Pembangunan Gender	92,08 (Maret)	92,47-93,47	92,69-93,69	92,69-93,69
1,5	Indeks Pembangunan Manusia	73,38	75,7 - 75,79	76,25 - 76,34	76,25 - 76,34
1,6	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	4,88	4,43 - 3,93	4,41 - 3,91	4,41 - 3,91
1,7	Indeks Reformasi Birokrasi	80,11 (2022)	81.80-82.40	82,50-83,10	82,50-83,10
1,8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,59	69,59 - 69,96	69,61 - 69,96	69,61 - 69,96
1,9	Indeks Risiko Bencana	101,65	100,65-99,65	99,65-98,65	99,65-98,65

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

8.2. Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026

Indikator Kinerja Daerah (IKD) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Aspek kesejahteraan Masyarakat;
2. Aspek pelayanan umum; dan
3. Aspek daya saing daerah.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial.

Aspek Pelayanan Umum

merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial.

Aspek Daya Saing Daerah

merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Daerah secara rinci disajikan pada Tabel
Provinsi Jawa Timur tersebut 8.2

Tabel 8. 2 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	TARGET		Kondisi Akhir 2026
		2023	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1,1	Pertumbuhan Ekonomi	5,02 (TW3 c to c)	4,95 - 5,20	5,15 - 5,30	5,15 - 5,30
1,2	Persentase Penduduk Miskin	10,35 (Maret)	9,95 - 9,75	9,45 - 8,30	9,45 - 8,30
1,3	Indeks Gini	0,387 (Maret)	0,3870 - 0,3650	0,3760 - 0,3540	0,3760 - 0,3540
1,4	Indeks Pembangunan Gender	92,08 (Maret)	92,47-93,47	92,69-93,69	92,69-93,69
1,5	Indeks Pembangunan Manusia	73,38	75,7 - 75,79	76,25 - 76,34	76,25 - 76,34
1,6	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	4,88	4,43 - 3,93	4,41 - 3,91	4,41 - 3,91
1,7	Indeks Reformasi Birokrasi	80,11 (2022)	81.80-82.40	82,50-83,10	82,50-83,10
1,8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,59	69,59 - 69,96	69,61 - 69,96	69,61 - 69,96
1,9	Indeks Risiko Bencana	101,65	100,65-99,65	99,65-98,65	99,65-98,65
B. ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar				
1.1.	Pendidikan				
1.1.1	Indeks Pendidikan	0,642	0,68	0,69	0,69
1.2.	Kesehatan				
1.2.1	Indeks Kesehatan	0,844	0,851	0,854	0,854
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.3.1	Indeks Konektivitas	0,810 (2022)	0,769	0,770	0,770
1.3.2	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	68,90 (2022)	69,05	69,10	69,10
1.4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1.4.1	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	86,85**	90,16	90,17	90,17
1.5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
1.5.1	Persentase Kejadian Poleksosbud terhadap Tahun Sebelumnya	75,90 (2022)	90,5	91	91
1.5.2	Persentase penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	100,55	90	95	95
1.5.3	Indeks Kapasitas Daerah	0,63 (2022)	0,68 - 0,69	0,69 - 0,70	0,69 - 0,70
1.6.	Sosial				
1.6.1	Persentase PPKS yang Mandiri	1,30 (2022)	1,36	1,38	1,38
2	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar				
2,1	Ketenagakerjaan				
2.1.1	Tingkat Kesempatan Kerja		94.89 -96.47	94.92 - 96.49	94.92 - 96.49
2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	TARGET		Kondisi Akhir 2026
		2023	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
2.2.1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,440 (2022)	0,420	0,415	0,415
2.2.2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,1 (2022)	68,00	69,00	69,00
2.2.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 penduduk perempuan	4,67 (2022)	3,70	3,50	3,50
2,3	Pangan				
2.3.1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	79,85 (2022)	79,90	79,95	79,95
2,4	Pertanahan				
2.4.1	Persentase kasus sengketa yang termediasi.	100	80	80	80
2,4	Lingkungan Hidup				
2.4.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,86	56,13	56,13	56,13
2.4.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,73	84,08	84,14	84,14
2.4.3	Indeks Kualitas Lahan	49,70	47,78	47,78	47,78
2.4.4	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	77,99	82,46	82,46	82,46
2,5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
2.5.1	Persentase lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	100 (2022)	100	100	100
2,6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
2.6.1	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan	13,98 (Maret)	13,28-12,68	12,78-11,90	12,78-11,90
2.6.2	Persentase Desa Mandiri	36,25	41	45	45
2,7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2.7.1	Total Fertility Rate (TFR)	2,00 (2022)	1,98	1,99	1,99
2,8	Perhubungan				
2.8.1	Indeks Aksesibilitas	76,17 (2022)	76,89	77,29	77,29
2,9	Komunikasi dan Informatika				
2.9.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,30 (2022)	4,1	4,2	4,2
2,1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
2.10.1	Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur	7,19 (2022)	3,5	3,53	3,53
2,11	Penanaman Modal				
2.11.1	Nilai Realisasi Penanaman Modal	100,1 (s.d. TW III)	117	120	120
2,12	Kepemudaan dan Olahraga				
2.12.1	Indeks Pembangunan Pemuda	57,00	57,50	57,75	57,75
2,13	Statistik				
2.3.1	Indeks Pembangunan Statistik	2,21	3,00	3,15	3,15
2,14	Persandian				
2.14.1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	548	570	590	590
2,15	Kebudayaan				
2.15.1	Jumlah Warisan Budaya Yang Dilestarikan	20	26	31	31
2,16	Perpustakaan,				
2.16.1	Tingkat Kegemaran Membaca	69,78	71,75	72,00	72,00
2,17	Kearsipan				
2.17.1	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	91,44 (2022)	92,2	92,3	92,3
3	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan				
3,1	Pariwisata				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	TARGET		Kondisi Akhir 2026
		2023	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
3.1.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata	13,53 (2022)	6,6	6,6	6,6
3,2	Kelautan dan Perikanan				
3.2.1	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan	5,71 (2022)	1,5	1,5	1,5
3,3	Pertanian				
3.3.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan	-1,39 (2022)	0,25	0,25	0,25
3.3.2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Hortikultura	6,15 (2022)	1	1	1
3.3.3	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Perkebunan	-0,28	1	1,5	1,5
3.3.4	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Peternakan	1,79 (2022)	1,3	1,3	1,3
3,4	Kehutanan				
3.4.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,97 (2022)	1,9	1,9	1,9
3,5	Energi dan Sumber Daya Mineral				
3.5.2	Persentase Rasio Elektrifikasi	99,62 (s.d juni)	99,9	99,95	99,95
3.5.3	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	9,36 (2022)	12,15	12,70	12,70
3,6	Perdagangan				
3.6.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,15 (Tw 3 c toc)	5,03	6,04	6,04
3,7	Perindustrian				
3.7.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	3,96 (Tw 3 c toc)	4,96	5,97	5,97
4	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang Urusan				
4,1	Perencanaan Pembangunan				
4.1.1	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	99,35 (2022)	100	100	100
4,2	Keuangan				
4.2.1	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	66,63 (2022)	58,5	58,5	58,5
4.2.2	Opini BPK	WTP (2022)	WTP	WTP	WTP
4,3	Kepegawaian				
4.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	86,27 (2022)	88	89	89
4,4	Pendidikan dan Pelatihan				
4.4.1	Persentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi minimal 20 JP	27,56 (2022)	30	31	31
4,5	Penelitian dan Pengembangan				
4.5.1	Indeks Inovasi Daerah	71,38	73	74	74
4,6	Kesatuan Bangsa dan Politik				
4.6.1	Indeks Demokrasi Indonesia	81,31 (2022)	85,5	85,7	85,7
4,7	Penghubung				
4.7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penghubung	90,18 (2022)	80	80	80
4.7.2	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi	100 (2022)	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	TARGET		Kondisi Akhir 2026
		2023	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti				
4,8	Pengawasan				
4.8.1	Indeks Integritas Pemerintah Prov. Jatim	73,11 (2022)	75	75,5	75,5
4,9	Sekretariat Dewan				
4.9.1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83,91 (2022)	86	87	87
4,1	Kesekretariatan Daerah				
4.10.1	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Timur	83,83 (2022)	87,9	88,9	88,9
4.10.2	Persentase Rekomendasi Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama yang menjadi Kebijakan	90 (2022)	95,5	96	96
4.10.4	Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	87	87	87	87
4.10.5	Persentase Produk Hukum di Jawa Timur yang tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan	100	100	100	100
4.10.6	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian	88	90	91	91
4.10.7	Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan	100 (2022)	100	100	100
4.10.8	Indeks Tata Kelola Pengadaan	82,1 (2022)	70	72	72
4.10.9	Nilai IKM Pengguna Layanan di Lingkungan Sekretariat Daerah	85,08 (2022)	89,47	89,57	89,57
4.10.10	Nilai IKM Pengguna Layanan Keprotokolan dan Materi Komunikasi Pimpinan	86,76 (2022)	89,20	89,25	89,25

*) angka sementara

**) angka sangat sementara



BAB IX PENUTUP



RPD JAWA TIMUR

2025
2026



BAB IX PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program-program prioritas daerah dan kerangka pendanaan seluruh program dan daftar program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 disusun sebagai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan periode rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024.

Rencana Pembangunan Daerah menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2026 dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun.

9.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah di Jawa Timur, maka seiring dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 telah berakhir masa berlakunya, dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 merupakan dokumen transisi perencanaan Pembangunan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur sampai dengan terpilihnya

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilu Kepala Daerah Serentak secara Nasional pada tahun 2024.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur sampai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 ditetapkan.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, adalah sebagai berikut:

1. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Pejabat Gubernur dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang pemeritahan di bidang perencanaan;
2. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkewajiban program-program dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026;
3. Setiap Organisasi Perangkat Daerah, baik yang berbentuk Sekretariat Daerah, Badan, Dinas dan perangkat daerah lainnya berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
4. Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
5. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pememerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
6. Apabila dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka akan dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR**